PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Provinsi Sumatera Barat

AUDITED

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman



Festival Tabuik



Talao Pauh Waterfront

2025

1 Januari 2025 — 31 Desember 2025

KOTA PARIAMAN

MEI 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Pemerintah Kota Pariaman dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025. LKPD ini merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

LKPD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 terdiri dari komponen:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

LKPD ini disusun melalui konsolidasi laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan telah melalui proses reviu Inspektorat Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kami menyambut baik setiap masukan dan rekomendasi yang membangun demi perbaikan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.

Semoga LKPD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pariaman, 22 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025,

sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, kegiatan operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pariaman, 22 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		xi
DAFTAR LAMPIRAN		xii
LAPORAN KEUANGAN		
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3.	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II	**INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**	7
2.1.	Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas	7
2.2.	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional	7
BAB III	**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**	9
3.1.	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	9
3.2.	Kebijakan Keuangan	12
3.3.	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
BAB IV	**KEBIJAKAN AKUNTANSI**	27
4.1.	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan	27
4.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
BAB V	**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**	70
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	70
5.2	Laporan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)	113
5.3	Laporan Neraca	118
5.4	Laporan Operasional (LO)	170

		Halaman
5.5	Laporan Arus Kas	189
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	199
BAB VI	**PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA**	201
6.1	Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan	201
6.2	Komitmen dan Kontijensi	202
6.3	Pengungkapan Lainnya	205
6.4	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pariaman	206
6.5	Kepemimpinan Daerah	208
6.6	Pernyataan Tanggungjawab	209
BAB VII	**PENUTUP**	210

DAFTAR TABEL

		Halaman
3.1	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Pariaman Tahun 2019 – 2025 (%)	10
3.2	Pengangguran dan TPT Tahun 2025	11
3.3	Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio* Tahun 2025	11
3.4	Ringkasan APBD Pergeseran TA 2025	15
3.5	Ringkasan APBD Perubahan dan Pergeseran Perubahan TA 2025	16
3.6	Ringkasan Pos Pendapatan APBD Awal dan Perubahan Anggaran Tahun 2025	18
3.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Perangkat Daerah TA 2025	19
3.8	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan per TA 2025 dan 2024	22
3.9	Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi per TA 2025 dan 2024	24
3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per Perangkat Daerah TA 2025	25
5.1	Pajak Daerah	73
5.2	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	73
5.3	Retribusi Daerah	74
5.4	Kenaikan dan/atau Penurunan Realisasi Retribusi	75
5.5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	77
5.6	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah	77
5.7	Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025	79
5.8	Bagi Hasil Pajak	80
5.9	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	81
5.10	Dana Alokasi Khusus	82
5.11	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik	83
5.12	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	84
5.13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainya	85
5.14	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	86
5.15	Bantuan Keuangan	87
5.16	Belanja Daerah	88
5.17	Belanja Operasi	88
5.18	Belanja Pegawai	89
5.19	Belanja Pegawai per Perangkat Daerah	89
5.20	Belanja Barang dan Jasa	91
5.21	Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah	92
5.22	Belanja Hibah	93
5.23	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang	94

		Halaman
	Berbadan Hukum Tahun 2025	
5.24	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025	95
5.25	Belanja Modal Peralatan Mesin	97
5.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah	97
5.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99
5.28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah	99
5.29	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	100
5.30	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah	100
5.31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	101
5.32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah	101
5.33	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana	102
5.34	Belanja Tidak Terduga Tahun 2025	102
5.35	Belanja Transfer	104
5.36	Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Tahun 2025	106
5.37	Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025	108
5.38	Rincian SiLPA Tahun 2025	109
5.39	Rekapitulasi Sisa Dana Transfer Pemerintah Pusat s.d Tahun Anggaran 2025	109
5.40	Sisa DAU- Yang Ditentukan Penggunaannya sampai TA 2025	110
5.41	Sisa DAK – Fisik sampai TA 2025	111
5.42	Sisa DAK – Non Fisik sampai TA 2025	111
5.43	Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	113
5.44	Penghitungan Silpa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan LRA	114
5.45	Rekonsiliasi SILPA Tahun 2025 dengan Laporan Keuangan Terkait	115
5.46	Penghitungan SAL Akhir per 31 Desember 2025	116
5.47	Perbandingan dan Analisis Tren LPSAL Tahun 2025 dan 2024	117
5.48	Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman	118
5.49	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	120
5.50	Rincian Kas BLUD	120
5.51	Rincian Kas Dana BOS	121
5.52	Daftar Rincian Kas Dana BOK Puskesmas	122
5.53	Daftar Piutang Pajak	123
5.54	Daftar Rincian Piutang PBB P2	124
5.55	Daftar Piutang Retribusi Daerah	124
5.56	Daftar Pitang Lain-lain PAD Yang Sah	125

		Halaman
5.57	Bantuan Penguatan Modal Kepada Koperasi Kota Pariaman	126
5.58	Rincian Piutang Denda air Bersih	126
5.59	Rincian Piutang Jasa Air Bersih	127
5.60	Daftar Piutang Lainnya	128
5.61	Rincian Saldo Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund*	129
5.62	Daftar Penyisihan Piutang Pajak	130
5.63	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi	131
5.64	Daftar Penyisihan Piutang Lainnya	132
5.65	Daftar Persediaan	132
5.66	Sisa Logistik Bantuan Tanggap Darurat Bencana	133
5.67	Rincian Dana Bergulir bagi UMKM	134
5.68	Rincian Penyertaan Modal pada Bank Nagari	136
5.69	Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024 (Nilai Perolehan)	137
5.70	Rincian Saldo Aset Tetap Tanah	138
5.71	Data Aset Tetap Tanah yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak Dalam Penguasaan Pemerintahan Kota Pariaman	139
5.72	Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin	140
5.73	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	140
5.74	Data Mutasi (+) Hibah dari Pihak Ketiga	141
5.75	Data Mutasi (+) Reklasifikasi Salah Rekening	142
5.76	Data Mutasi (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	143
5.77	Data Mutasi (+) Antar Perangkat Daerah	144
5.78	Data Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi	145
5.79	Data Mutasi (-) Penghapusan	151
5.80	Data Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas dan Gedung Bangunan yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Pariaman	152
5.81	Rincian Saldo Aset Gedung dan Bangunan	153
5.82	Mutasi (+) Antar Perangkat Daerah	154
5.83	Mutasi (-) Penghapusan	155
5.84	Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	155
5.85	Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi JIJ	156
5.86	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya	156
5.87	Mutasi (+) Mutasi Antar Perangkat Daerah	157
5.88	Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi ATL	158

		Halaman
5.89	Mutasi (-) Salah Rekening	158
5.90	Mutasi (-) Penghapusan	159
5.91	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan	159
5.92	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan	160
5.93	Rincian Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	162
5.94	Daftar Aset Tidak Berwujud	162
5.95	Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	163
5.96	Rincian Saldo Aset Lain-Lain	163
5.97	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	164
5.98	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	166
5.99	Daftar Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek	166
5.100	Pendapatan Diterima Dimuka	167
5.101	Rincian Utang Belanja	167
5.102	Perubahan Ekuitas	168
5.103	Verifikasi Persamaan Akuntansi Neraca	169
5.104	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	170
5.105	Pendapatan Asli Daerah - LO	171
5.106	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	172
5.107	Selisih Pajak Daerah LO dengan Pajak Daerah LRA	173
5.108	Selisih Retribusi Daerah karena adanya Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka	173
5.109	Selisih LO-LRA Lain-Lain PAD Yang SAH	175
5.110	Pendapatan Transfer-LO	176
5.111	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Transfer	176
5.112	Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah	177
5.113	Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	177
5.114	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	178
5.115	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	178
5.116	Selisih Pendapatan Hibah	178
5.117	Beban Operasi	179
5.118	Beban Pegawai –LO	180
5.119	Pengujian LO-LRA Pegawai	180

		Halaman
5.120	Beban Persediaan –LO	181
5.121	Perbandingan LRA – LO Persediaan	181
5.122	Beban Jasa	182
5.123	Pengujian LO-LRA Beban Jasa	183
5.124	Beban Pemeliharaan	184
5.125	Pengujian LO-LRA Pemeliharaan	184
5.126	Beban Perjalanan Dinas	185
5.127	Pengujian LO-LRA Perjalanan Dinas	185
5.128	Beban Hibah	185
5.129	Beban Penyisihan Piutang	186
5.130	Beban Penyusutan dan Amortisasi	187
5.131	Beban Transfer-LO	187
5.132	Pengujian LO-LRA Beban Transfer	188
5.133	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	189
5.134	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	190
5.135	Rincian Arus Masuk Kas - Pendapatan Asli Daerah	190
5.136	Rincian Arus Masuk Kas - Transfer dari Pemerintah Pusat	191
5.137	Rincian Arus Masuk Kas - Transfer dari Pemerintah Provinsi	191
5.138	Rincian Arus Masuk Kas - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192
5.139	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	193
5.140	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	193
5.141	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	194
5.142	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	194
5.143	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	195
5.144	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	196
5.145	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	196
5.146	Penerimaan dan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK)	196
5.147	Rekapitulasi Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	197
5.148	Rincian Saldo Akhir Kas	198
5.149	Perbandingan Rincian Saldo Akhir Kas LAK dan Kas Pada Neraca	198
5.150	Ekuitas	199
5.151	Koreksi Ekuitas Lainnya	200
6.1	Pergantian Manajemen dan Pegawai	201
6.2	Rekapitulasi Status Perkara Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025	202

		Halaman
6.3	Kesimpulan Penilaian Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2025	204
6.4	Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	206
6.5	Daftar Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kota Pariaman	208
6.6	Susunan Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Pariaman	208

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
5.1	Grafik Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024 per Komponen Pendapatan	20
5.2	Diagram Pendapatan Transfer Tahun 2025	21
5.3	Grafik Porsi Belanja Tahun 2025 dan 2024	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Belanja Pegawai
1.a. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1.b. Daftar Belanja Tambahan Penghasilan ASN
1.c. Daftar Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
1.d. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
1.e. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
1.f. Daftar Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH , Belanja Pegawai BOS dan Belanja Pegawai BLUD
2. Daftar Belanja Barang dan Jasa
2.a. Daftar Belanja Persediaan
2.b. Daftar Belanja Barang dan Jasa
2.c. Daftar Belanja Pemeliharaan
2.d. Daftar Belanja Perjalanan Dinas
2.e. Daftar Belanja Hibah
3. Ikhtisar Dana Desa
4. Rekapitulasi Dana BLUD Tahun 2025
5. Rekapitulasi Dana BOS Tahun 2025
5.a. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT SMP Se Kota Pariaman
5.b. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Utara
5.c. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Tengah
5.d. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Selatan
5.e. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Timur
5.f. Rincian BOS Swasta
6. Rekapitulasi Dana BOK Puskesmas Tahun 2025
7. Daftar Piutang Kota Pariaman
7.a. Daftar Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer Kota Pariaman
7.b. Daftar Piutang Retribusi Kota Pariaman
7.c. Daftar Piutang Lain-Lain Kota Pariaman
8. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Kota Pariaman
8.a. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer Kota Pariaman
8.b. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Kota Pariaman
8.c. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain Kota Pariaman
9. Daftar Persediaan
10.a Rekapitulasi perkembangan bantuan dana bergulir ukm dan *Revolving Fund*
10.a Rekapitulasi Perkembangan Bantuan Dana Bergulir KSP/USP

10.b Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
11. Penyertaan Modal
12. Daftar Aset Tetap Tanah
13. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
14. Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
15. Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
16. Daftar Aset Tetap Lainnya
17. Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
18. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan
18.a. Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Mesin
18.b. Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Bangunan
18.c. Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jaringan
18.d. Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
19.a. Properti Investasi
19.b. Data Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
20.a. Aset Lain- Lain TGR
20.b. Rincian Aset Lain-Lain (TGR)
21. Aset Lain- Lain (Aset Tak Berwujud)
22. Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud
23. Aset Lain- Lain
24. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
25. Daftar Pendapatan diterima dimuka
26. Rekap Data Sisa Kewajiban Pemko Pariaman (Utang Belanja)
26.a. Rincian Sisa Kewajiban Pemko Pariaman (Utang Belanja)
27. Daftar Beban Pegawai
27.a. Daftar Beban Gaji dan Tunjangan ASN
27.b. Daftar Beban Tambahan Penghasilan ASN
27.c. Daftar Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
27.d. Daftar Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
27.e. Daftar Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
27.f. Daftar Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KWDH dan Beban Pegawai BOS
28. Daftar Beban Barang dan jasa
28.a. Daftar Beban Persediaan
28.b. Daftar Beban Jasa
28.c. Daftar Beban Pemeliharaan
28.d. Daftar Beban Perjalanan Dinas-LO
28.e. Daftar Beban Hibah-LO

28.f Daftar Beban Lain-lain
29.a Daftar Selisih Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA
29.b Daftar Selisih Beban Barang-LO dan Beban Barang-LRA
29.c Daftar Selisih Beban Barang dan Jasa -LO dan Belanja Barang dan Jasa -LRA
29.d Daftar Selisih Beban Pemeliharaan -LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA
29.e Daftar Selisih Beban Perjalanan Dinas -LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
29.f Daftar Selisih Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan-LO
30. Koreksi Ekuitas Lain-Lain

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**PENDAPATAN**					
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	24.153.192.141,00	22.296.272.876,00	92,31	14.396.111.950,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	12.987.038.800,00	12.111.002.347,00	93,25	9.375.406.310,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	11.365.010.955,00	11.365.010.955,00	100,00	11.331.512.753,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.a.4)	18.208.414.779,00	11.687.692.049,89	64,19	10.808.347.629,36
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		**66.713.656.675,00**	**57.459.978.227,89**	**86,13**	**45.911.378.642,36**
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**					
1.2.1.	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1).a	8.463.920.358,00	6.892.265.406,00	81,43	6.320.110.669,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1).b	3.256.212.000,00	3.267.262.000,00	100,34	5.977.692.000,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1).c	412.300.209.000,00	407.108.094.546,00	98,74	417.506.738.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1).d	69.617.888.000,00	64.768.194.706,00	93,03	93.837.724.329,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		**493.638.229.358,00**	**482.035.816.658,00**	**97,65**	**523.642.264.998,00**
1.2.2.	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
1.2.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.b.2)	6.963.163.000,00	6.963.163.000,00	100,00	0,00
1.2.2.2.	Dana Desa	5.1.1.b.3)	41.027.669.000,00	40.945.791.400,00	99,80	41.844.428.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA		**47.990.832.000,00**	**47.908.954.400,00**	**99,83**	**41.844.428.000,00**
1.2.3.	**TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.b.4)	43.165.753.064,00	28.391.165.663,00	65,77	32.963.958.033,00
1.2.3.3.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINYA		**43.165.753.064,00**	**28.391.165.663,00**	**65,77**	**32.963.958.033,00**
1.2.4.	**BANTUAN KEUANGAN**					
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.b.5)	230.000.000,00	645.000.000,00	280,43	0,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		**230.000.000,00**	**645.000.000,00**	280,43	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**585.024.814.422,00**	**558.980.936.721,00**	**95,55**	**598.450.651.031,00**
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**					
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.1.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.c	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		**4.000.000.000,00**	4.000.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN		**655.738.471.097,00**	**620.440.914.948,89**	**94,62**	**644.362.029.673,36**
2	**BELANJA**					
2.1.	**BELANJA OPERASI**					
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.2.2.a.1)	338.992.439.397,14	317.424.790.284,00	93,64	314.988.384.111,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.a.2)	179.810.154.298,75	160.910.917.798,10	89,49	164.059.422.975,00
2.1.3.	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Belanja Hibah	5.2.2.a.3)	7.567.876.000,00	7.556.116.110,00	99,84	21.650.244.697,33
2.1.6.	Bantuan Sosial	5.2.2.a.4)	0,00	0,00	0,00	610.542.000,00
2.1.7.	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		**526.370.469.695,89**	**485.891.824.192,10**	**92,31**	**501.308.593.783,33**
2.2.	**BELANJA MODAL**					
2.2.1.	Belanja Tanah	5.2.2.b.1)	8.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.b.2)	12.284.428.388,00	10.884.258.129,00	88,60	10.229.912.049,00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.b.3)	5.477.909.000,00	4.710.081.248,06	85,98	27.172.296.811,00

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
2.2.4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.2.2.b.4)	7.648.905.865,00	7.140.315.441,28	93,35	19.973.012.799,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.b.5)	1.304.460.950,00	1.716.537.750,00	131,59	1.305.248.900,00
2.2.5.	Belanja Aset Lainnya	5.2.2.b.6)	99.000.000,00	89.095.815,00	90,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		**34.614.704.203,00**	**24.540.291.363,34**	**70,49**	**58.680.468.559,00**
2.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**					
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.2.2.c	5.230.000.000,00	561.152.287,00	10,73	120.495.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		**5.230.000.000,00**	**561.152.287,00**	**10,73**	**120.495.000,00**
2.4.	**BELANJA TRANSFER**					
2.4.1.	**BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**					
2.4.1.1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	5.2.2.d.1)	2.415.319.214,12	1.011.376.155,00	41,87	546.550.321,00
2.4.1.3.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.2.2.d.2)	468.703.399,99	385.360.106,00	82,22	424.969.883,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		**2.884.022.614,11**	**1.396.736.261,00**	**48,43**	**971.520.204,00**
2.4.2.	**BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
2.4.2.1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.2.2.d.3)	3.065.760.000,00	3.065.760.000,00	100,00	3.235.680.000,00
2.4.2.2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.2.2.d.4)	83.082.047.296,00	83.000.169.695,00	99,90	83.784.226.995,00
	JUMLAH BELANJATRANSFER BANTUAN KEUANGAN		**86.147.807.296,00**	**86.065.929.695,00**	**99,90**	**87.019.906.995,00**
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		**89.031.829.908,11**	**87.462.665.956,00**	**98,24**	**87.991.427.199,00**
	TOTAL BELANJA		**655.447.033.808,00**	**598.455.933.618,44**	**91,31**	**848.160.984.541,33**
	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)		**291.467.289,00**	**21.984.981.130,45**	**7.542,86**	**(3.738.984.867,97)**
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
3.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	5.2.3.a	2.644.532.711,00	2.644.532.711,54	100,00	7.383.487.579,51
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	5.2.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**2.644.532.711,00**	**2.644.532.711,54**	**100,00**	**7.383.487.579,51**
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.3.c	2.936.000.000,00	2.936.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEGELUARAN PEMBIAYAAN		**2.936.000.000,00**	**2.936.000.000,00**	**100,00**	1.000.000.000,00
3.3.	**PEMBIAYAAN BERSIH**		**(291.467.289,00)**	**(291.467.288,46)**	**100,00**	**6.383.487.579,51**
4	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**5.2.4**	**0,00**	**21.693.513.841,99**	**0,00**	**2.644.532.711,54**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOSI BALAO

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	2.644.532.711,54	7.383.487.679,51
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		2.644.532.711,54	7.383.487.679,51
3	**Subtotal (1 - 2)**		**(0,00)**	**(0,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		21.693.513.841,99	2.644.532.711,54
5	**Subtotal (3 + 4)**		**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**		**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	2.644.532.711,54	7.383.487.579,51
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		2.644.532.711,54	7.383.487.579,51
3	**Subtotal (1 - 2)**		**(0,00)**	**(0,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		21.893.513.841,99	2.644.532.711,54
5	**Subtotal (3 + 4)**		**21.893.513.841,99**	**2.644.532.711,54**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**		**21.893.513.841,99**	**2.644.532.711,54**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

C. NERACA

Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**ASET**			
1.1	**ASET LANCAR**			
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	5.3.1.a	20.247.256.238,61	1.571.594.340,16
1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.b	0,00	86.760.250,00
1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.c	10.000.000,00	0,00
1.1.1.4	Kas di BLUD	5.3.1.d	1.107.484.409,38	507.674.452,38
1.1.1.5	Kas Dana BOS	5.3.1.e	6.086.000,00	10.126.000,00
1.1.1.6	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.f	322.687.194,00	468.377.669,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
1.1.3	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.g	5.281.097.734,00	4.855.374.375,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.h	3.619.235.549,00	2.411.280.523,00
1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
1.1.6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.i	1.261.022.982,00	243.823.161,85
1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.j	0,00	1.758.923.689,00
1.1.8	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.k	9.308.227.954,00	11.888.547.076,00
1.1.9	Piutang Lainnya	5.3.1.l	615.550.430,66	608.409.748,66
1.1.10	Penyisihan Piutang			
1.1.10.1	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.m.a	(3.361.227.926,45)	(2.703.917.540,75)
1.1.10.2	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.m.b	(601.864.086,66)	(601.864.086,66)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka		-	0,00
1.1.12	Persediaan	5.3.1.n	5.559.118.126,83	5.022.938.757,10
	JUMLAH ASET LANCAR		**43.374.674.605,37**	**26.128.048.414,74**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
1.2.1	Investasi Non Permanen			
1.2.1.1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
1.2.1.2	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
1.2.1.3	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
1.2.1.4	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
1.2.1.5	Dana Bergulir	5.3.2.a	775.474.500,00	775.474.500,00
1.2.1.6	Penyisihan Dana Bergulir		0,00	0,00
1.2.1.7	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
1.2.1.8	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
1.2.1.9	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen			
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.b	63.108.899.000,00	60.172.899.000,00
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**63.884.373.500,00**	**60.948.373.500,00**
1.3	**ASET TETAP**			
1.3.1	Tanah	5.3.3.a	103.328.821.439,25	103.598.821.439,25
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.3.3.b	263.246.447.906,93	256.586.551.868,93
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.3.3.c	557.468.992.767,90	553.208.953.941,84
1.3.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.3.3.d	967.112.492.364,32	926.566.640.376,04
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.e	83.159.604.828,56	81.522.445.476,56
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.3.f	46.359.805.963,00	46.359.805.963,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.g	(1.434.069.044.682,74)	(1.369.522.652.054,92)
	JUMLAH ASET TETAP		**586.607.120.587,22**	**598.320.567.010,70**
1.4	**DANA CADANGAN**			
1.4.1	Dana Cadangan		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**			
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
1.5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.4.a	5.895.584.559,08	4.640.412.060,96
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00

No.	Uraian	Catatan	2025	2024
1	2	3	4	5
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.b	821.257.815,00	687.182.000,00
1.5.5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
1.5.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.4.c	(689.955.662,81)	(687.182.000,00)
1.5.7	Aset Lain-lain	5.3.4.d	28.610.407.069,33	32.260.937.983,10
1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.4.e	(23.736.959.134,20)	(27.155.293.594,97)
	JUMLAH ASET LAINNYA		**10.991.334.646,40**	**9.746.056.449,09**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**			
1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.5.a	137.605.343.956,88	137.605.343.956,88
1.6.4	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.5.b	(38.593.073.431,00)	(32.340.945.875,00)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**99.012.270.527,88**	**105.264.398.083,88**
	JUMLAH ASET		**803.779.773.865,87**	**800.407.443.458,41**
2	**KEWAJIBAN**			
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2.1.2	Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya		0,00	0,00
2.1.3	Utang Bunga		0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.6.a	185.709.467,28	82.225.825,28
2.1.6	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.6.b	3.501.768.382,11	5.192.971.396,01
2.1.7	Utang Transfer Out		0,00	0,00
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**3.687.472.849,39**	**5.275.197.221,29**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
2.2.1	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		**3.687.472.849,39**	**5.275.197.221,29**
3	**EKUITAS**			
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**			
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		0,00	0,00
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan		0,00	0,00
3.1.3	Cadangan Piutang		0,00	0,00
3.1.4	Cadangan Persediaan		0,00	0,00
3.1.5	Cadangan Belanja yang Ditangguhkan		0,00	0,00
3.1.6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		0,00	0,00
3.1.7	Utang Jangka Pendek		0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		**0,00**	**0,00**
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**			
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		0,00	0,00
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		0,00	0,00
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		**0,00**	**0,00**
3.3	**EKUITAS DANA CADANGAN**		0,00	0,00
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		**0,00**	**0,00**
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN			
			800.092.301.017,48	795.132.246.237,12
3.4	**EKUITAS**		**800.092.301.017,48**	**795.132.246.237,12**
	JUMLAH EKUITAS	5.3.7	**803.779.773.866,87**	**800.407.443.458,41**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALIKOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=4-5/5*100*
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN**					
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.4.1.a.**				
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah		22.721.996.235,00	15.099.752.181,17	7.622.244.053,83	50,48
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah		14.082.745.204,00	9.799.612.224,33	4.283.132.979,67	43,71
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.365.010.955,00	11.331.512.753,00	33.498.202,00	0,30
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		11.837.623.397,04	10.961.152.554,21	876.470.842,83	8,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		**60.007.375.791,04**	**47.192.029.712,71**	**12.815.346.078,33**	**27,16**
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.4.1.b.**				
1.2.1.	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak		6.892.265.406,00	8.079.034.358,00	(1.186.768.952,00)	(14,69)
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.267.262.000,00	5.977.692.000,00	(2.710.430.000,00)	(45,34)
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum		407.108.094.546,00	417.506.738.000,00	(10.398.643.454,00)	(2,49)
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus		64.768.194.706,00	93.837.724.329,00	(29.069.529.623,00)	(30,98)
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		**482.035.816.658,00**	**525.401.188.687,00**	**(43.365.372.029,00)**	**(8,25)**
1.2.2.	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
1.2.2.1.	Dana Desa		-	41.844.428.000,00	(41.844.428.000,00)	(100,00)
1.2.2.2.	Insentif Fiskal		6.963.163.000,00	0,00	6.963.163.000,00	100,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		**6.963.163.000,00**	**41.844.428.000,00**	**(34.881.265.000,00)**	**(83,36)**
1.2.3.	**TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		25.810.846.541,00	36.148.320.317,00	-10.337.473.776,00	(28,60)
1.2.3.3.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH		**25.810.846.541,00**	**36.148.320.317,00**	**(10.337.473.776,00)**	**(28,60)**
1.2.4.	**BANTUAN KEUANGAN**					
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		445.000.000,00	0,00	445.000.000,00	100,00
1.2.4.2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN		**645.000.000,00**	**0,00**	**645.000.000,00**	**100,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**515.454.826.199,00**	**603.393.937.004,00**	**(87.939.110.805,00)**	**(14,57)**
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.4.1.c.**				
1.3.1.	Pendapatan Hibah		11.344.155.928,00	174.500.000,00	11.169.655.928,00	6.400,95
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat		4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	100,00
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**15.344.155.928,00**	**174.500.000,00**	**15.169.655.928,00**	**8.693,21**
	JUMLAH PENDAPATAN		**590.806.357.918,04**	**650.760.466.716,71**	**(59.954.108.798,67)**	**(9,21)**
2	**BEBAN**					
2.1	**BEBAN OPERASI**					
2.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.a.1)	317.578.889.408,00	312.696.234.820,00	4.882.654.588,00	1,56
2.1.2	Beban Persediaan	5.4.2.a.2)	29.983.764.294,27	37.356.733.894,13	-7.372.969.599,86	(19,74)
2.1.3	Beban Jasa	5.4.2.a.3)	99.292.650.709,16	102.440.686.282,00	-3.148.035.572,84	(3,07)
2.1.4	Beban Pemeliharaan	5.4.2.a.4)	13.468.156.709,54	8.291.680.563,00	5.176.476.146,54	62,43
2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.a.5)	16.393.034.640,00	18.634.452.689,00	-2.241.418.049,00	(12,03)
2.1.6	Beban Barang BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Beban Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	Beban Hibah	5.4.2.a.6)	7.556.116.110,00	21.650.244.697,33	-14.094.128.587,33	(65,10)
2.1.11	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.a.7)	0,00	545.742.000,00	-545.742.000,00	(100,00)
2.1.12	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.a.8)	657.310.385,70	410.698.456,98	246.611.928,72	60,05
2.1.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.a.9)	74.201.823.882,63	88.821.620.731,02	-14.619.796.848,39	(16,46)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4-5/5*100
2.1.14	Beban Lain-lain	5.4.2.a.10)	1.947.677.662,00	633.667.617,00	1.313.990.045,00	207,29
	JUMLAH BEBAN OPERASI		**661.079.923.801,30**	**691.481.981.750,46**	**(30.402.057.949,16)**	**(5,14)**
2.2	**BEBAN BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN**	5.4.2.b.				
2.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		915.865.952,00	1.600.016.144,21	(684.150.592,21)	(42,76)
2.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		3.065.760.000,00	3.235.680.000,00	(169.920.000,00)	(5,25)
2.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		42.054.376.295,00	83.784.226.995,00	(41.729.849.700,00)	(49,81)
2.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		-	988.696.139,10	(988.696.139,10)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER		**46.036.003.847,00**	**89.608.619.278,31**	**(43.572.615.431,31)**	**(48,63)**
5	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	5.4.2.c.				
5.2.1	Beban Tidak Terduga		481.652.287,00	120.495.000,00	361.157.287,00	299,73
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		**481.652.287,00**	**120.495.000,00**	**361.157.287,00**	**299,73**
	JUMLAH BEBAN		**707.597.279.935,30**	**681.211.096.028,77**	**(73.613.816.093,47)**	**(10,81)**
3	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**		**(16.790.922.017,28)**	**(30.450.629.312,06)**	**13.659.707.294,80**	**(44,86)**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
4	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
4.1.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	186.678.517,00	(186.678.517,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	**(186.678.517,00)**	**186.678.517,00**	**(100,00)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(16.790.922.017,28)**	**(30.637.307.829,06)**	**13.846.385.811,80**	**(45,19)**
5	**POS LUAR BIASA**	5.4.2.d.				
5.1.1	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.4.3.	**(16.790.922.017,28)**	**(30.637.307.829,06)**	**13.846.385.811,80**	**(45,19)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
1	*2*	*3*	*4*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah		22.296.272.876,00	14.396.111.950,00
Penerimaan Retribusi Daerah		11.739.158.547,00	9.375.406.310,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.365.010.955,00	11.331.512.753,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		12.018.454.049,89	10.652.465.229,36
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		6.892.265.406,00	6.320.110.669,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.267.262.000,00	5.977.692.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		407.108.094.546,00	417.506.738.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		64.768.194.706,00	93.837.724.329,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		6.963.163.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		28.391.165.663,00	32.963.958.033,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		645.000.000,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa		40.945.791.400,00	41.844.428.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		4.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**620.399.833.148,89**	**644.206.147.273,36**
Arus Keluar Kas	5.5.1.b.		
Pembayaran Belanja Pegawai		317.424.790.284,00	314.988.384.111,00
Pembayaran Belanja Barang & Jasa		160.910.917.798,10	164.059.422.975,00
Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		7.556.116.110,00	21.650.244.697,33
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	610.542.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		561.152.287,00	120.495.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.011.376.155,00	546.550.321,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		385.360.106,00	424.969.883,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		3.065.760.000,00	3.235.680.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		83.000.169.695,00	83.784.226.995,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**573.915.642.435,10**	**589.420.515.982,33**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		**46.484.190.713,79**	**54.785.631.291,03**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	**5.5.2.a**		
Pencarian Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor		0,00	0,00
Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	0,00
Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		41.081.800,00	155.882.400,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**41.081.800,00**	**155.882.400,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.2.b.**		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		0,00	0,00

Uraian	Catatan	2025	2024
1	2	3	4
Perolehan Peralatan dan Mesin		10.884.258.129,00	10.229.912.049,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		4.710.051.248,06	27.172.296.811,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		7.140.318.441,28	18.973.012.799,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.716.537.750,00	1.305.246.900,00
Perolehan Aset Lainnya		69.095.815,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.936.000.000,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**27.476.291.383,34**	**59.680.468.559,00**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi		**(27.435.209.883,34)**	**(59.524.586.159,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
Arus Masuk Kas	5.5.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		39.274.854.573,98	42.932.044.859,68
Dana BOS/FKTP/BLUD Tahun 2025		986.178.121,38	2.199.064.454,38
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**40.261.032.695,36**	**45.131.109.314,06**
Arus Keluar Kas	5.5.4.b.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		39.274.854.573,98	42.932.044.859,68
Saldo Akhir Dana BOS Tahun 2025		6.086.000,00	10.126.000,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP/BLUD/Kas Lainnya		1.430.171.603,38	976.052.121,38
Koreksi SILPA Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**40.711.112.177,36**	**43.918.222.981,06**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		**(450.079.482,00)**	**1.212.886.333,00**
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5.	**18.598.901.648,45**	**(3.526.068.534,97)**
Saldo Awal Kas di BUD		**1.658.354.590,16**	**5.184.423.125,13**
Saldo Akhir Kas di BUD		**20.257.256.238,61**	**1.658.354.590,16**
- Saldo Akhir Kas di Kasda		20.247.256.238,61	1.571.594.340,16
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	86.760.250,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		10.000.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas BLUD		**1.107.484.409,38**	**507.674.492,38**
Saldo Akhir Kas Dana BOS		**6.086.000,00**	**10.126.000,00**
Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas		**322.687.194,00**	**468.377.669,00**
Saldo Akhir Kas	5.5.6.	**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOSA SALADI

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2025 dan Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2025	2024
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.6	795.132.246.237,12	822.917.825.354,19
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		(16.790.922.017,26)	(30.637.307.829,06)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
3.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
3.2	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
3.3	LAIN-LAIN		21.750.976.797,62	0,00
3.3.1	Koreksi Nilai Piutang		(1.756.923.689,00)	0,00
3.3.2	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir		7.140.682,00	0,00
3.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap		22.501.176.056,00	0,00
3.3.4	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		(373.617.362,00)	0,00
3.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya		9.598.843,00	0,00
3.3.6	Koreksi Nilai Aset Lainnya		1.013.791.804,12	0,00
3.3.7	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya		9.000.000,00	0,00
3.3.8	Koreksi Nilai Utang Belanja		342.810.660,50	0,00
	KOREKSI EKUITAS LAINNYA		0,00	2.851.728.711,99
4	EKUITAS AKHIR		800.092.301.017,48	795.132.246.237,12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN,

YOSA BALAD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun manfaat pelaporan keuangan tersebut antara lain:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan dan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah selama satu periode pelaporan;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran dan kewajiban pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan dan operasional, yaitu jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil (output dan outcome) yang dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas, termasuk likuiditas dan arus kas;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah, yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pajak, transfer, dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari aktivitas selama periode pelaporan;

g. Menyediakan informasi mengenai kepatuhan terhadap anggaran dan peraturan perundang-undangan, melalui penyajian realisasi anggaran dan sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran;

h. Mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);

i. Menjadi dasar perencanaan, penganggaran, dan pengambilan kebijakan fiskal di masa mendatang, serta menilai keberlanjutan fiskal jangka panjang;

j. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasinya, surplus/defisit operasional, arus kas, aset, kewajiban, ekuitas, serta perubahan saldo anggaran lebih.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1752);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

y. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 73);

aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);

bb. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 264);

cc. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 268);

dd. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);

ee. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 30);

ff. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);

gg. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 18);

hh. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 13);

ii. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 21);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

2.2 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

3.2. Kebijakan Keuangan

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3. Pembiayaan
5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
5.2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3. Neraca
5.3.1. Aset Lancar
5.3.2. Investasi jangka Panjang
5.3.3. Aset Tetap
5.3.4. Aset Lainnya
5.3.5. Properti Investasi
5.3.6. Kewajiban Jangka Pendek
5.3.7. Ekuitas
5.4. Laporan Operasional (LO)
5.4.1. Pendapatan – LO
5.4.2. Beban – LO
5.4.3. Surplus/Defisit – LO
5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.6.1. Ekuitas Awal
5.6.2. Surplus/Defisit – LO
5.6.3. Koreksi Ekuitas Lainnya
5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

6.2. Komitmen dan Kontijensi

6.2.1. Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2024/PN.Pmn

6.2.2. Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Pmn

6.2.3. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2025/PTUN.Pdg

6.2.4. Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2025/PN.Pmn

6.3. Pengungkapan Lainnya

6.3.1. Perubahan Penerapan Basis Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi

6.3.2. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Subsequent Events)

6.3.3. Informasi Segmen dan Entitas Akuntansi

6.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pariaman

6.5. Kepemimpinan Daerah

6.5.1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

6.5.2. Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Pariaman

6.6 Pernyataan Tanggungjawab

BAB VII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

Kota Pariaman terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Pada waktu itu Kota Otonom Pariaman terdiri dari tiga kecamatan, 55 desa, dan 16 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, Kota Pariaman terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Timur. Namun demikian, jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 6 desa dan 16 kelurahan, Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 desa, dan Pariaman Timur terdiri dari 16 desa.

Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.373 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman jika dirinci menurut jenis pendidikan yang ditamatkan, yaitu sebanyak 229 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 1.571 orang berpendidikan Sarjana (S1), 441 orang pegawai dengan tingkat Pendidikan Sarjana Muda / Diploma, 125 orang dengan pendidikan SMU, 3 orang berpendidikan SMP, 2 orang berpendidikan Sekolah Dasar (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal yang bekerja di Kota Pariaman terdapat sebanyak 568 orang dengan rincian 277 orang pada Kementerian Agama, 22 orang pegawai Badan Pusat Statistik, 19 orang pada Badan Pertanahan Nasional, 32 orang pada Pengadilan Negeri, 84 orang pada Lembaga Pemasyarakatan, 71 orang pada Kejaksaan Negeri, dan 28 orang pada Pengadilan Agama, 7 orang pada Samsat, 4 orang pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, 18 orang pada KPU Pariaman dan 8 orang pada Bawaslu. Juga terdapat 286 orang personel Kepolisian Resor (Polres) Kota Pariaman dan 362 orang Personel Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Pariaman (Badan Pusat Statistik, 2025).

2.2 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);

d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 264);

e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 268);

f. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1);

g. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 30);

h. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);

i. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 18);

j. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 21);

k. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1);

l. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Desa (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 3);

m. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 7);

n. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 21);

o. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 22);

p. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 24);

q. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 31);

r. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 99 /600/2025 Tentang Standar Harga Satuan Tertingi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Dan Pagar Tahun 2025

s. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 102/900/2025 Tentang Standar Harga Satuan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;

t. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 165/900/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 102/900/2025 Tentang Standar Harga Satuan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Analisis kondisi ekonomi makro dan ekonomi regional dalam LKPD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menjelaskan faktor eksternal yang memengaruhi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kinerja ekonomi tahun sebelumnya, dinamika perekonomian nasional dan regional, serta dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah.

Pada tingkat nasional, perkembangan ekonomi tahun 2025 dipengaruhi oleh stabilitas pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, serta dinamika inflasi. Kondisi tersebut berdampak pada besaran dan ketepatan penyaluran dana transfer ke daerah, yang merupakan komponen dominan dalam struktur pendapatan Kota Pariaman. Ketergantungan terhadap dana transfer mengindikasikan keterbatasan kemandirian fiskal daerah dan memengaruhi fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Secara regional, struktur ekonomi Kota Pariaman didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, pariwisata, perikanan, dan UMKM. Kinerja sektor-sektor tersebut berpengaruh langsung terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Fluktuasi aktivitas ekonomi masyarakat, daya beli, dan tingkat kunjungan wisata berdampak pada volatilitas penerimaan PAD selama Tahun Anggaran 2025.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif moderat belum diikuti oleh ekspansi basis pajak yang signifikan, sehingga ruang fiskal daerah tetap terbatas. Kondisi ini berdampak pada kebijakan belanja daerah, yang menuntut pengendalian belanja operasional, peningkatan efisiensi, serta prioritisasi belanja wajib dan pelayanan dasar. Tekanan inflasi turut memengaruhi peningkatan belanja barang dan jasa, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan anggaran.

Selain itu, risiko ekonomi regional berupa keterbatasan investasi, ketergantungan terhadap dana transfer, serta potensi risiko bencana di wilayah pesisir menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas fiskal daerah. Oleh karena itu, pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan fiskal, dan optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro dan regional tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 mencerminkan upaya menjaga kesinambungan fiskal, efektivitas belanja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Kondisi makro ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi daerah karena mampu menggambarkan kapasitas produksi serta dinamika pertumbuhan ekonomi secara agregat. Dalam konteks LKPD, PDRB tidak hanya diposisikan sebagai data statistik, tetapi sebagai alat evaluasi atas efektivitas kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2025 tercatat sebesar 3,46 persen. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari 4.200,08 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 4.345,40 miliar rupiah pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil, terlepas dari pengaruh inflasi, serta mencerminkan mulai pulih dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi utama di Kota Pariaman

Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat 7.279,06 miliar rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2024 yaitu sebesar 6.801,89 miliar rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya nilai nominal output ekonomi, yang dipengaruhi oleh kombinasi antara pertumbuhan volume produksi dan perubahan harga. Secara umum, kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya daya ungkit ekonomi daerah serta potensi peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari perspektif kinerja pembangunan, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 memberikan sinyal positif bahwa kebijakan dan program di bidang ekonomi mulai memberikan hasil. Namun demikian, angka pertumbuhan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut secara sektoral untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Badan Pusat Statistik, 2026).

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2025 menunjukkan 3 (tiga) kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10% dalam pembentukan nilai tambah bruto, yaitu :

a. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,38%;
b. Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,10%; dan
c. Kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 14,52%;

Terkait dengan perkembangan harga bahwa perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan, dan rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah. Melihat kondisi perekonomian lima tahun terakhir, diperkirakan laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Pariaman menurut lapangan usaha sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Pariaman Tahun 2021 – 2025 (%)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian	1,55	5,93	4,57	1,77	4,44
2	Pertambangan dan Penggalian	1,27	4,07	6,28	-0,86	1,40
3	Industri Pengolahan	5,29	7,63	4,72	3,05	3,67
4	Pengadaan Listrik. & Gas	0,82	1,47	2,26	0,25	-1,64
5	Pengadaan Air	0,56	4,95	4,00	3,15	3,20
6	Konstruksi	2,26	7,46	4,25	1,34	2,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-0,75	10,57	4,97	2,16	5,60

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
8	Transportasi dan Pergudangan	1,71	8,22	6,48	-1,37	2,41
9	Akomodasi dan Makan Minum	1,96	3,35	3,14	1,48	2,86
10	Informasi dan Komunikasi	1,41	5,82	2,33	0,14	2,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	6,32	1,91	0,68	-1,52
12	*Real Estate*	0,91	5,03	5,33	1,04	2,38
13	Jasa Perusahaan	0,28	3,12	5,87	0,05	0,63
14	Adm Pemerintah	5,37	5,71	4,22	0,11	1,46
15	Jasa Pendidikan	1,21	5,41	4,28	1,13	2,90
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	1,91	4,50	4,90	2,20	2,24
17	Jasa Lain-lain	1,44	6,41	4,77	1,45	3,61
PDRB/GDRP		**1,73**	**7,00**	**4,41**	**1,14**	**3,23**

3.1.3. Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengangguran dan TPT Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT
Sekolah Dasar	NA	NA	NA	NA	313	NA
SMP/Tsanawiyah	298	6,17	NA	NA	406	5,59
SMA/Aliyah	833	5,82	479	5,77	1.312	5,8
Universitas/ D.IV/S1/S2/S3	NA	NA	552	5,61	785	4,77
Jumlah	**1.622**	**5,23**	**1.194**	**5,07**	**2.816**	**5,16**

(sumber : https://pariamankota.bps.go.id/publication/2026)

3.1.4. Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio*

Data indikator kemiskinan dan gini *ratio* Kota Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio* Tahun 2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Gini *Ratio*
2019	4.200	5,03	0,49	0,07	446.514	0,300
2020	3.658	4,76	0,49	0,10	480.028	0,310
2021	3.987	4,38	0,36	0,08	495.386	0,301

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Gini *Ratio*
2022	3.796	4,13	0,46	0,09	522.932	0,272
2023	3.910	4,20	0,48	0,09	576.455	0,289
2024	4.010	4,26	0,50	0,08	609.286	0,281
2025	3630	3,83	0,44	0,07	634.304	0,300

3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman dari Tahun 2020 sampai Tahun 2025, yaitu: Tahun 2020 (78,55), Tahun 2021 (78,72), Tahun 2022 sebesar (79,31), Tahun 2023 sebesar (79,76), Tahun 2024 sebesar (80,49) dan Tahun 2025 sebesar (81,27) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian pembangunan manusia Kota Pariaman Tahun 2025 berada pada status sangat tinggi (IPM ≥ 80). (Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025, BRS No.68/11/13/Th.XXVII, 5 November 2025)

3.2. Kebijakan Keuangan

3.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Berdasarkan kondisi aktual perekonomian nasional dan daerah serta realisasi APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, khususnya dari sisi pendapatan daerah sampai dengan Semester I, kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) disesuaikan dengan memperhatikan realisasi PAD sampai dengan Semester I Tahun 2025 serta potensi riil yang dapat dicapai sampai akhir tahun anggaran. Penyesuaian ini dilakukan melalui evaluasi capaian masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah, dengan mempertimbangkan tren realisasi historis, kondisi ekonomi masyarakat, serta efektivitas pemungutan. Langkah ini bertujuan agar target PAD lebih realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pendapatan transfer, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, disesuaikan berdasarkan alokasi definitif yang diterima daerah. Penyesuaian ini mencerminkan perubahan kebijakan fiskal nasional dan provinsi serta dinamika realisasi Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2025.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penyesuaian seiring dengan adanya peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi, khususnya yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta pencantuman Bantuan Keuangan Provinsi yang pada APBD murni belum dialokasikan. Penyesuaian ini memperkuat struktur pendapatan daerah dan meningkatkan kepastian pendanaan program prioritas.
4. Pendapatan yang bersumber dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disesuaikan dengan realisasi penerimaan aktual serta ketentuan pengelolaan dana JKN yang berlaku, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

5. Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Pariaman terus mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara bertahap. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pariaman yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan pilihan, serta urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah, dengan mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas layanan publik, dan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan Prediksi Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Belanja transfer bersifat khusus, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, telah diperhitungkan sesuai dengan indikasi alokasi dan ketentuan teknis yang berlaku, dengan memperhatikan potensi penyesuaian sebagai dampak perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

b. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar program dan kegiatan, serta antar jenis dan objek belanja dimungkinkan dilakukan dalam rangka penyesuaian capaian kinerja, efisiensi pelaksanaan program, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah/lahan dan kebutuhan mendesak lainnya, melalui mekanisme Perubahan APBD;

c. Penyesuaian kebijakan belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan secara selektif dan terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil evaluasi atas efektivitas penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya;

d. Program dan kegiatan baru yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada program prioritas RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan pada tahun anggaran berjalan serta kesiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

e. Komitmen pendanaan bersama dengan Pemerintah Pusat, termasuk program nasional yang dilaksanakan di daerah, diperhitungkan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian kewenangan, keberlanjutan pendanaan, dan dampaknya terhadap beban fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.

f. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi belanja, serta keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dan capaian kinerja, guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

g. Anggaran Belanja pada pergeseran setelah perubahan APBD Tahun 2025 bertambah sebesar Rp27.312.990.126,00 sehingga total anggaran Belanja menjadi sebesar Rp655.447.003.808,00,. Kebijakan perubahan Anggaran Belanja pada perubahan APBD TA 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi mengalami penambahan anggaran sebesar Rp7.439.575.663,96 atau 1,43% sehingga total anggaran Belanja Operasi menjadi sebesar Rp526.370.469.695,89, dari anggaran semula Rp518.930.894.031,93. Penambahan ini merupakan penyesuaian atas kebutuhan operasional yang berkembang, antara lain peningkatan alokasi gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyesuaian standar harga satuan belanja barang dan jasa, serta penambahan program layanan publik prioritas yang tidak terakomodasi dalam APBD Induk. Belanja Operasi mendominasi struktur belanja daerah dengan porsi 80,31% dari total anggaran Belanja Daerah setelah perubahan, yang mencerminkan karakteristik pemerintah daerah kota yang sebagian besar anggarannya digunakan untuk belanja rutin operasional;
2. Belanja Modal mengalami penambahan anggaran paling signifikan secara persentase yaitu sebesar Rp14.429.832.266,00 atau 70,79% sehingga total anggaran Belanja Modal menjadi sebesar Rp34.814.704.203,00, dari anggaran semula Rp20.384.871.937,00. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi pada Belanja Modal dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan di akhir Tahun Anggaran 2025.;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penambahan anggaran sebesar Rp3.730.000.000,00 atau 248,67% sehingga total anggaran BTT menjadi Rp5.230.000.000,00, dari anggaran semula Rp1.500.000.000,00. Peningkatan yang cukup signifikan ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Kota Pariaman menghadapi dinamika kebencanaan, mengingat Kota Pariaman sebagai daerah pesisir memiliki risiko terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir rob, abrasi pantai, dan angin puting beliung. Penambahan alokasi BTT juga mempertimbangkan kemungkinan kebutuhan tanggap darurat yang tidak terantisipasi pada saat penyusunan APBD Induk. Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Belanja Transfer mengalami penambahan anggaran sebesar Rp1.713.582.196,04 atau 1,96%, dari anggaran semula Rp87.318.247.713,07 menjadi Rp89.031.829.909,11. Penambahan ini disebabkan oleh penyesuaian alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah desa sesuai realisasi penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi dari proyeksi awal, serta penambahan Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah desa untuk mendanai program-program pembangunan desa yang mendesak. Belanja Transfer mendukung prinsip desentralisasi fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan antarpemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Prioritas Penggunaan Anggaran Tahun 2025 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman.;
7. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah (PD);

8. Optimalisasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja Langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik; dan
9. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti bahwa masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasilnya.

3.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan

APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, pergeseran setelah perubahan anggaran, diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp291.467.289,00. Defisit tersebut ditutup melalui kebijakan pembiayaan daerah yang direncanakan secara terukur dan berpedoman pada prinsip kehati-hatian fiskal.

Sumber pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 berasal dari Penerimaan Pembiayaan, berupa pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.644.532.711,00.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.936.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman. Kebijakan penyertaan modal tersebut ditujukan untuk memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau entitas terkait, guna mendukung peningkatan kinerja dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar minus Rp291.467.289,00, yang digunakan untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan tanpa penambahan utang daerah dan dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal serta keberlanjutan keuangan daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 disusun dan dilaksanakan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian output dan outcome program serta kegiatan perangkat daerah. Pendekatan ini tercermin secara nyata dalam proses pengalokasian dan penyesuaian anggaran yang dituangkan dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024. Ringkasan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Ringkasan APBD Pergeseran TA 2025

Uraian	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pendapatan	665.680.718.682,00	628.134.013.682,00	(37.546.705.000,00)
Pendapatan Asli Daerah	57.049.327.694,00	57.049.327.694,00	0,00
Pendapatan Transfer	608.631.390.988,00	571.084.685.988,00	(37.546.705.000,00)

Uraian	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Belanja Daerah	665.680.718.682,00	628.134.013.682,00	(37.546.705.000,00)
Belanja Operasi	528.030.193.735,93	518.930.894.031,93	(9.099.299.704,00)
Belanja Modal	47.545.787.603,00	20.384.871.937,00	(27.160.915.666,00)
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
Belanja Transfer	88.604.737.343,07	87.318.247.713,07	(1.286.489.630,00)
Surplus / (Defisit)	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan Tabel 3.4, pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp37.546.705.000,00 yang sepenuhnya bersumber dari penurunan pendapatan transfer. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Pariaman melakukan rasionalisasi belanja daerah dalam jumlah yang seimbang guna menjaga stabilitas fiskal daerah. Penyesuaian belanja terutama difokuskan pada belanja modal dan belanja operasi, dengan tetap mempertahankan keberlanjutan output layanan publik yang bersifat rutin dan wajib, khususnya pelayanan dasar serta penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan outcome berupa stabilitas layanan publik dan kontinuitas kinerja perangkat daerah tetap terjaga, meskipun terjadi penyempitan ruang fiskal akibat berkurangnya pendapatan transfer.

Selanjutnya, perbandingan antara APBD Perubahan dan Pergeseran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Tabel 3.5 Ringkasan APBD Perubahan dan Pergeseran Perubahan TA 2025

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Pergeseran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	**2**	**3**	**4 (3-2)**
Pendapatan	**651.508.471.097,00**	**655.738.471.097,00**	**4.230.000.000,00**
Pendapatan Asli Daerah	66.713.656.675,00	66.713.656.675,00	0,00
Pendapatan Transfer	584.794.814.422,00	585.024.814.422,00	230.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Belanja Daerah	**651.217.003.808,00**	**655.447.003.808,00**	**4.230.000.000,00**
Belanja Operasi	526.370.469.695,89	526.370.469.695,89	0,00
Belanja Modal	34.814.704.203,00	34.814.704.203,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	5.230.000.000,00	4.230.000.000,00
Belanja Transfer	89.031.829.909,11	89.031.829.909,11	0,00
Surplus / (Defisit)	**291.467.289,00**	**291.467.289,00**	**0,00**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Pergeseran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	2.644.532.711,00	2.644.532.711,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.936.000.000,00	2.936.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada sisi Pendapatan, pergeseran menghasilkan penambahan sebesar Rp4.230.000.000,00 atau 0,65%, sehingga total anggaran Pendapatan menjadi Rp655.738.471.097,00 dari sebelumnya Rp651.508.471.097,00. Penambahan ini bersumber dari dua pos: (i) Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp230.000.000,00 yang merupakan bantuan keuangan provinsi untuk tanggap darurat bencana; dan (ii) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bertambah sebesar Rp4.000.000.000,00 yang merupakan Bantuan Kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanganan bencana alam berupa banjir dan longsor. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami perubahan sebesar Rp66.713.656.675,00, yang mencerminkan stabilitas proyeksi penerimaan daerah dari sumber PAD.

Pada sisi Belanja Daerah, pergeseran menghasilkan penambahan sebesar Rp4.230.000.000,00 atau 0,65%, sehingga total anggaran Belanja Daerah menjadi Rp655.447.003.808,00. Seluruh penambahan terkonsentrasi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bertambah sebesar Rp4.230.000.000,00 atau 423,00%, dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp5.230.000.000,00. Penambahan BTT ini dialokasikan untuk mendukung penanganan Dana Darurat yang diterima dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.000.000.000,00, yang akan digunakan untuk penanggulangan bencana dan kebutuhan darurat lainnya sesuai mekanisme penggunaan BTT

Secara keseluruhan, dinamika perubahan APBD dan pergeseran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa struktur pendapatan dan belanja daerah telah diarahkan secara konsisten untuk mendukung pencapaian target kinerja APBD. Dalam konteks penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun 2025, kebijakan penganggaran tersebut mencerminkan keterkaitan yang memadai antara realisasi anggaran dengan pencapaian output dan outcome pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari terjaganya keseimbangan fiskal, keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung layanan dasar, serta penguatan kapasitas fiskal daerah yang mendukung akuntabilitas dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

3.3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024. Seiring dengan dinamika pelaksanaan anggaran dan perkembangan kondisi fiskal daerah, dilakukan Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025, serta Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025.

Pergeseran setelah perubahan anggaran, struktur APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kondisi keuangan daerah yang relatif seimbang, dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp665.738.471.097,00, belanja daerah sebesar Rp655.447.003.808,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp291.467.289,00. Defisit tersebut ditutup melalui kebijakan pembiayaan daerah tanpa penambahan utang, sehingga tetap menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai respons atas dinamika realisasi pendapatan daerah, kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan prioritas, serta perlunya penyesuaian alokasi anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan, dan antar jenis belanja guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, perubahan anggaran juga mempertimbangkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya untuk mendukung pembiayaan anggaran berjalan secara optimal.

Secara umum, kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan keterkaitan yang selaras antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Ringkasan Perubahan atas Pos Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp665.680.718.682,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp655.738.471.097,00 terjadi penurunan sebesar (Rp9.942.247.585,00) atau berkurang sebesar 1,52% sebagaimana tertera dalam Tabel 3.6

Tabel 3.6 Ringkasan Pos Pendapatan APBD Awal dan Perubahan Anggaran Tahun 2025

Pendapatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Pergeseran Setelah Perubahan (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
Pendapatan Asli Daerah	**57.049.327.694,00**	**66.713.656.675,00**	**9.664.328.981,00**
Pajak Daerah	21.173.192.141,00	24.153.192.141,00	2.980.000.000,00
Retribusi Daerah	4.392.239.800,00	12.987.038.800,00	8.594.799.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.331.512.753,00	11.365.010.955,00	33.498.202,00
Lain-lain PAD yang Sah	20.152.383.000,00	18.208.414.779,00	(1.943.968.221,00)
Pendapatan Transfer	**608.631.390.988,00**	**585.024.814.422,00**	**(23.606.576.566,00)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	577.354.185.000,00	541.629.061.358,00	(35.725.123.642,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.277.205.988,00	43.395.753.064,00	12.118.547.076,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**0,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**
Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Total Pendapatan	**665.680.718.682,00**	**655.738.471.097,00**	**(9.942.247.585,00)**

Realisasi APBD Kota Pariaman Tahun 2025 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

A. Realisasi Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh selama TA 2025 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp620.440.914.948,89 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp655.738.471.097,00

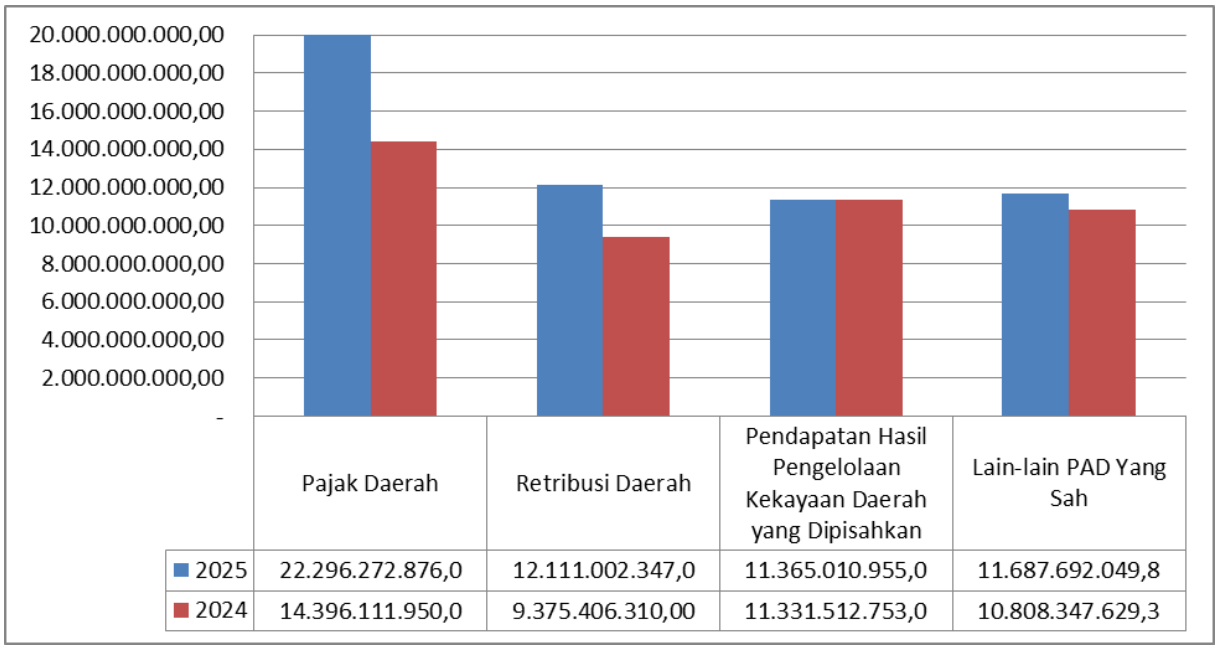
   Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan sebanyak 10 Perangkat Daerah dari 28 Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Realisasi pendapatan yang dicapai oleh 10 Perangkat Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Perangkat Daerah Tahun 2025

No	PD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga	15.000.000,00	21.426.000,00	6.426.000,00	142,84	3.846.000,00
2	Dinas Kesehatan	14.390.835.717,00	14.355.886.819,00	(34.948.898,00)	99,76	12.192.101.021,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	325.000.000,00	252.339.479,00	(72.660.521,00)	77,64	299.125.820,00
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3.010.932.000,00	2.383.932.074,00	(626.999.926,00)	79,18	2.032.127.753,00
5	Dinas Perhubungan	600.000.000,00	231.672.500,00	(368.327.500,00)	38,61	206.808.000,00
6	Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.120.000.000,00	381.477.538,00	(738.522.462,00)	34,06	257.827.763,00
7	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.090.000.000,00	871.020.000,00	(218.980.000,00)	79,91	807.710.000,00
8	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	260.000.000,00	192.660.000,00	(67.340.000,00)	74,10	172.320.000,00
9	Bagian Umum	60.000.000,00	42.750.000,00	(17.250.000,00)	71,25	74.750.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	634.866.703.380,00	601.707.750.538,89	(33.158.952.841,11)	94,78	628.315.413.316,36
Total		**655.738.471.097,00**	**620.440.914.948,89**	**(35.297.556.148,11)**	**94,62**	**644.362.029.673,36**

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan target pendapatan sebesar Rp655.738.471.097,00 dengan realisasi sebesar Rp620.440.914.948,89 atau 94,62%, sehingga terdapat selisih kurang realisasi sebesar Rp35.297.556.148,11. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp644.362.029.673,36, capaian pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan.

Realisasi pendapatan pada masing-masing perangkat daerah menunjukkan variasi capaian. Sebagian perangkat daerah telah merealisasikan pendapatan mendekati atau melampaui target yang ditetapkan, sementara perangkat daerah lainnya belum mencapai target, dengan tingkat realisasi yang bervariasi. Perbedaan capaian tersebut, terutama pada perangkat daerah dengan kontribusi pendapatan yang signifikan, berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah secara keseluruhan.



	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD Yang Sah
2025	22.296.272.876,0	12.111.002.347,0	11.365.010.955,0	11.687.692.049,8
2024	14.396.111.950,0	9.375.406.310,00	11.331.512.753,0	10.808.347.629,3

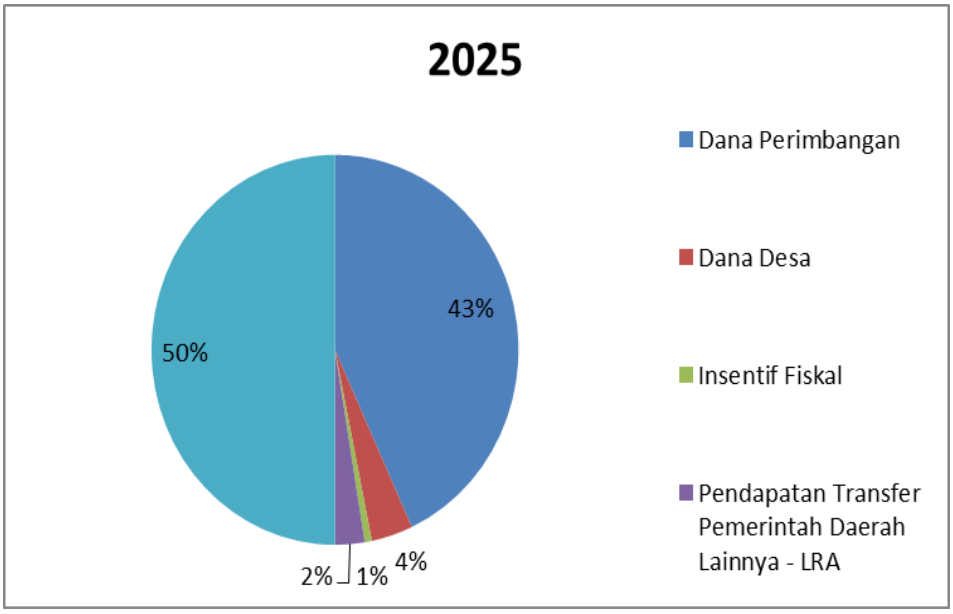
Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024 per Komponen Pendapatan

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut jenis pendapatan, diketahui bahwa realisasi PAD Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 pada seluruh komponen pendapatan. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen Pajak Daerah, diikuti oleh Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan realisasi PAD pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran selanjutnya, Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pajak Daerah, melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan sistem informasi perpajakan daerah secara berkelanjutan.
2. Peningkatan Kinerja Retribusi Daerah, dengan melakukan evaluasi terhadap jenis dan tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Penguatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, melalui peningkatan kinerja badan usaha milik daerah dan optimalisasi hasil penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Optimalisasi Lain-lain PAD yang Sah, antara lain melalui peningkatan pendapatan bunga, denda administrasi, serta pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Peningkatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan sumber-sumber PAD, guna memastikan konsistensi antara perencanaan dan realisasi pendapatan.
6. Penyempurnaan Perencanaan Pendapatan Daerah, dengan memperhatikan realisasi historis dan potensi riil daerah sebagai dasar penetapan target pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp558.980.936.721,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Gambar 5.2 Diagram Pendapatan Transfer Tahun 2025

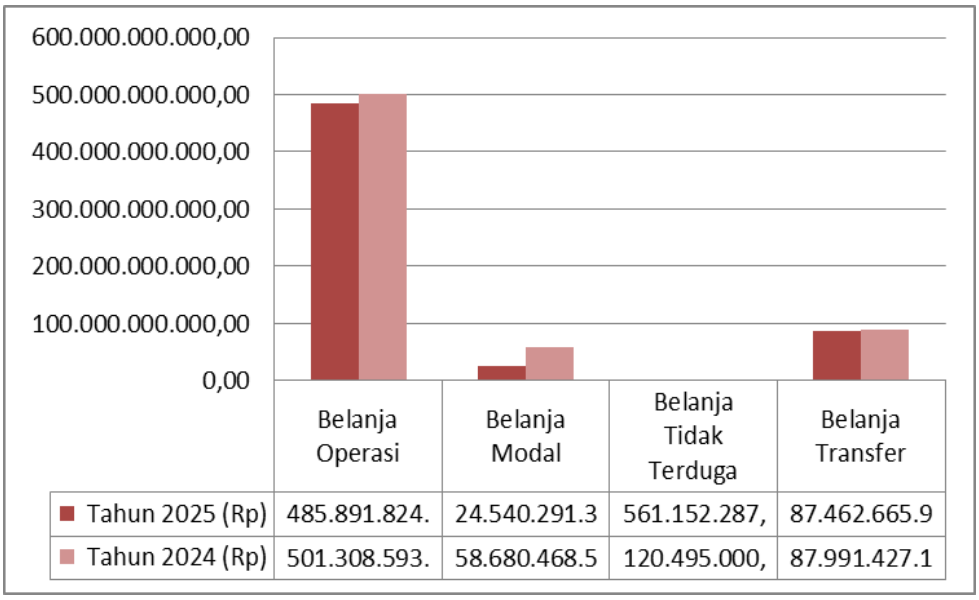
Berdasarkan diagram komposisi pendapatan transfer, diketahui bahwa struktur pendapatan transfer Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2025 didominasi oleh Dana Perimbangan dan Dana Desa yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 43% dan 50%. Adapun Insentif Fiskal dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan transfer. Komposisi ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Perimbangan dan Dana Desa.

B. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 mencerminkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi yang dilaksanakan oleh dua puluh delapan Perangkat Daerah, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang juga berfungsi sebagai Perangkat Daerah. Dengan demikian, terdapat dua puluh delapan entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman.

Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp655.447.003.808,00, dengan realisasi sebesar Rp598.455.933.818,44 atau 91,31% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan berdasarkan prinsip pengendalian anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, alokasi belanja minimum, serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pelaksanaan belanja daerah diarahkan untuk menjamin terselenggaranya administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta dukungan terhadap agenda-agenda prioritas daerah.

.



Gambar 5.3 Grafik Porsi Belanja Tahun 2025 dan 2024

Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Berdasarkan grafik realisasi belanja daerah, Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dengan realisasi sebesar Rp485.891.824.192,10, diikuti oleh Belanja Transfer sebesar 87.462.665.956,00. Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp24.540.291.383,34, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp561.152.287,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan, sedangkan Belanja Transfer relatif stabil.

Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2025 dan 2024 berdasarkan Organisasi adalah:

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		**336.836.808.907,23**	**307.217.800.664,39**	**91,21**	**354.615.268.684,00**
		Pendidikan	155.782.847.556,37	144.156.623.806,55	92,54	150.870.465.391,00
		Kesehatan	114.376.483.204,83	110.221.545.930,00	96,37	130.503.276.786,00
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.342.047.783,00	18.649.557.824,00	91,68	34.800.356.384,00
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.940.142.768,00	11.492.766.404,28	88,81	17.527.731.050,00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.974.388.690,03	19.027.330.042,56	90,72	17.152.334.258,00
		Sosial	12.420.898.905,00	3.669.976.657,00	29,55	3.761.104.815,00
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**		**66.724.743.036,64**	**59.443.064.766,00**	**89,09**	**60.732.391.856,00**
		Tenaga Kerja	678.306.700,00	379.539.900,00	55,95	163.429.740,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.013.239.189,00	4.440.947.390,00	88,58	4.311.090.110,00
		Pangan	167.085.250,00	152.649.788,00	91,36	299.497.149,00

No	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
		Pertanahan	58.432.750,00	28.681.639,00	49,08	76.438.260,00
		Lingkungan Hidup	10.696.274.478,00	8.489.855.985,00	79,37	10.081.888.650,00
		Administrasi Kependudukan dan Capil	3.913.748.275,69	3.752.081.054,00	95,87	3.647.190.577,00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.527.279.851,29	4.863.783.892,00	88,00	5.511.990.166,00
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.244.283.000,00	3.113.458.400,00	95,97	3.977.163.750,00
		Perhubungan	12.132.559.254,75	11.402.700.076,00	93,98	9.260.740.493,00
		Komunikasi dan Informatika	7.623.535.318,00	6.869.306.561,00	90,11	6.524.918.748,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.880.729.983,00	5.588.180.433,00	95,03	5.705.334.051,00
		Penanaman Modal	4.924.284.154,00	4.536.237.562,00	92,12	4.708.524.934,00
		Kepemudaan dan Olah Raga	1.830.824.000,00	1.601.810.937,00	87,49	1.968.348.500,00
		Statistik	4.670.500,00	4.118.500,00	88,18	29.310.946,00
		Persandian	21.289.000,00	20.153.000,00	94,66	14.132.082,00
		Kebudayaan	974.439.531,00	936.163.676,00	96,07	1.107.828.331,00
		Perpustakaan	3.846.642.301,91	3.202.124.973,00	83,24	3.055.815.695,00
		Kearsipan	187.119.500,00	61.271.000,00	32,74	288.749.674,00
3	**Urusan Pilihan**		**27.798.866.753,98**	**25.515.645.808,00**	**91,79**	**25.223.041.350,00**
		Kelautan dan Perikanan	963.016.940,00	912.397.050,00	94,74	874.903.463,00
		Pariwisata	6.206.885.184,00	5.763.944.090,00	92,86	6.136.122.542,00
		Pertanian	17.059.409.844,98	15.741.887.178,00	92,28	14.845.668.763,00
		Perdagangan	2.889.835.285,00	2.781.309.695,00	96,24	3.336.968.924,00
		Perindustrian	679.719.500,00	316.107.795,00	46,51	29.377.658,00
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**		**224.086.585.110,15**	**206.279.422.580,05**	**92,05**	**207.530.282.651,33**
		Administrasi Pemerintahan	36.295.902.320,89	33.490.500.405,08	92,27	21.238.904.700,00
		Pengawasan	8.771.142.519,00	8.583.184.850,00	97,86	7.175.799.825,00
		Perencanaan	5.761.466.142,87	4.966.286.232,00	86,20	5.749.317.109,00
		Keuangan	111.059.650.237,59	102.828.266.525,97	92,59	103.483.759.237,00
		Kepegawaian	5.712.648.009,00	5.144.873.305,00	90,06	4.728.226.461,00
		Penelitian dan Pengembangan	215.089.400,00	38.025.360,00	17,68	48.391.950,00
		Sekretariat DPRD	29.501.510.706,06	25.674.787.287,00	87,03	25.784.572.335,00
		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	22.448.635.186,00	21.652.065.087,00	96,45	21.424.478.512,00
		Kesatuan Bangsa dan Politik	4.320.540.588,74	3.901.433.528,00	90,30	17.896.832.522,33
Jumlah			**655.447.003.808,00**	**598.455.933.818,44**	**91,31**	**648.100.984.541,33**

Rincian belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2025 dan 2024 berdasarkan Fungsi adalah:

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi TA 2025 dan 2024

No	Jenis	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	**PELAYANAN UMUM**	**227.769.744.089,41**	**209.485.487.901,05**	91,97	**196.790.058.728,00**
	Pangan	167.085.250,00	152.649.788,00	91,36	299.497.149,00
	Komunikasi dan Informatika	7.623.535.318,00	6.869.306.561,00	90,11	6.524.918.748,00
	Statistik	4.670.500,00	4.118.500,00	88,18	29.310.946,00
	Persandian	21.289.000,00	20.153.000,00	94,66	14.132.082,00
	Kearsipan	187.119.500,00	61.271.000,00	32,74	288.749.674,00
	Administrasi Pemerintahan	36.295.902.320,89	33.490.500.405,08	92,27	21.238.904.700,00
	Pengawasan	8.771.142.519,00	8.583.184.850,00	97,86	7.175.799.825,00
	Perencanaan	5.761.466.142,87	4.966.286.232,00	86,20	5.749.317.109,00
	Keuangan	111.059.650.237,59	102.828.266.525,97	92,59	103.483.759.237,00
	Kepegawaian	5.712.648.009,00	5.144.873.305,00	90,06	4.728.226.461,00
	Penelitian dan Pengembangan	215.089.400,00	38.025.360,00	17,68	48.391.950,00
	Sekretariat DPRD	29.501.510.706,06	25.674.787.287,00	87,03	25.784.572.335,00
	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	22.448.635.186,00	21.652.065.087,00	96,45	21.424.478.512,00
2	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**25.294.929.278,77**	**22.928.763.570,56**	90,65	**35.049.166.780,33**
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.974.388.690,03	19.027.330.042,56	90,72	17.152.334.258,00
	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.320.540.588,74	3.901.433.528,00	90,30	17.896.832.522,33
3	**EKONOMI**	**50.735.141.513,02**	**46.522.143.581,00**	91,70	**44.436.938.192,00**
	Tenaga Kerja	678.306.700,00	379.539.900,00	55,95	163.429.740,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.527.279.851,29	4.863.783.892,00	88,00	5.511.990.166,00
	Perhubungan	12.132.559.254,75	11.402.700.076,00	93,98	9.260.740.493,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.880.729.983,00	5.588.180.433,00	95,03	5.705.334.051,00
	Penanaman Modal	4.924.284.154,00	4.536.237.562,00	92,12	4.708.524.934,00
	Kelautan dan Perikanan	963.016.940,00	912.397.050,00	94,74	874.903.463,00
	Pertanian	17.059.409.844,98	15.741.887.178,00	92,28	14.845.668.763,00
	Perdagangan	2.889.835.285,00	2.781.309.695,00	96,24	3.336.968.924,00
	Perindustrian	679.719.500,00	316.107.795,00	46,51	29.377.658,00
4	**LINGKUNGAN HIDUP**	**10.754.707.228,00**	**8.518.537.624,00**	79,21	**10.158.326.910,00**
	Pertanahan	58.432.750,00	28.681.639,00	49,08	76.438.260,00
	Lingkungan Hidup	10.696.274.478,00	8.489.855.985,00	79,37	10.081.888.650,00
5	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**33.282.190.551,00**	**30.142.324.228,28**	90,57	**52.328.087.434,00**
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.342.047.783,00	18.649.557.824,00	91,68	34.800.356.384,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.940.142.768,00	11.492.766.404,28	88,81	17.527.731.050,00
6	**KESEHATAN**	**117.620.766.204,83**	**113.335.004.330,00**	96,36	**134.480.440.536,00**
	Kesehatan	114.376.483.204,83	110.221.545.930,00	96,37	130.503.276.786,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.244.283.000,00	3.113.458.400,00	95,97	3.977.163.750,00
7	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**7.181.324.715,00**	**6.700.107.766,00**	93,30	**7.243.950.873,00**
	Kebudayaan	974.439.531,00	936.163.676,00	96,07	1.107.828.331,00
	Pariwisata	6.206.885.184,00	5.763.944.090,00	92,86	6.136.122.542,00
8	**PENDIDIKAN**	**161.460.313.858,28**	**148.960.559.716,55**	92,26	**155.894.629.586,00**

No	Jenis	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	Pendidikan	155.782.847.556,37	144.156.623.806,55	92,54	150.870.465.391,00
	Kepemudaan dan Olah Raga	1.830.824.000,00	1.601.810.937,00	87,49	1.968.348.500,00
	Perpustakaan	3.846.642.301,91	3.202.124.973,00	83,24	3.055.815.695,00
9	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**21.347.886.369,69**	**11.863.005.101,00**	55,57	**11.719.385.502,00**
	Sosial	12.420.898.905,00	3.669.976.657,00	29,55	3.761.104.815,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.013.239.189,00	4.440.947.390,00	88,58	4.311.090.110,00
	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.913.748.275,69	3.752.081.054,00	95,87	3.647.190.577,00
Jumlah		**655.447.003.808,00**	**598.455.933.818,44**	91,31	**648.100.984.541,33**

Rincian anggaran dan realisasi belanja dan transfer per perangkat daerah adalah:

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per Perangkat Daerah TA 2025

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	157.613.671.556,37	145.758.434.743,55	(11.855.236.812,82)	92,48	152.838.813.891,00
2	Dinas Kesehatan	114.376.483.204,83	110.221.545.930,00	(4.154.937.274,83)	96,37	130.503.276.786,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	22.359.731.642,75	20.772.760.032,00	(1.586.971.610,75)	92,90	36.643.210.757,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	23.916.778.746,00	20.002.622.389,28	(3.914.156.356,72)	83,63	27.649.175.700,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	15.150.963.681,06	14.130.504.267,56	(1.020.459.413,50)	93,26	12.319.877.726,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.823.425.008,97	4.896.825.775,00	(926.599.233,97)	84,09	4.832.456.532,00
7	Dinas Sosial	12.420.898.905,00	3.669.976.657,00	(8.750.922.248,00)	29,55	3.761.104.815,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	8.257.522.189,00	7.554.405.790,00	(703.116.399,00)	91,49	8.288.253.860,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.913.748.275,69	3.752.081.054,00	(161.667.221,69)	95,87	3.647.190.577,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.527.279.851,29	4.863.783.892,00	(663.495.959,29)	88,00	5.511.990.166,00
11	Dinas Perhubungan	9.892.946.645,00	9.288.179.507,00	(604.767.138,00)	93,89	7.454.768.380,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.649.494.818,00	6.893.578.061,00	(755.916.757,00)	90,12	6.568.361.776,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	9.412.784.768,00	8.655.597.923,00	(757.186.845,00)	91,96	9.071.680.633,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	5.602.590.854,00	4.915.777.462,00	(686.813.392,00)	87,74	4.871.954.674,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7.181.324.715,00	6.700.107.766,00	(481.216.949,00)	93,30	7.243.950.873,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.033.761.801,91	3.263.395.973,00	(770.365.828,91)	80,90	3.344.565.369,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	18.189.512.034,98	16.806.934.016,00	(1.382.578.018,98)	92,40	16.020.069.375,00
18	Sekretariat Daerah	36.295.902.320,89	33.490.500.405,08	(2.805.401.915,81)	92,27	21.238.904.700,00
19	Sekretariat DPRD	29.501.510.706,06	25.674.787.287,00	(3.826.723.419,06)	87,03	25.784.572.335,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	2.691.128.347,00	2.622.215.716,00	(68.912.631,00)	97,44	2.424.336.831,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	14.920.507.881,00	14.455.909.015,00	(464.598.866,00)	96,89	14.592.729.304,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.840.456.204,00	2.702.402.530,00	(138.053.674,00)	95,14	2.600.602.857,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	2.059.482.754,00	1.926.977.826,00	(132.504.928,00)	93,57	1.843.416.068,00
24	Inspektorat	8.745.702.519,00	8.557.744.850,00	(187.957.669,00)	97,85	7.139.193.277,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	5.976.555.542,87	5.004.311.592,00	(972.243.950,87)	83,73	5.797.709.059,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	111.059.650.237,59	102.828.266.525,97	(8.231.383.711,62)	92,59	103.483.759.237,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	5.712.648.009,00	5.144.873.305,00	(567.774.704,00)	90,06	4.728.226.461,00
28	Kantor Kesbangpol	4.320.540.588,74	3.901.433.528,00	(419.107.060,74)	90,30	17.896.832.522,33
Jumlah		**655.447.003.808,00**	**598.455.933.818,44**	**(56.991.069.989,56)**	**91,31**	**648.100.984.541,33**

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp598.455.933.818,44 atau 91,31% dari total anggaran sebesar Rp655.447.003.808,00. Secara umum, realisasi belanja pada sebagian besar perangkat daerah berada di atas 90% dari anggaran yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa perangkat daerah dengan tingkat realisasi yang relatif rendah. Kondisi tersebut mempengaruhi capaian realisasi belanja daerah secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pariaman yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang disusun melalui proses konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang yang wajib menyelenggarakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pengelolaan anggaran, pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas yang berada dalam penguasaannya, termasuk unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Konsolidasi laporan keuangan dilakukan dengan menggabungkan secara penuh (*full consolidation*) laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan BLUD, ke dalam laporan keuangan entitas pelaporan, dengan melakukan eliminasi atas transaksi dan saldo timbal balik antar entitas, baik antara Perangkat Daerah dengan BLUD maupun antar Perangkat Daerah lainnya, sehingga LKPD menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah secara wajar.

Pada Tahun Anggaran 2025, entitas akuntansi Pemerintah Kota Pariaman terdiri atas 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah, yang di antaranya terdapat entitas akuntansi yang memiliki unit BLUD, yaitu:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
5. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
10 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
13. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
14. Dinas Kesehatan (8 unit BLUD);
15. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Perpustakaan Dan Arsip;
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika;

19. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM;
21. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan LH (1 unit BLUD);
22. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja;
23. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
24. Kecamatan Pariaman Timur;
25. Kecamatan Pariaman Utara;
26. Kecamatan Pariaman Selatan;
27. Kecamatan Pariaman Tengah, dan
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seluruh laporan keuangan entitas akuntansi tersebut dikonsolidasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku unit akuntansi konsolidator, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 adalah basis akrual. Dengan basis ini, pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas diakui dan disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi PSAP Nomor 4, Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo akun awal Tahun 2025 sesuai dengan saldo akhir yang telah diaudit sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024. Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berpengaruh terhadap periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk memberikan informasi yang memadai dan menjaga keterbandingan laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman disusun dengan menggunakan basis pengukuran biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk pos-pos tertentu yang diukur berdasarkan basis pengukuran lain sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Aset dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan apabila aset diperoleh tanpa biaya, dan selanjutnya disajikan sebesar nilai tercatat setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan/atau akumulasi penurunan nilai, apabila berlaku. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Akun Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek Pemerintah Kota Pariaman yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki jangka waktu jatuh tempo tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas diklasifikasikan berdasarkan unit pengelolaan sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas yang Dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), meliputi:
    1. Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan sub Rekening Kas Umum Daerah (sub RKUD) pada bank umum;
    2. Kas dan setara kas pada rekening Pemerintah Kota Pariaman lainnya pada bank umum;
    3. Kas pada rekening bank persepsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta rekening operasional gaji yang dikelola oleh Kuasa BUD; dan
    4. Rekening khusus (*special account*) Pemerintah Kota Pariaman yang dibuka oleh BUD pada bank umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dari dalam dan/atau luar negeri.
b) Kas dan Setara Kas yang Dikelola oleh Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi:
    1. Kas di Bendahara Penerimaan;
    2. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
    3. Kas pada BLUD.
c) Kas dan Setara Kas Lainnya yang Dikelola oleh Perangkat Daerah, yaitu saldo kas pada Perangkat Daerah selain kas di Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BLUD, yang meliputi:
    1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
    2. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan; dan
    3. Kas Lainnya yang Berasal dari Hibah.

Penerimaan kas adalah seluruh aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo kas daerah, yang berasal dari:

1. Penerimaan pendapatan;
2. Penerimaan pembiayaan; dan
3. Penerimaan kas lainnya.

Pengeluaran kas adalah seluruh aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo kas daerah, yang digunakan untuk:

1. Belanja;
2. Pengeluaran pembiayaan;

3. Pengeluaran transfer; dan
4. Pengeluaran lainnya yang bersifat transitoris.

Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan atas kas dan setara kas telah beralih kepada Pemerintah Kota Pariaman.

Penerimaan dan pengeluaran kas melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan kas melalui BUD diakui pada saat kas diterima di rekening milik BUD;
2. Pengeluaran kas melalui BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening milik BUD.

Penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Perangkat Daerah (PD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan kas diakui pada saat kas tunai diterima oleh bendahara atau pada saat kas diterima di rekening kas PD dan/atau BLUD; dan
2. Pengeluaran kas diakui pada saat kas tunai dikeluarkan oleh bendahara atau pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas PD dan/atau BLUD.

Pengukuran

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
2. Pada tanggal pelaporan, kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisih yang timbul akibat penjabaran tersebut diakui sebagai pendapatan atau beban selisih kurs pada periode berjalan.

Pengungkapan

Kas dan Setara Kas diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan meliputi antara lain:

1. Kebijakan akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas;
2. Penjelasan mengenai sifat dan jenis masing-masing akun kas dan setara kas yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kota Pariaman;
3. Rincian rekening kas yang signifikan;
4. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
5. Jumlah kas yang penggunaannya dibatasi, apabila ada;
6. Selisih kas, apabila ada; dan
7. Rincian setara kas, termasuk jenis instrumen dan jangka waktunya.

Penyajian

1. Kas dan Setara Kas disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar pada Neraca.

2. Arus kas masuk dan arus kas keluar yang terkait dengan kas dan setara kas disajikan dalam Laporan Arus Kas (LAK) sesuai dengan klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan, dapat segera dicairkan, dan dilakukan dalam rangka manajemen kas Pemerintah Kota Pariaman. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan secara bebas;
2. Ditujukan untuk mengelola kelebihan kas secara optimal guna meningkatkan produktivitas aset; dan
3. Memiliki tingkat risiko yang rendah.

Jenis investasi jangka pendek Pemerintah Kota Pariaman antara lain:

1. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau deposito yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3. Saham yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan; dan
4. Reksa dana.

Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, serta perubahan piutang menjadi investasi diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kota Pariaman dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), melainkan dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek.

Pada saat pelepasan atau penjualan investasi jangka pendek, selisih antara harga pelepasan (setelah dikurangi biaya penjualan) dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional (LO) serta disajikan sebagai penyesuaian terhadap SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pengukuran

1. Investasi jangka pendek yang memiliki pasar aktif diukur menggunakan nilai wajar, yaitu harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan.

2. Investasi jangka pendek yang tidak memiliki pasar aktif diukur menggunakan biaya perolehan, nilai nominal, atau nilai wajar lainnya sesuai karakteristik instrumen.
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi harga transaksi ditambah komisi perantara, jasa bank, dan biaya lain yang terkait langsung dengan perolehan investasi.
4. Investasi jangka pendek yang diperoleh tanpa biaya perolehan dinilai sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. Apabila nilai wajar tidak tersedia, digunakan nilai wajar aset lain yang diserahkan atau hasil penilaian sesuai ketentuan.
5. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito.
6. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Pengungkapan

Investasi jangka pendek diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang meliputi antara lain:

1. Kebijakan akuntansi investasi jangka pendek;
2. Jenis dan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki;
3. Dasar pengukuran yang digunakan;
4. Hasil investasi yang diperoleh selama periode pelaporan; dan
5. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi jangka pendek.

Penyajian

1. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar pada Neraca.
2. Hasil investasi, seperti bunga dan imbal hasil lainnya, diakui sebagai pendapatan dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).
3. Transaksi perolehan investasi jangka pendek disajikan sebagai reklasifikasi kas dan tidak dilaporkan dalam LRA.
4. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan sebagai penyesuaian SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
5. Dalam Laporan Arus Kas (LAK), arus kas terkait investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Kota Pariaman untuk menerima sejumlah uang atau manfaat ekonomi lainnya dari pihak lain sebagai akibat perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sebab lain yang sah.

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Piutang Jangka Pendek, yaitu piutang yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan; dan

2. Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang diharapkan diterima dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jenis piutang Pemerintah Kota Pariaman meliputi:

1. Piutang Pajak Daerah;
2. Piutang Retribusi Daerah;
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
6. Piutang Transfer Antar Daerah;
7. Piutang Lainnya; dan
8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagai akun kontra.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Kota Pariaman yang dapat diukur secara andal dan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, antara lain akibat:

- ❖ pungutan pendapatan daerah;
- ❖ perikatan atau perjanjian;
- ❖ transfer antar pemerintahan; dan
- ❖ kerugian daerah (TP/TGR).

Piutang Pajak Daerah diakui pada saat diterbitkannya dokumen ketetapan atau penagihan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- ❖ Surat Ketetapan Pajak;
- ❖ Surat Tagihan Pajak;
- ❖ SPPT PBB-P2;
- ❖ STP dan SKP PBB-P2; serta
- ❖ Keputusan keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang menambah jumlah pajak terutang.

Piutang selain piutang pajak diakui pada saat terdapat dokumen sah yang menimbulkan hak tagih dan belum dilunasi.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dan belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Transfer Antar Daerah diakui sebesar hak daerah penerima berdasarkan realisasi pendapatan yang belum dibayarkan.

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui apabila terdapat SK Pembebanan, SKP2K, SKTJM, atau dokumen sejenis yang sah. Apabila penyelesaian dilakukan melalui pengadilan, piutang diakui setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dan diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal berdasarkan dokumen ketetapan atau perjanjian.
2. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih.
3. Piutang TP/TGR disajikan sebagai aset lancar untuk bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan dan sebagai aset lainnya untuk bagian yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
4. Penghentian pengakuan piutang dilakukan melalui:
   - ❖ pelunasan;
   - ❖ penghapusbukuan (write-down); atau
   - ❖ penghapustagihan (write-off), sesuai ketentuan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang, sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Pajak	Retribusi	Transfer	Lainnya
Lancar	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Kurang Lancar	10%	10%	–	10%
Diragukan	50%	50%	–	50%
Macet	100%	100%	–	100%

Penyisihan dihitung pada setiap akhir periode pelaporan. Apabila kualitas piutang menurun, dilakukan penambahan penyisihan. Apabila kualitas piutang meningkat, dilakukan pengurangan penyisihan dan diungkapkan dalam CaLK.

Pengungkapan

Piutang diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi:

- ❖ kebijakan akuntansi piutang;
- ❖ rincian piutang menurut jenis dan kualitas;
- ❖ mutasi penyisihan piutang tidak tertagih; dan
- ❖ piutang signifikan yang bermasalah, apabila ada.

Penyajian

1. Piutang disajikan sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya pada Neraca sesuai jangka waktunya.
2. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan sebagai akun kontra piutang.
3. Piutang dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan, dengan selisih kurs diakui sebagai pendapatan atau beban selisih kurs.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimiliki untuk:

1. Mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah; dan/atau
2. Dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah lain dalam rangka pelayanan publik.

Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat :
   a) manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial dari persediaan kemungkinan besar akan diperoleh; dan
   b) biaya perolehan atau nilai persediaan dapat diukur secara andal, serta didukung oleh dokumen sumber yang sah.
2. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah, yang dibuktikan dengan dokumen antara lain:
   a) faktur;
   b) kuitansi; dan/atau
   c) Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual, yaitu setiap transaksi perolehan dan pemakaian persediaan dicatat secara langsung pada saat terjadinya transaksi.
4. Pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing-masing jenis persediaan dengan mempertimbangkan materialitas dan kemudahan pengendalian.
5. Pada akhir periode pelaporan, saldo persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
6. Inventarisasi fisik dilakukan terhadap:
   a) persediaan yang belum digunakan;
   b) persediaan yang berada di gudang/tempat penyimpanan; dan
   c) persediaan yang berada pada unit pengguna.
7. Persediaan yang rusak atau usang tidak disajikan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan didukung dengan daftar persediaan rusak/usang.
8. Beban persediaan diakui pada periode pelaporan saat terjadi:
   a) pemakaian persediaan;
   b) penyerahan persediaan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah lain; atau
   c) sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

Pengukuran

1. Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi:
   a) harga pembelian

b) biaya pengangkutan;

c) biaya penanganan; dan

d) biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan persediaan.

Biaya perolehan persediaan dikurangi dengan:

- ❖ potongan harga
- ❖ rabat; dan
- ❖ potongan sejenis lainnya.

2. Persediaan yang diperoleh melalui produksi sendiri diukur sebesar harga pokok produksi.
3. Persediaan yang diperoleh melalui hibah, rampasan, atau cara lain diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pengukuran beban persediaan pada Laporan Operasional dilakukan sebesar nilai pemakaian persediaan (use of goods).

   Dikecualikan dari Beban Persediaan:

   a) pemakaian persediaan untuk kegiatan pemeliharaan, yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan; dan

   b) penyerahan persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah lain, yang dicatat sebagai Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.
5. Nilai pemakaian persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu: Saldo Awal Persediaan (Perolehan Persediaan - Saldo Akhir Persediaan) dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian persediaan yang digunakan.

Pengungkapan

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi:

1. kebijakan akuntansi persediaan;
2. metode pencatatan dan penilaian persediaan;
3. rincian persediaan menurut jenis dan nilai;
4. persediaan rusak atau usang; dan
5. penyesuaian hasil inventarisasi fisik.

Penyajian

1. Persediaan disajikan dalam Neraca pada pos Aset Lancar.
2. Dalam rangka penyajian persediaan, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik persediaan sekurang-kurangnya setiap semester.
3. Hasil inventarisasi fisik digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dalam pembukuan.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Akun Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang diklasifikasikan menjadi:

1. Investasi Jangka Panjang Permanen

   Investasi jangka panjang permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tanpa rencana untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk :

   a. memperoleh dividen dan/atau hasil investasi jangka panjang;
   b. memperoleh pengaruh signifikan; dan/atau
   c. menjaga hubungan kelembagaan.

   Investasi jangka panjang permanen meliputi:

   a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan badan usaha lainnya, baik dalam bentuk:
      - ❖ surat berharga (saham); maupun
      - ❖ non surat berharga berupa aset/barang yang dinilai dengan uang.
   b. Pemberian Pinjaman Daerah yang dimiliki secara berkelanjutan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

   Investasi jangka panjang non permanen adalah investasi yang dimiliki lebih dari 12 bulan tetapi tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, atau terdapat rencana untuk ditarik kembali atau dialihkan.

   Investasi jangka panjang non permanen meliputi:

   a. Investasi pada BUMN yang bersifat sementara, antara lain dalam rangka penyehatan atau penyelamatan perekonomian nasional.
   b. Investasi pada BUMD yang bersifat sementara, antara lain dalam rangka penyehatan atau penyelamatan perekonomian daerah.
   c. Investasi dalam obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo.
   d. Investasi dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
   e. Dana Bergulir, yaitu dana yang disisihkan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja yang disalurkan secara bergulir.

Pengakuan

1) Perolehan Investasi

   Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, serta konversi piutang atau aset lain menjadi investasi diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria:

   a. manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan kemungkinan besar diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

Pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan penerimaan kas dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan, dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2) Pelepasan Investasi

a. Selisih antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan investasi.

b. Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

c. Hasil investasi berupa dividen tunai dan bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan dalam LRA dan LO.

d. Dividen saham (stock dividend) tidak diakui sebagai pendapatan, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1) Metode Biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan. Metode biaya diterapkan untuk:

a) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan.

b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang.

c) Investasi non permanen dalam proyek pembangunan.

Pendapatan dari investasi yang diukur dengan metode biaya diakui sebesar hasil yang diterima, tanpa mempengaruhi nilai investasi.

2) Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk:

a) Investasi permanen dengan kepemilikan ≥ 20%; atau

b) kepemilikan < 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

Pada metode ini:

- Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan.
- Nilai investasi disesuaikan dengan bagian laba/rugi setelah tanggal perolehan.
- Dividen tunai mengurangi nilai investasi dan diakui sebagai pendapatan.
- Dividen saham tidak mengubah nilai investasi.
- Penyesuaian nilai investasi dilakukan atas perubahan kepemilikan, selisih kurs, dan revaluasi aset.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode ini diterapkan untuk:

a) Investasi non permanen dalam rangka penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

b) Investasi non permanen berupa dana bergulir.

Penyajian

1) Investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca menurut jenisnya, yaitu investasi permanen dan non permanen.
2) Investasi non permanen yang diragukan tertagih disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.
3) Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.
4) Hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada Neraca.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Akun Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pariaman atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pengakuan

1. Aset tetap diakui apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:
   a) berwujud;
   b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c) biaya perolehan dapat diukur secara andal;
   d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal; dan
   e) diperoleh atau dibangun untuk digunakan.
2. Manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial dinilai berdasarkan kemampuan aset dalam mendukung operasional pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Aset tetap diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum atau fisik telah berpindah, yang dibuktikan dengan dokumen sah.
4. Apabila bukti kepemilikan hukum belum sepenuhnya selesai karena proses administratif, aset tetap tetap diakui sepanjang penguasaan telah berpindah dan terdapat bukti pembayaran atau pengendalian atas aset tersebut.

Pengukuran

1) Penilaian Awal

Aset tetap pada saat perolehan awal diukur berdasarkan:

a) Biaya perolehan; atau

b) Nilai wajar, apabila aset diperoleh tanpa pengeluaran (hibah/donasi/sitaan).

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan revaluasi.

2) Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan meliputi harga beli atau biaya konstruksi serta biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset siap digunakan, antara lain:

- ❖ biaya persiapan lokasi;
- ❖ biaya pengangkutan dan bongkar muat;
- ❖ biaya instalasi;
- ❖ biaya profesional; dan
- ❖ biaya konstruksi.

Biaya administrasi umum, biaya awal operasi, dan biaya pra-produksi tidak dikapitalisasi, kecuali secara langsung dapat diatribusikan.

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a) Aset tetap yang belum selesai pada akhir periode pelaporan diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

b) KDP direklasifikasi menjadi aset tetap terkait setelah selesai dan siap digunakan.

c) Perlakuan KDP mengikuti ketentuan PSAP 08.

4) Perolehan Khusus

a) Perolehan gabungan dialokasikan berdasarkan proporsi nilai wajar masing-masing aset.

b) Pertukaran aset:

- ❖ aset tidak serupa, dicatat sebesar nilai wajar;
- ❖ aset serupa, dicatat sebesar nilai tercatat aset yang dilepas, tanpa pengakuan laba/rugi.

c) Aset donasi dicatat sebesar nilai wajar dan diakui sebagai pendapatan operasional.

5) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi apabila:

- ❖ memperpanjang masa manfaat; atau
- ❖ meningkatkan kapasitas, kualitas, atau kinerja aset.

Kapitalisasi mengikuti Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, yaitu:

a) Peralatan dan Mesin ≥ Rp300.000,00 per unit;

b) Aset Tetap Lainnya ≥ Rp0,00;

c) Konstruksi ≥ Rp10.000.000,00.

6) Pengukuran Berikutnya

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian kembali hanya dilakukan berdasarkan ketentuan nasional dan selisihnya dicatat pada ekuitas.

7) Penyusutan

a) Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai aset selama masa manfaat.

b) Penyusutan diakui sebagai beban penyusutan pada LO dan akumulasi penyusutan pada Neraca.

c) Metode penyusutan:

- ❖ garis lurus;
- ❖ saldo menurun ganda; atau
- ❖ unit produksi.

d) Tanah dan KDP tidak disusutkan.

8) Penilaian Kembali

Revaluasi aset tetap pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selisih revaluasi dicatat pada akun ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

9) Aset Infrastruktur

Aset infrastruktur merupakan bagian dari aset tetap dan diperlakukan sesuai kebijakan ini. Contohnya jalan, jembatan, jaringan, dan sistem drainase.

Penghentian dan Pelepasan

1. Aset tetap dihentikan pengakuannya apabila dilepaskan atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi masa depan.
2. Aset yang dihentikan dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
3. Aset yang tidak lagi digunakan tetapi belum dilepas direklasifikasi ke aset lainnya.

Pengungkapan

Dalam CaLK diungkapkan:

1. dasar penilaian aset tetap;
2. rekonsiliasi mutasi aset tetap;
3. kebijakan dan informasi penyusutan;

4. pembatasan hak kepemilikan;
5. aset dalam konstruksi dan komitmen pengadaan; dan
6. informasi revaluasi (jika ada).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset berwujud yang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai serta belum siap digunakan, yang pada saat selesai akan direklasifikasi menjadi aset tetap.

KDP mencakup pembangunan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya, baik yang dilaksanakan melalui swakelola maupun melalui kontrak konstruksi dengan pihak ketiga.

Pengakuan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:
   a) besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial akan diperoleh;
   b) biaya perolehan dapat diukur secara andal; dan
   c) aset masih dalam proses pengerjaan dan belum siap digunakan.
2. KDP diklasifikasikan sebagai bagian dari aset tetap dan disajikan terpisah sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
3. KDP direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan apabila:
   a) pekerjaan konstruksi secara substansi telah selesai; dan
   b) aset telah siap digunakan sesuai tujuan perolehannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen sejenis.

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan diukur sebesar biaya perolehan, yaitu seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tersebut siap digunakan.

Biaya Konstruksi

1. Konstruksi Swakelola

   Biaya KDP swakelola meliputi:

   a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b) biaya yang dapat dialokasikan secara sistematis dan rasional; dan
   c) biaya lain yang secara khusus dibebankan pada konstruksi tersebut.

   Biaya langsung antara lain meliputi:

   a) biaya tenaga kerja lapangan;
   b) biaya bahan;
   c) biaya pemindahan dan penyewaan peralatan;

d) biaya perencanaan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan konstruksi.

Biaya tidak langsung yang dapat dialokasikan antara lain asuransi, biaya pengawasan, dan biaya inspeksi, yang dialokasikan secara konsisten menggunakan metode yang rasional.

2. Konstruksi melalui Kontrak Konstruksi

Nilai KDP melalui kontrak konstruksi meliputi:

a) termin yang telah dibayarkan sesuai progres pekerjaan; dan

b) kewajiban yang masih harus dibayar atas pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Setiap pembayaran termin dicatat sebagai penambah nilai KDP.

3. Klaim dan Perubahan Kontrak

Klaim yang disetujui dan dapat diukur secara andal sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi dicatat sebagai penambah nilai KDP.

4. Biaya Pinjaman

a) Biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi sebagai bagian dari KDP sepanjang:

- ❖ pinjaman digunakan secara langsung untuk membiayai konstruksi; dan
- ❖ biaya pinjaman dapat diidentifikasi dan diukur secara andal.

b) Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat konstruksi selesai dan siap digunakan.

c) Biaya pinjaman tidak dikapitalisasi apabila penghentian pekerjaan disebabkan oleh kondisi force majeure.

Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Tetap dan disajikan terpisah dari aset tetap yang telah selesai.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

1. rincian KDP berdasarkan jenis aset dan lokasi;
2. nilai kontrak, sumber pendanaan, dan tingkat penyelesaian;
3. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. uang muka kerja dan retensi (jika ada).

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Akun Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pariaman selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang adalah klaim Pemerintah Kota Pariaman yang penyelesaiannya diharapkan lebih dari 12 (dua belas) bulan yang meliputi :

a. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA);

b. Tagihan Ganti Rugi (TGR).

Pengakuan

Tagihan Jangka Panjang diakui apabila:

a. terdapat hak pemerintah untuk menerima manfaat ekonomi di masa depan; dan

b. nilai tagihan dapat diukur secara andal berdasarkan dokumen sah.

Pengukuran

a. TPA diukur sebesar nilai nominal kontrak penjualan setelah dikurangi angsuran yang telah diterima;

b. TGR diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi setoran yang telah diterima.

Pengungkapan

Tagihan Jangka Panjang diungkapkan dalam CaLK yang mencakup jenis tagihan, saldo awal, mutasi, dan saldo akhir

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah kerja sama Pemerintah Kota Pariaman dengan mitra dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah tanpa mengalihkan kepemilikan. Bentuk kemitraan meliputi:

a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);

b. Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna (BGS/BSG);

c. Perjanjian Konsesi Jasa.

Pengakuan

a. Barang Milik Daerah yang dipartisipasikan tetap diakui sebagai aset pemerintah dan direklasifikasi sebagai aset kemitraan;

b. Aset yang dibangun oleh mitra tidak diakui sebagai aset pemerintah selama masa kerja sama, kecuali pada akhir masa kerja sama sesuai BAST.

Pengukuran

Aset kemitraan diukur sebesar nilai tercatat atau nilai wajar, dipilih yang paling objektif pada saat penandatanganan BAST kerja sama.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset kemitraan disajikan pada Neraca dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan dalam CaLK yang memuat:

a. jenis dan objek kerja sama;

b. jangka waktu;

c. hak dan kewajiban para pihak;

d. potensi penerimaan daerah.

3. Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kota Pariaman. ATB antara lain meliputi:

a. perangkat lunak (software);

b. lisensi;

c. hak cipta, paten, dan hak sejenis;

d. hasil kajian/pengembangan.

Pengakuan

ATB diakui apabila:

a. dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh pemerintah;

b. memiliki manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa depan; dan

c. biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara andal.

Pengeluaran tahap penelitian dibebankan langsung, sedangkan tahap pengembangan dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Pengukuran

ATB diukur sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi apabila:

a. memperpanjang masa manfaat; atau

b. meningkatkan kapasitas atau kualitas layanan.

Amortisasi

ATB diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat sebagai berikut:

Jenis ATB	Masa Manfaat	Tarif
Software	4 tahun	25%
Lisensi/Franchise	8 tahun	12,5%
Hak cipta/paten	16 tahun	6,25%
Hasil kajian/pengembangan	20 tahun	5%

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya.

Penghentian ATB

ATB dihentikan pengakuannya apabila:

a. dilepaskan; atau

b. tidak lagi memberikan manfaat ekonomi atau jasa potensial.

Selisih antara nilai buku dan hasil pelepasan diakui dalam Laporan Operasional.

4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang:

a. dihentikan dari penggunaan aktif;

b. rusak berat; atau

c. tidak dimanfaatkan dalam operasional pemerintah.

Pengakuan dan Pengukuran

Aset Lain-lain diakui sebesar nilai tercatat pada saat reklasifikasi dan tetap disusutkan sesuai kebijakan aset tetap.

Penghapusan

Aset Lain-lain diproses penghapusannya paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi properti Investasi

Properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan termasuk sarana dan prasarana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut. Properti Investasi adalah properti yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk:

a. menghasilkan pendapatan sewa; dan/atau

b. meningkatkan nilai asset dan tidak digunakan untuk operasional pemerintahan atau pelayanan publik.

Pengakuan

Barang Milik Daerah (BMD) berupa properti diakui sebagai Properti Investasi apabila:

1. dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau peningkatan nilai aset; dan
2. tidak digunakan:
   - ❖ dalam kegiatan operasional pemerintahan;
   - ❖ untuk pelayanan kepada masyarakat;
   - ❖ untuk tujuan administratif; atau
   - ❖ untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan publik.

Properti yang tidak digunakan (idle asset) diakui sebagai Properti Investasi pada saat ditetapkannya status penggunaan oleh Pengelola Barang berdasarkan dokumen penetapan yang sah. Properti tidak diklasifikasikan sebagai Properti Investasi apabila:

a. digunakan sendiri dalam kegiatan pemerintahan atau pelayanan publik;

b. disewakan dengan tarif di bawah harga pasar dalam rangka bantuan sosial atau kepentingan strategis Pemerintah Kota Pariaman;

c. hanya sesekali disewakan dan tetap digunakan untuk operasional pemerintah;

d. digunakan sebagian untuk operasional pemerintah dan sebagian disewakan, apabila bagian yang disewakan tidak signifikan dan tidak dapat dipisahkan penatausahaannya.

Pengukuran

Properti Investasi diukur sebagai berikut:

1. Properti yang direklasifikasi dari aset tetap diukur sebesar nilai tercatat pada tanggal reklasifikasi.
2. Properti Investasi yang diperoleh melalui:
   - ❖ Pengadaan, sebesar biaya perolehan;
   - ❖ Sewa pembiayaan, sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini pembayaran sewa minimum;
   - ❖ Hibah atau perolehan nonpertukaran, sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan;
   - ❖ Transfer antar entitas pemerintah, sebesar nilai tercatat berdasarkan dokumen serah terima.

Properti yang telah memenuhi kriteria Properti Investasi disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai Properti Investasi.

Properti Investasi Setelah Perolehan Awal

Properti Investasi dicatat menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Tanah tidak disusutkan.

Bangunan disusutkan dengan metode dan masa manfaat sesuai kebijakan penyusutan BMD Pemerintah Kota Pariaman.

Pengeluaran setelah perolehan awal dikapitalisasi apabila:

1. meningkatkan manfaat ekonomi atau potensi jasa; atau
2. memperpanjang masa manfaat properti.

Revaluasi Properti Investasi dilakukan hanya apabila ditetapkan secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Penggunaan (Reklasifikasi)

Properti direklasifikasi jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang nyata, yang ditunjukkan dengan:

1. Dimulainya penggunaan Properti Investasi untuk operasional pemerintah, direklasifikasi menjadi Aset Tetap;
2. Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, direklasifikasi menjadi Persediaan;
3. Dihentikannya penggunaan aset tetap dan dimulainya pemanfaatan untuk disewakan, direklasifikasi menjadi Properti Investasi.

Reklasifikasi dilakukan sebesar nilai tercatat pada tanggal perubahan penggunaan.

Penghentian Pengakuan

Properti Investasi dihentikan pengakuannya apabila:

1. dilepaskan melalui penjualan, hibah, tukar-menukar, atau penyertaan modal; atau
2. tidak lagi memberikan manfaat ekonomi atau jasa potensial secara permanen.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil pelepasan diakui dalam Laporan Operasional.

Pengungkapan

Properti Investasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:

1. dasar penilaian nilai tercatat;
2. metode dan masa manfaat penyusutan;
3. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. rekonsiliasi saldo Properti Investasi;
5. pendapatan sewa dari Properti Investasi;
6. beban operasional langsung terkait Properti Investasi; dan
7. kewajiban kontraktual yang signifikan terkait Properti Investasi.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang Pemerintah Kota Pariaman yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi di masa depan dan dapat dipaksakan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

1. Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui apabila:

1. terdapat kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu;
2. besar kemungkinan diperlukan pengeluaran sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
3. nilai kewajiban dapat diukur secara andal.

Pengukuran

1. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal.
2. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
3. Selisih kurs diakui sebagai penyesuaian ekuitas sesuai SAP.

A. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Pariaman meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan atau pada akhir periode pelaporan atas saldo yang belum disetorkan.

b) Pengukuran dilakukan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan kepada pihak yang berhak.

2. Utang Bunga

a) Utang bunga diakui atas bunga pinjaman yang telah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.

b) Pengukuran dilakukan sebesar bunga terutang

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

a) Utang belanja diakui pada saat barang/jasa telah diterima tetapi belum dibayar sampai akhir periode pelaporan.

b) Pengukuran dilakukan sebesar nilai tagihan atau estimasi biaya yang masih harus dibayar

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

5. Pendapatan Diterima di Muka

a) Pendapatan diterima di muka diakui pada saat kas diterima tetapi kewajiban penyerahan barang/jasa belum dipenuhi.

b) Pengukuran dilakukan sebesar kas yang belum menjadi pendapatan.

6. Utang Belanja

a) Utang belanja diakui pada saat barang/jasa telah diterima tetapi belum dibayar sampai akhir periode pelaporan.

b) Pengukuran dilakukan sebesar nilai tagihan atau estimasi biaya yang masih harus dibayar.

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

B. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Pariaman meliputi:

1. Utang kepada Pemerintah Pusat
2. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
3. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
4. Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)
5. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka panjang diakui sejak perjanjian pinjaman mengikat secara hukum dan diukur sebesar nilai nominal pinjaman dikurangi pembayaran pokok yang telah dilakukan.

Bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Penghentian Pengakuan

Kewajiban dihentikan pengakuannya apabila:

1. kewajiban tersebut telah diselesaikan; atau
2. kewajiban dihapuskan berdasarkan perjanjian formal atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan nilai penyelesaian diakui dalam Laporan Operasional.

Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi

1. Kewajiban Diestimasi

   Diakui apabila kemungkinan besar kewajiban akan timbul dan dapat diestimasi secara andal.

2. Kewajiban Kontinjensi

   Tidak diakui dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan apabila terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Pariaman mengungkapkan paling sedikit:

1. rincian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;
2. saldo awal dan akhir kewajiban;
3. kewajiban yang jatuh tempo dalam 12 bulan;
4. kewajiban dalam mata uang asing;
5. restrukturisasi, tunggakan, atau penghapusan kewajiban, apabila ada.

4.3.11. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Pariaman yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas yang disajikan dalam Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas sebagaimana disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Surplus/defisit Laporan Operasional (LO) merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah memperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa, yang mempengaruhi perubahan ekuitas.

Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa yang menimbulkan perubahan aset dan/atau kewajiban Pemerintah Kota Pariaman, yang berdampak pada kenaikan atau penurunan kekayaan bersih pemerintah daerah. Perubahan ekuitas meliputi antara lain:

1. Surplus/defisit LO periode berjalan;
2. Koreksi-koreksi yang secara langsung menambah atau mengurangi ekuitas; dan
3. Transaksi antar entitas dalam lingkup Pemerintah Kota Pariaman.

Pengukuran

Ekuitas diukur sebesar nilai tercatat aset dikurangi kewajiban pada tanggal pelaporan. Perubahan ekuitas diukur berdasarkan:

1. Surplus atau defisit LO periode berjalan;

2. Dampak kumulatif koreksi kesalahan periode sebelumnya dan perubahan kebijakan akuntansi; dan
3. Transaksi antar entitas yang belum dieliminasi pada tingkat entitas akuntansi.

Klasifikasi Ekuitas

Untuk tujuan penyajian dan pengendalian, ekuitas Pemerintah Kota Pariaman diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ekuitas SAL;
2. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan;
3. Ekuitas Dana Lancar;
4. Ekuitas Dana Investasi; dan
5. Ekuitas Dana Cadangan.

Klasifikasi tersebut digunakan sebagai akun pengendali (control account) dalam rangka penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Transaksi Antar Entitas dan Perlakuan Khusus

1) Transaksi Antar Entitas (TAE)

   Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang terjadi antara entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan dalam lingkup Pemerintah Kota Pariaman. Pada tingkat konsolidasi LKPD, seluruh Transaksi Antar Entitas harus dieliminasi sehingga tidak mempengaruhi saldo ekuitas konsolidasian. Transaksi Antar Entitas dapat terjadi:

   1. Antar satuan kerja dalam satu entitas pelaporan; atau
   2. Antar satuan kerja lintas entitas pelaporan, termasuk antara Perangkat Daerah/BLUD dengan SKPKD/BUD.

2) Diterima dari Entitas Lain (DDEL) dan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

   Akun DDEL dan DKEL digunakan untuk mencatat transaksi antar entitas yang timbul akibat pemisahan fungsi antara Perangkat Daerah/BLUD sebagai pengguna anggaran dengan Kuasa BUD sebagai pengelola kas. Pada penyajian Laporan Perubahan Ekuitas masing-masing entitas, akun DDEL dan DKEL disajikan sebagai bagian dari Transaksi Antar Entitas dan dieliminasi pada saat konsolidasi LKPD.

3) Pengesahan Hibah Langsung

   Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi antar entitas antara Perangkat Daerah/BLUD penerima hibah dengan BUD pengelola hibah. Pada tingkat konsolidasi LKPD, ekuitas yang timbul dari pengesahan hibah langsung dieliminasi sehingga tidak mempengaruhi ekuitas konsolidasian Pemerintah Kota Pariaman.

4) Perlakuan atas UP/TUP

   Penarikan dan pengembalian Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) merupakan transaksi transitoris yang menimbulkan akun timbal balik antar entitas. Pada tingkat konsolidasi LKPD, akun timbal balik yang timbul dari transaksi UP/TUP dieliminasi sehingga tidak mempengaruhi saldo ekuitas konsolidasian.

Penyajian

Ekuitas disajikan:

1. Dalam Neraca sebagai salah satu pos utama; dan
2. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan saldo awal ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, serta saldo akhir ekuitas.

Saldo ekuitas yang disajikan dalam Neraca harus sama dengan saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Pariaman mengungkapkan paling sedikit:

1. Rincian perubahan ekuitas selama periode pelaporan;
2. Penjelasan koreksi kesalahan periode sebelumnya dan perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada ekuitas;
3. Informasi mengenai Transaksi Antar Entitas dan proses eliminasi pada konsolidasi LKPD; dan
4. Penjelasan atas saldo ekuitas signifikan lainnya.

4.3.12. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Pariaman yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui apabila:

1. telah timbul hak Pemerintah Kota Pariaman untuk menagih pendapatan; atau
2. telah terjadi realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pariaman sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi daerah.

Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasikan menjadi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Klasifikasi lebih lanjut menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Pencatatan

Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan diakui sebesar nilai bruto tanpa dikompensasikan dengan beban terkait. Pengecualian asas bruto dapat dilakukan apabila pengurang

pendapatan bersifat variabel, tidak dapat diestimasi secara andal, dan proses transaksi belum selesai.

Pengakuan

1. Pendapatan Perpajakan-LO

   Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak, yaitu:

   a. Self Assessment System

      Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh pemerintah daerah.

   b. Withholding Tax System

      Pendapatan diakui pada saat pemotongan dan/atau penyetoran pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

   c. Official Assessment System

      Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak menagih, yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

   Pengembalian pendapatan pajak yang bersifat normal dan berulang (recurring) dicatat sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

2. Pendapatan Bukan Pajak Daerah (PDBP)-LO

   a. Pendapatan Retribusi Daerah

      Diakui pada saat:

      1. kas diterima; atau
      2. diterbitkannya tagihan, apabila pembayaran dilakukan setelah izin atau layanan diberikan.

   b. Pendapatan Layanan

      Diakui pada saat hak atas pendapatan timbul atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Apabila transaksi jasa dapat diestimasi secara andal, pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian layanan.

   c. Pendapatan dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam

      Diakui sesuai karakteristik transaksi, antara lain berdasarkan izin, volume, harga jual, atau bagi hasil.

   d. Pendapatan dari Investasi Pemerintah

      Diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

   e. Pendapatan dari Pemanfaatan Aset Daerah

      Diakui sesuai hak yang timbul berdasarkan perjanjian kerja sama atau pada saat kas diterima.

   f. Pendapatan-LO Lainnya

      Diakui sesuai dengan saat timbulnya hak atau diterimanya kas sesuai ketentuan SAP.

3. Pendapatan Hibah-LO
    a. Hibah dalam bentuk kas diakui pada saat kas diterima di RKUD atau disahkan oleh Kuasa BUD.
    b. Hibah dalam bentuk barang/jasa diakui pada saat pengesahan oleh Kuasa BUD.

Pengukuran

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto:

1. pajak berdasarkan nilai nominal ketetapan atau kas yang diterima;
2. PDBP sesuai nilai transaksi atau hak yang timbul;
3. hibah barang/jasa berdasarkan nilai wajar.

Apabila nilai hibah tidak dapat diukur secara andal, diungkapkan dalam CaLK.

Pengungkapan

Pendapatan-LO diungkapkan dalam CaLK menurut sumber dan klasifikasinya serta disajikan dalam mata uang rupiah.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Klasifikasi

Pendapatan-LRA dikelompokkan menjadi:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pencatatan

Pendapatan-LRA dicatat berdasarkan asas bruto, dengan pengecualian sesuai ketentuan SAP.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD atau diterima oleh Bendahara Penerimaan yang merupakan bagian dari BUD, termasuk pendapatan BLUD, BOS, dan dana kapitasi JKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima dan dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia apabila diterima dalam mata uang asing.

Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan dalam CaLK sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Perlakuan Khusus

Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA dicatat sesuai sifatnya (recurring atau non-recurring) dan periode terjadinya, serta berdampak pada pendapatan, SAL, atau ekuitas sesuai ketentuan SAP.

4.3.13. Kebijakan Akuntansi Belanja LRA dan Beban-LO

1) Belanja LRA

Belanja LRA adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Klasifikasi

Belanja LRA diklasifikasikan menjadi:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, tidak diharapkan berulang, dan sangat diperlukan.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran berupa uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang kepada entitas pelaporan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Belanja LRA diakui pada saat:

1. terjadinya pengeluaran kas dari RKUD; atau
2. pengesahan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Khusus:

1. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban disahkan dengan diterbitkannya SP2D GU atau SP2D Nihil.
2. Belanja BLUD, dana kapitasi JKN FKTP, dan BOS/PSG diakui pada saat diterbitkan SP2D pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembalian belanja:

1. atas belanja tahun berjalan dicatat sebagai pengurang belanja tahun berjalan;
2. atas belanja tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA.

Pengukuran

Belanja LRA diukur berdasarkan asas bruto sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran sah lainnya, sesuai klasifikasi dalam dokumen anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja LRA disajikan dalam:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Arus Kas pada aktivitas operasi dan/atau investasi; dan
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Belanja dalam mata uang asing dikonversi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlakuan Khusus

1. Persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau belanja bantuan sosial berbentuk barang tidak diperhitungkan sebagai beban persediaan.
2. Penyerahan aset tetap yang sebelumnya diperoleh melalui belanja modal tidak dicatat sebagai belanja hibah, tetapi dicatat sebagai beban nonoperasional.

2) Beban-LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran kas, konsumsi aset, maupun timbulnya kewajiban.

Klasifikasi

Beban-LO diklasifikasikan menjadi:

1. Beban Operasi;
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi;
3. Beban Transfer; dan
4. Beban Tidak Terduga.

Pengakuan

Beban-LO diakui pada saat:

1. terjadinya konsumsi aset;
2. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; atau
3. timbulnya kewajiban.

Pengakuan beban tidak bergantung pada arus kas keluar, melainkan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa yang menimbulkan beban secara akrual.

Pengukuran

Beban-LO diukur sebesar:

1. nilai tagihan atau kewajiban yang sah dan telah disetujui KPA/PPK; atau

2. hasil perhitungan akuntansi sesuai ketentuan SAP, termasuk penyusutan, amortisasi, dan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pengukuran beban dilakukan secara andal berdasarkan dokumen sumber dan/atau perhitungan akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Koreksi dan Pengembalian

1. Pengembalian beban yang terjadi pada periode yang sama dicatat sebagai pengurang beban.
2. Pengembalian beban yang diterima pada periode berikutnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
3. Koreksi yang berdampak pada periode sebelumnya dicatat sebagai penyesuaian ekuitas.
4. Pengembalian beban transfer pada periode berikutnya dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berjalan.

Pengungkapan

Beban-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK, termasuk rincian material, analisis varians, dan informasi relevan lainnya.

4.3.14. Kebijakan Akuntansi Akun Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan, yaitu semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang perlu dibayar kembali; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan, yaitu semua pengeluaran RKUD yang akan diterima kembali.

Pembiayaan disajikan dan diakui hanya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan tidak mempengaruhi Laporan Operasional.

Klasifikasi

Akun pembiayaan dikelompokkan menjadi:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pembiayaan mengacu pada klasifikasi dan kodefikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat:

1. kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
2. dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat:

1. kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah; atau
2. dilakukan pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan pembiayaan dilakukan dengan basis kas sesuai prinsip LRA.

Pengukuran

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diukur sebesar nilai nominal.
2. Pembiayaan dalam mata uang asing dijabarkan dan dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan khusus.

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan dalam Mata Uang Asing:

1. Penarikan mata uang asing yang langsung digunakan untuk pembayaran dalam mata uang yang sama dicatat dengan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penarikan mata uang asing yang digunakan untuk pembayaran dalam rupiah dicatat menggunakan kurs transaksi bank.
3. Penarikan mata uang asing sesuai komitmen yang diterima di rekening BUD dicatat dengan kurs tengah Bank Indonesia.
4. Penarikan mata uang asing yang tidak sesuai komitmen dicatat menggunakan kurs transaksi.

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan dalam Mata Uang Asing:

1. Apabila tersedia dana dalam mata uang yang sama, transaksi dicatat dengan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Apabila valuta asing dibeli dengan rupiah, transaksi dicatat sebesar rupiah yang digunakan (kurs transaksi).
3. Apabila valuta asing dibeli dengan mata uang asing lainnya:
   - ❖ transaksi antar mata uang asing dicatat dengan kurs transaksi; dan
   - ❖ hasil akhirnya dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, tanpa dikompensasikan.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan dalam CaLK sekurang-kurangnya meliputi:

1. anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan; dan
2. anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan.

Perlakuan Khusus

1. Pinjaman Luar Negeri melalui Rekening Khusus (NoD mendahului kas)

- ❖ Penerimaan pembiayaan diakui pada tanggal valuta Notice of Disbursement (NoD).
- ❖ Selisih kurs antara tanggal NoD dan penerimaan kas diakui sebagai selisih kurs belum terealisasi (unrealized).

2. Pinjaman Luar Negeri melalui Rekening Khusus (kas mendahului NoD)
   - ❖ Kas yang diterima sebelum NoD dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan.
   - ❖ Pengakuan penerimaan pembiayaan dilakukan pada saat NoD diterima berdasarkan tanggal valuta NoD.
   - ❖ Selisih kurs diakui sebagai selisih kurs belum terealisasi (unrealized).
3. Perlakuan akhir tahun anggaran atas pinjaman luar negeri melalui rekening khusus mengikuti ketentuan peraturan tersendiri.
4. Penerimaan Pembiayaan dari Penerbitan Obligasi
   - ❖ Penerimaan pembiayaan diakui sebesar kas yang diterima.
   - ❖ Selisih antara kas yang diterima dan nilai nominal obligasi diakui sebagai premium atau diskon.
   - ❖ Premium atau diskon disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban.
   - ❖ Amortisasi premium atau diskon dilakukan secara periodik dengan metode garis lurus selama masa obligasi.

4.3.15. Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SlLPA), Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), dan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

A. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA merupakan hasil akhir pelaksanaan anggaran dan tidak mempengaruhi Laporan Operasional.

Penyajian

1. SiLPA/SiKPA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
2. Dalam LRA, SiLPA/SiKPA disajikan sebagai selisih antara:
   - ❖ realisasi pendapatan,
   - ❖ realisasi belanja,
   - ❖ realisasi penerimaan pembiayaan, dan
   - ❖ realisasi pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam LPSAL, SiLPA/SiKPA disajikan sebagai penambah atau pengurang Saldo Awal SAL untuk memperoleh Saldo Akhir SAL.

Transaksi yang Mempengaruhi/Koreksi SiLPA/SiKPA

Transaksi yang dapat mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat tidak berulang (non-recurring);
2. selisih kurs belum terealisasi atas kas dalam valuta asing pada Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran; dan
3. koreksi atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Koreksi tersebut disajikan pada LPSAL dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah dan/atau RKA Perangkat Daerah. SiLPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

1. menutup defisit anggaran;
2. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya;
3. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia;
4. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
5. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat kebijakan pemerintah;
6. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
7. mendanai kegiatan yang peningkatan sasaran kinerjanya dapat diselesaikan sampai batas akhir pembayaran tahun anggaran berjalan.

B. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan sesuai ketentuan. SAL mencerminkan posisi sisa kapasitas fiskal pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan.

Penyajian

1. SAL disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
2. Saldo Akhir SAL dipengaruhi oleh:
   - ❖ Saldo Awal SAL,
   - ❖ penggunaan SAL tahun berjalan,
   - ❖ SiLPA/SiKPA tahun berjalan, dan
   - ❖ koreksi atau penyesuaian SAL.
3. LPSAL disajikan pada laporan keuangan Perangkat Daerah/BLUD, laporan konsolidasian Bendahara Umum Daerah, dan LKPD.

Transaksi yang Mempengaruhi/Koreksi SAL

Transaksi yang dapat mengoreksi SAL antara lain:

1. koreksi kesalahan saldo kas di Bendahara Umum Daerah;
2. kas di KPPN;
3. kas di BLUD;
4. kas di Bendahara Pengeluaran;
5. kas hibah langsung yang telah disahkan pada tahun anggaran sebelumnya; dan
6. penyesuaian lain atas pencatatan SAL sesuai ketentuan.

Koreksi SAL disajikan dalam LPSAL dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.16. Kebijakan Akuntansi Transitoris

Transaksi Transitoris adalah transaksi kas nonanggaran yang mencerminkan penerimaan dan/atau pengeluaran kas secara bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja/beban, maupun pembiayaan Pemerintah Kota Pariaman. Kas transitoris merupakan kas yang diterima pemerintah daerah bersifat titipan atau transit dan dalam jangka waktu tertentu wajib disetorkan atau disalurkan kepada pihak ketiga yang telah ditentukan.

Klasifikasi Transaksi Transitoris

Transaksi transitoris diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Transaksi Transitoris

   Transaksi pemindahan kas berupa pemberian dan/atau pengembalian uang persediaan kepada atau dari Bendahara Pengeluaran.

2. Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

   Transaksi kas yang berasal dari pemotongan gaji atau penghasilan tetap pejabat daerah, ASN, pegawai non-ASN, dan/atau setoran pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Transaksi Pemindahbukuan dan Transfer Antar Rekening BUD

   - ❖ Mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah.
   - ❖ Dalam hal pemindahbukuan melibatkan rekening valuta asing, selisih kurs terealisasi diakui dan disajikan sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku.

4. Transaksi Koreksi Kesalahan Pemindahbukuan

   Transaksi yang timbul akibat kesalahan pemindahbukuan antara rekening Bendahara Umum Daerah dengan rekening pihak ketiga.

5. Transaksi Nonanggaran Pihak Ketiga Lainnya

   Penerimaan kas yang belum dapat ditetapkan sebagai pendapatan atau pembiayaan, antara lain:

   - ❖ retur dana SP2D,
   - ❖ penerimaan pada rekening migas (RPL),

- ❖ penerimaan pinjaman atau hibah luar negeri pada rekening khusus sebelum terbit Notice of Disbursement (NoD),
- ❖ dan transaksi sejenis lainnya.

Pengakuan dan Penyajian

1. Penerimaan kas transitoris diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Pengeluaran kas transitoris diakui pada saat kas disetorkan atau disalurkan kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan kas transitoris dicatat sebagai kewajiban jangka pendek pada akun Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) atau akun kewajiban terkait.
4. Pengeluaran kas transitoris dicatat sebagai pelunasan kewajiban.
5. Transaksi transitoris tidak mempengaruhi SiLPA/SiKPA dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
6. Transaksi transitoris disajikan dalam:
   - ❖ Neraca sebagai aset kas dan kewajiban terkait; dan
   - ❖ Laporan Arus Kas pada bagian Aktivitas Transitoris.

Pengungkapan

Transaksi transitoris diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), antara lain meliputi:

1. jenis dan nilai transaksi transitoris yang signifikan; dan
2. pengaruh transaksi transitoris terhadap aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Perlakuan Akuntansi Kas Transitoris Tertentu

1. Pajak dan Potongan Pihak Ketiga

   Pajak dan potongan lainnya yang dipungut bendahara atas transaksi belanja dicatat sebagai kas transitoris dan kewajiban PFK sampai dengan disetorkan ke kas negara atau pihak yang berhak.

2. Uang Jaminan dari Pihak Ketiga
   - ❖ Uang jaminan yang diterima dari penyedia barang/jasa dicatat sebagai kas transitoris dan kewajiban pihak ketiga.
   - ❖ Uang jaminan dikembalikan setelah pihak ketiga menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai kontrak.
   - ❖ Dalam hal pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, uang jaminan:
     a) dieksekusi sesuai ketentuan kontrak;
     b) direklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan
     c) digunakan untuk mendanai penyelesaian kewajiban pihak ketiga melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah terkait.
3. Selisih Kurs atas Transaksi Transitoris

Selisih kurs terealisasi yang timbul dari transaksi transitoris dengan valuta asing diakui dan disajikan sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku.

4.3.17. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang Tidak Dilanjutkan, dan Peristiwa Luar Biasa Kebijakan ini disusun berdasarkan PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, serta IPSAP 04 dan standar akuntansi pemerintahan terkait lainnya.

A. Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan akuntansi atas kesalahan penyajian pos-pos dalam laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya agar sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Kesalahan dapat timbul antara lain karena:

1. kesalahan perhitungan,
2. kesalahan penerapan standar atau kebijakan akuntansi,
3. kesalahan interpretasi fakta,
4. keterlambatan bukti transaksi,
5. kelalaian atau kecurangan.

Klasifikasi Kesalahan

Kesalahan diklasifikasikan menjadi:

1. Kesalahan tidak berulang; dan
2. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang dibedakan menjadi:

1. kesalahan periode berjalan; dan
2. kesalahan periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik merupakan kesalahan yang secara alamiah dapat terjadi berulang, seperti koreksi penerimaan pajak yang memerlukan restitusi atau tambahan setoran.

Perlakuan Akuntansi

1. Setiap kesalahan dikoreksi segera setelah diketahui.
2. Koreksi kesalahan periode berjalan dilakukan dengan pembetulan akun terkait pada periode berjalan.
3. Koreksi kesalahan periode sebelumnya:
   - ❖ sebelum laporan keuangan diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan akun terkait;
   - ❖ setelah laporan keuangan diterbitkan, dilakukan dengan penyesuaian:
     a) Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk akun LRA dan pembiayaan; dan/atau

b) Ekuitas untuk akun LO dan neraca.

4. Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas dilakukan melalui penyesuaian akun neraca terkait tanpa mempengaruhi LRA.
5. Kesalahan berulang dan sistemik tidak dilakukan koreksi retrospektif, tetapi dicatat pada saat terjadi transaksi pengembalian atau tambahan pembayaran.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Dampak koreksi kesalahan periode sebelumnya disajikan dalam:
   - ❖ Laporan Perubahan SAL; dan/atau
   - ❖ Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Koreksi kesalahan yang mempengaruhi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas pada aktivitas yang sesuai.
3. Seluruh koreksi kesalahan yang material diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan dalam prinsip, dasar, konvensi, aturan, atau praktik akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Ketentuan

1. Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten antarperiode.
2. Perubahan kebijakan akuntansi hanya dilakukan apabila:
   - ❖ diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi; atau
   - ❖ menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal.
3. Perubahan kebijakan akuntansi tidak termasuk:
   - ❖ penerapan kebijakan untuk transaksi yang secara substansi berbeda; atau
   - ❖ penerapan kebijakan baru untuk transaksi yang sebelumnya tidak material atau belum pernah terjadi.

Perlakuan Akuntansi

1. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Dalam implementasi awal kebijakan akuntansi baru, dilakukan:
   - ❖ penyajian kembali (restatement) pos-pos neraca awal periode; dan
   - ❖ penyesuaian penyajian komparatif apabila diperlukan.

Pengungkapan

Perubahan kebijakan akuntansi diungkapkan dalam CaLK, termasuk alasan perubahan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

C. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian nilai tercatat aset, kewajiban, pendapatan, atau beban akibat perubahan kondisi, informasi baru, atau pengalaman tambahan.

Perlakuan Akuntansi

1. Dampak perubahan estimasi diakui secara prospektif.
2. Pengaruh perubahan estimasi disajikan dalam Laporan Operasional pada periode berjalan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Pengungkapan

Dampak material perubahan estimasi diungkapkan dalam CaLK.

D. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian fungsi, program, kegiatan, atau segmen tertentu akibat perubahan kebijakan, peraturan, atau restrukturisasi, tanpa mengganggu fungsi utama pemerintah daerah.

Perlakuan Akuntansi

1. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan tetap diakui dan dilaporkan sampai tanggal penghentian.
2. Untuk tujuan komparabilitas, operasi yang dihentikan tetap disajikan dalam laporan keuangan, meskipun bernilai nol.

Pengungkapan

Informasi material terkait operasi yang tidak dilanjutkan diungkapkan dalam CaLK, antara lain:

1. hakikat dan alasan penghentian,
2. tanggal efektif penghentian,
3. dampak terhadap keuangan dan pelayanan publik.

E. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang:

1. tidak merupakan kegiatan normal entitas;
2. tidak diharapkan terjadi dan tidak berulang;
3. berada di luar kendali entitas; dan
4. berdampak signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Ketentuan

1. Peristiwa darurat atau bencana yang telah diantisipasi dalam anggaran tidak serta-merta dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa.
2. Peristiwa dikategorikan luar biasa apabila secara tunggal menyerap sebagian besar anggaran Belanja Tak Terduga atau menyebabkan perubahan mendasar posisi aset/kewajiban.

Pengungkapan

Hakikat, nilai, dan dampak peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.3.18. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Pariaman disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan diterapkan secara konsisten antarperiode.

Ruang Lingkup

1. Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai tercatat aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Penyusutan merupakan konsekuensi penerapan akuntansi berbasis akrual dan dimaksudkan untuk mencerminkan penurunan potensi manfaat ekonomis dan/atau sosial aset tetap.

Aset Tetap yang Disusutkan

Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang memenuhi kriteria penurunan manfaat dan digunakan dalam operasional Pemerintah Kota Pariaman, meliputi:

1. Peralatan dan Mesin;
2. Gedung dan Bangunan;
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset tetap lainnya berupa Aset Tetap–Renovasi, yaitu renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kota Pariaman dan memenuhi kriteria kapitalisasi, disusutkan berdasarkan masa manfaat yang lebih pendek (mana yang lebih singkat) antara masa manfaat aset dan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tetap disusutkan sebagaimana aset tetap sepanjang masih memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial.

Aset Tetap yang Tidak Disusutkan

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
3. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman;
4. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan untuk penghapusan;
5. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak disusutkan secara periodik, melainkan dihapuskan pada saat aset tersebut tidak lagi dapat digunakan atau mati.

Metode dan Dasar Penyusutan

1. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) untuk seluruh jenis aset tetap yang disusutkan.
2. Penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan, dan dibebankan satu bulan penuh pada bulan perolehan aset, meskipun aset diperoleh tidak pada awal bulan.
3. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan, tanpa memperhitungkan nilai residu (diasumsikan nihil).
4. Apabila nilai perolehan tidak diketahui, maka digunakan estimasi nilai wajar sebagai dasar penyusutan.
5. Nilai penyusutan dihitung sampai dengan satuan rupiah terdekat.

Formula penyusutan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Perlakuan Akuntansi Penyusutan

1. Beban penyusutan diakui setiap periode dan disajikan dalam Laporan Operasional.
2. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca.
3. Untuk aset tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat renovasi atau overhaul, dilakukan penyesuaian terhadap nilai dasar penyusutan dan sisa masa manfaat aset.

Penyusutan atas Aset Tetap Lama

1. Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya kebijakan penyusutan dicatat dengan dasar nilai tercatat pada akhir tahun sebelum penerapan penyusutan.
2. Koreksi penyusutan atas aset tetap lama:
   - ❖ diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya penyusutan;
   - ❖ dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun penerapan penyusutan sebagai:
     a) penambah akun Akumulasi Penyusutan; dan
     b) pengurang Ekuitas pada Neraca.
3. Apabila suatu aset telah habis masa manfaatnya sebelum tahun penerapan penyusutan, maka koreksi penyusutan hanya dihitung sampai dengan akhir masa manfaat aset tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Akumulasi penyusutan dan nilai tercatat aset tetap disajikan dalam Neraca.
2. Beban penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional.
3. Informasi penyusutan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi:
   a) kebijakan penyusutan yang digunakan;
   b) metode penyusutan;
   c) masa manfaat atau tarif penyusutan;

d) nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai tercatat aset tetap pada awal dan akhir periode.

4.3.19. Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Dana yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Kebijakan ini mengatur sistem akuntansi dan pelaporan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan dana yang tidak melalui RKUD dalam Pemerintah Kota Pariaman meliputi:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Karakteristik Dana yang Tidak Melalui RKUD

1. Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri melalui rekening bendahara sekolah, serta digunakan untuk membiayai operasional nonpersonalia pendidikan dasar.
2. Dana Kapitasi JKN merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP milik Pemerintah Kota Pariaman melalui rekening bendahara dana kapitasi dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN.
3. Dana BOS dan Dana Kapitasi JKN:
   - ❖ tidak disetor ke RKUD;
   - ❖ dikelola langsung oleh Perangkat Daerah /Unit Perangkat Daerah terkait; dan
   - ❖ diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pendapatan yang tidak melalui RKUD diakui pada saat kas diterima di rekening bendahara Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
2. Belanja atau beban diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas atau pada saat timbulnya kewajiban sesuai basis akrual.
3. Aset yang diperoleh dari penggunaan dana yang tidak melalui RKUD diakui sebagai aset Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan akuntansi aset.

Penyajian dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Pendapatan, belanja/beban, dan aset yang berasal dari pengelolaan dana yang tidak melalui RKUD disajikan dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Neraca, untuk menyajikan aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
2. Laporan Operasional, untuk menyajikan pendapatan-LO dan beban;
3. Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas, dan ekuitas akhir;

4. Catatan atas Laporan Keuangan, untuk mengungkapkan informasi naratif dan rincian atas pos-pos laporan keuangan.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, maka Laporan Keuangan Perangkat Daerah paling sedikit menyajikan:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional; dan
3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, maka dalam LKPD paling sedikit disajikan dalam:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pariaman telah menerapkan pengelompokan pendapatan dan belanja daerah dalam proses penganggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024. Selanjutnya, penjabaran APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024. Perubahan atas APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025, dan Perubahan Penjabaran APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp620.440.914.948,89 atau 94,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp655.738.471.097,00. Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp598.455.933.818,44 atau 91,31% dari anggaran sebesar Rp655.447.003.808,00. Surplus Tahun 2025 adalah sebesar Rp21.984.981.130,45, yang setelah diperhitungkan dengan pembiayaan bersih sebesar (Rp291.467.288,46), menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.693.513.841,99.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, berikut disajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah:

1. Realisasi Pendapatan Daerah
   Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp620.440.914.948,89, yang bersumber dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57.459.978.227,89
   b. Pendapatan Transfer sebesar Rp558.980.936.721,00
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp4.000.000.000,00
2. Realisasi Belanja Daerah
   Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp598.455.933.818,44, yang terdiri atas:
   a. Belanja Operasi sebesar Rp485.891.824.192,10
   b. Belanja Modal sebesar Rp24.540.291.383,34
   c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp561.152.287,00
   d. Belanja Transfer sebesar Rp87.462.665.956,00
   Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pariaman mencatat surplus anggaran sebesar Rp21.984.981.130,45.
3. Realisasi Pembiayaan Daerah
   Realisasi pembiayaan bersih Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp291.467.288,46), yang berasal dari:

a. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.644.532.711,54.
b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.936.000.000,00, yang merupakan penyertaan modal daerah pada Tahun Anggaran 2025

.

1. Pendapatan	Anggaran	Realisasi
	Rp655.738.471.097,00	Rp620.440.914.948,89

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp655.738.471.097,00, dengan realisasi sebesar Rp620.440.914.948,89 atau mencapai 94,62% dari target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp644.362.029.673,36, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp23.921.114.724,47) atau 3,71%.

Penurunan realisasi pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Penurunan realisasi Pendapatan Transfer, khususnya pada komponen transfer tertentu yang bersifat non-reguler dan/atau menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai proyeksi awal.
2. Belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa jenis penerimaan, antara lain akibat penyesuaian target, kondisi ekonomi regional, serta faktor administratif dalam proses pemungutan pada Tahun Anggaran 2025.
3. Terdapat pendapatan yang secara perhitungan telah menjadi hak daerah namun pembayarannya belum diterima di RKUD sampai dengan 31 Desember 2025, sehingga tidak dapat diakui sebagai Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2025 sesuai basis pengakuan yang digunakan.

Meskipun terjadi penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024, secara umum kinerja pendapatan Tahun Anggaran 2025 masih menunjukkan tingkat pencapaian yang baik, tercermin dari realisasi yang mencapai lebih dari 94% dari target anggaran, dan tetap mendukung keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Pariaman.

1.1 Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp66.713.656.675,00	Rp57.459.978.227,89

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp66.713.656.675,00, dengan realisasi sebesar Rp57.459.978.227,89 atau mencapai 86,13% dari target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.911.378.642,36, realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp11.548.599.585,53 atau 25,15%.

Peningkatan realisasi PAD tersebut mencerminkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, yang antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaian kebijakan dan peningkatan pengawasan.

2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD pada Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan mempertimbangkan proyeksi peningkatan potensi penerimaan yang belum sepenuhnya terealisasi.
2. Adanya kendala administratif dan teknis dalam proses penagihan dan pemungutan pada beberapa jenis pajak dan retribusi.
3. Faktor kondisi ekonomi regional yang mempengaruhi kemampuan bayar wajib pajak pada periode tertentu.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp57.459.978.227,89 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 25,15% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.911.378.642,36. Meskipun capaian terhadap target anggaran adalah sebesar 86,13%, tren positif ini mencerminkan perbaikan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang guna mendukung peningkatan derajat kemandirian fiskal Pemerintah Kota Pariaman

Rasio kemandirian fiskal Kota Pariaman (perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah) pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 9,26%, meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar 7,67%.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen PAD adalah:

		Anggaran	Realisasi
1.a	**Pendapatan Pajak Daerah**	**Rp24.153.192.141,00**	**Rp22.296.272.876,00**

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp24.153.192.141,00, dengan realisasi sebesar Rp22.296.272.876,00 atau mencapai 92,31% dari target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.396.111.950,00, realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.900.160.926,00 atau 54,88%.

Peningkatan signifikan tersebut terutama dipengaruhi oleh implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mulai Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pariaman memperoleh bagian pendapatan melalui mekanisme opsen atas PKB dan BBNKB yang sebelumnya tidak dicatat sebagai komponen Pajak Daerah kabupaten/kota. Kebijakan ini berdampak

langsung terhadap peningkatan struktur dan komposisi Pendapatan Pajak Daerah dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Selain faktor kebijakan tersebut, peningkatan realisasi Pajak Daerah juga dipengaruhi oleh:

1. Intensifikasi dan pengawasan pemungutan pajak daerah.
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Pembaruan dan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak.

Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target anggaran, capaian sebesar 92,31% menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah telah terealisasi secara relatif optimal dengan mempertimbangkan dinamika implementasi kebijakan opsen pada tahun berjalan. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada Tabel 5.1, termasuk kontribusi penerimaan yang berasal dari opsen PKB dan BBNKB.

Tabel 5.1 Pajak Daerah

No	Akun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame	170.000.000,00	171.989.758,00	101,17	136.464.108,00
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	5.908.220,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.220.000.000,00	1.919.659.704,00	45,49	1.604.473.250,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.099.466.639,00	102,49	5.503.588.857,00
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.690.000.000,00	7.216.172.475,00	93,84	7.145.677.515,00
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.657.674.888,00	6.346.653.200,00	112,17	0,00
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.415.517.253,00	2.542.331.100,00	105,24	0,00
Jumlah		**24.153.192.141,00**	**22.296.272.876,00**	**92,31**	**14.396.111.950,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu selanjutnya disebut PBJT adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu disajikan pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

No	Akun PBJT	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.500.000.000,00	1.630.580.315,00	108,71	1.389.223.652,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	6.000.000.000,00	5.412.999.760,00	90,22	5.623.488.313,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	110.000.000,00	119.488.400,00	108,63	114.340.550,00
4	PBJT-Jasa Parkir	30.000.000,00	3.060.000,00	10,20	1.520.000,00

No	Akun PBJT	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	50.000.000,00	50.044.000,00	100,09	17.105.000,00
Jumlah		**7.690.000.000,00**	**7.216.172.475,00**	**93,84**	**7.145.677.515,00**

1.b Pendapatan Retribusi Daerah **Anggaran Rp12.987.038.800,00** **Realisasi Rp12.111.002.347,00**

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp12.987.038.800,00, dengan realisasi sebesar Rp12.111.002.347,00 atau mencapai 93,25% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.375.406.310,00, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.735.596.037,00 atau 29,18%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah disajikan pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Retribusi Daerah

No	Akun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.300.004.800,00	9.063.248.040,00	109,20	6.939.650.757,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	135.391.000,00	45,13	92.768.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	750.000.000,00	368.517.538,00	49,14	257.827.763,00
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan	500.000.000,00	302.445.000,00	60,49	272.487.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	350.000,00	0,00	0,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	370.000.000,00	54.960.000,00	14,85	4.250.000,00
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	300.000.000,00	96.281.500,00	32,09	114.040.000,00
8	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	40.000.000,00	42.525.000,00	106,31	41.910.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.015.000.000,00	814.526.000,00	80,25	774.206.000,00
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	733.446.000,00	698.510.790,00	95,24	402.599.730,00
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	378.588.000,00	281.908.000,00	74,46	213.600.000,00

No	Akun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	252.339.479,00	84,11	262.067.060,00
Total		**12.987.038.800,00**	**12.111.002.347,00**	**93,25**	**9.375.406.310,00**

Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi capaian antar jenis retribusi, peningkatan realisasi secara agregat sebesar 29,18% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025. Penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan dan/atau penurunan realisasi per jenis retribusi disajikan pada Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Kenaikan dan/atau Penurunan Realisasi Retribusi

No	Akun	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.123.597.283,00	Dilakukannya reklasifikasi atas pendapatan non kapitasi pada BLUD (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan bertambahnya volume pelayanan kesehatan pada masing-masing unit
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	42.623.000,00	adanya penambahan tempat parkir di tepi jalan didepan Cafe – cafe di Kota Pariaman
3	Retribusi Pelayanan Pasar	110.689.775,00	Penataan tata letak pedagang yang lebih baik mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan dan penagihan serta adanya perbaikan kebersihan, keamanan, dan sarana pasar membuat pedagang lebih nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar retribusi
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan	29.958.000,00	tidak terdapat perubahan tarif, penambahan objek retribusi, maupun kebijakan baru, melainkan merupakan hasil optimalisasi penagihan atas kewajiban retribusi yang telah ditetapkan.
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	350.000,00	Pemungutan retribusi tempat penginapan di Pulau Angso Duo masih dalam proses penyempurnaan dasar hukum teknis pelaksanaannya. Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp350.000,00 yang merupakan penerimaan insidentil atas pemanfaatan fasilitas penginapan
6	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	50.710.000,00	Sehubungan dengan di sahkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Januari tahun 2024, terjadi penyesuaian tarif retribusi yang cukup signifikan. Hal ini membuat pemasukan PAD meningkat tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	(17.758.500,00)	kurangnya minat berwisata ke Pantai Pariaman dikarenakan Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat
8	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	615.000,00	1. Terjadi peningkatan jumlah ternak yang dipotong di RPH dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi daging masyarakat, serta peningkatan permintaan pada momen hari besar keagamaan. 2. Dilakukan optimalisasi pengawasan dan penertiban

No	Akun	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Keterangan
			pemotongan agar sesuai regulasi. 3. Ada perbaikan dalam sistem pencatatan dan penagihan retribusi, sehingga penerimaan lebih tertib, transparan, dan meminimalkan potensi kebocoran. Kesimpulannya, bertambahnya volume pemotongan oleh Pengusaha daging di Kota Pariaman, serta adanya perbaikan sistem pencatatan dan penatausahaan penerimaan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga meminimalkan potensi kebocoran.
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	40.320.000,00	Peningkatan hasil pemungutan retribusi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 tidak terlalu signifikan dikarenakan kegiatan event yang dilaksanakan pada destinasi wisata berbayar masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	295.911.060,00	UPTD. Labor Lingkungan melakukan perluasan layanan pengujian karena menerima pengujian sampel dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar bahkan luar Sumbar karena merupakan labor lingkungan pertama berakreditasi A di Sumbar. Meningkatnya penjualan bibit ikan dan indukan pada UPTD. BBI
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	68.308.000,00	Terjadi peningkatan pemasukan PAD tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dikarenakan ada penambahan pedagang musiman di kawasan wisata pantai gandoriah di event Piaman Barayo tahun 2025
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	(9.727.581,00)	Berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Total		**2.735.596.037,00**	

Perubahan penetapan target penerimaan retribusi pada Tahun Anggaran 2025 telah mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya, potensi riil objek retribusi, serta kapasitas Perangkat Daerah pengelola dalam melakukan pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.c	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**Anggaran**	**Realisasi**
		Rp11.365.010.955,00	**Rp11.365.010.955,00**

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp11.365.010.955,00, dengan realisasi sebesar Rp11.365.010.955,00 atau mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.331.512.753,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp33.498.202,00 atau 0,30%.

Pendapatan ini berasal dari bagian laba/dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman pada Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari). Besaran pendapatan yang diterima pada Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 tanggal 21 Maret 2025, berdasarkan surat Bank Nagari nomor SR/109/TRS/CB/03-2025 tanggal 21 Maret 2025 Perihal Penyampaian Bukti Pemindahbukuan Deviden Tahun Buku 2024 sebesar Rp11.365.010.955,00 disajikan pada tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Akun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	11.331.512.753,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.365.010.955,00	11.365.010.955,00	100,00	0,00
Jumlah		**11.365.010.955,00**	**11.365.010.955,00**	**100,00**	**11.331.512.753,00**

Reklasifikasi dari akun BUMN ke BUMD mulai Tahun Anggaran 2025 sesuai penyesuaian kodefikasi.

1.d Lain-lain PAD yang sah

Anggaran Rp18.208.414.779,00 **Realisasi Rp11.687.692.049,89**

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp18.208.414.779,00, dengan realisasi sebesar Rp11.687.692.049,89 atau mencapai 64,19% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.808.347.629,36, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp879.344.420,53 atau 8,14%. Rincian anggaran dan realisasi disajikan pada Tabel 5.6. berikut.

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

No	Akun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.000.000.000,00	41.081.800,00	4,11	155.882.400,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	470.213.259,00	23,51	693.433.441,25
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	181.250.000,00	7,25	109.375.000,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	1.610.689,00	0,00	2.478.422.123,89
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.250.000.000,00	2.251.874.318,00	100,08	0,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	468.732.052,00	452.309.248,00	96,50	448.732.052,00

No	Akun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	25.779.453,00	1.460.806,00	5,67	25.779.453,00
8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	160.291,00	74.920,00	46,74	160.291,00
9	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	827.151,00
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	86.106.951,00	120.948.083,00	140,46	45.747.193,00
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.403.500,00	756.640,00	53,91	1.403.500,00
12	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.896.353,00	5.557.560,00	191,88	2.896.353,00
13	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	71.563.151,00	64.954.500,00	90,77	0,00
14	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	37.600,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	1.308.760,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	712.500,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	930.910.411,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	962.812.563,89	0,00	121.290.719,22
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	51.225.405,00
20	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.018.316.917,00	6.755.750.063,00	84,25	6.669.901.287,00
21	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	847.545.700,00	377.000.000,00	44,48	0,00
22	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Jumlah		**18.208.414.779,00**	**11.687.692.049,89**	**64,19**	**10.808.347.629,36**

Tabel 5.7 Lain-lain PAD yang sah Tahun 2025

No	Akun	Keterangan
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	Penjualan atas BMD yang masih bernilai ekonomis pada SD dan SMP, serta pada beberapa Perangkat Daerah
2	Jasa Giro	➢ Pendapatan Jasa Giro Rekening Kas Daerah ➢ Rekening atas nama jabatan di Perangkat Daerah ➢ Rekening BOK dan dana BOS
3	Pendapatan Bunga	Pendapatan dari Bunga Deposito Bank Nagari
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Setoran pengembalian temuan pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Setoran pengembalian yang diketahui peruntukkannya
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan oleh pihak ketiga
7	Pendapatan BLUD	Pendapatan atas jasa layanan kesehatan (kapitasi JKN)

1.2 Pendapatan Transfer	Anggaran	Realisasi
	Rp585.024.814.422,00	**Rp558.980.936.721,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp585.024.814.422,00, dengan realisasi sebesar Rp558.980.936.721,00 atau mencapai 95,55% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp598.450.651.031,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp39.469.714.310,00) atau 6,60%.

Realisasi sebesar 95,55% menunjukkan bahwa secara umum penerimaan transfer telah terealisasi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam dokumen APBD dan peraturan perundang-undangan terkait transfer ke daerah.

Penurunan realisasi dibandingkan Tahun Anggaran 2024 terutama dipengaruhi oleh:

1. Penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sesuai kebijakan fiskal nasional Tahun 2025.
2. Perubahan komposisi dan/atau formula penghitungan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).
3. Penyaluran berbasis kinerja dan pemenuhan persyaratan tertentu pada beberapa jenis transfer.

Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Anggaran	Realisasi
	Rp493.638.229.358,00	**Rp482.035.816.658,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp493.638.229.358,00, dengan realisasi sebesar

Rp482.035.816.658,00 atau mencapai 97,65% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp523.642.264.998,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp41.606.448.340,00) atau 7,95%.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Anggaran	Realisasi
a)	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**Rp8.463.920.358,00**	**Rp6.892.265.406,00**

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp8.463.920.358,00, dengan realisasi sebesar Rp6.892.265.406,00 atau mencapai 81,43% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.320.110.669,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp572.154.737,00 atau 9,05%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8 Bagi Hasil Pajak

No	Akun	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH PBB	1.065.519.000,00	1.180.236.406,00	110,77	2.241.837.669,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.352.623.358,00	5.431.899.000,00	73,88	3.903.193.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	232.370.000,00	0,00	134.640.000,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	45.778.000,00	47.760.000,00	104,33	40.440.000,00
Jumlah		**8.463.920.358,00**	**6.892.265.406,00**	**81,43**	**6.320.110.669,00**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2025 melampaui target yang telah dianggarkan. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, penerimaan dari komponen ini mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh variasi alokasi dan penyaluran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta kemungkinan perbedaan waktu penyaluran antar tahun anggaran
- Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Ketidaktercapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak nasional serta mekanisme penghitungan dan distribusi Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat, yang berada di luar kewenangan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, secara komparatif realisasi komponen ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tidak dianggarkan pada Tahun 2025, namun terdapat realisasi penerimaan. Penerimaan ini bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada perhitungan alokasi oleh Pemerintah Pusat berdasarkan realisasi penerimaan pajak nasional, sehingga tidak dapat diproyeksikan secara pasti pada saat penyusunan anggaran.

❖ Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melampaui target yang ditetapkan serta menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut mengikuti alokasi dan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam **Anggaran Rp3.256.212.000,00** **Realisasi Rp3.267.262.000,00**

Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp3.256.212.000,00, dengan realisasi sebesar Rp3.267.262.000,00 atau 100,34% dari anggaran. Realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp11.050.000,00, yang terutama disebabkan oleh penerimaan DBH Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang melebihi estimasi serta realisasi DBH Mineral dan Batubara–Royalty yang tidak dianggarkan pada awal tahun.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.977.692.000,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp2.710.430.000,00) atau 45,34%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

❖ Penurunan signifikan pada DBH Sawit sebesar Rp2.332.894.000,00.

❖ Penurunan DBH Mineral dan Batubara–Landrent sebesar Rp537.164.200,00.

❖ Penurunan DBH Perikanan sebesar Rp270.165.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel 5.9 berikut.

Tabel 5.9 Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	206.581.000,00	206.581.000,00	100,00	131.757.000
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	456.069.000,00	91.213.800,00	20,00	628.378.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	0,00	368.066.200,00	0,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	30.343.000,00	38.182.000,00	125,83	51.279.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	938.585.000,00	938.585.000,00	100,00	1.208.750.000
6	DBH Sawit	1.624.634.000,00	1.624.634.000,00	100,00	3.957.528.000
Jumlah		**3.256.212.000,00**	**3.267.262.000,00**	**100,34**	**5.977.692.000,00**

c) Dana Alokasi Umum **Anggaran Rp412.300.209.000,00** **Realisasi Rp407.108.094.546,00**

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp412.300.209.000,00, dengan realisasi sebesar Rp407.108.094.546,00 atau

98,74% dari anggaran. Realisasi tersebut lebih rendah dari anggaran sebesar Rp5.192.114.454,00. Selisih tersebut merupakan penyesuaian penyaluran dari Pemerintah Pusat berdasarkan kebijakan transfer ke daerah serta mekanisme rekonsiliasi penyaluran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp417.506.738.000,00, realisasi DAU Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.398.643.454,00 atau 2,49%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak dialokasikannya kembali komponen DAU Peruntukan pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terdapat pada Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, struktur DAU Tahun 2025 sepenuhnya bersifat block grant, sesuai kebijakan transfer fiskal Pemerintah Pusat.

		Anggaran	Realisasi
d)	**Dana Alokasi Khusus**	**Rp69.617.888.000,00**	**Rp64.768.194.706,00**

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp69.617.888.000,00, dengan realisasi sebesar Rp64.768.194.706,00 atau 93,03% dari anggaran.

Realisasi tersebut lebih rendah dari target sebesar Rp4.849.693.294,00, yang terutama dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran berbasis kinerja dan pemenuhan persyaratan dokumen pada masing-masing bidang DAK sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp93.837.724.329,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp29.069.529.623,00) atau 30,98%.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan signifikan pada DAK Fisik, dari Rp34.147.923.493,00 pada Tahun 2024 menjadi Rp2.188.772.651,00 pada Tahun 2025.
- Relatif stabilnya DAK Non Fisik, yang terealisasi sebesar Rp62.579.422.055,00 atau 92,85% dari anggaran.

Perubahan ini mencerminkan kebijakan alokasi nasional dan penetapan bidang prioritas DAK oleh Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025. Rincian DAK disajikan pada Tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.217.951.000,00	2.188.772.651,00	98,68	34.147.923.493,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	67.399.937.000,00	62.579.422.055,00	92,85	59.689.800.836,00
Jumlah		**69.617.888.000,00**	**64.768.194.706,00**	**93,03**	**93.837.724.329,00**

1) DAK – Fisik	Anggaran	Realisasi
	Rp2.217.951.000,00	Rp2.188.772.651,00

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2.217.951.000,00, dengan realisasi sebesar Rp2.188.772.651,00 atau 98,68% dari anggaran. Realisasi tersebut menunjukkan tingkat serapan yang optimal terhadap pagu yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Sisa anggaran sebesar Rp29.178.349,00 merupakan selisih antara pagu dan realisasi kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, yang disebabkan oleh penyesuaian nilai kontrak dan capaian output kegiatan sesuai ketentuan penyaluran DAK berbasis kinerja.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.147.923.493,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp31.959.150.842,00) atau 93,59%. Penurunan signifikan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan alokasi DAK Fisik secara nasional pada Tahun Anggaran 2025, dimana sebagian besar bidang penugasan dan penguatan sistem yang memperoleh alokasi pada Tahun Anggaran 2024 tidak kembali dialokasikan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, perbedaan realisasi antar tahun lebih dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan prioritas nasional, bukan oleh penurunan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Pariaman. Rincian DAK - Fisik disajikan pada tabel 5.11 berikut.

Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	349.970.000,00	344.366.500,00	98,40	258.384.898,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	750.570.000,00	743.773.763,00	99,09	1.320.523.106,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	199.770.309,00	0,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	909.909.000,00	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SKB	207.502.000,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	878.811.900,00
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	371.700.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.386.911.300,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	0,00	900.862.079,00	0,00	25.931.592.289,00
Jumlah		**2.217.951.000,00**	**2.188.772.651,00**	**98,68**	**34.147.923.493,00**

2) DAK – Non Fisik | **Anggaran** | **Realisasi**
Rp67.399.937.000,00 | **Rp62.579.422.055,00**

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp67.399.937.000,00, dengan realisasi sebesar Rp62.579.422.055,00 atau 92,85% dari anggaran. Realisasi tersebut belum mencapai target sebesar Rp4.820.514.945,00, yang terutama dipengaruhi oleh tidak terealisasinya beberapa komponen DAK Non Fisik serta mekanisme penyaluran berbasis persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.689.800.836,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.889.621.219,00 atau 4,84%. Realisasi yang melebihi pagu pada beberapa komponen (seperti BOS Reguler) serta realisasi pada komponen yang tidak dianggarkan pada awal tahun merupakan hasil penyesuaian penyaluran berdasarkan data penerima dan verifikasi pusat, serta telah ditindaklanjuti melalui mekanisme penyesuaian APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian anggaran dan realisasi disajikan pada Tabel 5.12 berikut.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	13.812.100.000,00	14.453.822.000,00	104,65	14.753.123.738,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	646.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.494.122.000,00	31.078.288.748,00	90,10	28.605.817.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	355.500.000,00	137.572.500,00	38,70	793.795.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.890.600.000,00	0,00	0,00	1.948.100.911,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.295.000.000,00	0,00	0,00	1.167.348.950,00
7	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.347.288.000,00	2.247.511.750,00	95,75	11.098.364.064,00
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	403.692.750,00	79,83	329.712.500,00
10	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	155.040.000,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	1.885.480.860,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	1.293.124.250,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.908.697.000,00	5.403.866.866,00	91,46	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	371.410.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.117.990.000,00	4.649.612.331,00	90,85	0,00
16	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	371.410.000,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	155.040.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	0,00	0,00	0,00	599.856.250,00
20	Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	393.682.423,00
Jumlah		**67.399.937.000,00**	**62.579.422.055,00**	**92,85**	**59.689.800.836,00**

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran **Realisasi**

Rp47.990.832.000,00 **Rp47.908.954.400,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp47.990.832.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.908.954.400,00 atau 99,83% dari anggaran. Dengan demikian terdapat selisih kurang realisasi terhadap anggaran sebesar Rp81.877.600,00 atau 0,17%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.844.428.000,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.064.526.400,00 atau 14,49%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh diterimanya Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2025, yang pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat alokasi maupun realisasinya. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No	Jenis Penerimaan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Dana Desa	41.027.669.000	40.945.791.400	99,80	41.844.428.000
2	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.963.163.000,00	6.963.163.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**47.990.832.000,00**	**47.908.954.400,00**	99,83	**41.844.428.000,00**

1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran **Rp43.165.753.064,00** **Realisasi** **Rp28.391.165.663,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan bagi hasil yang bersumber dari pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp43.165.753.064,00 dengan realisasi mencapai Rp28.391.165.663,00 atau sebesar 65,77% dari target anggaran. Seluruh realisasi tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, terdapat penurunan realisasi sebesar (Rp4.572.792.370,00) atau 13,87% dari realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp32.963.958.033,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika penerimaan pajak di tingkat provinsi yang menjadi basis pembagian, serta penyesuaian penyaluran bagi hasil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan alokasi tahun berjalan. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel 5.14 berikut.

Tabel 5.14 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Tanggal	Nomor Keputusan	Keterangan	PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	Pajak Rokok	Jumlah
1	05/03/2025	Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025	DBH Kurang Salur Tahun 2024	**2.421.608.824**	**874.295.597**	**8.539.408.766**	**53.233.889**		**11.888.547.076**
2	05/05/2025	Nomor 971.1/014/PPD-Bapenda/5/2025	DBH Pajak Rokok Desember 2024					**1.626.979.036**	**1.626.979.036**
3	05/05/2025	Nomor 971.1/015/PPD-Bapenda/5/2025	DBH Pajak Rokok TW I					**2.730.368.553**	**2.730.368.553**
1	03/06/2025	Nomor 971.1/021/PPD-Bapenda/2025	DBH TW I	**58.803.128**	**54.385.499**	**3.399.199.272**	**516.193**		**3.512.904.092**
4	04/08/2025	Nomor 971.1/030/PPD-Bapenda/8/2025	DBH Pajak Rokok TW II					**2.437.183.745**	**2.437.183.745**
5	24/10/2025	Nomor 971.1/40/PPD-Bapenda/10/2025	DBH Pajak Rokok TW III					**2.609.283.888**	**2.609.283.888**
6	24/12/2025	Nomor 971.1/62/PPD-Bapenda/2025	DBH TW II, III, IV			**1.908.159.189**	**1.191.233**		**1.909.350.422**
7	23/12/2025	Nomor 971.1/61/PPD-Bapenda/2025	DBH Pajak Rokok TW IV					**1.676.548.851**	**1.676.548.851**
Jumlah				**2.480.411.952**	**928.681.096**	**13.846.767.227**	**54.941.315**	**11.080.364.073**	**28.391.165.663**

1. Bantuan Keuangan	Anggaran	Realisasi
	Rp230.000.000,00	Rp645.000.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pariaman menganggarkan Pendapatan Transfer berupa Bantuan Keuangan sebesar Rp230.000.000,00 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp645.000.000,00 atau 280,43% dari anggaran. Kelebihan realisasi tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan bantuan keuangan bersifat khusus untuk penanggulangan bencana alam yang diterima setelah penetapan APBD, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak dianggarkan pada awal tahun.

Bantuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan pemberi bantuan dan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, terutama dalam rangka penanganan dampak bencana alam di wilayah Kota Pariaman.. Rincian Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel 5.15 berikut.

Tabel 5.15 Bantuan Keuangan

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provins	230.000.000,00	445.000.000,00	193,48	0,00
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**230.000.000,00**	**645.000.000,00**	280,43	**0,00**

1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran	Realisasi
	Rp4.000.000.000,00	Rp4.000.000.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pariaman menerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanganan bencana alam berupa banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kota Pariaman. Berdasarkan Surat Sekretaris Presiden Nomor B-08/KSN/SP/KK.14.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025, bantuan tersebut telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Pariaman pada tanggal 12 Desember 2025 melalui Bank Nagari Nomor Rekening 05000101000395. Bantuan dimaksud merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersifat khusus (*Earmarked*) untuk mendukung percepatan penanganan dampak bencana alam.

2. Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp655.447.003.808,00	Rp598.455.933.818,44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp655.447.003.808,00 dengan realisasi sebesar Rp598.455.933.818,44 atau 91,31% dari anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp56.991.069.989,56 atau 8,69% yang tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp648.100.984.541,33, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp49.645.050.722,89) atau 7,66%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 5.16 berikut.

Tabel 5.16 Belanja Daerah

No.	Jenis Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	526.370.469.695,89	485.891.824.192,10	92,31	501.308.593.783,33
2	Belanja Modal	34.814.704.203,00	24.540.291.383,34	70,49	58.680.468.559,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.230.000.000,00	561.152.287,00	10,73	120.495.000,00
4	Belanja Transfer	89.031.829.909,11	87.462.665.956,00	98,24	87.991.427.199,00
Jumlah		**655.447.003.808,00**	**598.455.933.818,44**	91,31	**648.100.984.541,33**

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Belanja Operasi

Anggaran **Rp526.370.469.695,89**

Realisasi **Rp485.891.824.192,10**

Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp526.370.469.695,89 dan terealisasi sebesar Rp485.891.824.192,10 atau 92,31% dari anggaran. dengan demikian terdapat sisa anggaran Belanja Operasi sebesar Rp40.478.645.503,79 atau 7,69% yang tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp501.308.593.783,33, realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp15.416.769.591,23) atau 3,08%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 5.17 berikut.

Tabel 5.17 Belanja Operasi

No	Akun Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	338.992.439.397,14	317.424.790.284,00	93,64	314.988.384.111,00
2	Belanja Barang dan Jasa	179.810.154.298,75	160.910.917.798,10	89,49	164.059.422.975,00
3	Belanja Hibah	7.567.876.000,00	7.556.116.110,00	99,84	21.650.244.697,33
4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	610.542.000,00
Jumlah		**526.370.469.695,89**	**485.891.824.192,10**	**92,31**	**501.308.593.783,33**

1) Belanja Pegawai

Anggaran **Rp338.992.439.397,14**

Realisasi **Rp317.424.790.284,00**

Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp338.992.439.397,14 dengan realisasi sebesar Rp317.424.790.284,00 atau 93,64% dari anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.567.649.113,14 atau 6,36% yang tidak terealisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2025. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp314.988.384.111,00, realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.436.406.173,00 atau 0,77%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 5.18 berikut.

Tabel 5.18 Belanja Pegawai

No	Akun Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	203.552.023.257,20	193.813.872.225,00	95,22	180.172.606.765,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	121.127.480.178,14	110.015.269.428,00	90,83	77.378.356.727,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	44.229.309.969,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.302.022.773,80	5.910.156.687,00	93,78	6.165.974.726,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	382.660.236,00	327.495.500,00	85,58	114.876.312,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	413.097.600,00	385.880.000,00	93,41	379.800.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	17.847.875,00
8	Belanja Pegawai BLUD	7.215.155.352,00	6.972.116.444,00	96,63	6.529.611.737,00
Jumlah		**338.992.439.397,14**	**317.424.790.284,00**	**93,64**	**314.988.384.111,00**

Rincian Belanja Pegawai per Perangkat Daerah disajikan pada tabel 5.19 berikut.

Tabel 5.19 Belanja Pegawai per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp.)	Realisasi Tahun 2025 (Rp.)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	123.152.456.875,37	113.087.275.492,00	91,83	118.048.329.361,00
2	Dinas Kesehatan	75.493.420.902,83	73.188.773.860,00	96,95	72.700.731.564,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	6.373.842.811,00	5.773.281.494,00	90,58	5.617.835.360,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	8.849.074.428,00	7.986.298.658,00	90,25	7.362.710.073,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9.598.171.041,06	8.712.306.162,00	90,77	5.404.353.579,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.023.066.156,97	3.305.949.795,00	82,17	2.778.521.617,00
7	Dinas Sosial	2.643.140.321,00	2.423.291.158,00	91,68	2.372.687.604,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.466.321.546,00	3.223.804.936,00	93,00	3.024.969.406,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.271.612.397,69	3.152.302.090,00	96,35	2.902.326.034,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp.)	Realisasi Tahun 2025 (Rp.)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp.)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.911.709.153,29	2.781.419.000,00	95,53	2.946.585.588,00
11	Dinas Perhubungan	5.165.878.157,00	4.733.559.448,00	91,63	3.614.032.266,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.682.631.916,00	3.112.758.004,00	84,53	2.895.131.252,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	4.887.575.310,00	4.667.915.690,00	95,51	4.388.877.127,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	4.144.069.754,00	3.841.919.703,00	92,71	3.645.534.094,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.373.605.478,00	4.129.944.414,00	94,43	3.575.652.866,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	2.318.161.926,91	2.291.898.181,00	98,87	2.402.408.495,00
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	13.580.907.699,98	13.057.579.936,00	96,15	12.511.787.417,00
18	Sekretariat Daerah	10.398.429.797,89	10.077.387.188,00	96,91	9.972.768.819,00
19	Sekretariat DPRD	9.721.575.600,06	9.246.965.117,00	95,12	9.181.091.996,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	2.373.768.141,00	2.321.168.932,00	97,78	2.183.370.990,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	10.169.886.508,00	10.005.047.346,00	98,38	10.017.712.649,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.537.909.804,00	2.418.828.191,00	95,31	2.395.564.233,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	1.764.642.247,00	1.659.961.829,00	94,07	1.610.523.755,00
24	Inspektorat	7.217.198.545,00	7.110.403.008,00	98,52	6.505.152.749,00
25	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.183.933.975,87	3.621.596.974,00	86,56	3.814.444.990,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	7.299.310.670,48	6.444.694.621,00	88,29	8.083.182.324,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.576.952.039,00	3.307.669.518,00	92,47	3.322.286.971,00
28	Kantor Kesbang Pol	1.813.186.193,74	1.740.789.539,00	96,01	1.709.810.932,00
Jumlah		**338.992.439.397,14**	**317.424.790.284,00**	**93,64**	**314.988.384.111,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

2)	**Belanja Barang dan Jasa**	**Anggaran**	**Realisasi**
		Rp179.810.154.298,75	**Rp160.910.917.798,10**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp179.810.154.298,75 dengan realisasi sebesar Rp160.910.917.798,10 atau 89,49% dari anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.899.236.500,65 atau 10,51% yang tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp164.059.422.975,00, realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

mengalami penurunan sebesar (Rp3.148.505.176,90) atau 1,92%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan riil belanja pada perangkat daerah serta efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan akun belanja serta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 5.20 berikut.

Tabel 5.20 Belanja Barang dan Jasa

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	33.096.229.296,75	28.607.229.160,00	86,44	32.700.985.961,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	693.500.000,00	670.567.232,00	96,69	760.300.284,00
3	Belanja Jasa Kantor	53.431.227.415,00	47.413.082.055,00	88,74	54.817.346.837,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.956.678.545,00	14.569.338.686,56	97,41	9.982.674.554,00
5	Belanja Sewa Tanah	15.000.000,00	13.945.000,00	92,97	32.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.753.200.000,00	2.097.498.700,00	76,18	1.070.227.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.671.375.000,00	1.937.317.000,00	72,52	1.917.991.676,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	164.000.000,00	160.570.000,00	97,91	79.000.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	182.800.000,00	170.312.060,00	93,17	223.527.740,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	55.000.000,00	49.500.000,00	90,00	0,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	127.800.000,00	125.978.000,00	98,57	16.900.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.668.000,00	102.029.452,00	67,72	99.815.000,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	39.238.000,00	39.236.065,00	100,00	68.496.950,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.988.806.860,00	7.363.036.596,00	92,17	5.031.421.267,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.692.672.165,00	4.577.005.825,54	97,54	3.756.589.886,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.711.610.282,00	1.621.934.635,00	94,76	1.413.331.933,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.551.129.230,00	16.393.034.640,00	83,85	18.776.632.740,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.336.725.000,00	3.202.838.000,00	95,99	6.415.218.776,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.924.798.802,00	11.657.301.590,00	90,19	5.658.682.191,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	10.446.477.615,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	9.972.087.886,00	9.568.647.197,00	95,95	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.299.826.461,00	4.068.036.599,00	94,61	4.481.320.697,00

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.995.781.356,00	6.502.479.305,00	92,95	6.310.481.868,00
Jumlah		**179.810.154.298,75**	**160.910.917.798,10**	**89,49**	**164.059.422.975,00**

Rincian Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah disajikan pada tabel 5.21 berikut.

Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	21.208.080.567,00	19.215.100.605,00	90,60	21.849.087.224,00
2	Dinas Kesehatan	34.935.497.093,00	33.568.713.664,00	96,09	29.784.019.613,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	10.120.707.966,75	9.548.311.220,00	94,34	13.766.313.874,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	12.700.449.318,00	10.563.615.483,00	83,18	14.823.490.577,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.033.737.640,00	4.910.598.771,56	97,55	6.903.097.222,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.743.458.852,00	1.534.521.870,00	88,02	2.039.282.915,00
7	Dinas Sosial	1.740.808.204,00	1.212.285.499,00	69,64	1.320.917.211,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	4.750.800.643,00	4.302.450.854,00	90,56	5.246.684.454,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	612.135.878,00	569.778.964,00	93,08	744.864.543,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.550.670.558,00	2.023.443.932,00	79,33	2.565.404.578,00
11	Dinas Perhubungan	3.326.568.488,00	3.169.922.504,00	95,29	3.683.638.114,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.947.813.902,00	3.761.771.057,00	95,29	3.673.230.524,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	4.451.209.458,00	3.927.832.233,00	88,24	4.682.803.506,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	1.361.377.100,00	976.815.759,00	71,75	1.200.866.646,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.567.778.237,00	2.336.575.909,00	91,00	2.857.478.383,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	1.314.399.875,00	970.297.792,00	73,82	725.179.124,00
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	4.572.726.035,00	3.716.475.780,00	81,27	3.458.113.131,00
18	Sekretariat Daerah	23.049.612.223,00	20.720.491.118,08	89,90	11.068.169.381,00
19	Sekretariat Dprd	18.326.613.211,00	14.999.954.873,00	81,85	16.075.916.339,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	309.860.206,00	294.608.784,00	95,08	233.084.841,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	4.619.472.373,00	4.323.262.669,00	93,59	4.379.933.655,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
22	Kecamatan Pariaman Selatan	302.546.400,00	283.574.339,00	93,73	205.038.624,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	288.840.507,00	261.053.497,00	90,38	224.692.313,00
24	Inspektorat	1.370.003.974,00	1.291.824.425,00	94,29	634.040.528,00
25	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.733.871.567,00	1.327.659.522,00	76,57	1.981.079.069,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	9.155.509.658,00	8.029.574.898,46	87,70	7.203.004.714,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.135.695.970,00	1.837.203.787,00	86,02	1.385.739.490,00
28	Kantor Kesbang Pol	1.579.908.395,00	1.233.197.989,00	78,06	1.344.252.382,00
Jumlah		**179.810.154.298,75**	**160.910.917.798,10**	**89,49**	**164.059.422.975,00**

Rincian per objek dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

3) Belanja Hibah

Anggaran	Realisasi
Rp7.567.876.000,00	**Rp7.556.116.110,00**

Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp7.567.876.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.556.116.110,00 atau 99,84% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp14.094.128.587,33) atau 65,10% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.650.244.697,33.

Penurunan yang signifikan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025, yang pada Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp13.961.261.265,00. Selain itu, tidak terdapat realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.115.449.861,00. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22 Belanja Hibah

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	13.961.261.265,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.335.600.000,00	3.328.605.110,00	99,79	200.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	3.115.449.861,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	1.225.000.000,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.346.500.000,00	2.341.735.000,00	99,80	2.273.281.238,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	925.776.000,00	925.776.000,00	100,00	875.252.333,33
	Jumlah	**7.567.876.000,00**	**7.556.116.110,00**	**99,84**	**21.650.244.697,33**

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disajikan pada tabel 5.23 berikut.

Tabel 5.23 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025

No	Uraian	No Keputusan	Nilai Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
1	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 100/400.7.23/2025 tentang Pemberian Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 254/400/2025 tentang Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	210.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat
3	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 90/420/2025 tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2025	600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 145/900/2025 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : Nomor :400-5.8/948/N.PHD./DIKPORA/IV/ 2025 dan Nomor : 037-0316-A/NPHD/IV-2025 tentang Pelaksanaan Hibah Kawartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025	150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	3.178.605.110,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga

No	Uraian	No Keputusan	Nilai Realisasi (Rp)	Perangkat Daerah
	Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler		
6	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	Hibah Bantuan Operasional Sekolah kepada Satuan Pendidikan Swasta	2.341.735.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Perwako No 20 Tahun 2024 tanggal 30 Desember Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	925.776.000,00	Kantor KesbangPol
Total			**7.556.116.110,00**	

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman disajikan pada Tabel 5.24 berikut. Besaran bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024.

Tabel 5.24 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN)	120.024.000,00	120.024.000,00
2	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Bulan Bintang (PBB)	68.706.000,00	68.706.000,00
3	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Demokrat	145.944.000,00	145.944.000,00
4	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	70.002.000,00	70.002.000,00
5	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya (Golkar)	147.276.000,00	147.276.000,00
6	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Nasional Demokrat (NasDem)	86.058.000,00	86.058.000,00
7	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	127.026.000,00	127.026.000,00
8	Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	160.740.000,00	160.740.000,00
Total		**925.776.000,00**	**925.776.000,00**

Rincian Belanja Hibah Dana BOSP dengan anggaran sebesar Rp2.346.500.000,00 realisasi sebesar Rp2.341.735.000,00 atau 99,79% terdiri dari BOS SD Swasta sebesar Rp1.868.317.000, BOS SMP Swasta sebesar Rp473.418.000,00. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP merupakan data realisasi non RKUD berdasarkan Pendapatan Transfer langsung dari Pemerintah Pusat ke sekolah penerima dana BOSP. Rincian Belanja Hibah Belanja Hibah Dana BOSP disajikan pada **Lampiran 5f.**

2.2 Belanja Modal	Anggaran	Realisasi
	Rp34.814.704.203,00	Rp24.540.291.383,34

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp34.814.704.203,00 dengan realisasi sebesar Rp24.540.291.383,34 atau 70,49% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp34.140.177.175,66) atau 58,18% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.680.468.559,00.
Penurunan realisasi yang signifikan ini terutama disebabkan oleh tidak terealisasinya Belanja Modal Tanah sebesar Rp8.000.000.000,00 yang direncanakan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat, serta penurunan yang substansial pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan akibat berkurangnya proyek infrastruktur berskala besar dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Seluruh realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp24.540.291.383,34 telah dicatat sebagai penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2025 sesuai dengan kebijakan akuntansi dan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman. Rincian perubahan nilai aset tetap disajikan pada Catatan B.3 mengenai Aset Tetap.

1) Belanja Modal Tanah	Anggaran	Realisasi
	Rp8.000.000.000,00	Rp0,00

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%. Tidak terealisasinya Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh belum selesainya proses pengadaan tanah yang direncanakan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 juga sebesar Rp0,00.

Proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Rakyat pada Tahun Anggaran 2025 tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan akibat kendala permasalahan lahan. Anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 tidak terealisasi dan tidak menghasilkan SiLPA yang dapat digunakan langsung, melainkan menjadi bagian dari sisa APBD yang diperhitungkan dalam SiLPA Tahun Anggaran 2025. Proses pengadaan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi
	Rp12.284.428.388,00	Rp10.884.258.129,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp12.284.428.388,00 dengan realisasi sebesar Rp10.884.258.129,00 atau 88,60% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp654.346.080,00 atau 6,40% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.229.912.049,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel 5.25 berikut.

Tabel 5.25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	179.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	700.000.000,00	0,00	0,00	2.025.280.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	800.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor	852.106.380,00	794.447.093,00	93,23	729.379.750,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.775.918.800,00	2.467.421.922,00	88,89	702.374.015,00
6	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	187.000.000,00	129.829.500,00	69,43	0,00
7	Belanja Modal Alat Komunikasi	60.000.000,00	59.900.000,00	99,83	0,00
8	Belanja Modal Peralatan Pemancar	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran	163.179.200,00	159.844.078,00	97,96	145.750.502,00
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	2.817.317.000,00
11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	30.000.000,00	0,00	0,00	341.421.100,00
12	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	400.000.000,00	398.490.000,00	99,62	0,00
13	Belanja Modal Komputer Unit	1.422.895.440,00	1.399.490.722,00	98,36	753.501.009,00
14	Belanja Modal Peralatan Komputer	337.513.500,00	316.410.067,00	93,75	318.547.677,00
15	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
16	Belanja Modal Alat Pelindung	1.621.895,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	915.187.000,00	900.365.475,00	98,38	34.018.610,00
18	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.400.500.000,00	1.384.697.555,00	98,87	129.075.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71.000.000,00	70.935.000,00	99,91	0,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	766.620.900,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	984.521.164,00	1.078.017.320,00	109,50	0,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.932.385.009,00	1.673.809.397,00	86,62	1.276.826.486,00
Jumlah		**12.284.428.388,00**	**10.884.258.129,00**	**88,60**	**10.229.912.049,00**

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah disajikan pada tabel 5.26 berikut.

Tabel 5.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	3.000.573.164,00	2.830.947.145,00	94,35	1.877.995.915,00
2	Dinas Kesehatan	2.153.656.209,00	1.899.987.307,00	88,22	5.461.387.488,00
3	Dinas Pekerjaan Umum,	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	64.305.600,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
	Penataan Ruang Dan Pertanahan				
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	884.530.000,00	160.361.668,00	18,13	1.568.903.500,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	69.055.000,00	68.813.250,00	99,65	12.426.925,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.900.000,00	56.354.110,00	99,04	14.652.000,00
7	Dinas Sosial	36.950.380,00	34.400.000,00	93,10	67.500.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	40.400.000,00	28.150.000,00	69,68	16.600.000,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	64.900.140,00	58.920.960,00	90,79	0,00
11	Dinas Perhubungan	1.400.500.000,00	1.384.697.555,00	98,87	157.098.000,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	19.049.000,00	19.049.000,00	100,00	0,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	74.000.000,00	59.850.000,00	80,88	0,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	97.144.000,00	97.042.000,00	99,90	25.553.934,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	53.941.000,00	47.800.000,00	88,62	38.750.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	201.848.750,00
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	35.878.300,00	32.878.300,00	91,64	50.168.827,00
18	Sekretariat Daerah	2.587.860.300,00	2.433.002.099,00	94,02	197.966.500,00
19	Sekretariat Dprd	1.239.321.895,00	1.214.265.922,00	97,98	149.300.000,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	7.500.000,00	6.438.000,00	85,84	7.881.000,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	131.149.000,00	127.599.000,00	97,29	195.083.000,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	6.000.000,00	5.962.500,00	99,38	8.200.000,00
24	Inspektorat	158.500.000,00	155.517.417,00	98,12	0,00
25	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	58.750.000,00	55.055.096,00	93,71	2.185.000,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	30.000.000,00	29.296.800,00	97,66	85.650.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00
28	Kantor Kesbang Pol	1.670.000,00	1.670.000,00	100,00	6.255.610,00
	Jumlah	**12.284.428.388,00**	**10.884.258.129,00**	**88,60**	**10.229.912.049,00**

3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran	Realisasi
		Rp5.477.909.000,00	Rp4.710.081.248,06

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.477.909.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.710.081.248,06 atau 85,98%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp22.462.215.562,94) atau 82,67% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.172.296.811,00.

Penurunan yang sangat signifikan pada komponen ini terutama disebabkan oleh selesainya pembangunan fasilitas berskala besar pada Tahun Anggaran 2024, sehingga Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat proyek pembangunan gedung baru dengan nilai sebanding. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel 5.27 berikut.

Tabel 5.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.352.909.000,00	4.689.281.248,06	87,60	26.505.158.749,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	493.946.000
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	173.192.062
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	125.000.000,00	20.800.000,00	16,64	0,00
Jumlah		**5.477.909.000,00**	**4.710.081.248,06**	**85,98**	**27.172.296.811,00**

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah disajikan pada tabel 5.28 berikut.

Tabel 5.28 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	2.666.000.000,00	2.638.233.641,55	98,96	2.549.010.392,00
2	Dinas Kesehatan	1.383.909.000,00	1.158.053.999,00	83,68	21.958.638.121,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	1.220.314.674,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	0,00	0,00	294.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	450.000.000,00	438.786.084,00	97,51	0,00
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	772.069.624,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	49.620.000,00	99,24	0,00
9	Sekretariat Dprd	214.000.000,00	213.601.375,00	99,81	378.264.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	214.000.000,00	211.786.148,51	98,97	0,00
TOTAL		**5.477.909.000,00**	**4.710.081.248,06**	**85,98**	**27.172.296.811,00**

4)	**Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**Anggaran**	**Realisasi**
		Rp7.648.905.865,00	**Rp7.140.318.441,28**

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp7.648.905.865,00 dengan realisasi sebesar Rp7.140.318.441,28 atau 93,35% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp12.832.694.357,72) atau 64,25% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.973.012.799,00.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya proyek infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran 2024, yaitu dari Rp16.995.457.309,00 menjadi Rp4.482.705.581,28. Selain itu, tidak terdapat realisasi Belanja Modal Jaringan Air Minum pada Tahun Anggaran 2025 yang pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp837.487.890,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan pada tabel 5.29 berikut.

Tabel 5.29 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	4.875.359.000,00	4.482.705.581,28	91,95	16.995.457.309,00
2	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.692.313.865,00	1.674.614.079,00	98,95	1.641.844.700,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	376.000.000,00	375.232.002,00	99,79	99.722.900,00
4	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	107.725.000,00	40.000.000,00	37,13	398.500.000,00
5	Belanja Modal Instalasi Gas	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	0,00
6	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	837.487.890,00
7	Belanja Modal Jaringan Listrik	497.508.000,00	487.783.779,00	98,05	0,00
8	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	49.983.000,00	99,97	0,00
Jumlah		**7.648.905.865,00**	**7.140.318.441,28**	**93,35**	**19.973.012.799,00**

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per Perangkat Daerah, disajikan pada tabel 5.30 berikut.

Tabel 5.30 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	260.000.000,00	256.017.100,00	98,47	398.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	5.820.180.865,00	5.406.167.318,00	92,89	15.974.441.249,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.382.725.000,00	1.292.346.580,28	93,46	3.600.071.550,00
4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	186.000.000,00	185.787.443,00	99,89	0,00
Jumlah		**7.648.905.865,00**	**7.140.318.441,28**	**93,35**	**19.973.012.799,00**

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran	Realisasi
Rp1.304.460.950,00	**Rp1.716.537.750,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.304.460.950,00 dengan realisasi sebesar Rp1.716.537.750,00 atau 131,58% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 meningkat sebesar Rp411.290.850,00 atau 31,51% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.305.246.900,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel 5.31 berikut.

Tabel 5.31 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Akun	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	RealisasiTahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	148.970.000,00	88.544.800,00	59,44	14.529.000,00
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	1.290.117.900,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.155.490.950,00	1.627.992.950,00	140,89	0,00
Jumlah		**1.304.460.950,00**	**1.716.537.750,00**	**131,58**	**1.305.246.900,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada BOSP-BOS sebesar Rp1.627.992.950,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.155.490.950,00. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian realisasi setelah penetapan perubahan penganggaran pada aplikasi Kemendikbud. Realisasi belanja tersebut merupakan belanja non-RKUD yang dilaksanakan secara langsung oleh satuan pendidikan penerima Dana BOSP-BOS dan telah dilaporkan melalui mekanisme konsolidasi BOSP-BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 5.32 berikut

Tabel 5.32 Belanja Modal Aset Tetap Lainya per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.304.460.950,00	1.716.537.750,00	131,59	1.290.117.900,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	0,00	0,00	0,00	15.129.000,00
Total		**1.304.460.950,00**	**1.716.537.750,00**	**131,59**	**1.305.246.900,00**

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran	Realisasi
Rp99.000.000,00	**Rp89.095.815,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp99.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp89.095.815,00 atau mencapai 89,99% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Belanja Modal Aset Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp89.095.815,00 karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat penganggaran maupun realisasi untuk jenis belanja tersebut.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang digunakan untuk penyediaan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (SIG PBB) pada sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

Pengadaan SIG PBB tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan data objek pajak daerah melalui pemetaan spasial dan digitalisasi basis data perpajakan daerah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data objek dan subjek pajak, mempermudah proses identifikasi serta validasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

2.3 Belanja Tidak Terduga	Anggaran	Realisasi
	Rp5.230.000.000,00	Rp561.152.287,00

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp5.230.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp561.152.287,00 atau 10,73% dari anggaran. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran BTT yang tidak terealisasi sebesar Rp4.668.847.713,00 atau 89,27%.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada penetapan status keadaan darurat bencana Hidrometeorologi (cuaca ekstrem) di wilayah Kota Pariaman, yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pariaman sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

No	Nomor Keputusan	Tanggal	Perihal
1	Nomor 400/300/2025	24 November 2025	Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Pariaman
2	Nomor 409/900/2025	3 Desember 2025	Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Pariaman
3	Nomor 417/900/2025	10 Desember 2025	Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Kota Pariaman

Berdasarkan penetapan status keadaan darurat tersebut, BTT dicairkan dalam 2 (dua) tahap melalui mekanisme Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Rincian Belanja Tidak Terduga disajikan pada tabel 5.34 berikut.

Tabel 5.34 Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No	SP2D / Nomor Dokumen	Pencairan Bruto (Rp)	Pengembalian Belanja (Rp)	Pencairan Netto (Rp)	Keterangan
1	13.77/04.0/000507/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 tanggal 27 November 2025	222.225.000,00	314.841,00	221.910.159,00	STS tanggal 29 Desember 2025

No	SP2D / Nomor Dokumen	Pencairan Bruto (Rp)	Pengembalian Belanja (Rp)	Pencairan Netto (Rp)	Keterangan
2	13.77/06.0/000404/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025 tanggal 31 Desember 2025	339.242.128,00	0,00	339.242.128,00	Tidak terdapat sisa dana yang dikembalikan
Total Pencairan Bruto				**561.152.287,00**	

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai kebutuhan penanganan keadaan darurat, khususnya dalam rangka penanggulangan dampak cuaca ekstrem dan kondisi kedaruratan lainnya yang memerlukan penanganan segera oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Tidak Terduga dimanfaatkan antara lain untuk belanja jasa, belanja operasional, belanja barang habis pakai, belanja modal, serta belanja bahan makanan untuk kebutuhan dapur umum selama masa tanggap darurat.

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kebutuhan riil penanganan darurat di lapangan guna mendukung kelancaran operasional penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta percepatan penanganan keadaan darurat.

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat pengembalian Belanja Langsung atas penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan dokumen Nomor 13.77/07.0/000005 /LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 dengan keterangan "Setoran Pengembalian Sisa Belanja BTT Cuaca Ekstrem Tahap I". Pengembalian tersebut merupakan sisa dana kegiatan penanganan cuaca ekstrem yang tidak terealisasi seluruhnya sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4 Belanja Transfer

Anggaran	Realisasi
Rp89.031.829.909,11	**Rp87.462.665.956,00**

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp89.031.829.909,11. Hingga tanggal 31 Desember 2025, realisasi Belanja Transfer mencapai Rp87.462.665.956,00 atau sebesar 98,24% dari total anggaran. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.569.163.953,11 atau 1,76% dari anggaran.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.991.427.199,00, realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp528.761.243,00) atau 0,60%. Penurunan realisasi tersebut bersumber dari tiga komponen berikut:

- Penurunan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp784.057.300,00 atau 0,94%;
- Penurunan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Provinsi sebesar Rp169.920.000,00 atau 5,25%, yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan Pemerintah Kota

Pariaman yang menjadi dasar penghitungan alokasi bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan

- Penurunan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp39.609.777,00 atau 9,32%, yang mencerminkan penurunan realisasi pendapatan retribusi daerah sebagai basis penghitungan.

Penurunan ketiga komponen di atas sebagian diimbangi oleh kenaikan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp464.825.834,00 atau 85,05%, terutama akibat meningkatnya realisasi pendapatan Pajak Daerah yang digunakan sebagai basis penghitungan bagi hasil, termasuk dampak implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penghitungan dan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional berdasarkan realisasi pendapatan yang sesungguhnya telah diterima pada Kas Daerah, mengacu pada:

- Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian, dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa; dan
- Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 019/900/2025 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

Rincian Belanja Transfer disajikan pada Tabel 5.35 berikut.

Tabel 5.35 Belanja Transfer

No	Belanja Transfer	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.415.319.214,12	1.011.376.155,00	41,87	546.550.321,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	468.703.399,99	385.360.106,00	82,22	424.969.883,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	3.065.760.000,00	3.065.760.000,00	100,00	3.235.680.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	83.082.047.295,00	83.000.169.695,00	99,90	83.784.226.995,00
Jumlah		**89.031.829.909,11**	**87.462.665.956,00**	**98,24**	**87.991.427.199,00**

2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran **Rp2.415.319.214,12** **Realisasi** **Rp1.011.376.155,00**

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2.415.319.214,12. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.011.376.155,00 atau 41,87% dari anggaran, sehingga

terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.403.943.059,12 atau 58,13%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp546.550.321,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp464.825.834,00 atau 85,05%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya realisasi pendapatan Pajak Daerah Kota Pariaman yang digunakan sebagai faktor pengali dalam penghitungan bagi hasil, termasuk dampak implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tidak tercapainya target anggaran (realisasi 41,87%) disebabkan oleh penetapan anggaran yang didasarkan pada proyeksi pendapatan Pajak Daerah secara penuh, termasuk potensi opsen PKB dan BBNKB, sementara realisasi pendapatan Pajak Daerah yang menjadi basis penghitungan bagi hasil belum sepenuhnya mencapai proyeksi tersebut. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021, penghitungan dan penyaluran bagi hasil dilaksanakan secara proporsional berdasarkan realisasi pendapatan yang sesungguhnya diterima pada Kas Daerah, sehingga realisasi belanja bagi hasil bersifat mengikuti (*following*) realisasi pendapatannya.

		Anggaran	Realisasi
2.4.2	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah**	**Rp468.703.399,99**	**Rp385.360.106,00**

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp468.703.399,99. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp385.360.106,00 atau 82,22% dari anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp83.343.293,99 atau 17,78%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp424.969.883,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.609.777,00 atau 9,32%. Penurunan tersebut mencerminkan penurunan realisasi pendapatan retribusi daerah yang menjadi basis penghitungan bagi hasil pada Tahun Anggaran 2025. Sesuai mekanisme yang berlaku, penghitungan dan penyaluran bagi hasil dilaksanakan secara proporsional berdasarkan realisasi pendapatan yang sesungguhnya diterima pada Kas Daerah, sehingga realisasi belanja bagi hasil bersifat mengikuti realisasi pendapatannya.

		Anggaran	Realisasi
2.4.3	**Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi**	**Rp3.065.760.000,00**	**Rp3.065.760.000,00**

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp3.065.760.000,00 dan seluruhnya telah terealisasi sebesar Rp3.065.760.000,00 atau 100,00% dari anggaran, sehingga tidak terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Provinsi merupakan penerusan (*pass-through*) bantuan keuangan di bidang pendidikan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di wilayah Kota Pariaman. Besaran alokasi dihitung berdasarkan jumlah peserta didik aktif pada jenjang SMA sesuai data yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.235.680.000,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp169.920.000,00) atau 5,25%. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah peserta didik jenjang SMA di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang menjadi dasar penghitungan alokasi bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi sebesar 100% mencerminkan bahwa seluruh pagu bantuan keuangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah disalurkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan penerima sesuai dengan peruntukannya.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka program wajib belajar 12 Tahun dari pemerintah Kota Pariaman untuk pelajar SMA/SMK di wilayah Kota Pariaman sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman Nomor 120-004/PKS/GSB-2025 dan Nomor 100.3.7.1/006/PKS/PEM/VI/2025 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Pariaman tahun Anggaran 2025 dengan rincian bantuan keuangan yaitu disajikan pada tabel 5.36 berikut.

Tabel 5.36 Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Tahun 2025

No	Penerima Bantuan	Realisasi (Rp)
1	SMA N 1 Pariaman	563.760.000,00
2	SMA N 2 Pariaman	565.920.000,00
3	SMA N 3 Pariaman	419.040.000,00
4	SMA N 4 Pariaman	328.320.000,00
5	SMA N 5 Pariaman	257.760.000,00
6	SMA N 6 Pariaman	141.120.000,00
7	SMKN 1 Pariaman	228.240.000,00
8	SMKN 2 Pariaman	271.440.000,00
9	SMKN 3 Pariaman	116.640.000,00
10	SMKN 4 Pariaman	96.480.000,00
11	SLB N 1 Pariaman	54.000.000,00
12	SLB N 2 Pariaman	23.040.000,00
Jumlah		**3.065.760.000,00**

2.4.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	Anggaran	Realisasi
		Rp83.082.047.295,00	Rp83.000.169.695,00

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp83.082.047.295,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp83.000.169.695,00 atau 99,90% dari anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp81.877.600,00 atau 0,10%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.784.226.995,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp784.057.300,00) atau 0,94%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian besaran alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan penetapan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025, yang mencakup penyesuaian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan komponen bantuan keuangan khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa merupakan transfer keuangan dari Pemerintah Kota Pariaman kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dan penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas yang ditetapkan. Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi dan kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian ikhtisar Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa disajikan pada **Lampiran 3**.

3.	Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
		(Rp291.467.288,00)	(Rp291.467.288,46)

Pembiayaan Bersih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran Pembiayaan Bersih TA 2025 ditetapkan sebesar defisit (Rp291.467.288,00) dan terealisasi sebesar defisit Rp291.467.288,46 atau terealisasi 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Bersih Tahun Anggaran 2024 yang mencatat surplus sebesar Rp6.383.487.579,51, terdapat perubahan kondisi pada TA 2025 menjadi defisit sebesar Rp291.467.288,46. Perubahan ini mencerminkan pergeseran arah Pembiayaan Bersih senilai Rp6.675.020.291,05 (dari surplus menjadi defisit) yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp2.936.000.000,00 kepada PT Bank Nagari, sementara Penerimaan Pembiayaan (SiLPA TA 2024) menurun menjadi Rp2.644.532.711,54. Defisit Pembiayaan Bersih ini tertutupi oleh Surplus Anggaran pada sisi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

3.a	Pembiayaan Penerimaan	Anggaran	Realisasi
		Rp2.644.532.711,00	Rp2.644.532.711,54

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.644.532.711,00 dan terealisasi sebesar Rp2.644.532.711,54 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 seluruhnya bersumber dari penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024), sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian Penerimaan Pembiayaan berdasarkan sumber kas sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.37 berikut.

Tabel 5.37 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	1.571.594.340,16
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	86.760.250,00
3	Kas di BLUD	479.674.452.38
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	28.000.000,00
5	Kas Dana BOS	10.126.000,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	468.377.669,00
Jumlah		**2.644.532.711,54**

3.b	**Pengeluaran Penerimaan**	**Anggaran**	**Realisasi**
		Rp2.936.000.000,00	**Rp2.936.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.936.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.936.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 seluruhnya merupakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT Bank Nagari) Cabang Pariaman. Penyaluran PMP dilakukan berdasarkan SP2D Nomor 13.77/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/10/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT. Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 serta persetujuan Walikota Pariaman.

Dengan terlaksananya PMP ini, total akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Bank Nagari mengalami peningkatan. Nilai penyertaan modal ini akan dicatat sebagai Investasi Permanen dalam Neraca Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2025.

4.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**Anggaran**	**Realisasi**
		Rp0,00	**Rp21.693.513.841,99**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Pariaman pada akhir Tahun Anggaran 2025 (per 31 Desember 2025) terealisasi sebesar Rp21.693.513.841,99. SiLPA TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.048.981.130,45 atau 720,32% dibandingkan SiLPA TA 2024 sebesar Rp2.644.532.711,54. Kenaikan yang signifikan ini terutama disebabkan oleh realisasi pendapatan yang melampaui target dan/atau realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran pada TA 2025.

Rincian SiLPA Tahun 2025 berdasarkan sumber kas sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.38 berikut.

Tabel 5.38 Rincian SiLPA Tahun 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	20.247.256.238,61
2	Kas di Bendahara Penerimaan *)	10.000.000,00
3	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1.107.484.409,38
4	Kas Dana BOS di Rekening Bank Sekolah **)	1.000.000,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS ***)	5.086.000,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	322.687.194,00
Jumlah		**21.693.513.841,99**

*) Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang berada pada rekening pengumpul retribusi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan per 31 Desember 2025 yang merupakan pendapatan retribusi sewa atas aset (toilet) yang tidak lagi menjadi objek retribusi akibat adanya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**) Kas Dana BOS di Rekening Bank Sekolah adalah saldo kas yang masih berada di rekening bank masing-masing sekolah penerima BOS per 31 Desember 2025, yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran.

**) Kas di Bendahara Pengeluaran BOS adalah saldo kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Sekolah (tunai/setara kas) per 31 Desember 2025, yang merupakan kewajiban untuk dikembalikan atau disetorkan ke kas Dana BOS.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pariaman memiliki sisa penyaluran Dana Transfer Pemerintah Pusat yang bersifat *Earmarked* (penggunaan ditentukan) sebesar Rp31.988.552.323,72 Rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39 Rekapitulasi Sisa Dana Transfer Pemerintah Pusat s.d Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Dana Transfer	Sisa per 31 Desember 2025 (Rp)	% thd Total
1	Sisa Dana BTT	4.545.000.000,00	14,21
	- BKK Bantuan Presiden	*4.000.000.000,00*	
	- BKK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	*50.000.000,00*	
	- BKK Provinsi Sumatera Barat Tahap II	*80.000.000,00*	
	- BKK Provinsi Sumatera Barat Tahap III	*215.000.000,00*	
	- BKK Pemerintah Kab/Kota OKU	*200.000.000,00*	
2	DAU Tambahan TPG THR dan Ke-13	6.069.632.000,00	18,97
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya (DAU *Earmarked*)	17.141.852.583,00	53,58
4	DAK Fisik	2.280.056.213,00	7,13
5	DAK Non-Fisik	613.769.370,00	1,92

No	Komponen Dana Transfer	Sisa per 31 Desember 2025 (Rp)	% thd Total
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit	198.811.437,00	0,62
6	Dana Insentif Daerah	1.139.430.720,72	3,56
Total Sisa Dana Transfer		**31.988.552.323,72**	**100,00**

Dari saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.247.256.238,61, terdapat dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat *earmarked* (terikat penggunaannya) yang belum sepenuhnya disalurkan hingga akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.988.552.323,72, maka timbul selisih kurang sebesar Rp11.741.296.085,11. Selisih ini mencerminkan adanya kewajiban kontinjensi pemerintah daerah.

Sisa DAU *Earmarked* Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.141.852.583,00 atau 53,58% terserap dari total dana yang tersedia sebesar Rp76.099.351.685,00, terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp5.333.952.979,00 dan penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp70.765.398.706,00. Dari 5 (lima) bidang layanan, Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Kelurahan berhasil mencapai tingkat penyerapan 100,00% (sisa nihil), sementara 3 (tiga) bidang lainnya masih memiliki sisa yang akan menjadi SiLPA Bertanda Tahun Anggaran 2026. Bidang Pendidikan menjadi bidang dengan sisa terbesar sebesar Rp10.433.356.018,00 dengan tingkat penyerapan 67,27%, rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Sisa DAU – Yang Ditentukan Penggunaanya Sampai TA 2025

Urusan	SILPA	Penerimaan 2025	Total Penerimaan	Total Realisasi	Sisa DAU
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5
Bidang Pekerjaan Umum	256.406.380,00	0,00	256.406.380,00	256.406.380,00	0,00
Bidang Kesehatan	1.417.066.762,00	22.797.283.000,00	24.214.349.762,00	21.327.786.164,00	2.886.563.598,00
Bidang Pendidikan	3.598.214.167,00	28.279.706.000,00	31.877.920.167,00	17.846.349.982,00	14.031.570.185,00
Bidang Kelurahan	62.265.670,00	3.200.000.000,00	3.262.265.670,00	3.262.265.670,00	0,00
PPPK	0,00	16.488.409.706,00	16.488.409.706,00	16.264.690.906,00	223.718.800,00
Total	**5.333.952.979,00**	**70.765.398.706,00**	**76.099.351.685,00**	**58.957.499.102,00**	**17.141.852.583,00**

Sisa DAK Fisik Pemerintah Kota Pariaman sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.280.056.213,00, terdiri dari akumulasi sisa tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp2.279.426.295,00 dan realisasi penerimaan serta belanja Tahun 2025 (persamaan: Sisa = Rp2.279.426.295,00 + Rp2.188.772.651,00 − Rp2.188.142.733,00 = Rp2.280.056.213,00). Sisa DAK Fisik sebagian besar merupakan sisa anggaran dari bidang-bidang yang tidak mendapat alokasi penerimaan baru pada Tahun 2025 (saldo bawaan), khususnya Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp1.032.084.825,00.

Perlu dicatat bahwa terdapat selisih antara hasil kalkulasi penjumlahan sisa per bidang/sub-bidang (Rp2.280.670.289,00) dengan saldo yang disajikan dalam tabel dokumen sumber (Rp2.280.056.213,00) sebesar Rp629.918,00. Selisih ini berasal dari perbedaan pembulatan pada sub-bidang Sekolah Dasar (SD) yang sisa kalkulasinya adalah Rp629.918,00 namun dalam dokumen sumber terkonsolidasi ke dalam induk Bidang Pendidikan. Angka yang disajikan dalam laporan ini adalah Rp2.280.056.213,00 sesuai dengan data resmi yang telah diverifikasi dengan KPPN Padang.

Tabel 5.41 Sisa DAK – Fisik Sampai TA 2025

Bidang	Sisa DAK- Fisik s.d Tahun 2024	Penerimaan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Total Sisa DAK- Fisik
1	2	3	4	5 = 2+3-4
Pendidikan	**160.105.044**	**1.287.910.572**	**1.287.288.575**	**160.727.041**
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	344.366.500	344.366.500	0,00
Sekolah Dasar (SD)	0,00	743.773.763	743.151.766	629.918
Sub Bidang SKB	0,00	199.770.309	199.770.309	0,00
Kesehatan dan KB	**1.032.084.825**	**900.862.079**	**900.862.079**	**1.032.084.825**
Jalan	**169.695.142**	**0,00**	**0,00**	**169.695.142**
Bidang Air Minum	**389.543.944**	**0,00**	**0,00**	**389.543.944**
Bidang Perumahan dan Permukiman	**61.435.150**	**0,00**	**0,00**	**61.435.150**
Bidang Sanitasi	**20.400.000**	**0,00**	**0,00**	**20.400.000**
Bidang Irigasi	**352.465.571**	**0,00**	**0,00**	**352.465.571**
Bidang Pariwisata - Cadangan	**93.696.619**	**0,00**	**0,00**	**93.696.619**
Total DAK Fisik	**2.279.426.295**	**2.188.772.651**	**2.188.142.733**	**2.280.056.213**

Sisa DAK Fisik sebesar Rp2.280.056.213,00 akan dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan KPPN Padang terkait penyampaian laporan sisa DAK Fisik sesuai mekanisme yang diatur dalam PMK Nomor 193/PMK.07/2021. Sisa DAK Fisik yang memenuhi syarat akan disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2026 sepanjang program/kegiatan masih relevan dan mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Sisa DAK Non-Fisik Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2025 sebesar Rp706.580.634,00, total realisasi pendapatan DAK Non-Fisik Tahun 2025 sebesar Rp62.579.422.055,00 dengan total realisasi belanja sebesar Rp62.672.233.319,00, rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.42 Sisa DAK Non – Fisik Sampai TA 2025

Uraian	Sisa Tahun 2024	Realisasi Pendapatan Tahun 2025	Realisasi Belanja Tahun 2025	Sisa DAK-NF
1	2	3	4	5 = 2+3-4
DAK Non Fisik-BOS Reguler		14.453.822.000,00	14.453.822.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD		31.078.288.748,00	31.078.288.748,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		137.572.500,00	137.572.500,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD		1.885.480.860,00	1.885.480.860,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		1.293.124.250,00	1.293.124.250,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	99.776.250	2.247.511.750,00	2.224.543.400,00	122.744.600,00

Uraian	Sisa Tahun 2024	Realisasi Pendapatan Tahun 2025	Realisasi Belanja Tahun 2025	Sisa DAK-NF
1	2	3	4	5 = 2+3-4
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	101.997.250	403.692.750,00	377.320.000,00	128.370.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		155.040.000,00	155.040.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	504.807.134,00	5.403.866.866,00	5.649.130.230,00	259.543.770,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		4.649.612.331,00	4.649.612.331,00	0,00
DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan		371.410.000,00	313.564.000,00	57.846.000,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		500.000.000,00	454.735.000,00	45.265.000,00
Jumlah	**706.580.634,00**	**62.579.422.055,00**	**62.672.233.319,00**	**613.769.370,00**

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur masing-masing jenis dana transfer dimaksud, Pemerintah Kota Pariaman memiliki kewajiban hukum (legal obligation) untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi selaku pemberi dana, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai *free cash* yang dapat dialokasikan secara diskresioner.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban dimaksud, Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan penyesuaian penganggaran pada Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme *carry-over* yang dituangkan dalam perubahan APBD atas kewajiban penyesuaian belanja yang bersumber dari dana transfer sebesar Rp11.741.296.085,11, serta terhadap kewajiban utang belanja kepada pihak ketiga sebesar Rp3.501.766.382,11. Seluruh kewajiban tersebut telah diungkapkan dalam laporan keuangan ini sesuai dengan prinsip full disclosure sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Konseptual SAP.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang wajib disajikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LPSAL menyajikan informasi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang terdiri dari SAL Awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan, dan SAL Akhir periode pelaporan.

LPSAL Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan data realisasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi dan direkonsiliasi dengan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca per 31 Desember 2025. SiLPA Tahun Anggaran 2025 dihitung berdasarkan formula: SiLPA = Surplus/(Defisit) LRA + Pembiayaan Neto, yang selanjutnya menjadi SAL Akhir sebagaimana tersaji dalam LPSAL.

5.43 Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	SAL Awal	2.644.532.711,54	7.383.487.579,51
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(2.644.532.711,54)	(7.383.487.579,51)
3	SiLPA / (SiKPA) Tahun Berjalan	21.693.513.841,99	2.644.532.711,54
4	**SAL Akhir per 31 Desember**	**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**

1. SAL Awal

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp2.644.532.711,54	**Rp7.383.487.579,51**

SAL Awal merupakan akumulasi Saldo Anggaran Lebih dari tahun-tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun anggaran berjalan. Sesuai PSAP 02 paragraf 28, SAL Awal Tahun Anggaran 2025 merupakan nilai yang sama dengan SAL Akhir Tahun Anggaran 2024, yang besarnya identik dengan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersaji dalam LRA, LAK, dan Neraca per 31 Desember 2024.

SAL Awal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.644.532.711,54, menurun sebesar Rp4.738.954.867,97 atau (64,18%) dibandingkan SAL Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.383.487.579,51. Penurunan SAL Awal ini disebabkan oleh lebih rendahnya SiLPA Tahun Anggaran 2024 dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2023, terutama akibat peningkatan realisasi belanja modal infrastruktur yang signifikan pada Tahun Anggaran 2024, yakni Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.172.296.811,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp19.973.012.799,00, serta peningkatan Belanja Hibah sebesar Rp21.650.244.697,33 yang menyerap lebih besar kas daerah pada Tahun Anggaran 2024.

SAL Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.644.532.711,54 telah dikonfirmasi konsistensinya dengan: (i) Saldo Akhir Kas pada LAK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.644.532.711,54; (ii) Saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar

Rp2.644.532.711,54; dan (iii) SiLPA Tahun Anggaran 2024 pada LRA sebesar Rp2.644.532.711,54. Tidak terdapat selisih di antara keempat angka tersebut, sehingga kesinambungan (continuity) antar periode akuntansi terpenuhi.

2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp2.644.532.711,54	Rp7.383.487.579,51

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan mekanisme pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk: (a) menutup defisit anggaran; (b) mendanai kewajiban yang belum tersedia anggarannya; dan (c) mendanai program/kegiatan prioritas yang belum tercakup dalam APBD tahun berjalan.

Penggunaan SAL pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.644.532.711,54, seluruhnya merupakan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SAL Akhir per 31 Desember 2024 (SiLPA Tahun Anggaran 2024). Nilai ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan tercatat pada LRA Tahun Anggaran 2025 akun "Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya" (Kode 3.1.1.) dengan realisasi sebesar Rp2.644.532.711,54 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.644.532.711,54.

Penggunaan SAL TA 2025 sebesar Rp2.644.532.711,54 mengalami penurunan sebesar Rp4.738.954.867,97 atau (64,18%) dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.383.487.579,51, yang konsisten dengan penurunan SAL Awal sebagaimana diuraikan pada Pos 1. Dengan tergunakannya seluruh SAL sebagai penerimaan pembiayaan, maka saldo SAL setelah penggunaan adalah Rp0,00 (nihil), sebelum ditambahkan SiLPA tahun berjalan.

3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp21.693.513.841,99	Rp2.644.532.711,54

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran, termasuk selisih pembiayaan neto. SiLPA merupakan indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD. Penghitungan SiLPA menggunakan formula:

SiLPA = Surplus/(Defisit) LRA + Pembiayaan Neto

di mana Surplus/(Defisit) LRA diperoleh dari selisih Total Pendapatan dikurangi Total Belanja, dan Pembiayaan Neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

5.44 Penghitungan SiLPA Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan LRA

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
A	**TOTAL PENDAPATAN**	**620.440.914.948,89**	**644.362.029.673,36**
	➢ Pendapatan Asli Daerah	57.459.978.227,89	45.911.378.642,36
	➢ Pendapatan Transfer	558.980.936.721,00	598.450.651.031,00
	➢ Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.000.000.000,00	0,00

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
B	**TOTAL BELANJA**	**598.455.933.818,44**	**648.100.984.541,33**
	➢ Belanja Operasi	485.891.824.192,10	501.308.593.783,33
	➢ Belanja Modal	24.540.291.383,34	58.680.468.559,00
	➢ Belanja Tak Terduga	561.152.287,00	120.495.000,00
	➢ Belanja Transfer	87.462.665.956,00	87.991.427.199,00
C	**SURPLUS/(DEFISIT) LRA [A - B]**	**21.984.981.130,45**	**(3.738.954.867,97)**
D	**PEMBIAYAAN NETO**	**(291.467.288,46)**	**6.383.487.579,51**
	➢ Penerimaan Pembiayaan (Penggunaan SiLPA TA sebelumnya)	2.644.532.711,54	7.383.487.579,51
	➢ Pengeluaran Pembiayaan (PMP kepada PT Bank Nagari)	(2.936.000.000,00)	(1.000.000.000,00)
E	**SiLPA / (SiKPA) [C + D]**	**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**

SiLPA Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.693.513.841,99, meningkat sebesar Rp19.048.981.130,45 atau 720,32% dibandingkan SiLPA per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.644.532.711,54. SiLPA TA 2025 terdiri dari Surplus LRA sebesar Rp21.984.981.130,45 dikurangi Pembiayaan Neto defisit sebesar Rp291.467.288,46, sehingga menghasilkan SiLPA sebesar Rp21.693.513.841,99.

Peningkatan SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang signifikan didorong oleh faktor-faktor berikut:

a. Surplus LRA TA 2025 sebesar Rp21.984.981.130,45, berbalik dari kondisi Defisit LRA TA 2024 sebesar Rp3.738.954.867,97. Perubahan posisi dari defisit menjadi surplus ini merupakan capaian positif pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025;
b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11.548.599.585,53 atau 25,15% yang didorong oleh kenaikan Pajak Daerah (54,88%), Retribusi Daerah (29,18%), dan Lain-lain PAD yang Sah (8,14%);
c. Penerimaan Dana Darurat sebesar Rp4.000.000.000,00 berupa Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk penanganan bencana alam di Kota Pariaman berdasarkan Surat Sekretaris Presiden Nomor B-08/KSN/SP/KK.14.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025, yang tidak terdapat pada Tahun Anggaran 2024;
d. Efisiensi realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp24.540.291.383,34, turun signifikan Rp34.140.177.175,66 atau (58,18%) dibandingkan TA 2024 sebesar Rp58.680.468.559,00, seiring selesainya program pembangunan infrastruktur berskala besar pada TA 2024; serta
e. Efisiensi Belanja Hibah sebesar (65,09%) dan tidak terealisasinya Belanja Bantuan Sosial (100%) pada Tahun Anggaran 2025, yang berkontribusi pada penghematan belanja operasi.

5.45 Rekonsiliasi SiLPA TA 2025 dengan Laporan Keuangan Terkait

No	Sumber / Laporan Keuangan	Jumlah (Rp)
1	SiLPA pada LRA (baris 4 / Kode 3.3.) per 31 Des 2025	21.693.513.841,99
2	Saldo Akhir Kas pada LAK per 31 Des 2025	21.693.513.841,99

No	Sumber / Laporan Keuangan	Jumlah (Rp)
3	Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Des 2025	21.693.513.841,99
4	SAL Akhir pada LPSAL per 31 Des 2025	21.693.513.841,99
	Selisih antar laporan (nihil = terpenuhi articulation)	**0,00 ✓**

Tabel rekonsiliasi di atas membuktikan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.693.513.841,99 konsisten dan ter-artikulasi dengan (i) Saldo Akhir Kas pada LAK, (ii) Saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2025, dan (iii) SAL Akhir pada LPSAL. Selisih di antara keempat angka tersebut adalah Rp0,00 (nihil), sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi prinsip artikulasi antar laporan keuangan (*inter-statement articulation*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Konseptual SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010).

4.	**Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember**	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
		Rp21.693.513.841,99	**Rp2.644.532.711,54**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.693.513.841,99, meningkat sebesar Rp19.048.981.130,45 atau 720,32% dibandingkan SAL per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.644.532.711,54. SAL per 31 Desember 2025 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

5.46 Penghitungan SAL Akhir per 31 Desember 2025

1	SAL Awal (SiLPA TA 2024)	2.644.532.711,54
2	Dikurangi: Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2025	(2.644.532.711,54)
3	**SAL Setelah Penggunaan (1 - 2)**	**0,00**
4	Ditambah: SiLPA Tahun Anggaran 2025	21.693.513.841,99
5	**SAL Akhir per 31 Desember 2025 (3 + 4)**	**21.693.513.841,99**

SAL Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.693.513.841,99 akan menjadi: (i) SAL Awal pada LPSAL Tahun Anggaran 2026; dan (ii) batas maksimal penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA yang dapat dialokasikan dalam APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kota Pariaman akan mengalokasikan SAL dimaksud secara terencana dalam APBD Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme penerimaan pembiayaan sesuai Pasal 60 PP Nomor 12 Tahun 2019, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan likuiditas untuk kelancaran operasional pemerintahan.

SAL Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.693.513.841,99 telah dikonfirmasi konsistensinya dengan Saldo Akhir Kas pada LAK TA 2025, Saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2025, serta SiLPA Tahun Anggaran 2025 pada LRA, dengan selisih Rp0,00 (nihil). Dengan demikian, LPSAL Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Pariaman telah memenuhi syarat keterkaitan antar laporan keuangan (*articulation*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.47 Perbandingan dan Analisis Tren LPSAL Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
1	SAL Awal	2.644.532.711,54	7.383.487.579,51	(64,18)
2	Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pembiayaan	(2.644.532.711,54)	(7.383.487.579,51)	(64,18)
3	Surplus/(Defisit) LRA	21.984.981.130,45	(3.738.954.867,97)	688,00
4	Pembiayaan Neto	(291.467.288,46)	6.383.487.579,51	(104,57)
5	**SiLPA / (SiKPA) Tahun Berjalan**	**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**	**720,32**
6	**SAL Akhir per 31 Desember**	**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**	**720,32**

Berdasarkan perbandingan data LPSAL di atas, terdapat pola yang konsisten dalam pengelolaan SAL Pemerintah Kota Pariaman: (i) Penggunaan SAL selalu sama besarnya dengan SAL Awal, karena seluruh SAL Awal dioptimalkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun berjalan; dan (ii) SAL Akhir selalu sama dengan SiLPA tahun berjalan, karena SAL setelah penggunaan adalah nihil. Hal ini merupakan praktik pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan dan menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya keuangan yang tersedia.

Peralihan dari kondisi Defisit LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.738.954.867,97 menjadi Surplus LRA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.984.981.130,45 merupakan capaian positif yang signifikan dan mencerminkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini didukung oleh keberhasilan meningkatkan pendapatan daerah dan ketepatan dalam mengefisiensikan pengeluaran, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk membiayai program pembangunan pada Tahun Anggaran 2026.

..

5.3. Neraca

Neraca Daerah Pemerintah Kota Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp803.779.773.866,87, nilai Kewajiban sebesar Rp3.687.472.849,39, dan Ekuitas sebesar Rp800.092.301.017,48. Dibandingkan dengan posisi keuangan per 31 Desember 2024, total Aset mengalami peningkatan sebesar Rp3.372.330.408,46 atau 0.42 %, dan Kewajiban menurun sebesar (Rp1.587.724.371,90) atau (30.10)%, yang mencerminkan perbaikan kondisi fiskal Pemerintah Kota Pariaman. Neraca disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan (PP Nomor 71 Tahun 2010) dengan basis akrual.

	Tahun 2025	Tahun 2024
1. Aset Lancar	**Rp43.374.674.605,37**	**Rp26.128.048.414,74**

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2025 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana BOK Puskesmas, berbagai jenis Piutang, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp43.374.674.605,37, meningkat sebesar Rp17.246.626.190,63 atau 66.01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.128.048.414,74. Peningkatan signifikan ini terutama didorong oleh kenaikan Kas di Kas Daerah sebesar Rp18.675.661.898,45 atau 1.188.33% dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.017.199.820,15 atau 417.19%, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada masing-masing sub-pos pada tabel 5.48 berikut.

Tabel 5.48 Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
1	Kas di Kas Daerah	20.247.256.238,61	1.571.594.340,16	1.188,33
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	86.760.250,00	(100,00)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000.000,00	0,00	(100,00)
4	Kas di BLUD	1.107.484.409,38	507.674.452,38	118,15
5	Kas Dana BOS	6.086.000,00	10.126.000,00	(39,90)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	322.687.194,00	468.377.669,00	(31,11)
7	Piutang Pajak Daerah	5.281.097.734,00	4.855.374.375,00	8,77
8	Piutang Retribusi Daerah	3.619.235.549,00	2.411.280.523,00	50,10
9	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.261.022.982,00	243.823.161,85	417,19
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	1.758.923.689,00	(100,00)
11	Piutang Transfer antar Daerah	9.308.227.954,00	11.888.547.076,00	(21,70)
12	Piutang Lainnya	615.550.430,66	608.409.748,66	1,17
13	Penyisihan Piutang	(3.963.092.013,11)	(3.305.781.627,41)	19,88
14	Persediaan	5.559.118.126,83	5.022.938.757,10	10,67
Jumlah		**43.374.674.605,37**	**26.128.048.414,74**	**66,01**

1.a Kas di Kas Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp20.247.256.238,61	**Rp1.571.594.340,16**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Pariaman yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas di Kas Daerah disajikan berdasarkan saldo rekening koran RKUD Nomor 0500.0101.0039-5 pada Bank Nagari per 31 Desember 2025 yang telah direkonsiliasi dengan Buku Kas Umum (BKU) BUD.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.247.256.238,61, meningkat sebesar Rp18.675.661.898,45 atau 1188.33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.571.594.340,16. Peningkatan signifikan ini disebabkan oleh: (i) surplus LRA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.974.981.130,45; (ii) penerimaan Dana Darurat sebesar Rp4.000.000.000,00; dan (iii) efisiensi belanja modal yang signifikan pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun 2024.

Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pariaman melakukan penempatan kas dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp13.000.000.000,00 sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 131 ayat (1). Seluruh deposito tersebut telah dicairkan dan disetorkan kembali ke RKUD sebelum 31 Desember 2025, sesuai Pasal 131 ayat (2), sehingga tidak terdapat saldo *deposito outstanding* per 31 Desember 2025.

Terdapat selisih antara saldo Rekening Koran RKUD sebesar Rp20.246.816.238,61 dengan Kas di Neraca sebesar Rp20.247.256.238,61, yakni sebesar Rp440.000,00. Selisih ini terjadi akibat *double* validasi SP2D pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) oleh bank. Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan rekonsiliasi dan dana sebesar Rp440.000,00 disetorkan kembali ke RKUD pada tanggal 4 Februari 2026, sebagaimana dibuktikan dengan Nota Kredit Bank Nagari. Kejadian ini merupakan *adjusting event* sesuai PSAP Nomor 01 paragraf 79.

1.b Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp0,00	**Rp86.760.250,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran pada akhir periode pelaporan, yang terdiri dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) yang belum dipertanggungjawabkan. Sesuai PSAP Nomor 01, Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan terpisah dari Kas di Kas Daerah karena berada di luar pengelolaan BUD.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nihil), menurun sebesar (Rp86.760.250,00) atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.760.250,00. Saldo nihil ini mencerminkan bahwa seluruh Bendahara Pengeluaran pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pariaman telah mempertanggungjawabkan dan menyetorkan sisa UP/GU/TU ke RKUD sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2025, sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 jo. Hal ini menunjukkan tertib administrasi pertanggungjawaban uang muka kerja pada Tahun Anggaran 2025, rincian disajikan pada tabel 5.49 berikut.

Tabel 5.49 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Perangkat Daerah	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
1	Dinas Kesehatan	0,00	12.250,00	(100,00)%
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	86.748.000,00	(100,00)%
Jumlah		**0,00**	**86.760.250,00**	**(100,00)%**

1.c Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp10.000.000,00	**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.000.000,00, mengalami peningkatan sebesar 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 tersebut merupakan kas tunai yang berada pada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersumber dari pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa sewa toilet tahun 2025. Sampai dengan tanggal pelaporan, penerimaan tersebut belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga masih tercatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

1.d Kas di BLUD

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.107.484.409,38	**Rp507.674.452,38**

Kas di BLUD merupakan kas yang berada pada rekening masing-masing unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, kas BLUD tidak harus disimpan dalam RKUD namun wajib dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam Neraca Pemerintah Daerah. Saldo disajikan berdasarkan Laporan Kas Bulanan masing-masing BLUD yang telah diverifikasi oleh BPKPD.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.107.484.409,38, meningkat sebesar Rp599.809.957,00 atau 118.15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp507.674.452,38. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo RSUD Sadikin sebesar Rp616.704.425,00 yang mencerminkan peningkatan pendapatan layanan kesehatan dan efisiensi penggunaan anggaran BLUD Tahun Anggaran 2025, rincian disajikan pada tabel 5.50 berikut.

Tabel 5.50 Rincian Kas BLUD

No	Perangkat Daerah	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
1	RSUD Sadikin	891.448.419,00	274.743.994,00	224.47%
2	UPTD Air Bersih	88.356.150,00	77.770.661,00	13.61%
3	Puskesmas Naras	8.347.933,00	31.217.681,00	(73.26)%
4	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	24.789,00	5.547.906,00	(99.55)%
5	Puskesmas Pariaman	77.041.718,00	62.419.676,00	23.43%

No	Perangkat Daerah	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
6	Puskesmas Kuraitaji	1.996.899,00	24.585.110,00	(91.88)%
7	Puskesmas Air Santok	20.240.794,38	12.155.087,38	66.52%
8	Puskesmas Marunggi	18.695.029,00	18.354.947,00	1.85%
9	Puskesmas Sikapak	1.332.678,00	879.390,00	51.55%
Total		**1.107.484.409,38**	**507.674.452,38**	**118.15%**

Penyajian Kas di BLUD telah sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 telah diverifikasi melalui rekonsiliasi antara Laporan Keuangan BLUD dengan data yang dilaporkan ke BPKPD, dan tidak terdapat selisih. Rincian Kas di BLUD disajikan pada **Lampiran 4.**

1.e Kas Dana BOS

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp6.086.000,00	**Rp10.126.000,00**

Kas Dana BOS merupakan sisa saldo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum terpakai pada akhir Tahun Anggaran 2025, yang berada pada rekening BOS dan/atau dalam bentuk kas tunai di tangan Bendahara BOS masing-masing satuan pendidikan negeri. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, sisa Dana BOS pada akhir tahun anggaran tidak disetor ke RKUD melainkan menjadi saldo awal pada tahun anggaran berikutnya dan tetap digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah.

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.086.000,00, menurun sebesar (Rp4.040.000,00) atau (39,90%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.126.000,00. Penurunan ini mencerminkan peningkatan penggunaan Dana BOS untuk membiayai operasional sekolah pada Tahun Anggaran 2025, rincian disajikan pada tabel 5.51 berikut.

Tabel 5.51 Rincian Kas Dana BOS

No.	Sekolah	Saldo per 31 Desember Tahun 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
1	Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri)	4.036.000,00	10.126.000,00
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri)	2.050.000,00	0,00
Jumlah		**6.086.000,00**	**10.126.000,00**

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.086.000,00 terdiri dari dua satuan pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

a) SMPN I Kota Pariaman saldo Kas BOS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.050.000,00 terdiri dari:

- ❖ Kas pada Rekening Dana Bos sebesar Rp1.000.000,00

- ❖ Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.050.000,00

b) SDN 18 Karan Aur saldo Kas BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.036.000,00 merupakan kas tunai pada bendahara pengeluaran.

Kas Tunai pada Bendahara BOS sebagaimana dimaksud di atas merupakan hasil penarikan dari rekening BOS untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang pada akhir tahun belum seluruhnya dibelanjakan. Saldo kas tunai dimaksud berada dalam pengawasan Kepala Sekolah dan telah dilakukan opname kas per 31 Desember 2025. Rincian Kas di Bendahara BOS disajikan pada **Lampiran 5**.

1.f Kas Dana BOK Puskemas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp322.687.194,00	**Rp468.377.669,00**

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan sisa saldo Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada rekening penerima salur masing-masing Puskesmas yang belum terealisasi penggunaannya sampai dengan 31 Desember 2025. Dana BOK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan langsung oleh Kementerian Kesehatan ke rekening Puskesmas melalui mekanisme Transfer ke Daerah, dengan tujuan mendukung upaya kesehatan promotif dan preventif.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp322.687.194,00, menurun sebesar (Rp145.690.475,00) atau (31,11%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp468.377.669,00. Penurunan saldo ini mencerminkan peningkatan penyerapan Dana BOK oleh puskesmas-puskesmas di lingkup Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2025. Saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2025 merupakan kas pada rekening BOK salur Tahun 2025 yang akan menjadi saldo awal dan digunakan pada Tahun Anggaran 2026. Rincian disajikan pada tabel 5.52 berikut.

Tabel 5.52 Daftar Rincian Kas Dana BOK Puskesmas

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Puskesmas Naras	57.743.125,00	624.994.901,00	602.802.867,00	79.935.159,00
2	Puskesmas Pariaman	94.409.103,00	1.119.932.658,00	1.155.364.864,00	58.976.897,00
3	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	8.948.152,00	649.806.347,00	652.357.775,00	6.396.724,00
4	Puskesmas Kuraitaji	40.095.175,00	609.749.538,00	643.146.700,00	6.698.013,00
5	Puskesmas Marunggi	110.665.039,00	542.507.105,00	565.081.331,00	88.090.813,00
6	Puskesmas Air Santok	75.996.296,00	552.771.843,00	593.294.014,00	35.474.125,00
7	Puskesmas Sikapak	80.520.779,00	550.276.136,00	583.681.452,00	47.115.463,00
Total		**468.377.669,00**	**4.650.038.528,00**	**4.795.729.003,00**	**322.687.194,00**

Berdasarkan tabel di atas, total penerimaan Dana BOK seluruh puskesmas pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.650.038.528,00 dengan total realisasi penggunaan sebesar Rp4.795.729.003,00, sehingga menghasilkan saldo akhir sebesar Rp322.687.194,00. Persamaan matematis saldo BOK adalah: Saldo Akhir = Saldo Awal (Rp468.377.669,00) + Penerimaan (Rp4.650.038.528,00) – Realisasi (Rp4.795.729.003,00) = Rp322.687.194,00, sehingga terbukti konsisten dan terverifikasi.

Penyajian Kas Dana BOK Puskesmas pada Neraca per 31 Desember 2025 telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai mekanisme pencatatan Dana BOK dalam LKPD, di mana sisa Dana BOK disajikan sebagai Kas pada Neraca karena dana tersebut masih merupakan milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas disajikan pada **Lampiran 6**.

1.g Piutang Pajak Daerah

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp5.281.097.734,00	**Rp4.855.374.375,00**

Piutang Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Kota Pariaman untuk menerima pembayaran atas pajak yang telah ditetapkan namun belum diterima pada akhir periode pelaporan. Piutang pajak diakui pada saat timbulnya hak atas pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan daerah yang berlaku, sesuai PSAP Nomor 01 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.281.097.734,00, meningkat sebesar Rp425.723.359,00 atau 8.77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.855.374.375,00. Perhitungan peningkatan Piutang Tahun 2025 dengan mempertimbangkan akumulasi sisa piutang dari tahun sebelumnya dikurangi Piutang Tertagih ditambah proyeksi piutang baru tahun 2025 yang merupakan hasil backup data SISMIOP per 31 Desember 2025 (Rp4.855.374.375,00 – Rp392.705.634,00 = Rp4.447.471.841,00 + Rp818.428.993,00 = Rp5.265.900.834,00). Pemerintah Kota Pariaman secara aktif melakukan penagihan piutang melalui program intensifikasi pajak daerah, rincian disajikan pada tabel 5.53 berikut.

Tabel 5.53 Daftar Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Restoran	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.265.900.834,00	4.840.177.475,00
3	Piutang Pajak Parkir	166.700,00	166.700,00
Jumlah		**5.281.097.734,00**	**4.855.374.375,00**

Rincian Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 7a**.

Kegiatan updating data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terdapat piutang dari Tahun 2014 s.d. 2025 sebesar Rp5.265.900.834,00 dengan rincian disajikan pada tabel 5.54 berikut.

Tabel 5.54 Daftar Rincian Piutang PBB P2

No	Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Mutasi (+) Piutang (Rp)	Mutasi (-) Pembayaran Piutang (Rp)	Saldo Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	2014	220.903.653,00	0,00	8.068.272,00	212.835.381,00
2	2015	212.835.381,00	211.698.799,00	7.796.306,00	416.737.874,00
3	2016	416.737.874,00	155.015.029,00	4.969.552,00	566.783.351,00
4	2017	566.783.351,00	249.306.807,00	9.075.759,00	807.014.399,00
5	2018	807.014.399,00	179.597.623,00	7.433.544,00	979.178.478,00
6	2019	979.178.478,00	176.456.853,00	11.125.315,00	1.144.510.016,00
7	2020	1.144.510.016,00	579.304.674,00	35.023.356,00	1.688.791.334,00
8	2021	1.688.791.334,00	640.860.386,00	39.054.913,00	2.290.596.807,00
9	2022	2.290.596.807,00	654.953.320,00	47.325.798,00	2.898.224.329,00
10	2023	2.898.224.329,00	827.303.148,00	80.504.168,00	3.645.023.309,00
11	2024	3.645.023.309,00	944.777.183,00	142.328.651,00	4.447.471.841,00
12	2025	4.447.471.841,00	818.428.993,00	0,00	**5.265.900.834,00**

Mutasi (+) Piutang PBB P2 untuk Tahun 2025 sebesar Rp818.428.993,00 merupakan perolehan dari backup data SISMIOP per tanggal 31 Desember 2025 dari nilai ketetapan sebesar Rp2.345.383.063,00 dikurangi pembayaran sebesar Rp1.526.954.070,00.

1.h Piutang Retribusi Daerah

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp3.619.235.549,00	**Rp2.411.280.523,00**

Piutang Retribusi Daerah merupakan hak Pemerintah Kota Pariaman atas retribusi yang telah ditetapkan atau dipungut namun belum diterima pembayarannya pada akhir periode pelaporan. Piutang retribusi diakui saat timbul hak atas retribusi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.619.235.549,00, meningkat sebesar Rp1.207.955.026,00 atau 50,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.411.280.523,00. Peningkatan saldo tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian dan reklasifikasi akun piutang pendapatan pada BLUD RSUD Sadikin, serta penyesuaian kembali pengelompokan piutang pendapatan pada UPTD Air Bersih yang direklasifikasi ke akun Piutang Pendapatan Jasa Pelayanan BLUD. dengan rincian disajikan pada tabel 5.55 berikut.

Tabel 5.55 Daftar Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.650.000,00	9.650.000,00
2	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	88.206.943,00	88.206.943,00

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
3	Retribusi Pelayanan Pasar (Disparbud)	165.100.000,00	112.100.000,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	108.569.000,00	73.954.000,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Diskoperindag)	2.175.000,00	2.175.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	1.512.988.442,00	1.350.214.779,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar (Disperindagkop)	1.046.000,00	1.046.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.983.848,00	10.983.848,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	758.095.506,00
10	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	18.580.575,00	4.854.447,00
11	Retribusi dari Jasa Layanan Kesehatan (RSUD Sadikin)	1.701.935.741,00	0,00
Jumlah		**3.619.235.549,00**	**2.411.280.523,00**

Rincian Piutang Retribusi disajikan pada **Lampiran 7b.**

		Tahun 2025	Tahun 2024
1.i	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**Rp1.261.022.982,00**	**Rp243.823.161,85**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan tagihan atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang belum diterima pembayarannya pada akhir periode pelaporan, mencakup piutang hasil pengelolaan dana bergulir, piutang denda retribusi, dan piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.261.022.982,00, meningkat sebesar Rp1.017.199.820,15 atau 417.19% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp243.823.161,85. Penyesuaian pengakuan atas piutang pendapatan BLUD UPTD Air Bersih Kota Pariaman. Piutang ini diakui berdasarkan dokumen klaim yang telah diajukan dan diverifikasi, rincian disajikan pada tabel 5.56 berikut.

Tabel 5.56 Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (BPR)	123.000.000,00	123.000.000,00
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Air Bersih	70.262.551,00	120.823.161,85
3	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Air Bersih	1.067.760.431,00	0,00
Jumlah		1.261.022.982,00	243.823.161,85

Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 5.57 berikut.

Tabel 5.57 Bantuan Penguatan Modal Kepada Koperasi Kota Pariaman

No	Nama Nasabah/KSP/USP	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
Penyaluran Awal Tahun 2006				
1	Jamaah Masjid Kampung Baru	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Takapalo Saiyo	50.000.000,00	35.000.000,00	10.500.000,00
3	Pengadilan Agama	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Bina Karya Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
5	KP-RI SMPN 3 Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
6	Jambak Sakato	50.000.000,00	27.500.000,00	8.250.000,00
7	KPN SMAN 2 Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Tuah Sakato	50.000.000,00	37.500.000,00	11.250.000,00
9	KPP Laskar Cimparuh	50.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
10	KPRI Pemko Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**500.000.000,00**	**110.000.000,00**	**33.000.000,00**
Guliran I Tahun 2006				
1	PRIMKOPTAMA	50.000.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00
2	Koperasi Nelayan Pasie Nareh	10.000.000,00	5.500.000,00	1.650.000,00
3	KPP SERB USH	20.000.000,00	0,00	0,00
Guliran II Tahun 2009				
1	KOPPAS APPSI	50.000.000,00	0,00	0,00
2	KSU Teratai	50.000.000,00	0,00	0,00
3	KPP Kampung Apar Farming	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Koperasi Tirta Anai	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**280.000.000,00**	**13.000.000,00**	**3.900.000,00**
Total		**780.000.000,00**	**123.000.000,00**	**36.900.000,00**

Rincian atas piutang denda pemakaian air UPTD. Air Bersih Kota Pariaman per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 5.58 berikut.

Tabel 5.58 Rincian Piutang Denda Air Bersih

No.	Lokasi	Kategori Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar> 1 s.d 3 Bulan	Diragukan > 3 s.d 12 Bulan	Macet > 12 Bulan	
1	Pariaman Tengah	274.947,00	696.753,00	20.534.573,00	691.366,00	22.197.639,00
2	Paraman Utara	510.080,00	1.283.956,00	2.016.987,00	41.189.009,00	45.000.032,00
3	Pariaman Selatan	2.943,00	8.362,00	37.497,00	4.534,00	53.336,00
4	Pariaman Timur	310.588,00	571.646,00	1.372.615,00	756.695,00	3.011.544,00
Total		**1.098.558,00**	**2.560.717,00**	**23.961.672,00**	**42.641.604,00**	**70.262.551,00**

Selisih Piutang Denda Air Bersih Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp50.560.610,85. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif denda atas keterlambatan pembayaran jasa air bersih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBS (*Integreted Billing System*).

Rincian atas piutang jasa pemakaian air UPTD. Air Bersih Kota Pariaman per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel 5.59 berikut.

Tabel 5.59 Rincian Piutang Jasa Air Bersih

No.	Lokasi	Kategori Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar> 1 s.d 3 Bulan	Diragukan > 3 s.d 12 Bulan	Macet > 12 Bulan	
1	Pariaman Tengah	27.494.700	69.675.300	134.457.300	69.136.600	300.763.900
2	Paraman Utara	51.015.500	128.418.100	201.730.031	78.900.900	460.064.531
3	Pariaman Selatan	294.300	836.200	3.749.700	453.400	5.333.600
4	Pariaman Timur	31.139.500	57.354.700	97.434.700	115.669.500	301.598.400
Total		**109.944.000**	**256.284.300**	**437.371.731**	**264.160.400**	**1.067.760.431**

1.j Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp0,00	**Rp1.758.923.689,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, menurun (Rp1.758.923.689,00) atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.758.923.689,00. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025, sisa saldo pada rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Kota Pariaman untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Dengan demikian, seluruh Dana Perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pariaman telah disalurkan secara penuh oleh Pemerintah Pusat.

1.k Piutang Transfer antar Daerah

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp9.308.227.954,00	**Rp11.888.547.076,00**

Saldo Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.308.227.954,00, menurun sebesar (Rp2.580.319.122,00) atau 27.72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.888.547.076,00. Penurunan ini mengindikasikan bahwa dana transfer antar daerah yang menjadi hak Pemerintah Kota Pariaman, termasuk Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dan dana perimbangan lainnya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah diterima sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam mekanisme penyaluran dana transfer dari pemerintah provinsi. Kurang Salur Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana

Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

1.l Piutang Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp615.550.430,66	**Rp608.409.748,66**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp615.550.430,66, tidak mengalami peningkatan dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp608.409.748,66, dengan kenaikan sebesar Rp7.140.682,00 atau 1.17% yang berasal dari kenaikan Piutang Jasa Revolving BPR dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir Tahun 2025, rincian disajikan pada tabel 5.60 berikut.

Tabel 5.60 Daftar Piutang Lainnya

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang jasa bunga dana bergulir KSP/USP	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang jasa bunga dana bergulir BPR	117.367.333,33	117.367.333,33
3	Piutang Lain-lain TGR	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR	6.679.737,00	6.545.662,00
5	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	7.006.607,00	0,00
6	Piutang Jaminan Pemeliharaan	320.434.635,00	320.434.635,00
7	Piutang Kelebihan Pembayaran	139.049.569,16	139.049.569,16
Jumlah		**615.550.430,66**	**608.409.748,66**

Uraian Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar **Rp615.550.430,66** sebagai berikut.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir KSP/USP sebesar **Rp24.600.000,00**

  Dana bergulir Penguatan Modal Koperasi Kota Pariaman bidang usaha simpan pinjam dikelola oleh Dinas Perindagkop UKM dan disalurkan melalui Bank Nagari Cabang Pariaman sebesar Rp500.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat tunggakan pokok sebesar Rp123.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp36.900.000,00. Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman dana bergulir sesuai perjanjian yaitu 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk Bank Nagari. Sehingga saldo piutang bunga jasa dana bergulir per 31 Desember 2025 sebesar 2/3x Rp36.900.000 = Rp24.600.000,00.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/Revolving Fund sebesar **Rp117.367.333,33**
  Pengelolaan dana bergulir Revolving Fund dulunya dilaksanakan oleh DPMDES dan sekarang oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disalurkan melalui PT. BPR La Mangau Sejahtera sebesar Rp2.500.000.000,00. Tunggakan Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dengan rincian disajikan pada tabel 5.61 berikut.

Tabel 5.61 Rincian Saldo Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund*

Sektor	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Pertanian & Peternakan	32.742.500,00	32.742.500,00
Kelautan & Perikanan	34.467.000,00	34.467.000,00
Industri	49.705.000,00	49.705.000,00
Perdagangan	59.136.500,00	59.136.500,00
Jumlah	**176.051.000,00**	**176.051.000,00**

Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman Dana Bergulir sesuai perjanjian yaitu: 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk bank pengelola, sehingga saldo piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2025 sebesar 2/3 x Rp176.051.000,00 = Rp117.367.333,33.

- Piutang Lain-lain TGR sebesar **Rp412.549,17**

  Piutang Lain-lain TGR merupakan piutang TGR yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2025. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK Semester II Tahun 2025 nilai Piutang TGR per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp412.549,17.

- Piutang Jasa *Revolving* BPR sebesar **Rp6.679.737,00**

  Merupakan Jasa Giro Tabungan *Revolving* pada Bank BPR La Mangau Sejahtera berdasarkan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Kota Pariaman surat nomor 026/PT.BPR /TCI /II-2026.

- Piutang Pendapatan Bunga sebesar **Rp7.006.607,00**
  Merupakan pendapatan bunga tabungan BPR Tahun 2025 berdasarkan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Kota Pariaman Nomor 026/PT.BPR/TCI/II-2026 tanggal 18 Februari 2026.
- Piutang Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp320.434.635,00**

  Merupakan Piutang atas Jaminan Pelaksanaan oleh *Videi General Insurance* sebesar Rp641.083.635,00 atas pemutusan kontrak kegiatan pekerjaan pengadaan bangunan gedung tempat kerja pengadaan bangunan kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT Puncak Timur Papua. (nilai berdasarkan progres lapangan), telah dilakukan angsuran pembayaran cicilan jaminan pelaksanaan oleh PT Puncak Timur Papua sebesar Rp320.649.000,00 dengan rincian pembayaran: tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp150.649.000,00, tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp60.000.000,00, dan tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 dan tanggal 06 Februari 2023 nilai pembayaran sebesar Rp15.000.000,00. Sampai dengan tahun 2025 tidak terdapat penyetoran atas sisa pembayaran oleh PT. Puncak Timur Papua berdasarkan surat Perintah Pembayaran Jaminan Pelaksanaan RSUD Sadikin Nomor 005/002A/RS-SDK/2025 tanggal 10 Desember 2025.

- Piutang Kelebihan Pembayaran sebesar **Rp139.049.569,16**

Merupakan piutang kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Tahun Anggaran 2019 pada PT Puncak Timur Papua. Sampai dengan tahun 2025 tidak terdapat penyetoran atas sisa pembayaran oleh PT. Puncak Timur Papua Berdasarkan surat RSUD dr. Sadikin Nomor 005/001.A/RS-SDK/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal penagihan kelebihan pembayaran.

1.m Penyisihan Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp3.963.092.013,11)	**(Rp3.305.781.627,41)**

Penyisihan Piutang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang yang disajikan sebagai pengurang (kontra akun) dari saldo piutang bruto. Penyisihan dihitung berdasarkan analisis aging piutang sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Kebijakan Akuntansi, dengan tarif penyisihan: Lancar 0%, Kurang Lancar 10%, Diragukan 50%, dan Macet 100%.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.963.092.013,11), meningkat (makin bertambah) sebesar Rp657.310.385,70 atau 24.31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.305.781.627,41). Peningkatan penyisihan ini sejalan dengan bertambahnya volume piutang, khususnya piutang PBB P2 dan piutang retribusi. Penyisihan terdiri dari: Penyisihan Piutang Pajak Rp2.467.721.627,66; Penyisihan Piutang Retribusi Rp838.622.294,30; Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Rp54.884.004,49; dan Penyisihan Piutang Lainnya Rp601.864.086,66.

a. Penyisihan Piutang Pendapatan	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp3.361.227.926,45)	**(Rp2.703.917.540,75)**

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp3.361.227.926,45) dan (Rp2.703.917.540,75) dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp2.467.721.627,66)	**(Rp1.882.979.300,21)**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp2.467.721.627,66) dan (Rp1.882.979.300,21), dengan rincian disajikan pada tabel 5.62 berikut.

Tabel 5.62 Daftar Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Pajak Restoran	(15.030.200,00)	(15.030.200,00)
2	PBB P2	(2.452.524.727,66)	(1.867.782.400,21)
3	Pajak Parkir	(166.700,00)	(166.700,00)
Jumlah		**(2.467.721.627,66)**	**(1.882.979.300,21)**

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp584.742.327,45 dari penyisihan piutang per 31 Desember 2024 . (Rincian disajikan pada **Lampiran 8a**).

2. Penyisihan Piutang Retribusi	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp329.597.878,00)	(Rp718.161.933,36)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp329.597.878,80) dan (Rp718.161.933,36), dengan rincian disajikan pada tabel 5.63 berikut.

Tabel 5.63 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	(88.206.943,00)	(61.646.943,00)
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	(1.046.000,00)	(1.046.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar/WC Umum (Disperindagkop)	(2.175.000,00)	(2.175.000,00)
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Pujasera (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	(122.600.000,00)	(24.390.000,00)
5	Retribusi Air Bersih (Dinas Perkim LH)	0,00	(570.214.925,12)
6	Retribusi Pelayanan Persampahan (Dinas Perkim LH)	(91.261.500,00)	(38.143.445,00)
7	Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan)	(9.650.000,00)	(9.650.000,00)
8	Retribusi IMB (DPMPTSP dan Naker)	(10.983.848,00)	(10.983.848,00)
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PUPRP)	(3.674.587,80)	-
Jumlah		**329.597.878,80**	**(718.250.161,12)**

Rincian disajikan pada **Lampiran 8b**.

3. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp563.908.419,99)	(Rp102.776.307,19)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp563.908.419,99) dan (Rp102.776.307,19). Penyesuaian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penyisihan terhadap piutang pendapatan denda retribusi dan pendapatan jasa layanan air pada UPTD. Air Bersih.

Rincian disajikan pada **Lampiran 8c**.

b. Penyisihan Piutang Lainnya	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp601.864.086,66)	(Rp601.864.086,66)

Penyisihan Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp601.864.086,66) dan (Rp601.864.086,66), dengan rincian disajikan pada tabel 5.64 berikut.

Tabel 5.64 Daftar Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang bunga dana bergulir KSP/USP	(24.600.000,00)	(24.600.000,00)
2	Piutang bunga dana bergulir BPR	(117.367.333,33)	(117.367.333,33)
4	Piutang Lain-lain TGR	(412.549,17)	(412.549,17)
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	(320.434.635,00)	(320.434.635,00)
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	(139.049.569,16)	(139.049.569,16)
Jumlah		**(601.864.086,66)**	**(601.864.086,66)**

Rincian disajikan pada **Lampiran 8c**.

1.n Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp5.559.118.126,83	Rp5.022.938.757,10

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dinilai berdasarkan metode harga perolehan dan dicatat menggunakan metode perpetual. Saldo persediaan diperoleh dari hasil opname fisik persediaan per 31 Desember 2025.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.559.118.126,83, meningkat sebesar Rp536.179.369,73 atau 10,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.022.938.757,10. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan Obat-obatan pada RSUD Sadikin dan Puskesmas sebesar Rp554.609.442,40 dan penambahan Bahan Baku sebesar Rp263.340.318,00. Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik per 31 Desember 2025 oleh tim inventarisasi masing-masing Perangkat Daerah, dengan rincian disajikan pada tabel 5.65 berikut.

Tabel 5.65 Daftar Persediaan

No	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan Kimia	95.478.400,00	101.173.900,00
2	Bahan Baku	263.340.318,00	0,00
3	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.569.000,00	31.698.500,00
4	Bahan Lainnya	10.866.600,00	531.470.664,00
5	Alat Tulis Kantor	64.681.814,00	56.555.002,00
6	Bahan Cetak	83.855.600,00	139.008.300,00
7	Benda Pos	950.000,00	3.120.000,00

No	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
8	Bahan Komputer	362.633.550,00	0,00
9	Alat Listrik	302.653.000,00	432.168.650,00
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	800.000,00
11	Obat	4.045.529.244,50	3.525.016.662,10
12	Obat-obatan Lainnya	208.578.339,00	174.481.479,00
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	64.802.731,33	3.250.000,00
14	Pakan	24.179.530,00	24.195.600,00
Jumlah		**5.559.118.126,83**	**5.022.938.757,10**

Rincian data persediaan per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 9**.

Per 31 Desember 2025 terdapat persediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang kadaluarsa dan/atau sudah dimusnahkan nilai persediaan sebesar Rp252.189.299,00. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor 35/000.2.4/2025 tangal 23 Desember 2025 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025. Daftar obat dan perbekalan kesehatan yang dihapuskan dari persediaan obat perbekalan kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Pariaman sebesar Rp85.124.345,00, obat yang berasal dari program APBN/APBD sebesar Rp167.064.954,00.

Terdapat sisa persediaan logistik bantuan tanggap darurat bencana cuaca ekstrem sebesar Rp839.373.850,00. Persediaan tersebut merupakan barang bantuan yang belum disalurkan dan masih tersimpan pada BPBD serta Pendopo Wali Kota Pariaman sampai dengan tanggal pelaporan, untuk mendukung kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana.

Tabel 5.66 Sisa Logistik Bantuan Tanggap Darurat Bencana

NO	Jenis Persediaan	Tempat	Nilai Persediaan
1	Paket Sembako	BPBD	17.833.500,00
2	Kasur Lipat	Pendopo	84.500.000,00
3	Higenis Kita	BPBD	15.200.000,00
4	Velbed	BPBD	96.560.000,00
5	Tenda Keluarga	BPBD	296.868.000,00
6	Beras	Pendopo	328.412.350,00
Jumlah			**839.373.850,00**

2. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp63.884.373.500,00	**Rp60.948.373.500,00**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, terdiri dari Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Permanen berupa

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Jangka Panjang disajikan sesuai PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.884.373.500,00, meningkat sebesar Rp2.936.000.000,00 atau 4.82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.948.373.500,00. Peningkatan seluruhnya berasal dari penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Nagari Tahun 2025 sebesar Rp2.936.000.000,00.

		Tahun 2025	Tahun 2024
2.a	**Dana Bergulir**	**Rp775.474.500,00**	**Rp775.474.500,00**

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama sebesar Rp775.474.500,00, tidak mengalami perubahan (0,00%). Dana Bergulir disajikan bersih (net) setelah dikurangi Investasi Non Permanen yang Diragukan Tidak Tertagih sebesar Rp1.724.525.500,00 dari total Dana Bergulir bruto sebesar Rp2.500.000.000,00. Penyisihan dihitung berdasarkan *aging schedule*: Kurang Lancar (1-3 tahun) 10%, Diragukan (3-5 tahun) 50%, dan Macet (>5 tahun) 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Investasi permanen yang diragukan tidak tertagih senilai Rp1.724.525.500,00 merupakan penyisihan atas dana bergulir berdasarkan *aging schedule* maka diperoleh rincian dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM dan untuk penguatan modal usaha koperasi, yaitu:

- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM sebesar Rp1.601.525.500.
- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha koperasi sebesar Rp123.000.000,00.

Alokasi Dana Bergulir tersebut terdiri dari:

1. Bantuan penguatan modal usaha bagi UMKM di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme "jasa/bunga dan biaya dana bergulir" sebesar 6% per tahun. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Kota Pariaman bekerja sama dengan BPR LPN Lurah Ampalu Kurai Taji (sekarang BPR Tri Capital Investama (TCI) Sumbar di Kurai Taji). Atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di BPR, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan BPR, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk BPR sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Penyaluran awal dana bergulir adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dan disalurkan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 pada bulan Oktober 2004 melalui BPR dan pengguliran pertama yang berasal dari pokok sebesar Rp91.500.000,00. Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2025 dengan rincian pada tabel 5.67 berikut.

Tabel 5.67 Rincian Dana Bergulir bagi UMKM

No.	Sektor	Jumlah Nasabah (orang)	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	Pertanian dan Peternakan	48	351.500.000,00	279.534.500,00	32.742.500,00

No.	Sektor	Jumlah Nasabah (orang)	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
2	Kelautan dan Perikanan	77	412.500.000,00	321.747.500,00	34.467.000,00
3	Industri	106	588.500.000,00	434.986.500,00	49.705.000,00
4	Perdagangan	181	739.000.000,00	565.257.000,00	59.136.500,00
Jumlah		**412**	**2.091.500.000,00**	**1.601.525.500,00**	**176.051.000,00**

Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan bagi UMKM di BPR Tahun 2025 adalah sebesar Rp406.052.307,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 330.0.00419.0 bahwa rekening tersebut tidak dapat dicairkan untuk di transfer ke rekening Kas Daerah karena masalah administrasi specimen tanda tangan pemilik rekening dan saldo sebesar Rp6.679.737,00 yang bersumber dari penerimaan jasa giro rekening pada rekening Nomor 330.0.00425.0. Kedua saldo tersebut mengendap di rekening masing-masing dan selama Tahun 2025 tidak terdapat penambahan nilai baik atas tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.

Saldo pada Rekening Dana Bergulir Tahun 2025 sebesar Rp406.052.307,00 meningkat sebesar Rp7.006.607,00 dari Saldo per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp399.045.700,00 merupakan bunga tabungan Tahun 2025 berdasarkan Laporan Perekembangan Dana Bergulir Kota Pariaman Nomor 026/PT.BPR/TCI/II-2026 tanggal 18 Februari 2026.

2. Bantuan penguatan modal kepada Koperasi di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme "jasa/bunga dan biaya dana bergulir" sebesar 6% per tahun. Atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di Bank Nagari, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan Bank Nagari, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk Bank Nagari sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Penyaluran awal dana bergulir pada Tahun 2006 adalah sebesar Rp500.000.000,00 melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM. Selanjutnya terdapat pengguliran pertama dari pengembalian pokok pada Tahun 2006 dan pengguliran kedua pada Tahun 2009 dengan total plafon Rp280.000.000,00.

   Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan Modal Koperasi di Bank Nagari adalah sebesar Rp377.000.000,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 05000101009047 sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan sisa saldo tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 14 November 2025. Berdasarkan verifikasi terhadap penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah dan surat Sekretariat Daerah Kota Pariaman Nomor 900/1293/BPKPD/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

Rincian perhitungan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 10a dan 10b**.

2.b	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp63.108.899.000,00	Rp60.172.899.000,00

Investasi Permanen merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan. Penyertaan modal disajikan berdasarkan metode biaya (*cost method*) sesuai PSAP Nomor 06 mengingat kepemilikan kurang dari 20%.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.108.899.000,00, meningkat sebesar Rp2.936.000.000,00 atau 4.88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.172.899.000,00. Peningkatan ini berasal dari penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Nagari sebesar Rp2.936.000.000,00 (2.936 lembar saham) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2025 dan Surat Bank Nagari Nomor SR/027/DIR/PD/05-2025 perihal Penambahan Modal Pemerintah Kota Pariaman. Penyertaan modal pemerintah Kota Pariaman kepada BUMD, yaitu:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Bank Nagari sebesar Rp60.284.000.000,00 berupa saham seri A sejumlah 60.284 lembar atau merupakan 3,14% dari seluruh jumlah saham Seri A dalam perseroan berdasarkan surat Bank Nagari nomor SR/018/DIR/PD/02-2026 tanggal 4 Februari 2026, dengan rincian pada tabel 5.68 berikut.

Tabel 5.68 Rincian Penyertaan Modal pada Bank Nagari

No.	Tahun	Nominal (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
1	2003-2006	1.000.000,00	7.100	7.100.000.000,00
2	2007-2009	1.000.000,00	1.500	1.500.000.000,00
		1.000.000,00	2	2.000.000,00
3	2010	1.000.000,00	742	742.000.000,00
4	2011	1.000.000,00	1.479	1.479.000.000,00
5	2012	1.000.000,00	3.184	3.184.000.000,00
6	2013	1.000.000,00	5.582	5.582.000.000,00
7	2014	1.000.000,00	5.111	5.111.000.000,00
8	2015	1.000.000,00	7.515	7.515.000.000,00
9	2017	1.000.000,00	11.183	11.183.000.000,00
10	2018	1.000.000,00	1.800	1.800.000.000,00
11	2020	1.000.000,00	8.650	8.650.000.000,00
12	2022	1.000.000,00	2.500	2.500.000.000,00
13	2024	1.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00
13	2025	1.000.000,00	2.936	2.936.000.000,00
Jumlah			**60.284**	**60.284.000.000,00**

2. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00.

Penyertaan Modal pertama kali dilakukan pada Tahun 2007 melalui Kantor Perwakilan Sumbar PT Balairung Citra Jaya Sumbar dibentuk dengan Akta Notaris Tentang Pendirian Nomor 15 Tanggal 10 Nopember 2009 yang berkedudukan di Jakarta. Pada Tahun 2011 PT Balairung Citra Jaya Sumbar menerbitkan saham atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp1.000.000.000,00 yang terdiri dari Saham Seri A sebanyak 600 lembar dengan nominal @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebanyak 400.000 lembar dengan nominal @ Rp1.000,00.

Tambahan modal disetor pada Tahun 2012 sebesar Rp1.824.899.000,00 terdiri dari Saham Seri A sebesar Rp1.094.939.400,00 atau 1.094,94 lembar saham dengan harga perlembar @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebesar Rp729.959.600,00 atau 729.959,6 lembar saham dengan harga perlembar sebesar @ Rp1.000,00.
Core Business dari PT Balairung Citra Jaya Sumbar adalah jasa pengelolaan hotel. Persentase saham Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sampai dengan tahun 2025 sebesar 1,72% dari nilai saham Rp2.824.899.000,00 dan sampai dengan tanggal pelaporan LKPD Kota Pariaman TA 2025 data bagi hasil deviden PT Balairung Citra Jaya Sumbar belum diterima oleh pemerintah daerah. (Rincian Investasi Permanen disajikan pada **Lampiran 11**).

3. Aset Tetap

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp586.607.120.587,22	**Rp598.320.567.010,70**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai PSAP Nomor 07. Nilai buku Aset Tetap merupakan nilai perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk Peralatan dan Mesin, Jalan-Irigasi-Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, serta metode saldo menurun berganda untuk Gedung dan Bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp586.607.120.587,22, menurun sebesar (Rp11.713.446.423,48) atau 1.96% dibandingkan nilai buku per 31 Desember 2024 sebesar Rp598.320.567.010,70. Penurunan nilai buku ini terjadi karena beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp64.546.392.627,82 melebihi penambahan aset baru dari belanja modal. Secara nilai bruto (sebelum akumulasi penyusutan), Aset Tetap mengalami peningkatan dari belanja modal, hibah, dan koreksi aset. rincian rekapitulasi aset tetap pada tabel 5.69 berikut.

Tabel 5.69 Rekapitulasi Aset Tetap TA 2025 dan 2024 (Nilai Perolehan)

No	Jenis Aset Tetap	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
a	Tanah	103.328.821.439,25	103.598.821.439,25	(0.26)%
b	Peralatan dan Mesin	263.246.447.906,93	256.586.551.868,93	2.60%
c	Gedung dan Bangunan	557.468.992.767,90	553.208.953.941,84	0.77%
d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	967.112.492.364,32	926.566.640.376,04	4.38%

No	Jenis Aset Tetap	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Naik/(Turun) %
e	Aset Tetap Lainnya	83.159.604.828,56	81.522.445.476,56	2.01%
f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.359.805.963,00	46.359.805.963,00	(0.02)%
g	Akumulasi Penyusutan	(1.434.069.044.682,74)	(1.369.522.652.054,92)	4.71%
Jumlah		**586.607.120.587,22**	**598.320.567.010,70**	**(1.98)%**

3.a Tanah	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp103.328.821.439,25	**Rp103.598.821.439,25**

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.328.821.439,25, menurun sebesar (Rp270.000.000,00) atau 0.26% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp103.598.821.439,25, dengan rincian disajikan pada tabel 5.70 berikut.

Tabel 5.70 Rincian Saldo Aset Tetap Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**103.598.821.439,25**
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk Antar Perangkat Daerah (+)	-
Total Mutasi Tambah	**-**
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar Perangkat Daerah (-)	-
Penghapusan (-)	(270.000.000,00)
Total Mutasi Kurang	(270.000.000,00)
Saldo Akhir	**103.328.821.439,25**

Penambahan dan pengurangan aset tanah diuraikan sebagai berikut.

1. Penghapusan sebesar Rp270.000.000,00 merupakan aset tetap tanah yang dihapus bukukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.216/PDT/2023/PT PDG memerintahkan pengurangan luas tanah dan nilai tanah karan aur sebelumnya nilainya Rp1.605.420.000,00 - Rp270.000.000,00 = Rp1.335.420.000 dan pengurangan luas sebelumnya 59.460 m^2 -10.000 m^2 = 49.460 m^2 SK Penghapusan No 259/900/2025
2. Tanah senilai Rp103.328.821.439,25 merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Pariaman yang pemanfaatan atas tanah dimaksud digunakan untuk bangunan gedung, tempat pembuangan sampah, pasar produksi, jalan *by pass*, irigasi, jalan, dan jembatan.

Dari seluruh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

1. 267 persil tanah bersertifikat dengan luas 1.104.315,50 m² senilai Rp72.417.575,49. Total fisik sertifikat adalah sebanyak 386 sertifikat;

2. 9 persil tanah masih dalam kondisi belum balik nama ke Pemerintah Kota Pariaman dengan luas 43.589,00 m² senilai Rp2.779.360.000,00 yaitu:
   a) Tanah untuk Gedung Pariwisata Ampalu Pauh, hibah dari Ibu Ratna Juwita (Eks Tanah STIE-SB), luas 31.910 m^2 senilai Rp2.616.620.000,00;
   b) SDN 02 Karan Aur, luas 725 m^2 senilai Rp45.000.000,00;
   c) Tanah Bangunan Sekolah SDN 06 Punggung Lading (wakaf), luas 2.479 m^2 senilai Rp12.250.000,00;
   d) Tanah Bangunan Sekolah SDN 04 Kajai, luas 2.015 m^2 senilai Rp42.500.000,00;
   e) Tanah Bangunan SDN 10 Sungai Pasak, luas 1.515 m^2 senilai Rp14.440.000,00;
   f) Tanah Bangunan SDN 02 Marunggi, luas 645 m^2 senilai Rp12.900.000,00;
   g) Tanah Bangunan SDN 11 Cubadak Air Utara, luas 1.550 m^2 senilai Rp7.710.000,00;
   h) Gedung Nasional (STIE-SB) Kelurahan Jawi-Jawi I Kota Pariaman, luas 2.150 m^2 senilai Rp23.650.000,00;
   i) Puskesmas Pembantu Talago Sariak, luas 600 m^2 senilai Rp4.290.000,00.
3. Belum bersertifikat sebanyak 217 bidang tanah dengan luas 997.520,82 m^2 senilai Rp30.911.245,95.

Rincian Tanah masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 12**.

Selain itu, terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak tiga persil dengan nilai perolehan:

1. Tanah TPI Muaro pinjam pakai dengan Satuan Kepolisian Perairan Polres Kota Pariaman, nilai perolehan Rp18.450.000,00; dan
2. Tanah Pantai Gandoriah di belakang Hotel Nan Tongga yang disewakan kepada masyarakat dengan nilai perolehan Rp18.540.000,00.

Tabel 5.71 Data Aset Tetap Tanah yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak Dalam Penguasaan Pemerintahan Kota Pariaman

No	Pejabat/Instansi Pemakai	Jenis BMD yang Dipinjamkan	Tanggal Pinjam Pakai	Jangka Waktu
1	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah ukuran 8x10 m² untuk pos jaga kapal Satpolair Polres Pariaman	23 Mei 2020	5 Tahun

Terdapat Aset Tetap Tanah yang disewakan kepada pihak lain sebanyak satu persil, yaitu tanah ukuran 24 x 7,5 m² di kawasan wisata Gandoriah untuk Warung Gandoriah dengan Pejabat Pemakai a.n. Irwan Maryon, tanggal sewa 19 Oktober 2023 selama lima tahun.

		Tahun 2025	Tahun 2024
3.b	**Peralatan dan Mesin**	**Rp263.246.447.906,93**	**Rp256.586.551.868,93**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp263.246.447.906,93, meningkat sebesar Rp6.659.896.038,00 atau 2.60% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp256.586.551.868,93, dengan rincian disajikan pada tabel 5.73 berikut.

Tabel 5.72 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**256.586.551.868,93**
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal(+)	679.277.481,00
Belanja modal (+)	10.884.258.129,00
Hibah Masuk (+)	365.374.128,00
Salah Rekening (+)	48.213.800,00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	189.941.460,00
Transfer Masuk Antar Perangkat Daerah (+)	2.502.920.532,00
Total Mutasi Tambah	**14.669.985.530,00**
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar Perangkat Daerah (-)	(2.502.920.532,00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(1.786.275.642,00)
Salah Rekening (-)	(5.000.000,00)
mutasi ke Aset lainya (-)	(35.790.000,00)
Aset tak Berwujud (-)	(45.000.000,00)
Penghapusan (-)	(3.635.103.318,00)
Total Mutasi Kurang	(8.010.089.492,00)
Saldo Akhir	**263.246.447.906,93**

Rincian Peralatan dan Mesin disajikan pada **Lampiran 13.**

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp263.246.447.906,93 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Jenis	Nilai
1	Alat besar	10.108.008.279,00
2	Alat angkutan	65.452.434.363,95
3	Alat bengkel dan alat ukur	3.989.668.670,00
4	Alat pertanian	4.620.184.021,20
5	Alat kantor dan rumah tangga	62.378.940.411,80
6	Alat studio, komunikasi, dan pemancar	8.579.436.747,33
7	Alat kedokteran dan kesehatan	37.564.184.407,00
8	Alat laboratorium	27.831.725.701,28
9	Alat persenjataan	857.759.326,00
10	Komputer	35.513.680.581,00
11	Alat produksi, pengolahan, dan pemurnian	16.250.000,00

No	Jenis	Nilai
12	Alat keselamatan kerja	2.764.295.370,00
13	Alat peraga	197.948.709,00
14	Peralatan proses/produksi	31.300.000,00
15	Rambu-rambu	2.982.544.369,00
16	Peralatan olah raga	358.086.950,00
Jumlah		**263.246.447.906,93**

Penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.884.258.129,00 berdasarkan LRA Tahun 2025;
2. Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp679.277.481,00 adalah koreksi karena pencatatan kembali BMD yang belum dicatat dalam Simda BMD pada:
   a. Dinas Perhubungan sebesar Rp490.367.040,00 Hibah Kementrian Perhubungan.
   b. Puskesmas Kampung Baru Padusunan sebesar Rp9.000.000,00 Motor yang sebelumnya kondisi rusak kembali menjadi kondisi baik setelah diperbaiki dan digunakan kembali untuk operasional.
   c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp38.100.000,00 Pencatatan Ulang Hibah Motor Kawasaki KLX Hibah dari Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri B 3832 PJO
   d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp10.000.000,00 Pembelian tahun 2024 Lemari Arsip
3. Hibah Masuk (+) Bantuan dari Pihak Lain sebesar Rp365.374.128,00 dengan rincian:

Tabel 5.74 Data Mutasi (+) Hibah dari Pihak Ketiga

No.	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Bantuan/Hibah (+)	Keterangan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mobil Pick Up	319.899.999,00	Pick Up Isuzu Traga Hibah BNPB Bidang KL (BAST 253/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025)
		Mesin Chain Saw	18.252.000,00	Hibah BNPB Bidang KL (BAST 253/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025) mesin chain saw 2 unit x 9.126.000 = 18.252.000
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	PC	19.719.426,00	Hibah Perpustakaan Nasional RI (Nomor 057.01.1.531535/2025)
		Printer	7.502.703,00	Hibah Perpustakaan Nasional RI (Nomor 057.01.1.531535/2025)
Jumlah			**365.374.128,00**	

4. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp48.213.800,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.75 Data Mutasi (+) Reklasifikasi Salah Rekening

Perangkat Daerah		Nilai Reklas	Rincian Barang	Nilai	Keterangan
UPT. Kecamatan Pariaman Utara					
1	SDN 03 Naras Hilir (Exs SDN 04 Nareh Hilir)	600,000.00	Microphone Gantung	600,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
2	SDN 04 Cubadak Air (Exs SDN 09 Cubadak Air)	4,600,000.00	Speaker	4,600,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
3	SDN 05 Tungkal Utara (Exs SDN 15 Sungai Betung)	1,200,000.00	teralis besi pintu ruang guru 1.200.000	1,200,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
4	SDN 13 Tungkal Selatan (Exs SDN 17 Hulu Banda)	6,500,000.00	infokus 6.500.000	6,500,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
5	SDN 20 Sintuk (Exs SDN 24 Sintuk)	300,000.00	rebana 2 x 150.000 = 300.000	300,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
Jumlah		**13,200,000.00**		**13,200,000.00**	
UPT. Kecamatan Pariaman Tengah					
1	SDN 18 Karan Aur (Exs SDN 14 Karan Aur)	141,800.00	Meja siswa	141,800.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
2	SDN 01 Kp.Jawa I (Exs SDN 16 Kampung Jawa I (	1,920,000.00	Pembelian Foto Presiden dan Wakil Presiden 24 x 80.000	1,920,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
3	SDN 17 Kampung Baru (Exs SDN 27 Kampung Baru)	12,200,000.00	laptop 1 unit x 9.000.000 kipas angin 2 x 600.000 = 1.200.000 , kursi siswa 10 x 200.000 = 2.000.000	12,200,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
Jumlah		**14,261,800.00**		**14,261,800.00**	
UPT. Kecamatan Pariaman Selatan					
1	SDN 01 Kurai Taji (Ex SDN 04 Pauh)	2,300,000.00	Rebana	2,300,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
2	SDN 05 Marabau	2,300,000.00	Rebana	2,300,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
3	SDN 10 Palak Aneh (Exs SDN 11 Palak Aneh)	500,000.00	Carano (Alat Peraga Kesenian)	500,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
4	SDN 12 Taluk (Exs SDN 15 Taluk)	2,300,000.00	Rebana	2,300,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
Jumlah		**7,400,000.00**		**7,400,000.00**	

Perangkat Daerah		Nilai Reklas	Rincian Barang	Nilai	Keterangan
UPT. Kecamatan Pariaman Timur					
1	SDN 02 Talago Sariak (Kec. Pariaman Timur)	9,950,000.00	Peralatan Drum Band	9,950,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
2	SDN 11 Koto Marapak (Kec. Pariaman Timur)	675,000.00	Papan Duk	675,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
3	SDN 06 Kp. Baru Padusunan (Kec. Pariaman Timur)	2,300,000.00	Rebana	2,300,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
Jumlah		**12,925,000.00**		**12,925,000.00**	
SMP					
1	SMP Negeri 9 Kota Pariaman	427,000.00	Stick Drum Band	427,000.00	Reklas dari ATL Ke Peralatan dan Mesin Belanja Modal 2025
Jumlah		**427,000.00**		**427,000.00**	
Total				**48,213,800.00**	

5. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp189.941.460,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa, namun memenuhi kriteria aset tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.76 berikut.

Tabel 5.76 Data Mutasi (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa

No.	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)
1	SDN 05 Tungkal Utara (Exs SDN 15 Sungai Betung)	Meja Siswa 10 x 200.000 = 2.000.000, Kursi Siswa 10 x 200.000 = 2.000.000 lemari kabinet 2.800.000	6.800.000,00
2	Dinas Perpustakaan & Arsip	Rak Buku 3.200.000 Rak Koran 1.800.000	5.000.000,00
3	Kelurahan Kp.Jawa 1	Lemari Arsip 1 Unit	3.993.250,00
4	Kelurahan Jati Hilir	1 Unit PC	10.000.000,00
5	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2 Unit PC x 9.490.355	18.980.710,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Mesin Chain Saw ms 170 3.720.000 x 3 = 11.160.000, Mesin Chain Saw ms 382 9.580.000 x 3 = 28.740.000 (Dana BTT)	79.500.000,00
		mesin pompa air honda wb 30xn 1 x 9.380.000 , mesin pompa wl 30xn 7.220.000 (Dana BTT)	
		Radio HT 20 unit x 1.150.000 (Dana BTT)	

No.	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)
7	Bagian Umum Sekretariat daerah	kapitalisasi barang dan jasa yaitu 3 lemari arsip 6.600.000, rumah burung 10.000.000 + 2 lampu tidur 3.800.000 + meja makan prasmanan 1 set 10.267.500 + 6 kipas angin 3.000.000+2 set karpet 20.000.000 + exhausfan 10.500.000 + exhausfan 1500.000	65.667.500,00
Jumlah			**189.941.460,00**

6. Mutasi Antar Perangkat Daerah sebesar Rp2.502.920.532,00 merupakan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian lebih lanjut pada tabel 5.77 berikut.

Tabel 5.77 Data Mutasi (+) Antar Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	UPT. Kec. Pariaman utara	426,434,850.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	175,192,700.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	371,443,820.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
4	UPT. Kec. Pariaman timur	336,797,000.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
5	TK Pariaman Timur	9,956,700.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
6	TK Pariaman Utara	9,956,700.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
7	UPT Sanggar Kegiatan Belajar SPNF	191,176,469.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
8	SMP 1 Pariaman	57,003,200.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
9	SMP 2 Pariaman	68,125,000.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
10	SMP 3 Pariaman	115,800,000.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
11	SMP 4 Pariaman	63,884,730.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
12	SMP 5 Pariaman	32,837,000.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
13	SMP 6 Pariaman	77,433,400.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
14	SMP 7 Pariaman	102,350,900.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
15	SMP 8 Pariaman	33,310,900.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
16	SMP 9 Pariaman	52,690,800.00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	289,036,363.00	BAST 030.032/02/BPKPD-2023 MINI BUS TRADO

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
			MHMFE447F3T00734 Tahun 2004 Dari Dinas Perhubungan
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	13,300,000.00	Mutasi Dari BPKPD Ke Perkim LH 2 Unit Chain Saw MS 170 = 3.720.000 MS 382 = 9.580.000 BAST (BA/360/001/TD-BPBD/XII/2025)
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7,990,000.00	Gordyn (7.490.000) dan stand mic (500.000) dari DPMDES
20	Upt. Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan	2,000,000.00	Speaker Dari Dinas Pertanian
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66,200,000.00	Mutasi Dari BPKPD Ke BPBD Mesin Chain Saw, Mesin Pompa Air dan HT
Jumlah		**2,502,920,532.00**	

7. Mutasi keluar antar Perangkat Daerah sebesar Rp2.502.920.532,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar Perangkat Daerah.
8. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp475.595.209,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin namun tidak memenuhi kriteria Aset Tetap pada Perangkat Daerah/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.78 berikut.

Tabel 5.78 Data Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

No	Perangkat Daerah	Nilai Tidak Kapitalisasi	Rincian Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	542,759,976.00	Meja dan Kursi Siswa 1520 Unit, diserahkan ke sekolah-sekolah negeri kota pariaman	381,116,310.00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Chromebook 16 Unit, connector cable analog aio 1 unit, wireless router 4b1001.504-AIO networking 2.4 g Gram	103,966,766.00	Barang diserahkan ke SD IT Unggulan Aisyiah Kota Pariaman
			Alat Peraga Edukasi (APE)	14,850,100.00	Harga dibawah Rp300.000,00
			ATK Untuk 30 Guru Magang Paud	3,000,000.00	Barang Habis Pakai
			Evercross NB1-i5001-13 4 Unit Untuk TK Swasta	39,826,800.00	Barang Diserahkan Ke TK Habibi, TK Aisyiyah Bustanul Athfal Bato, TK ABA Rambai, TK At-Tin
		542,759,976.00		**542,759,976.00**	
Kesehatan					
1	Dinas Kesehatan	3,667,000.00	Alat Kebersihan	3,667,000.00	Belanja Barang Habis

No	Perangkat Daerah	Nilai Tidak Kapitalisasi	Rincian Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
			(Kemoceng, sapu, sabun pembersih, plastik sampah, sikat wc)		Pakai
2	Puskesmas Pariaman	2,357,160.00	timbangan BB 8 X 250.000 = 2.000.000 PEN LIGHT 5 X 60.000 = 300.000 TRAFFIC CONE 1 X 57.160 = 57.160	2,357,160.00	Harga dibawah Rp300.000,00
3	Puskesmas Kurai Taji	439,000.00	339.000 belanja mouse adapter tensi meter 100.000	439,000.00	Barang Mudah Rusak
4	Puskesmas Marunggi	970,000.00	minor set (barang habis pakai) Rp. 570.000 1 otoscop 150.000 1 penlight 50.000 1 set extraksi serumen 200.000	970,000.00	Barang Mudah Rusak, Harga dibawah Rp300.000,00
5	Puskesmas air santok	1,468,720.00	timbangan digital 388.500 (2 unit) kaca mulut 348.540 (4 unit)vacum 165.390 alat test auto check 376.290 (BHP) Timbangan 190.000 (2 unit)	1,468,720.00	Harga dibawah Rp300.000,00
6	Puskesmas Sikapak Barat	16,857,000.00	pretisi ruangan interior kabinet ruang gigi.Rp. 13.500.000 barang habis pakai (3.357.000)	16,857,000.00	Interior Kabinet melekat ke bangunan dan barang habis pakai harga dibawah 300.000
7	RSUD Dr.Sadikin Kota Pariaman	106,826,766.00	bahan habis pakai , barang di bawah 300.000 Pemeliharaan Genset 69.491.550 22.907.625	106,826,766.00	Belanja Pemeliharaan dan Belanja Bahan Habis Pakai, Harga Dibawah 300.000
		132,585,646.00		**132,585,646.00**	
UPT. Kec. Pariaman Utara					
1	SDN 01 Balai Nareh	3,910,000.00	pagar sekolah 1.960.000 kursi siswa 130.000 x 15 = 1.950.000	3,910,000.00	Pagar Melekat ke Bangunan, Kursi Siswa dibawah 300.000,00
2	SDN 08 Apar (Exs SDN 07 Apar)	2,250,000.00	6 unit stop kontak x 150.000 = 900.000 Perlengkapan sound mic untuk mengajar 1 x 450.000 catrik printer 2 x 325.000 = 650.000,	2,250,000.00	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak

No	Perangkat Daerah	Nilai Tidak Kapitalisasi	Rincian Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
			Dispenser 250.000		
3	SDN 23 Balai Nareh (Exs SDN 11 Balai Nareh)	4,930,000.00	loudspeaker 260.000 Gorden Ruang Kelas 38 meter x 50.000 = 1.900.000 Gorden Ruang kepala sekolah 21 meter x 70.000 = 1.470.000 gorden ruang TU 5 Meter x 20.000 = 100,000 Pintu ruang TU = 400.000 Pintu ruang kelas = 800.000	4,930,000.00	Barang Harga dibawah 300.000, Pintu Melekat ke Bangunan
4	SDN 05 Tungkal Utara (Exs SDN 15 Sungai Betung)	6,600,000.00	Presiden dan wakil 10 unit x 140.000 = 1.400.000 teralis besi pintu ruang guru 1.200.000 Kursi dan meja siswa kursi 200.000 x 10 meja 200.000 x 10	6,600,000.00	Barang Harga dibawah 300.000, Pintu Melekat ke Bangunan
5	SDN 13 Tungkal Selatan (Exs SDN 17 Hulu Banda)	137,000.00	Alat Peraga Edukasi (APE) Magnet	137,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
6	SDN 17 Tungkal Utara (Exs SDN 22 Taji Taji)	500,000.00	Pot Bunga 20 Unit x 25.000	500,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
7	SDN 20 Sintuk (Exs SDN 24 Sintuk)	2,725,000.00	Rebana 2 x 150.000 = 300.000 meja siswa 5 x 285.000 = 1.425.000 kursi siswa 5 x 200.000 = 1.000.000	2,725,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
		21,052,000.00		**21,052,000.00**	
UPT. Kec. Pariaman Tengah					
1	SDN 06 Cimparuh (Exs SDN 11 Lapai)	1,150,000.00	speaker kecil 1 set X 250.000 jendela 2 unit x 450.000	1,150,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
2	SDN 18 Karan Aur (Exs SDN 14 Karan Aur)	141,800.00	Meja Siswa 1 Unit	141,800.00	Harga dibawah Rp300.000,00
3	SD N 01 KP.Jawa I (Exs SD 16 Kampung Jawa I)	2,520,000.00	microphone 3 x 125.000 microphone bando 1 x 225.000 1.920.000 Pembelian Foto Presiden dan wakil presiden	2,520,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
4	SDN 07 KP.Jawa II (Exs SD 17 Kampung Jawa II)	4,355,000.00	Gorden jendela kelas 67 unit x 65.000	4,355,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00

No	Perangkat Daerah	Nilai Tidak Kapitalisasi	Rincian Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
5	SDN 13 Lohong (Exs SDN 22 Lohong)	900,000.00	gambar presiden dan wakil 75.000 x 4, gambar guberbur dan Wali Kota serta wakil 75.000 x 8, di ruang guru dan kepsek	900,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
6	SDN 14 Pauh Timur (Exs SDN 23 Koto Mandakek)	250,000.00	Alat Peraga Edukasi (APE) Model Gigi	250,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
7	SDN 17 Kampung Baru (Exs SDN 27 Kampung Baru)	5,040,000.00	meja dan kursi siswa, meja 10 x 285.000 kursi 10 x 200.000 timbangan BB 1 unit 160.000 pita meteran 30.000	5,040,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
		14,356,800.00		**14,356,800.00**	
UPT. Kec. Pariaman Selatan					
1	SDN 03 TALUAK (Exs SDN 06 TALUK)	660,000.00	timbangan BB uk 100 kg 3 unit x 220.000	660,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
2	SDN 07 Toboh Palabah (Exs SDN 08 Toboh Palabah)	15,578,000.00	Meja Siswa 27 Unit, Kursi Siswa 27 Unit	15,578,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
3	SDN 08 Marunggi (Exs SDN 09 Marunggi)	200,000.00	Bendera	200,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
4	SDN 06 Punggung Lading (Exs SDN 12 Punggung Lading)	2,000,000.00	Belanja terali pintu dan perbaikan pagar sekolah	2,000,000.00	Melekat ke Bangunan
		18,438,000.00		**18,438,000.00**	
UPT. Kec. Pariaman Timur					
1	SDN 02 Talago Sariak (Kec. Pariaman Timur)	1,500,000.00	Bendera Drumband 6 X 250.000	1,500,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
2	SDN 05 Air Santok (Kec. Pariaman Timur)	8,000,000.00	Teralis Kelas II-V 8 x 500.000 Teralis Kelas VI 8 x 500.000	8,000,000.00	Melekat ke Bangunan
3	SDN 11 Koto Marapak (Kec. Pariaman Timur)	2,655,000.00	Pintu wc guru 745.000 seng IMB 60.000 X 16 = 960.000 Pintu kantor kepala sekolah 950.000	2,655,000.00	Melekat ke Bangunan
4	SDN 06 kp. Baru padusunan (Kec. Pariaman Timur)	1,000,000.00	meja siswa 1 x 200.000 kursi siswa 4 x 200.000	1,000,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
		13,155,000.00		**13,155,000.00**	

No	Perangkat Daerah	Nilai Tidak Kapitalisasi	Rincian Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
SMP					
1	SMP 1 Pariaman	7,280,000.00	pembuatan pintu dan jendela kelas pintu 3.500.000 x 2 jendela 280.000 x 1	7,280,000.00	Melekat ke Bangunan
2	SMP 2 Pariaman	37,950,000.00	Meja dan Kursi Siswa dibawah 300.000	37,950,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
3	SMP 3 Pariaman	35,200,000.00	meja dan kursi siswa meja 64 x 275.000 kursi 64 x 275.000	35,200,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
4	SMP 4 Pariaman	19,340,000.00	Foto gubernur, dan wakil 3 x 170.000, Wali Kota dan wakil 7 x 250.000, gorden 20 x 130.000, baterai laptop 980.000 meja siswa 30 x 270.000, kursi siswa 30 x 180.000	19,340,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
5	SMP 5 Pariaman	11,525,000.00	meja dan kursi siswa , meja 285.000 x 20, kursi 200.000 x 20 kipas angin 5 x 280.000 papan tulis 2 x 212.500	11,525,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
6	SMP 6 Pariaman	11,100,000.00	Foto presiden, gubernur dan Wali Kota 12 x 200.000, speaker 5 x 240.000 3 x 2.500.000= 7.500.000 monitor ruang labor informatika	11,100,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00 , Monitor Belanja Pemeliharaan
7	SMP 7 Pariaman	30,400,000.00	Meja Siswa 64 x 275.000 = 17.600.000 Kursi Siswa 64 x 200.000 = 12.800.000	30,400,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
8	SMP 8 Pariaman	3,660,000.00	Teralis jendela kelas 12 unit x 180.000 dan teralis pintu kelas 9 unit x 166.667	3,660,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
9	SMP 9 Pariaman	29,227,000.00	meja siswa 280.000 x 64 , kursi siswa 170.000 x 64, Stick Drumband 427.000 (3 Pasang Stick Besar, 3 Pasang Stick Kecil)	29,227,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
		185,682,000.00		**185,682,000.00**	
Perangkat Daerah					
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	43,930,000.00	Drum 40 unit x 1000.000	43,930,000.00	Belanja Barang Habis Pakai

No	Perangkat Daerah	Nilai Tidak Kapitalisasi	Rincian Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
	Pemukiman & Lingkungan Hidup		3.930.000 alat kebersihan		
2	Kantor Kesbang Pol	920,000.00	Tali bendera 46 meter x 20.000	920,000.00	Belanja Barang Habis Pakai
3	Dinas Sosial	1,600,000.00	Tabung gas 200.000 jam dinding 200.000 handuk 600.000 seprai 600.000	1,600,000.00	Belanja Barang Habis Pakai
4	Dinas Perhubungan	393,117,170.00	(marka jalan, 4 titik zona selamat anak) - SDN 02 Karan Aur - MTSN 1 Pariaman - SDN 03 Bungo Tanjung - SDN 01 Kp Jawa 1	393,117,170.00	Belanja Marka Jalan Garis Putih
5	UPT. Parkir	196,967,280.00	Pembuatan Marka Parkir (garis putih)	196,967,280.00	Pembuatan Marka Parkir (garis putih)
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3,300,000.00	papan informasi retribusi tempat wisata 11 x 300.000	3,300,000.00	Bahan Mudah Rusak/Rawan Hilang
7	Bagian Umum & Protokoler	217,011,770.00	kamar set RD Wali Kota 47.655.000 lukisan dinding 1.500.000 kursi plastik 200.000 x 50 = 10.000.000 kamar set RD Wakil Wali Kota 107.922.470 belanja slinger (160 x 225.000) , marawa kecil (44 x 55.000) marawa sedang (31 x 80.000) tiang bambu (190 x 17.000) total = 48.984.300 (Biaya Termasuk Pajak) stop kran 540.000 tabung gas 410.000	217,011,770.00	Belanja Melekat Ke Bangunan, Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja dibawah 300.000
8	Dinas Perpustakaan & Arsip	1,200,000.00	BOX arsip karton 2 Paket Rp. 1.200.000	1,200,000.00	Bahan Mudah Rusak
9	Kelurahan Lohong	200,000.00	Belanja gembok kantor lurah lohong 200.000	200,000.00	Harga dibawah Rp300.000,00
		858,246,220.00		**858,246,220.00**	
Total		**1,786,275,642.00**		**1,786,275,642.00**	

9. Reklasifikasi salah rekening (-) sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Peralatan Mesin ke Gedung dan Bangunan akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan. Reklasifikasi salah rekening ke Gedung dan

Bangunan pada UPT. Kecamatan Pariaman Selatan SDN 01 Kurai Taji atas pembuatan bangunan tugu Adiwiyata.

10. Mutasi ke Aset Lain-Lain (-) sebesar Rp35.790.000,00 merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang kondisi rusak berat dan merupakan hasil inventarisasi secara menyeluruh ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah KotaPariaman yaitu Pada UPT SD Kec. Pariaman Utara sebesar Rp. 35.790.00,00.

11. Mutasi (-) Aset Tak Berwujud sebesar Rp45.00.000,00 merupakan mutasi Aset Tetap Peralatan mesin yang dipindah catatkan kelompok Aset Tak Berwujud. Dengan rincian pada dinas PUPR Rp. 45.000.000,00 yaitu aplikasi PETA.

12. Penghapusan sebesar Rp3.635.103.318,00 merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapusbukukan disebabkan kondisi Aset Tetap yang rusak berat, lelang, hilang, dan telah diusulkan oleh Perangkat Daerah/Unit kerja pengguna untuk dihapusbukukan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor .

Tabel 5.79 Data Mutasi (-) Penghapusan

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Nomor SK
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	75,127,000.00	SK NO. 239/900/2025
2	UPT. Kec. Pariaman Utara	32,654,800.00	SK NO. 414/900/2025
3	UPT. Kec. Pariaman Tengah	2,500,000.00	SK NO. 448/900/2025
4	UPT. Kec. Pariaman Selatan	36,600,000.00	SK NO. 299/900/2025
5	SMP 4 Pariaman	1,100,000.00	SK NO. 453/900/2025
6	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	66,496,000.00	SK NO. 448/900/2025
7	Puskesmas Air Santok	272,121,967.00	SK NO. 299/900/2025
8	RSUD Dr.Sadikin Kota Pariaman	34,980,000.00	SK NO. 414/900/2025
9	Kantor Kesbang Pol	9,500,000.00	SK NO. 299/900/2025
10	Kantor Satuan Pol Pp & Pemadam Kebakaran	10,526,750.00	SK NO. 453/900/2025
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	124,213,750.00	SK NO. 299/900/2025
12	Dinas Perhubungan	2,368,898,894.00	SK NO. 202/900/2025 dan SK No. 448/900/2025
13	Dinas Perindagkop	11,950,000.00	SK NO. 453/900/2025
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	57,031,036.00	SK NO. 414/900/2025
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	19,712,985.00	SK NO. 414/900/2025
16	UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman	37,000,000.00	SK NO. 299/900/2025
17	Sekretariat DPRD	192,537,400.00	SK NO. 295/900/2025 dan SK NO.448/900/2025
18	Kelurahan Kp.Jawa 1	222,899,286.00	SK NO. 270/900/2025
19	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	21,000,000.00	SK NO. 448/900/2025
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	38,253,450.00	SK NO. 414/900/2025
Total		**3.635.103.318,00**	

Dapat diinformasikan terdapat Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Pariaman, rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.80 Data Aset Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Pariaman

No	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	900/02/BPKPD-2020	Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum	Kepala Kepolisisan Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Suzuki Grand Vitara 2.4 AT dengan Nopol BA 1542	2014	326.230.000,00	11-Mar-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
2	030.032/03/BPKPD/VI-2023	Nina Nadjmir, SE	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat	Kendaraan Minibus Innova dengan Nopol : BA 1059 W	2017	290.920.000,00	5-Jun-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
3	900/03/bpkpd-2019	Efrianto, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1018 W	2019	224.550.000,00	14-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
4	900/04/BPKPD-2019	Andry Kurniawan, S.iK, M.Hum	Kepala Kepolisisan Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1007 WD	2010	154.165.000,00	28-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
5	900/01/DPPKA-2023	Mayor INF. Darius	A.n .Kepala KODIM 0308	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) SUZUKI JEEP Grand Vitara 24 AT 2015 dengan Nopol BA 1550 W	2015	355.660.000,00	13-Feb-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
6	900/01/BPKPD-2020	A. Bondan, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota Innova V M/T dengan plat Nomor BA 5 W	2014	289.240.000,00	27-Feb-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
7	900//BPKPD-2020	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1502 W	2011	140.950.000,00	26-Oct-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
8	03/VII/umum/2022	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Jeep Toyota Fortuner BA 1641 XX	2022	532.900.000,00	12-Jul-22	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
9	900/01/BPKPD/2022	Nina Nadjmir, SE	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera	Yamaha Mio Soul BA 3186 W	2017	17.510.000,00	26-Apr-22	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang

No	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
			Barat					pengelolaan Barang BMD
10	07/BAST/Umum-2023	Zainal	Polres Pariaman	Mobil Avanza Veloz BA 1038 W	2016	206.820.000,00	18-Jul-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
Jumlah						**2.538.945.000,00**		

3.c Gedung dan Bangunan

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp557.468.992.767,90	**Rp553.208.953.941,84**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp557.468.992.767,90, meningkat sebesar Rp4.260.038.826,06 atau 0.77% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp553.208.953.941,84. Nilai tersebut tidak termasuk aset gedung dalam penyelesaian (KDP), dengan rincian disajikan pada tabel 5.81 berikut.

Tabel 5.81 Rincian Saldo Aset Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**553.208.953.941,84**
Mutasi Tambah	
Belanja modal (+)	4.710.081.248,06
Salah Rekening (+)	5.000.000,00
Transfer Masuk Antar Perangkat Daerah (+)	6.666.467.591,00
Total Mutasi Tambah	**11.381.548.839,06**
Mutasi Kurang	
Koreksi Saldo Awal (-)	(2,00)
Transfer keluar antar Perangkat Daerah (-)	(6.666.467.591,00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(32.756.920,00)
Penghapusan (-)	(422.285.500,00)
Total Mutasi Kurang	**(7.121.510.013,00)**
Saldo Akhir	**557.468.992.767,90**

Rincian disajikan pada **Lampiran 14**.

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.710.081.248,06 berdasarkan LRA Tahun 2025;
2. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi

akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, yaitu pada SD 01 Balai Kuraitaji Kec. Pariaman selatan.

3. Mutasi masuk antar Perangkat Daerah sebesar Rp6.666.467.591,00 merupakan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.82 Mutasi (+) antar Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	595,727,420.00	Mutasi dari Puskesmas kurai taji ke dinas pendidikan untuk bangunan TK
2	UPT. Kec. Pariaman Utara	185,884,178.00	Mutasi BM Dikpora
3	UPT. Kec. Pariaman Tengah	334,915,820.00	Mutasi BM Dikpora
4	UPT. Kec. Pariaman Selatan	385,369,508.00	Mutasi BM Dikpora
5	UPT. Kec. Pariaman Timur	388,472,965.00	Mutasi BM Dikpora
6	TK Kec. Timur	41,792,458.00	Mutasi BM Dikpora
7	SMP 2 Pariaman	185,801,074.00	Mutasi BM Dikpora
8	SMP 4 Pariaman	185,609,214.00	Mutasi BM Dikpora
9	SMP 8 Pariaman	185,854,845.00	Mutasi BM Dikpora
10	SMP 9 Pariaman	199,067,030.00	Mutasi BM Dikpora
11	Puskesmas Marunggi	1,025,472,079.00	Mutasi BM Dinkes Pembangunan Postu
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan	600,133,000.00	Gedung LKAAM Pindah ke pariwisata 2.352.368.000
13	Dinas Periwisata	2,352,368,000.00	Gedung LKAAM Pindah dari DPMDES 2.352.368.000
Jumlah		**6,666,467,591.00**	

4. Koreksi (-) saldo Awal sebesar Rp2,00 merupakan kurang catat aset tetap tahun 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga UPTD. Kecamatan Pariaman Utara;
5. Mutasi keluar antar Perangkat Daerah (-) sebesar Rp6.666.467.591,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Gedung Dan Bangunan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar Perangkat Daerah;
6. Mutasi (-) tidak dikapitalisasi sebesar Rp32.756.920,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun tidak memenuhi kriteria Aset Tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, pada Puskesmas Naras sebesar Rp.20.158.000,00 yaitu pemeliharaan Plafon dan garasi mobil ambulan, dan pada Puskesmas kuraitaji Rp. 11.956.920,00 yaitu biaya desain bangunan griya sehat.
7. Penghapusan sebesar Rp422.285.500,00 merupakan Aset Tetap gedung dan bangunan yang dihapus bukukan disebabkan kondisi Aset Tetap yang rusak berat, lelang, hilang, dan telah diusulkan oleh Perangkat Daerah/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman.

Tabel 5.83 Mutasi (-) Penghapusan

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Nomor SK
1	Puskesmas Pauh	238,158,000.00	SK No. 239/900/2025
2	Puskesmas Marunggi	44,745,000.00	SK No. 239/900/2025
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	43,999,000.00	SK No. 447/900/2025
4	Kecamatan Pariaman Tengah	95,383,500.00	SK No. 270/900/2025
Jumlah		422.285.500,00	

3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp967.112.492.364,32	**Rp926.566.640.376,04**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp967.112.492.364,32, meningkat sebesar Rp40.545.851.988,28 atau 4.38% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp926.566.640.376,04, dengan rincian disajikan pada tabel 5.84 berikut.

Tabel 5.84 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**926.566.640.376,04**
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal(+)	22.823.200.000,00
Belanja Modal (+)	7.140.318.441,28
Hibah Masuk (+)	11.248.781.800,00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	93.820.347,00
Transfer Masuk Antar Perangkat Daerah (+)	5.664.500,00
Total Mutasi Tambah	**41.311.785.088,28**
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar Antar Perangkat Daerah (-)	(5.664.500,00)
Tidak Dikapitalisasi (-)	(78.018.600,00)
Penghapusan (-)	(682.250.000,00)
Total Mutasi Kurang	**(765.933.100,00)**
Saldo Akhir	**967.112.492.364,32**

Rincian disajikan pada **Lampiran 15**.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.140.318.441,00 sesuai LRA Tahun 2025.
2. Koreksi saldo awal (-) sebesar Rp22.823.200.000,00 koreksi karena Penilaian 56 Ruas Jalan berdasarkan SK penilaian No.452/900/2025.
3. Mutasi Hibah (+) sebesar Rp11.248.781.800,00 merupakan mutasi Hibah Jalan waterfront city dari Kementerian PU.

4. Mutasi masuk antar Perangkat Daerah sebesar Rp5.664.500,00 merupakan mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah pada Dinas pemberdayaan masyarakat Desa yaitu instalasi listrik pada bangunan kantor Dinas pemberdayaan masyarakat desa mutasi dari DPMTSP.
5. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp93.820.347,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa, namun memenuhi kriteria aset tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Mutasi keluar antar Perangkat Daerah (-) sebesar Rp5.664.500,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sesuai rincian mutasi antar Perangkat Daerah.
7. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp78.018.600,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.85 berikut.

Tabel 5.85 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi JIJ

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	UPT. Peralatan Perbekalan Dan PJU	belanja barang habis pakai kegiatan kantor alat listrik Lampu LED Street Light HLS-DL-8D-40W : 42 Pcs	48.018.600,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	Pipa pembuangan gas metan TPA	30.000.000,00
Jumlah			**78.018.600,00**

6. Penghapusan sebesar Rp682.250.000,00 merupakan Aset Tetap JIJ dan yang dihapus bukukan disebabkan kondisi Aset Tetap yang rusak berat, lelang, hilang, dan telah diusulkan oleh Perangkat Daerah/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 450/900/2025.

3.e Aset Tetap Lainnya

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp83.159.604.828,56	**Rp81.522.445.476,56**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp83.159.604.828,56, meningkat sebesar Rp1.637.159.352,00 atau 2.01% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp81.522.445.476,56, dengan rincian disajikan pada tabel 5.86 berikut.

Tabel 5.86 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**81.522.445.476,56**
Mutasi Tambah	
Belanja modal ATL (+)	1.716.537.750,00
Belanja modal Aset Lainnya (+)	89.095.815,00
Hibah Masuk (+)	26.509.600,00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	11.247.500,00

Uraian	Nilai (Rp)
Transfer Masuk Antar Perangkat Daerah (+)	1.666.911.250,00
Total Mutasi Tambah	**3.510.301.915,00**
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar Perangkat Daerah(-)	(1.666.911.250,00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(50.826.500,00)
Salah Rekening (-)	(48.213.800,00)
mutasi ke Aset lainya(-)	(1.184.441,00)
Aset Tak berwujud (-)	(89.095.815,00)
Penghapusan (-)	(16.910.757,00)
Total Mutasi Kurang	**(1.873.142.563,00)**
Saldo Akhir	**83.159.604.828,56**

Rincian disajikan pada **Lampiran 16.**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.716.537.750,00 sesuai LRA Tahun 2025 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp89.095.815,00;
2. Mutasi Hibah (+) sebesar Rp26.509.600,00 merupakan mutasi Hibah Buku dari Perpustakaan RI ke Dinas perpustakaan dan arsip sebesar Rp26.509.600,00.
3. Mutasi Kapitalisasi barang dan Jasa (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.247.500,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa, namun memenuhi kriteria aset tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada UPTD SD Kec. Pariaman Tengah pada SD 02 Karan aur sebesar Rp11.247.500,00.
4. Mutasi masuk antar Perangkat Daerah sebesar Rp1.666.911.250,00 merupakan mutasi tambah Aset Tetap Lainnya Belanja Modal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa buku pelajaran dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.87 Mutasi (+) mutasi antar Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	UPT. Kec. Pariaman Utara	245.794.650,00	Mutasi BM Dikpora
2	UPT. Kec. Pariaman Tengah	310.608.400,00	Mutasi BM Dikpora
3	UPT. Kec. Pariaman Selatan	200.179.300,00	Mutasi BM Dikpora
4	UPT. Kec. Pariaman Timur	170.994.000,00	Mutasi BM Dikpora
6	TK 01 Kec. Pariaman Timur	11.962.400,00	Mutasi BM Dikpora
7	TK 01 Kec. Pariaman Utara	11.996.400,00	Mutasi BM Dikpora
8	SMP 1 Pariaman	108.761.000,00	Mutasi BM Dikpora
9	SMP 2 Pariaman	108.555.000,00	Mutasi BM Dikpora
10	SMP 3 Pariaman	155.595.000,00	Mutasi BM Dikpora

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
11	SMP 4 Pariaman	51.401.600,00	Mutasi BM Dikpora
13	SMP 5 Pariaman	143.950.000,00	Mutasi BM Dikpora
15	SMP 6 Pariaman	36.411.700,00	Mutasi BM Dikpora
17	SMP 7 Pariaman	47.328.000,00	Mutasi BM Dikpora
19	SMP 8 Pariaman	29.598.800,00	Mutasi BM Dikpora
21	SMP 9 Pariaman	33.775.000,00	Mutasi BM Dikpora
Jumlah		**1.666.911.250,00**	

5. Mutasi keluar antar Perangkat Daerah (-) sebesar Rp1.666.911.250,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya antar Perangkat Daerah ke UPT. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana rincian pada mutasi antar Perangkat Daerah;

6. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp50.826.500,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi ATL

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	49.626.500,00	Buku untuk sekolah diserahkan ke TK Swasta
2	UPT. Kec. Pariaman Tengah	1.200.000,00	Pada SDN 08 Kampung Jawa 1 Rp900.000,00 yaitu bendera dram band 30x 30.000, dan pada SDN 16 Cimparuh Rp. 300.000 yaitu 4 x 75.000
Total		**50.826.500,00**	

7. Salah rekening (-) sebesar Rp48.213.800,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Lainnya ke aset tetap selain Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Mutasi (-) Salah rekening

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	UPT. Kec. Pariaman Utara	Peralatan Mesin	13,200,000.00
2	UPT. Kec. Pariaman Tengah	Peralatan Mesin	14,261,800.00
3	UPT. Kec. Pariaman Selatan	Peralatan Mesin	7,400,000.00
4	UPT. Kec. Pariaman Timur	Peralatan Mesin	12,925,000.00
5	SMP 9 Pariaman	Peralatan Mesin	427,000.00
Jumlah			**48,213,800.00**

8. Mutasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.184.441,00 adalah mutasi ke rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Pariaman pada Aset Lain-Lain dengan rincian pada SDN 07 Sungai Rambai sebesar Rp1.184.441,00,

9. Mutasi (-) Aset Tak Berwujud sebesar Rp89.095.815,00 merupakan mutasi Aset Tetap Lainya yang dipindah catatkan ke aset lain-lain kelompok Aset Tak Berwujud. Dengan rincian pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Aplikasi PBB.
10. Penghapusan sebesar Rp16.910.757,00 merupakan Aset Tetap Lainya yang dihapus bukukan disebabkan kondisi Aset Tetap yang rusak berat, lelang, hilang, dan telah diusulkan oleh Perangkat Daerah/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman.

Tabel 5.90 Mutasi (-) Penghapusan

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Nomor SK
1	UPT. Kec. Pariaman Utara	6.000.000,00	SK No. 239/900/2025
2	UPT. Kec. Pariaman Selatan	3.496.537,00	SK No. 239/900/2025
3	RSUD Sadikin	750.500,00	SK No. 414/900/2025
4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	6.208.720,00	SK No. 414/900/2025
5	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	455.000,00	SK No. 299/900/2025
Total		**16.910.757,00**	

3.f	**Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
		Rp46.359.805.963,00	**Rp46.359.805.963,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp46.359.805.963,00 dan Rp46.370.697.963,00, menurun sebesar (Rp10.892.000,00) atau 0.02%. KDP merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan atau pengerjaan dan belum selesai pada akhir tahun anggaran, sehingga belum dapat digunakan dan belum disusutkan. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan KDP pada Tahun Anggaran 2025, dengan rincian disajikan pada tabel 5.91 berikut.

Tabel 5.91 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**46.359.805.963,00**
Mutasi Tambah	**0**
Total Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Total Mutasi Kurang	**0**
Saldo Akhir	**46.359.805.963,00**

Penambahan dan pengurangan aset KDP diuraikan pada **Lampiran 17**.

3.g	Akumulasi Penyusutan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp1.434.069.044.682,74)	**(Rp1.369.522.652.054,92)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.434.069.044.682,74), meningkat (semakin besar) sebesar Rp64.546.392.627,82 atau 4.71% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.369.522.652.054,92), dengan rincian disajikan pada tabel 5.92 berikut.

Tabel 5.92 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**1.369.522.652.054,92**
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	1.081.879.165,00
Transfer Masuk Antar Perangkat Daerah (+)	1.991.711.240,00
Penyusutan Tahun Berjalan (+)	67.946.902.663,82
Koreksi BPK (+)	
Total Mutasi Tambah	**71.020.493.068,82**
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	(708.261.803,00)
Transfer Keluar Antar Perangkat Daerah (-)	(1.991.711.240,00)
Rusak Berat (-)	(35.790.000,00)
Penghapusan (-)	(3.738.337.398,00)
Total Mutasi Kurang	**(6.474.100.441,00)**
Saldo Akhir	**1.434.069.044.682,74**

1. Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp1.081.879.165,00 merupakan hasil perhitungan kembali atas saldo awal akumulasi penyusutan terhadap Aset Peralatan dan mesin pada Puskesmas Kampung Baru padusunan Rp. 9.000.000,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.081.879.165,00 yaitu pada Dinas PUPR sebesar Rp.300.020.164,00 dan Dinas Pariwisata Rp. 682.250.000,00.
2. Mutasi masuk antar Perangkat Daerah disebabkan karena mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp1.991.771,240,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp293.447.822,00 serta Gedung dan Bangunan senilai Rp1.698.263.418,00;
3. Penyusutan tahun berjalan (+) sebesar Rp67.946.902.663,82 adalah penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin; Aset Tetap Gedung dan Bangunan; Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya semester I dan II ;
4. Koreksi saldo awal (-) sebesar Rp708.261.803,00 merupakan hasil perhitungan kembali atas saldo awal akumulasi penyusutan terhadap aset Peralatan Mesin Rp.26.011,803,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp682.250.000,00;
5. Mutasi keluar antar Perangkat Daerah disebabkan karena mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp1.991.771,240,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp293.447.822,00 serta Gedung dan Bangunan senilai Rp1.698.263.418,00;

6. Mutasi ke Aset Lain-Lain (-) merupakan inventarisasi rusak berat Tahun 2025 sebesar Rp35.790.000,00 terdiri dari rusak berat pada Peralatan Mesin Rp35.790.000,00;
7. Mutasi Penghapusan (-) sebesar Rp3.738.337.398,00 penghapusan pada Peralatan Mesin sebesar Rp2.735.089.770,00, gedung dan Bangunan Sebesar Rp.320.997.628,00 pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.682.250.000,00

Rincian Akumulasi penyusutan per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 18**.

Kebijakan penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum dilakukan penyusutan. Kebijakan tersebut telah direvisi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang mengatur metode garis lurus untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Kebijakan Akuntansi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang menganut metode garis lurus untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan metode saldo menurun berganda untuk Aset Tetap Bangunan dan Gedung.

4. Aset Lainnya	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp10.901.334.646,40	**Rp9.746.056.449,09**

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, sesuai PSAP Nomor 01. Aset Lainnya Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD), Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.901.334.646,40, meningkat sebesar Rp1.155.278.197,31 atau 11.85% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.746.056.449,09. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan TGRD sebesar Rp1.255.172.498,12 dan peningkatan Aset Tidak Berwujud akibat penambahan Software Aplikasi PBB dan Aplikasi PETA.

4.a Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp5.895.584.559,08	**Rp4.640.412.060,96**

Saldo TGRD per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.895.584.559,08, meningkat sebesar Rp1.255.172.498,12 atau 27.05% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.640.412.060,96. TGRD merupakan piutang yang timbul dari kerugian negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian pejabat/pegawai, dengan rincian disajikan pada tabel 5.93 berikut.

Tabel 5.93 Rincian Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**4.640.412.060,96**
Penambahan	2.722.166.024,33
Mutasi Tambah	**2.722.166.024,33**
Penyetoran (-)	(1.466.993.526,21)
Total Mutasi Kurang	**(1.466.993.526,21)**
Saldo Akhir	**5.895.584.559,08**

Rincian detail disajikan pada **Lampiran 20b**.

4.b Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp821.257.815,00	**Rp687.162.000,00**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp821.257.815,00, meningkat sebesar Rp134.095.815,00 atau 19.51% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp687.162.000,00. Rincian Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Pariaman disajikan pada tabel 5.94 berikut.

Tabel 5.94 Daftar Aset Tidak Berwujud

Jenis	Nilai (Rp)
Software Bidang Pendapatan di DPPKA (2013)	121.000.000,00
Software MapInfo Pendapatan di DPPKA (2014)	19.250.000,00
Software Payment Online Pendapatan di DPPKA (2014)	49.280.000,00
Lisensi Software Bidang Pendapatan (2016)	29.700.000,00
Sistem Informasi Pencapaian Realisasi Keuangan Kota (2016)	30.000.000,00
Software ESDNM Kepegawaian (2016)	50.000.000,00
Software Pembelajaran UPT Utara 4 Laptop	19.184.000,00
Software Pembelajaran UPT Timur 8 Laptop	38.368.000,00
Software Berbasis Web Dinas Kesehatan	29.700.000,00
Software Jaringan Dukcapil	98.000.000,00
Software(SQL Server) Microsoft	29.980.000,00
Software Oracle (SQL Server) Bidang Pendapatan	29.700.000,00
Software Monitoring PBB (2017)	44.000.000,00
Software Aplikasi PBHTB (2017)	99.000.000,00
Software Aplikasi PBB (2025)	89.095.815,00
Software Aplikasi PETA (2025)	45.000.000,00
Jumlah	**821.257.815,00**

Rincian Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 21**.

4.c	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp689.955.662,82)	(Rp687.162.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar (Rp689.955.662,82), meningkat sebesar Rp2.793.662,82 atau 0,41% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp687.162.000,00). Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aset tidak berwujud, dengan rincian disajikan pada tabel 5.95 berikut.

Tabel 5.95 Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	687,162,000.00
Mutasi Tahun Berjalan	2,793,662.82
Saldo Akhir	689,955,662.82

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 22**.

4.d	Aset Lain-Lain	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp28.610.407.069,33	Rp32.260.937.983,10

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.610.407.069,33, menurun sebesar (Rp3.650.530.913,77) atau 11.32% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.260.937.983,10. Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat atau tidak dapat digunakan, diclassified dari Aset Tetap menunggu proses penghapusbukuan. Mutasi tambah sebesar Rp36.974.441,00 berasal dari kondisi rusak berat inventarisasi 2025. Mutasi kurang sebesar Rp3.687.505.354,77 merupakan penghapusan aset berdasarkan SK Wali Kota Pariaman. Dengan rincian disajikan pada tabel 5.96 berikut.

Tabel 5.96 Rincian Saldo Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**32.260.937.983,10**
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	
Mutasi Peralatan dan Mesin (+)	35.790.000,00
ATL	1.184.441,00
Total Mutasi Tambah	**36.974.441,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	(9.000.000,00)
Penghapusan (-)	(3.678.505.354,77)
Total Mutasi Kurang	**(3.687.505.354,77)**
Saldo Akhir	**28.610.407.069,33**

4.e	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp23.735.959.134,20)	(Rp27.155.293.594,97)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp23.735.959.134,20), menurun sebesar (Rp3.419.334.460,77) atau 12.59% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp27.155.293.594,97). Penurunan disebabkan oleh penghapusan aset lain-lain beserta akumulasi penyusutannya yang lebih besar dari penambahan penyusutan aset rusak berat tahun berjalan dengan rincian disajikan pada **Lampiran 23.**

5. Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp99.012.270.527,88	Rp105.264.398.083,88

Properti Investasi merupakan properti (tanah dan/atau bangunan) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau kenaikan nilai properti, bukan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk dijual dalam kegiatan normal. Properti Investasi disajikan berdasarkan model biaya (cost model) yakni nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp99.012.270.527,88, menurun sebesar (Rp6.252.127.556,00) atau (5.94)% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.264.398.083,88. Penurunan disebabkan oleh kenaikan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp6.252.127.556,00, sementara nilai perolehan properti tidak berubah.

5.a	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp137.605.343.958,88	Rp137.605.343.958,88

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama sebesar Rp137.605.343.958,88, tidak terdapat penambahan properti investasi baru pada Tahun Anggaran 2025. Properti Investasi mencakup aset-aset komersial yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa, antara lain: Pariaman Plaza (hibah Kab. Padang Pariaman), Pasar Pariaman/Los Ikan, Pasar Produksi, Pasar Kurai Taji, Pasar Rakyat Pariaman (hibah Kementerian PU), kios Pulau Angso Duo, serta Pujasera Pantai Gandoriah dan Taman Anas Malik, dengan rincian disajikan pada tabel 5.97 berikut.

Tabel 5.97 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

No	Perangkat Daerah	Nama/Jenis Barang	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perindagkop	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Hibah	2004	1	7.384.075.000,00	Pariaman Plaza (Hibah dari Kab. Padang Pariaman)
2		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2005	1	4.498.555.000,00	Pembangunan Pasar Pariaman/Los Ikan
3		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2009	1	7.027.745.659,00	Pembangunan Pasar Produksi
4		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2015	1	2.051.904.000,00	Los Sayur Pasar Pariaman

No	Perangkat Daerah	Nama/Jenis Barang	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
5		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2016	1	10.271.385.598,00	KDP 2015 (Rp5.231.354.473,00) + KDP selesai 2016 Rp4.895.117.125,00 Pasar Kurai Taji
6		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2019	1	1.778.134.000,00	Pembangunan Los Lambung Balai Kuraitaji+ Biaya Honor Tender Rp6.350.000,00 + SPPD Rp6.945.000,00 + Rp39.976,00
7		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Pembelian	2020	1	168.290.000,00	Empat Kotak Bangunan Semi Permanen (Toko Souvenir)
8		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Pembelian	2020	1	434.949.599,00	Dua Puluh Kios Pujasera Pantai Gandoriah, Tiga Puluh Kios Pujasera Taman Anas Malik
9		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Hibah	2015	1	5.478.119.300,00	Pasar Kuraitaji (Hibah Pusat BAST No.40/M-DAG/BAST/6/2016 tangal 29 Juni 2016)
10		Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Pembelian	2018	1	3.059.651.794,88	Pusat Jajanan Kuliner Pantai Gandoriah Dua Puluh Delapan Petak Belakang Nantongga
Jumlah (1)						**42.152.809.950,88**	
1	UPT. Pengelola Pasar	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2022	1	94.504.522.624,00	Pasar Rakyat Pariaman (Hibah dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2022)
Jumlah (2)						**94.504.522.624,00**	
1	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Pembelian	2023	1	948.011.384,00	Pembangunan Kawasan Pulau Angso Duo (sembilan Unit Kios)
Jumlah (3)						**948.011.384,00**	
Total (1+2+3)						**137.605.343.958,88**	

5.b Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp38.593.073.431,00)	(Rp32.340.945.875,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp38.593.073.431,00), meningkat sebesar Rp6.252.127.556,00 atau 19.33% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp32.340.945.875,00). Penyusutan dihitung menggunakan metode saldo menurun berganda sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku, dengan rincian disajikan pada tabel 5.98 berikut.

Tabel 5.98 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**32.340.945.875,00**
Mutasi Tambah	
Penyusutan Tahun Berjalan (+)	6.252.127.556,00
Koreksi BPK (+)	
Total Mutasi Tambah	**6.252.127.556,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	-
Total Mutasi Kurang	**-**
Saldo Akhir	**38.593.073.431,00**

Rincian detail disajikan pada **Lampiran 19b.**

6. Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.687.472.849,39	Rp5.275.197.221,29

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sesuai PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban yang dapat diukur secara andal. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.687.472.849,39, menurun sebesar (Rp1.587.724.371,90) atau 30.10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.275.197.221,29. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Utang Belanja kepada pihak ketiga akibat penyelesaian kewajiban Tahun Anggaran 2024 yang dibayarkan pada awal Tahun Anggaran 2025, dengan rincian disajikan pada tabel 5.99 berikut.

Tabel 5.99 Daftar Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka (Retribusi Pasar)	185.706.467,28	82.225.825,28
2	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	3.501.766.382,11	5.192.971.396,01
Jumlah		**3.687.472.849,39**	**5.275.197.221,29**

6.a Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp185.706.467,28	**Rp82.225.825,28**

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima namun belum menjadi hak pemerintah daerah karena jasa/manfaat dari pendapatan tersebut belum sepenuhnya diberikan kepada pembayar. Sesuai PSAP berbasis akrual, pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan di masa mendatang.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp185.706.467,28, meningkat sebesar Rp103.480.642,00 atau 125.85% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.225.825,28 Peningkatan ini berasal dari kenaikan Pajak Reklame yang dibayar di muka dan sewa ATM di BPKPD serta sewa pasar, rincian disajikan pada tabel 5.100 berikut.

Tabel 5.100 Pendapatan Diterima Dimuka

No	Perangkat Daerah	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1	Dinas Perindagkop dan UKM	Pasar Pariaman	1.125.000,00
2	BPKPD	Pajak Relame	91.360.023,50
		Sewa ATM Balaikota	41.072.000,00
		Galery ATM DPRD	23.010.000,00
		Galery ATM Ruangan Balaikota	29.139.444,44
Jumlah			**185.706.467,94**

Rincian data Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada **Lampiran 25**.

6.b Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp3.501.766.382,11	**Rp5.192.971.396,01**

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah telah menerima manfaat dari barang/jasa dari pihak ketiga namun belum melakukan pembayaran atas manfaat tersebut pada akhir periode pelaporan.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.501.766.382,11, menurun sebesar (Rp1.691.205.013,90) atau (32.56)% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.192.971.396,01. Rincian utang belanja sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024
1	Utang Belanja Pegawai	154.099.124,00	342.106.637,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.467.436.082,00	2.491.296.610,40
3	Utang Belanja Bagi Hasil	1.880.231.176,11	2.359.568.148,61
Jumlah		3.501.766.382,11	5.192.971.396,01

1. Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp154.099.124,00 merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Sadikin Nomor 800/04/KEP/RS-SDK/2026;
2. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp1.467.436.082,00 terdiri dari Utang Belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp24.750.000,00 berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Review Nomor 700/011/LHR/Insp/2026; Utang Belanja BLUD sebesar Rp910.858.382,00 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Sadikin Nomor 800/04/KEP/RS-SDK/2026; Utang Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp531.827.700,00 berdasarkan Laporan Hasil Review Nomor 700/63/LHR/Insp/2025;
3. Sisa Utang Belanja DBH Desa sebesar Rp1.866.206.176,11; Sisa Utang Belanja Bagi Hasil untuk KAN Kurai Taji Tahun 2021 sebesar Rp14.025.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

Rincian Utang Belanja disajikan pada **Lampiran 26** dan **Lampiran 26a**

7. Ekuitas

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp800.092.301.017,48	**Rp795.132.246.237,12**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban, sesuai PSAP Nomor 01. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan perinciannya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Perubahan ekuitas dipengaruhi oleh: (i) Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO); dan (ii) Koreksi Ekuitas Lainnya yang terdiri dari koreksi kesalahan yang tidak berulang, perubahan kebijakan akuntansi, dan transaksi ekuitas lainnya.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp800.092.301.017,48, menurun sebesar (Rp4.960.054.780,36) atau 0.62% dibandingkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp795.132.246.237,12. Penurunan ini mencerminkan kondisi Defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp16.790.922.017,26 yang lebih besar dari Koreksi Ekuitas Lain-Lain sebesar Rp21.750.976.797,62. Defisit LO berbeda dengan Surplus LRA karena LO menggunakan basis akrual yang mencakup beban penyusutan aset tetap dan properti investasi sebesar ±Rp74 miliar, yang tidak terdapat dalam LRA berbasis kas, rincian disajikan pada tabel 5.102 berikut.

Tabel 5.102 Perubahan Ekuitas

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Ekuitas Awal (1 Januari 2025)	795.132.246.237,12
2	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO)	(16.790.922.017,26)
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	21.750.976.797,62
	Ekuitas Akhir (31 Desember 2025)	**800.092.301.017,48**

Koreksi Ekuitas Lain-Lain sebesar Rp21.750.976.797,62 terdiri dari koreksi kesalahan pencatatan aset yang tidak berulang, penyesuaian nilai awal akibat perubahan kebijakan akuntansi, dan transaksi penerimaan hibah aset yang langsung mempengaruhi ekuitas tanpa melalui LO. Koreksi

ekuitas diakui langsung ke ekuitas dan tidak dilaporkan melalui LO, sesuai PSAP Nomor 10 tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

Rekonsiliasi Neraca Verifikasi Persamaan Akuntansi

Persamaan akuntansi dasar mensyaratkan bahwa: Aset = Kewajiban + Ekuitas. Berikut adalah verifikasi terpenuhinya persamaan akuntansi Neraca Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2025:

Tabel 5.103 Verifikasi Persamaan Akuntansi Neraca per 31 Desember 2025

NO	POS NERACA	JUMLAH (Rp)
A	**TOTAL ASET**	**803.779.773.866,87**
1	Aset Lancar	43.374.674.605,37
2	Investasi Jangka Panjang	63.884.373.500,00
3	Aset Tetap (Nilai Buku)	586.607.120.587,22
4	Aset Lainnya (Neto)	10.901.334.646,40
5	Properti Investasi (Nilai Buku)	99.012.270.527,88
B	**TOTAL KEWAJIBAN**	**3.687.472.849,39**
C	**EKUITAS**	**800.092.301.017,48**
		803.779.773.866,87
	Selisih Aset – (Kewajiban + Ekuitas)	**0,00 ✓**

Tabel di atas membuktikan bahwa persamaan akuntansi Neraca Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2025 terpenuhi dengan sempurna: Aset Rp803.779.773.866,87 = Kewajiban Rp3.687.472.849,39 + Ekuitas Rp800.092.301.017,48, dengan selisih Rp0,00 (nihil). Dengan demikian, Neraca Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 telah disajikan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

5.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) pada Tahun 2025 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai dari Tahun 2015, sehingga Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan atau dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025. Rincian Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Tahun 2025	Tahun 2024
1. Pendapatan-LO	**Rp590.806.357.918,04**	**Rp650.760.466.716,71**

Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp590.806.357.918,04 dan Rp650.760.466.716,71. Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp59.954.108.798,67) atau 9,21% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2024.

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan pada tabel 5.104 berikut.

Tabel 5.104 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**60.007.375.791,04**	**57.459.978.227,89**	**2.547.397.563,15**
Pendapatan Pajak Daerah	22.721.996.235,00	22.296.272.876,00	425.723.359,00
Pendapatan Restribusi Daerah	14.082.745.204,00	12.111.002.347,00	1.971.742.857,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.365.010.955,00	11.365.010.955,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	11.837.623.397,04	11.687.692.049,89	149.931.347,15
Pendapatan Transfer-LO	**515.454.826.199,00**	**558.980.936.721,00**	**(43.526.110.522,00)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	482.035.816.658,00	482.035.816.658,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.963.163.000,00	47.908.954.400,00	(40.945.791.400,00)
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	25.810.846.541,00	28.391.165.663,00	(2.580.319.122,00)
Bantuan Keuangan	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	**15.344.155.928,00**	**4.000.000.000,00**	**11.344.155.928,00**
Pendapatan Hibah	15.344.155.928,00	0,00	15.344.155.928,00
Dana Darurat	0,00	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
Jumlah	**590.806.357.918,04**	**620.440.914.948,89**	**(29.634.557.030,85)**

Rincian penjelasan selisih Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

1.a Pendapatan Asli Daerah – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp60.007.375.791,04	**Rp47.192.029.712,71**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp60.007.375.791,04 dan Rp47.192.029.712,71. PAD-LO per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.815.346.078,33 atau 27,16%. Rincian PAD-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 5.105 berikut.

Tabel 5.105 Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LO		**22.721.996.235,00**	**15.099.752.181,17**	**50,48**
1	Pajak Reklame – LO	171.989.758,00	123.321.315,17	**39,46**
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	0,00	5.908.220,00	(100,00)
3	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.345.383.063,00	2.321.256.274,00	1,04
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	4.099.466.639,00	5.503.588.857,00	(25,51)
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	7.216.172.475,00	7.145.677.515,00	0,99
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	6.346.653.200,00	0,00	0,00
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.542.331.100,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO		**14.082.745.204,00**	**9.799.612.224,33**	**43,71**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	10.765.183.781,00	6.939.650.757,00	55,13
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	135.391.000,00	92.768.000,00	45,95
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	421.517.538,00	742.406.998,00	(43,22)
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	337.060.000,00	319.316.000,00	5,56
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	168.465.988,00	(112.056.767,67)	(250,34)
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	350.000,00	0,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	54.960.000,00	4.250.000,00	1193,18
8	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	96.281.500,00	114.040.000,00	(15,57)
9	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	42.525.000,00	41.910.000,00	1,47
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	814.526.000,00	774.206.000,00	5,21
11	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	698.510.790,00	402.599.730,00	73,50
12	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	281.908.000,00	213.600.000,00	31,98

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	266.065.607,00	266.921.507,00	(0,32)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		**11.365.010.955,00**	**11.331.512.753,00**	**0,30**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	11.331.512.753,00	(100,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	11.365.010.955,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO		**11.837.623.397,04**	**10.961.152.554,21**	**8,00**
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	41.081.800,00	155.882.400,00	(73,65)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-109.172.967,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro-LO	470.213.259,00	693.433.441,25	(32,19)
4	Pendapatan Bunga – LO	181.250.000,00	109.375.000,00	65,71
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.253.485.007,00	2.478.422.123,89	(9,08)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	452.309.248,00	448.732.052,00	0,80
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.460.806,00	25.779.453,00	(94,33)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	192.329.303,00	51.034.488,00	276,86
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	-50.560.610,85	27.549.532,85	(283,53)
10	Pendapatan dari Pengembalian –LO	962.812.563,89	173.228.624,22	455,80
11	Pendapatan dari BLUD-LO	7.065.414.988,00	6.796.465.439,00	3,96
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	377.000.000,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	1.250.000,00	(100,00)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO		**60.007.375.791,04**	**47.192.029.712,71**	**27,16**

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel 5.106 berikut.

Tabel 5.106 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	22.721.996.235,00	22.296.272.876,00	425.723.359,00
Pendapatan Restribusi Daerah	14.082.745.204,00	12.111.002.347,00	1.971.742.857,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.365.010.955,00	11.365.010.955,00	0,00

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Lain-Lain PAD yang Sah	11.837.623.397,04	11.687.692.049,89	149.931.347,15
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**60.007.375.791,04**	**57.459.978.227,89**	**2.547.397.563,15**

1. Selisih Pajak Daerah LRA dan LO Pendapatan Asli Daerah

Selisih Pajak Daerah LRA dan LO Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel 5.107 berikut.

Tabel 5.107 Selisih Pajak Daerah LO dengan Pajak Daerah LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Pajak Reklame – LO	171.989.758,00	171.989.758,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.345.383.063,00	1.919.659.704,00	425.723.359,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	4.099.466.639,00	4.099.466.639,00	0,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	7.216.172.475,00	7.216.172.475,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	6.346.653.200,00	6.346.653.200,00	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.542.331.100,00	2.542.331.100,00	0,00
Jumlah	**22.721.996.235,00**	**22.296.272.876,00**	**425.723.359,00**

Selisih Pajak Daerah LRA dan LO Pendapatan Asli Daerah dikarenakan selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp425.723.359,00 merupakan piutang PBB Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan nomor jurnal 002/PIUTANG-BLJ/BPKPD/2025.

2. Selisih Retribusi Daerah antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran

Selisih Retribusi Daerah antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada tabel 5.108 sebagai berikut:

Tabel 5.108 Selisih Retribusi Daerah karena adanya Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	10.765.183.781,00	9.063.248.040,00	1.701.935.741,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	135.391.000,00	135.391.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	421.517.538,00	368.517.538,00	53.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	337.060.000,00	302.445.000,00	34.615.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	168.465.988,00	0,00	168.465.988,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	350.000,00	350.000,00	0,00

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	96.281.500,00	96.281.500,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	42.525.000,00	42.525.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	814.526.000,00	814.526.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	698.510.790,00	698.510.790,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	281.908.000,00	281.908.000,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	266.065.607,00	252.339.479,00	13.726.128,00
Jumlah	**14.082.745.204,00**	**12.111.002.347,00**	**1.971.742.857,00**

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO selisih sebesar Rp1.701.935.741,00 merupakan Penyesuaian Piutang dari Jasa Layanan pada RSUD Sadikin dengan nomor jurnal 002/JP/RSUDSADIKI/2025;

b. Retribusi Pelayanan Pasar-LO selisih sebesar Rp53.000.000,00 merupakan Retribusi Kios-LO pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dengan nomor jurnal 012/JU-PENYESUAIAN/PARBUD/2025;

c. Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO selisih sebesar Rp34.615.000,00 merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan-LO pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup dengan nomor jurnal 008/JU-PIUTANG/12/2025;

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–LO selisih sebesar Rp168.465.988,00 merupakan Retribusi Penyewaan Bangunan-LO pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah sejumlah Rp162.773.663,00 dengan nomor jurnal 001/PIUTANG/PERINDAG/2025 dan jurnal penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 atas Retribusi Penyewaan Bangunan-LO pada UPT. Pengelola Pasar sejumlah Rp5.692.325,00 dengan nomor jurnal 002/ JU/UPTPASAR/2025;

e. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selisih sebesar Rp13.726.128,00 merupakan. Piutang tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup dengan nomor jurnal 005/JP/DPUPR/2025.

3. Selisih Lain-Lain PAD yang SAH antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran

Selisih Lain-Lain PAD yang SAH antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada tabel 5.109 sebagai berikut.

Tabel 5.109 Selisih LO-LRA Lain-Lain PAD yang SAH

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	41.081.800,00	41.081.800,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	(109.172.967,00)	0,00	(109.172.967,00)
Jasa Giro-LO	470.213.259,00	470.213.259,00	0,00
Pendapatan Bunga – LO	181.250.000,00	181.250.000,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.253.485.007,00	2.253.485.007,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	452.309.248,00	452.309.248,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.460.806,00	1.460.806,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	192.329.303,00	192.329.303,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	(50.560.610,85)	0,00	(50.560.610,85)
Pendapatan dari Pengembalian –LO	962.812.563,89	962.812.563,89	0,00
Pendapatan dari BLUD-LO	7.065.414.988,00	6.755.750.063,00	309.664.925,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	377.000.000,00	377.000.000,00	0,00
Jumlah	**11.837.623.397,04**	**11.687.692.049,89**	**149.931.347,15**

a. Selisih Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar (Rp109.172.967,00) merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan nomor jurnal 13.77 /09.0/000017/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.01.0000/02/2026;

b. Selisih Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sebesar (Rp50.560.610,85) merupakan Piutang Denda Air Bersih pada UPT. Pengelola Air Bersih dengan nomor jurnal 13.77 /09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/1.04.2.11.0.00.01.0002/02/2026;

c. Selisih Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp309.664.925,00 merupakan Piutang Retribusi Air Bersih pada UPT. Pengelola Air Bersih dengan nomor jurnal 13.77/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.04.2.11.0.00.01.0002/02/2026.

1.b Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp515.454.826.199,00	**Rp603.393.937.004,00**

Pendapatan Transfer–LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp515.454.826.199,00 dan Rp603.393.937.004,00. Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp87.939.110.805,00) atau 14,57%. Rincian Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 5.110 berikut.

Tabel 5.110 Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	**482.035.816.658,00**	**525.401.188.687,00**	**(8,25)**
Bagi Hasil Pajak–LO	6.892.265.406,00	8.079.034.358,00	(14,69)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	3.267.262.000,00	5.977.692.000,00	(45,34)
Dana Alokasi Umum(DAU)–LO	407.108.094.546,00	417.506.738.000,00	(2,49)
Dana Alokasi Khusus(DAK)–LO	2.188.772.651,00	34.147.923.493,00	(93,59)
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	62.579.422.055,00	59.689.800.836,00	4,84
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	**6.963.163.000,00**	**41.844.428.000,00**	**(83,36)**
Dana Desa-LO	0,00	41.844.428.000,00	(100,00)
Insentif Fiskal-LO	6.963.163.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	**25.810.846.541,00**	**36.148.320.317,00**	**(28,60)**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO	25.810.846.541,00	36.148.320.317,00	(28,60)
Bantuan Keuangan – LO	**645.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	645.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer – LO	**515.454.826.199,00**	**603.393.937.004,00**	**(14,57)**

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Transfer dengan rincian pada tabel 5.111 berikut.

Tabel 5.111 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Transfer

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	482.035.816.658,00	482.035.816.658,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	6.963.163.000,00	47.908.954.400,00	(40.945.791.400,00)
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	25.810.846.541,00	28.391.165.663,00	(2.580.319.122,00)
Bantuan Keuangan	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00
Total Pendapatan Transfer-LO	**515.454.826.199,00**	**558.980.936.721,00**	**(43.526.110.522,00)**

1. Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar (Rp40.945.791.400,00) merupakan penyesuaian Pendapatan Dana Desa dengan nomor jurnal 001/KOREKSI-BPK/2025;
2. Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar (Rp2.792.016.460,00) yang terdiri dari:

- Selisih sebesar (Rp11.888.547.076,00) merupakan Jurnal Balik Piutang Tahun 2024 (Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi pada Tahun 2024) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan nomor jurnal 001 /PIUTANG-BLJ/BPKPD/2025;
- Selisih sebesar Rp9.308.227.954,00 merupakan Kurang Salur bagi hasil Provinsi TA 2025 surat nomor 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 dengan rincian pada tabel 5.112 berikut.

Tabel 5.112 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah

No.	Keterangan	Piutang Tahun 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang Tahun 2024 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Piutang PKB	0,00	2.421.608.824,00	(2.421.608.824,00)
2	Piutang BBNKB	0,00	874.295.597,00	(874.295.597,00)
3	Piutang PBBKB	9.308.083.615,00	8.539.408.766,00	768.674.849,00
4	Piutang PAP	144.339,00	53.233.889,00	(53.089.550,00)
Jumlah		**9.308.227.954,00**	**11.888.547.076,00**	**(2.580.319.122,00)**

Detail data perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya dengan rincian pada Tabel 5.113 berikut.

Tabel 5.113 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Bagi Hasil Pajak	6.892.265.406,00	6.892.265.406,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.267.262.000,00	3.267.262.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum(DAU)	407.108.094.546,00	407.108.094.546,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	2.188.772.651,00	2.188.772.651,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik	62.579.422.055,00	62.579.422.055,00	0,00
Dana Desa	0,00	40.945.791.400,00	(40.945.791.400,00)
Insentif Fiskal	6.963.163.000,00	6.963.163.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.810.846.541,00	28.391.165.663,00	(2.580.319.122,00)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	645.000.000	645.000.000	0,00
Jumlah	**515.454.826.199,00**	**558.980.936.721,00**	**(43.526.110.522,00)**

1.c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LO	Tahun 2025	Tahun 2024
		Rp15.344.155.928,00	**Rp174.500.000,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp15.344.155.928,00 dan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp174.500.000,00 dan terdapat peningkatan sebesar Rp15.169.655.928,00 atau 8693,21% yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk Hibah, Pendapatan Lainnya.

Tabel 5.114 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat -LO	11.344.155.928,00	174.500.000,00	6400,95
2	Dana Darurat-LO	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO		**15.344.155.928,00**	**174.500.000,00**	**8693,21**

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian pada tabel 5.115 berikut.

Tabel 5.115 Pengujian terhadap Pendapatan LO dengan Pendapatan LRA - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.344.155.928,00	0,00	11.344.155.928,00
Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
Total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	**15.344.155.928,00**	**4.000.000.000,00**	**11.344.155.928,00**

Selisih LRA dan LO yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.344.155.928,00 dengan rincian:

Tabel 5.116 Selisih Pendapatan Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.344.155.928,00	-	11.344.155.928,00
Jumlah	**11.344.155.928,00**	**-**	**11.344.155.928,00**

Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp11.344.155.928,00 terdiri dari :

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp338.151.999,00 dengan nomor jurnal 001/JU/BPBD/12/2025.
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp27.222.129,00 dengan nomor jurnal 002/JU/ARSIP/2025.

- ❖ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan sebesar Rp11.248.781.800,00 dengan nomor jurnal 012/JP/DPUPR/2025.
- ❖ Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan sebesar (Rp270.000.000,00) dengan nomor jurnal 008/JP/DPUPR/2025.

2. Beban	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp607.597.279.935,30	**Rp681.211.096.028,77**

Beban-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp607.597.279.935,30 dan Rp681.211.096.028,77. Beban-LO per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp73.613.816.093,47) atau 10,81% dari Beban-LO per 31 Desember 2024. Uraian Beban-LO lebih lanjut adalah sebagai berikut.

2.a Beban Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp561.079.623.801,30	**Rp591.481.981.750,46**

Beban Operasi–LO per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp561.079.623.801,30 dan Rp591.481.981.750,46. Beban Operasi-LO per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp30.402.357.949,16) atau 5,14% dari Beban Operasi-LO per 31 Desember 2024. Rincian Beban-LO Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.117 Beban Operasi

No.	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Pegawai	317.578.889.408,00	312.696.234.820,00	1,56
2	Beban Persediaan	29.983.764.294,27	37.356.733.894,13	(19,74)
3	Beban Jasa	99.292.650.709,16	102.440.686.282,00	(3,07)
4	Beban Pemeliharaan	13.468.156.709,54	8.291.680.563,00	62,43
5	Beban Perjalanan Dinas	16.393.034.640,00	18.634.452.689,00	(12,03)
6	Beban Hibah	7.556.116.110,00	21.650.244.697,33	(65,10)
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	545.742.000,00	(100,00)
8	Beban Penyisihan Piutang	657.310.385,70	410.698.456,98	60,05
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.624.461.481,00	17.874.994.506,00	(34,97)
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.379.449.330,00	23.140.954.975,00	5,35
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.160.560.175,82	39.798.049.760,02	(21,70)
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	782.431.677,00	1.405.644.497,00	(44,34)
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	2.793.662,81	11.412.667,00	(75,52)

No.	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
14	Beban Penyusutan Properti Investasi	6.252.127.556,00	6.590.564.326,00	(5,14)
15	Beban Lain-lain	1.947.877.662,00	633.887.617,00	207,29
Jumlah		**561.079.623.801,30**	**591.481.981.750,46**	**(5,14)**

1) Beban Pegawai

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp317.578.889.408,00	**Rp312.696.234.820,00**

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp317.578.889.408,00 merupakan Beban Pegawai dengan rincian pada tabel 5.118 berikut.

Tabel 5.118 Beban Pegawai – LO

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	193.813.872.225,00	180.082.951.671,00	7,62
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	94.372.494.232,00	75.175.862.530,00	25,54
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.796.874.320,00	44.229.309.969,00	(64,28)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.910.156.687,00	6.165.974.726,00	(4,15)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	327.495.500,00	114.876.312,00	185,09
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	385.880.000,00	379.800.000,00	1,60
7	Beban Pegawai BOS	0,00	17.847.875,00	(100,00)
8	Beban Pegawai BLUD	6.972.116.444,00	6.529.611.737,00	6,78
Jumlah		**317.578.889.408,00**	**312.696.234.820,00**	**1,56**

Rincian Beban Pegawai per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 27**.

Pengujian LO dan LRA Pegawai dengan rincian pada tabel 5.119 berikut.

Tabel 5.119 Pengujian LO-LRA Pegawai

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	193.813.872.225,00	193.813.872.225,00	-
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	94.372.494.232,00	110.015.269.428,00	(15.642.775.196,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.796.874.320,00	0,00	15.796.874.320,00

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.910.156.687,00	5.910.156.687,00	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	327.495.500,00	327.495.500,00	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	385.880.000,00	385.880.000,00	-
7	Beban Pegawai BLUD	6.972.116.444,00	6.972.116.444,00	-
Jumlah		**317.578.889.408,00**	**317.424.790.284,00**	**154.099.124,00**

Selisih pengujian Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO sebesar Rp154.099.124,00. Selisih merupakan hutang jasa pelayanan 31 Desember 2025 RSUD. Sadikin. Rincian disajikan pada **Lampiran 29a**.

		Tahun 2025	Tahun 2024
2)	**Beban Persediaan**	**Rp29.983.764.294,27**	**Rp37.356.733.894,13**

Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp29.983.764.294,27 merupakan Beban Persediaan dengan rincian pada tabel 5.120 berikut.

Tabel 5.120 Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	29.983.764.294,27	37.356.733.894,13	(19,74)
Jumlah		**29.983.764.294,27**	**37.356.733.894,13**	**(19,74)**

Rincian Beban Persediaan per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 28a**.

Pengujian per Perangkat Daerah Persediaan, LRA dan Beban Persediaan dengan rincian pada tabel 5.121 berikut.

Tabel 5.121 Perbandingan LRA-LO Persediaan

No	Jenis Persediaan	Persediaan Awal Tahun	Belanja Barang Dan Jasa - Persediaan (LRA)	Persediaan Akhir Tahun	Persediaan Yang Digunakan	Beban Persediaan-LO	Selisih LO-LRA
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5	7	8=7-6
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5.022.938.757,10	29.277.796.392,00	5.494.315.395,50	28.806.419.753,60	29.983.764.294,27	1.177.344.540,67
Jumlah		**5.022.938.757,10**	**29.277.796.392,00**	**5.494.315.395,50**	**28.806.419.753,60**	**29.983.764.294,27**	**1.177.344.540,67**

Selisih LO dan LRA sebesar Rp1.177.344.540,67 merupakan utang belanja TA.2025 sebesar Rp1.404.365.982,00, pembayaran utang belanja sebesar (Rp51.777.250,00) dan belanja modal tambah barang dan jasa sebesar (Rp110.441.460,00) serta koreksi BPK sebesar (Rp64.802.731,33). Pengujian persediaan, belanja Persediaan–LRA, beban Persedian-LO disajikan pada **Lampiran 29b**.

3) Beban Jasa	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp99.292.650.709,16	**Rp102.440.686.282,00**

Beban Jasa sebesar Rp99.292.650.709,16 merupakan Beban Jasa dengan rincian pada tabel 5.122 berikut.

Tabel 5.122 Beban Jasa

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Jasa Kantor	47.357.521.054,60	53.739.369.855,00	(11,88)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.191.118.086,56	12.360.895.154,00	(1,37)
3	Beban Sewa Tanah	13.945.000,00	32.000.000,00	(56,42)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.097.498.700,00	1.070.227.000,00	95,99
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.937.317.000,00	1.917.991.676,00	1,01
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	160.570.000,00	79.000.000,00	103,25
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	205.132.160,00	49.496.000,00	314,44
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.500.000,00	0,00	0,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	125.978.000,00	16.900.000,00	645,43
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	131.876.830,00	133.211.900,00	(1,00)
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	9.388.687,00	35.100.050,00	(73,25)
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.202.838.000,00	6.415.218.776,00	(50,07)
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.682.185.240,00	5.366.095.691,00	117,70
14	Beban Barang dan Jasa BOS	9.557.399.697,00	10.433.377.615,00	(8,40)
15	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.068.036.599,00	4.481.320.697,00	(9,22)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	6.502.479.305,00	6.310.481.868,00	3,07
Jumlah		**99.292.650.709,16**	**102.440.686.282,00**	**(3,07)**

Rincian Beban Jasa per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 28b**.

Pengujian LO dan LRA Beban Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.123 Pengujian LO-LRA Beban Jasa

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	47.357.521.054,60	47.413.082.055,00	(55.561.000,40)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.191.118.086,56	14.569.338.686,56	(2.378.220.600,00)
3	Beban Sewa Tanah	13.945.000,00	13.945.000,00	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.097.498.700,00	2.097.498.700,00	-
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.937.317.000,00	1.937.317.000,00	-
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	160.570.000,00	160.570.000,00	-
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	205.132.160,00	170.312.060,00	34.820.100,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.500.000,00	49.500.000,00	-
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	125.978.000,00	125.978.000,00	-
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	131.876.830,00	102.029.452,00	29.847.378,00
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	9.388.687,00	39.236.065,00	(29.847.378,00)
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.202.838.000,00	3.202.838.000,00	-
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.682.051.590,00	11.657.301.590,00	24.750.000,00
14	Beban Barang dan Jasa BOS	9.557.399.697,00	9.568.647.197,00	(11.247.500,00)
15	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.068.036.599,00	4.068.036.599,00	-
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	6.502.479.305,00	6.502.479.305,00	-
Jumlah		**99.292.650.709,16**	**101.678.109.709,56**	**(2.385.459.000,40)**

Selisih pengujian Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa–LO sebesar (Rp2.385.459.000,40) merupakan pembayaran Utang sebesar

(Rp2.437.281.600,40), Kapitalisasi barang dan jasa sebesar (Rp11.247.500,00), Utang Belanja Tahun 2025 sebesar Rp63.070.100,00. Rincian data per Peragkat Daerah pada **Lampiran 29c**.

4) Beban Pemeliharaan	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp13.468.156.709,54	**Rp8.291.680.563,00**

Beban Pemeliharan sebesar Rp13.468.156.709,54 merupakan Beban Pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.363.036.596,00	4.997.482.267,00	47,33
2	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.483.185.478,54	1.880.866.363,00	138,36
3	Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.621.934.635,00	1.413.331.933,00	14,76
Jumlah		**13.468.156.709,54**	**8.291.680.563,00**	**62,43**

Rincian Beban Pemeliharaan per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 28c**.

Pengujian LO dan LRA Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.125 Pengujian LO-LRA Pemeliharaan

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.363.036.596,00	7.363.036.596,00	-
2	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.483.185.478,54	4.577.005.825,54	(93.820.347,00)
3	Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.621.934.635,00	1.621.934.635,00	-
Jumlah		**13.468.156.709,54**	**13.468.156.709,54**	**(93.820.347,00)**

Selisih pengujian Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan–LO sebesar (Rp93.820.347,00) merupakan kapitalisasi belanja barang dan jasa ke belanja modal dengan rincian data per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 29d**.

5) Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp16.393.034.640,00	**Rp18.634.452.689,00**

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp16.393.034.640,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian pada taber 5.126 berikut.

Tabel 5.126 Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.292.128.482,00	5.253.858.988,00	(18,31)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.100.906.158,00	13.380.593.701,00	(9,56)
Jumlah		**16.393.034.640,00**	**18.634.452.689,00**	**(12,03)**

Rincian Beban Perjalanan Dinas per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 28d.**

Pengujian LO dan LRA Perjalanan Dinas disajikan pada tabel 5.127 berikut.

Tabel 5.127 Pengujian LO-LRA Perjalanan Dinas

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.292.128.482,00	4.292.128.482,00	-
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.100.906.158,00	12.100.906.158,00	-
Jumlah		**16.393.034.640,00**	**16.393.034.640,00**	**-**

6) Beban Hibah

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp7.556.116.110,00	**Rp21.650.244.697,33**

Beban Hibah sebesar Rp7.556.116.110,00 merupakan Beban Hibah pada BPKPD dan beban barang/uang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian pada tabel 5.128 berikut.

Tabel 5.128 Beban Hibah

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	13.961.261.265,00	(100,00)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.328.605.110,00	200.000.000,00	1.564,30
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	3.115.449.861,00	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	210.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
5	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	750.000.000,00	1.225.000.000,00	(38,78)
8	Beban Hibah Dana BOS	2.341.735.000,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	925.776.000,00	875.252.333,33	5,77
10	Beban Hibah Dana BOSP	0,00	2.273.281.238,00	(100,00)
Jumlah		**7.556.116.110,00**	**21.650.244.697,33**	(65,10)

Rincian Beban Hibah per Perangkat Daearah disajikan pada **Lampiran 28e**.

7) Beban Bantuan Sosial

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp0,00	**Rp545.742.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 yaitu sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp545.742.000,00 dari Tahun 2024 sebesar Rp545.742.000,00.

8) Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp657.310.385,70	**Rp410.698.456,98**

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp657.310.385,70 merupakan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian pada tabel 5.129 berikut.

Tabel 5.129 Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	584.742.327,45	297.080.171,25	96,83
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(17.681.987,13)	71.770.635,38	(124,64)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	90.250.045,38	43.044.317,02	109,67
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	(1.196.666,67)	(100,00)
Jumlah		**657.310.385,70**	**410.698.456,98**	**60,05**

9) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp74.201.823.882,63	**Rp88.821.620.731,02**

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp74.201.823.882,63 merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian pada tabel 5.130 berikut.

Tabel 5.130 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.624.461.481,00	17.874.994.506,00	(34,97)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.379.449.330,00	23.140.954.975,00	5,35
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.160.560.175,82	39.798.049.760,02	(21,70)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	782.431.677,00	1.405.644.497,00	(44,34)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	2.793.662,81	11.412.667,00	(75,52)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	6.252.127.556,00	6.590.564.326,00	(5,14)
Jumlah		**74.201.823.882,63**	**88.821.620.731,02**	**(16,46)**

Beban Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp74.201.823.882,63 merupakan selisih Akumulasi Penyusutan TA. 2025 sebesar Rp1.434.069.044.682,74 dikurangi Akumulasi Penyusutan TA 2024 sebesar Rp1.369.522.652.054,92 dikurangi penghapusan dan penyesuaian akumulasi penyusutan sebesar Rp3.400.510.036,00 ditambah dengan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.793.662,81 dan Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp6.252.127.556,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per Perangkat Daearah disajikan pada **Lampiran 29f.**

10) Beban Lain-Lain

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp1.947.877.662,00	**Rp633.887.617,00**

Beban Lain-Lain sebesar Rp1.947.877.662,00 merupakan reklasifikasi belanja modal yang tidak dikapitaliasi dari Beban Barang dan Jasa. Rincian Beban Lain-lain per Perangkat Daerah disajikan pada **Lampiran 28f.**

2.b Beban Transfer

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp46.036.003.847,00	**Rp89.608.619.278,31**

Beban Transfer pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp46.036.003.847,00 dan Rp89.608.619.278,31, rincian disajikan pada tabel 5.131 berikut.

Tabel 5.131 Beban Transfer – LO

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	915.865.552,00	1.600.016.144,21	(42,76)
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	988.696.139,10	(100,00)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	3.065.760.000,00	3.235.680.000,00	(5,25)

No	Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)	Persentase (%)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	42.054.378.295,00	83.784.226.995,00	(49,81)
Jumlah		**46.036.003.847,00**	**89.608.619.278,31**	**(48,63)**

Pengujian LO dan LRA Transfer disajikan pada tabel 5.132 berikut.

Tabel 5.132 Pengujian LO-LRA Beban Transfer

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	915.865.552,00	1.011.376.155,00	(95.510.603,00)
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	385.360.106,00	(385.360.106,00)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	3.065.760.000,00	3.065.760.000,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	42.054.378.295,00	83.000.169.695,00	(40.945.791.400,00)
Jumlah		**46.036.003.847,00**	**87.462.665.956,00**	**(41.426.662.109,00)**

Selisih LO dan LRA Beban Transfer sebesar (Rp41.426.662.109,00) merupakan jurnal penyesuaian pembayaran Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 SK nomor 70/900/2022 sebesar (Rp480.870.709,00) dan Dana Desa sebesar (Rp40.945.791.400,00).

		Tahun 2025	Tahun 2024
2.c	**Beban Tidak Terduga**	**Rp481.652.287,00**	**Rp120.495.000,00**

Beban Tidak Terduga pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp481.652.287,00 dan Rp120.495.000,00. Selisih LO dan LRA sebesar Rp79.500.000,00 merupakan jurnal penyesuaian BTT ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan mutasi antar SKPD dengan nomor jurnal 001/JU-BTT/KEU/2025.

		Tahun 2025	Tahun 2024
2.d	**Defisit Non Operasional**	**Rp0,00**	**Rp186.678.517,00**

Defisit Non Operasional pada Tahun 2025 tidak ada/nihil.

		Tahun 2025	Tahun 2024
2.e	**Surplus/Defisit- LO**	**(Rp16.790.922.017,26)**	**(Rp30.637.307.829,06)**

Defisit–LO per 31 Desember 2025 sebesar (Rp16.790.922.017,26) dan Defisit–LO per 31 Desember 2024 sebesar (Rp30.637.307.829,06).

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang wajib disajikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan transitoris.

Tujuan penyajian LAK adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2025, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi tersebut disajikan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan, termasuk DPRD, Pemerintah Pusat, dan masyarakat.

Arus Kas Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan menunjukkan Kenaikan Kas Bersih sebesar Rp18.598.901.648,45, sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp21.693.513.841,99. Berikut ini disajikan uraian per aktivitas.

		Tahun 2025	Tahun 2024
1.	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**Rp46.484.190.713,79**	**Rp54.785.631.291,03**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pariaman dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang positif mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman mampu memenuhi seluruh kewajiban operasionalnya dari penerimaan yang dihasilkan secara internal pada periode berjalan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp46.484.190.713,79, menurun sebesar (Rp8.301.440.577,24) atau 15,15% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.785.631.291,03. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar (30,98%) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar (45,34%), yang mencerminkan kebijakan konsolidasi fiskal Pemerintah Pusat dalam APBN Tahun 2025.

Penurunan tersebut tidak sepenuhnya terkompensasi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25,49% dan penerimaan Dana Darurat sebesar Rp4.000.000.000,00. Nilai ini merupakan selisih antara total Arus Masuk Kas sebesar Rp620.399.833.148,89 dikurangi total Arus Keluar Kas sebesar Rp573.915.642.435,10 dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 5.133 berikut.

Tabel 5.133 Rincian Arus Kas dari Aktifitas Operasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
a.	Arus Masuk Kas	620.399.833.148,89	644.206.147.273,36	(3,70)
b.	Arus Keluar Kas	573.915.642.435,10	589.420.515.982,33	(2,63)
Total		**46.484.190.713,79**	**54.785.631.291,03**	**(15,15)**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat, Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penerimaan-penerimaan tersebut dicatat dan dilaporkan secara kas (*cash basis*) pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Pariaman. Realisasi arus masuk kas dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp620.399.833.148,89, mengalami penurunan sebesar (Rp23.806.314.124,47) atau 3,70% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp644.206.147.273,36, sebagaimana dirinci pada Tabel 5.134 berikut.

Tabel 5.134 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	57.418.896.427,89	45.755.496.242,36	25,49
2	Transfer dari Pemerintah Pusat	529.944.771.058,00	565.486.692.998,00	(6,29)
3	Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.036.165.663,00	32.963.958.033,00	(11,92)
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**620.399.833.148,89**	**644.206.147.273,36**	**(3,70)**

1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan kas yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp57.418.896.427,89, mengalami peningkatan sebesar Rp11.663.400.185,53 atau 25,49% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.755.496.242,36. Peningkatan PAD yang signifikan ini terutama didorong oleh kenaikan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 54,88% dan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 25,21%, yang mencerminkan upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta perluasan basis pajak oleh Pemerintah Kota Pariaman. Peningkatan PAD ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman. Rincian penerimaan PAD disajikan pada Tabel 5.135 berikut.

Tabel 5.135 Rincian Arus Masuk Kas-Pendapatan Asli Daerah

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Pajak Daerah	22.296.272.876,00	14.396.111.950,00	54,88
2	Penerimaan Retribusi Daerah	11.739.158.547,00	9.375.406.310,00	25,21
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.365.010.955,00	11.331.512.753,00	0,30
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	12.018.454.049,89	10.652.465.229,36	12,82
Jumlah		**57.418.896.427,89**	**45.755.496.242,36**	**25,49**

2. Transfer dari Pemerintah Pusat

Penerimaan kas yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp529.944.771.058,00, mengalami penurunan sebesar (Rp35.541.921.940,00) atau 6,29% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp565.486.692.998,00. Penurunan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp29.069.529.623,00 atau (30,98%) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp2.710.430.000,00 atau (45,34%), yang mencerminkan kebijakan konsolidasi fiskal Pemerintah Pusat. Sebaliknya, terdapat penerimaan Dana Penyesuaian sebesar Rp6.963.163.000,00 yang merupakan penerimaan baru pada Tahun Anggaran 2025 dan tidak terdapat pada tahun sebelumnya. Seluruh penerimaan transfer dicatat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan yang diterima di RKUD Kota Pariaman. Rincian transfer dari Pemerintah Pusat disajikan pada Tabel 5.136 berikut.

Tabel 5.136 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Pusat

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.892.265.406,00	6.320.110.669,00	9,05
2	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.267.262.000,00	5.977.692.000,00	(45,34)
3	Penerimaan Dana Alokasi Umum	407.108.094.546,00	417.506.738.000,00	(2,49)
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	64.768.194.706,00	93.837.724.329,00	(30,98)
5	Penerimaan Dana Penyesuaian	6.963.163.000,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa	40.945.791.400,00	41.844.428.000,00	(2,15)
Jumlah		**529.944.771.058,00**	**565.486.692.998,00**	**(6,29)**

3. Transfer dari Pemerintah Provinsi

Penerimaan kas yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp29.036.165.663,00, mengalami penurunan sebesar (Rp3.927.792.370,00) atau 11,92% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.963.958.033,00. Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Penurunan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebesar (13,87%) dipengaruhi oleh perubahan kebijakan penetapan alokasi bagi hasil pajak provinsi Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, terdapat penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp645.000.000,00 yang merupakan penerimaan baru pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditetapkan. Rincian disajikan pada Tabel 5.137 berikut.

Tabel 5.137 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Provinsi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	28.391.165.663,00	32.963.958.033,00	(13,87)

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
2	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	645.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**29.036.165.663,00**	**32.963.958.033,00**	**(11,92)**

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00, yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana Darurat. Pada Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat realisasi pada kelompok pendapatan ini. Dana Darurat dimaksud merupakan Bantuan Kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanganan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kota Pariaman, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Presiden Nomor B-08/KSN/SP/KK.14.00/12/2025 tanggal 19 Desember 2025. Penerimaan Dana Darurat ini telah dicatat dalam RKUD dan dilaporkan sesuai ketentuan pengelolaan dana darurat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Rincian disajikan pada Tabel 5.138 berikut.

Tabel 5.138 Rincian Arus Masuk Kas -Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Darurat	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**4.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp573.915.642.435,10, mengalami penurunan sebesar (Rp15.504.873.547,23) atau 2,63% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp589.420.515.982,33. Arus keluar kas ini mencerminkan seluruh pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan kewajiban transfer kepada pemerintah desa dan entitas lainnya. Pengeluaran kas dicatat berdasarkan penerbitan SP2D-LS dan SP2D-UP/GU/TU yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penurunan arus keluar kas terutama disebabkan oleh berkurangnya Pembayaran Belanja Hibah sebesar Rp14.094.128.587,33 atau (65,10%) dibandingkan TA 2024, serta tidak terdapat realisasi Pembayaran Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 (turun 100,00%). Di sisi lain, Belanja Pegawai mengalami kenaikan tipis sebesar 0,77% seiring kebijakan kenaikan gaji ASN, sementara Belanja Tidak Terduga meningkat signifikan sebesar 365,71% berkaitan dengan penanganan bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Pariaman. Rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi disajikan pada Tabel 5.139 berikut.

Tabel 5.139 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pembayaran Belanja Pegawai	317.424.790.284,00	314.988.384.111,00	0,77
2	Pembayaran Belanja Barang & Jasa	160.910.917.798,10	164.059.422.975,00	(1,92)
3	Pembayaran Belanja Hibah	7.556.116.110,00	21.650.244.697,33	(65,10)
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	0,00	610.542.000,00	(100,00)
5	Pembayaran Belanja Tak Terduga	561.152.287,00	120.495.000,00	365,71
6	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.011.376.155,00	546.550.321,00	85,05
7	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	385.360.106,00	424.969.883,00	(9,32)
8	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	3.065.760.000,00	3.235.680.000,00	(5,25)
9	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.000.169.695,00	83.784.226.995,00	(0,94)
Jumlah		**573.915.642.435,10**	**589.420.515.982,33**	**(2,63)**

2.	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
		(Rp27.435.209.583,34)	**(Rp59.524.586.159,00)**

Aktivitas investasi mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pelepasan aset tetap serta aset lainnya, termasuk penyertaan modal pada entitas lain. Sesuai PSAP 03 paragraf 47, arus keluar kas dari aktivitas investasi yang negatif (defisit) merupakan hal yang lazim dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat investasi aset tetap dan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar (Rp27.435.209.583,34), menunjukkan perbaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp59.524.586.159,00). Defisit Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2025 lebih rendah sebesar Rp32.089.376.575,66 atau 53,91% dibandingkan TA 2024.

Penurunan defisit ini terutama disebabkan oleh berkurangnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.462.215.562,94 atau (82,67%) dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp12.832.694.357,72 atau (64,25%), seiring dengan selesainya program pembangunan infrastruktur berskala besar pada Tahun Anggaran 2024. Rincian disajikan pada Tabel 5.140 berikut.

Tabel 5.140 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	41.081.800,00	155.882.400,00	(73,65)
2	Arus Keluar Kas	27.476.291.383,34	59.680.468.559,00	(53,96)
Jumlah		**(27.435.209.583,34)**	**(59.524.586.159,00)**	**(53,91)**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp41.081.800,00, menurun sebesar (Rp114.800.600,00) atau 73,65% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp155.882.400,00. Seluruh arus masuk kas investasi TA 2025 bersumber dari hasil penjualan/penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp41.081.800,00 sesuai Berita Acara Lelang/Penghapusan Aset yang telah disetujui Kepala Daerah dan DPRD. Tidak terdapat penerimaan kas dari penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor pada TA 2025. Hasil penjualan aset dimaksud telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Pariaman dan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) periode yang bersangkutan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Rincian disajikan pada Tabel 5.141 berikut.

Tabel 5.141 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
2	Penjualan Aset Lainnya	41.081.800,00	155.882.400,00	(73,65)
Jumlah		**41.081.800,00**	**155.882.400,00**	**(73,65)**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp27.476.291.383,34, menurun sebesar (Rp32.204.177.175,66) atau 53,96% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.680.468.559,00. Penurunan yang signifikan terutama terjadi pada Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.462.215.562,94 atau (82,67%) dan Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp12.832.694.357,72 atau (64,25%), seiring dengan selesainya program pembangunan infrastruktur berskala besar pada TA 2024 yang tidak berlanjut pada TA 2025. Sebaliknya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT Bank Nagari) pada TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.936.000.000,00, meningkat 193,60% dibandingkan TA 2024. Realisasi PMP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 dan dicatat sebagai Investasi Permanen dalam Neraca per 31 Desember 2025 sesuai PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi. Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp89.095.815,00 merupakan perolehan baru yang tidak terdapat pada TA 2024. Rincian disajikan pada Tabel 5.142 berikut.

Tabel 5.142 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	10.884.258.129,00	10.229.912.049,00	6,40
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	4.710.081.248,06	27.172.296.811,00	(82,67)
4	Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	7.140.318.441,28	19.973.012.799,00	(64,25)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.716.537.750,00	1.305.246.900,00	31,51

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
6	Perolehan Aset Lainnya	89.095.815,00	0,00	0,00
7	Penyertaan Modal Daerah	2.936.000.000,00	1.000.000.000,00	193,60
Jumlah		**27.476.291.383,34**	**59.680.468.559,00**	**(53,96)**

3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025	Tahun 2024
	(450.079.482,00)	**Rp1.212.886.333,00**

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah dalam arti ekonomis. Sesuai PSAP 03 paragraf 59, aktivitas transitoris bersifat sementara dan merupakan pos perantara (*clearing account*), meliputi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), penerimaan dan pengeluaran Dana BOS, serta Kas Dana Kapitasi FKTP dan BLUD yang bersifat *extrabudgeter*.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar defisit (Rp450.079.482,00), berubah arah dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang mencatat surplus sebesar Rp1.212.886.333,00. Terjadi perubahan posisi (*sign change*) dari surplus menjadi defisit dengan selisih nominal sebesar Rp1.662.965.815,00 atau (137,11%). Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP/BLUD/Kas Lainnya yang diklasifikasikan sebagai pengeluaran transitoris sebesar 46,53% dibandingkan TA 2024, serta penurunan penerimaan Dana BOS/FKTP/BLUD sebesar (55,15%). Rincian disajikan pada Tabel 5.143 berikut.

Tabel 5.143 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	40.216.032.695,36	45.131.109.314,06	(10,79)
2	Arus Keluar Kas	40.711.112.177,36	43.918.222.981,06	(7,30)
Arus Kas Bersih (Defisit) Transitoris		**(450.079.482,00)**	**1.212.886.333,00**	**(137,11)**

a. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp40.261.032.695,36, menurun sebesar (Rp4.870.076.618,70) atau 10,79% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.131.109.314,06. Penerimaan terbesar berasal dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp39.274.854.573,98 yang mencakup potongan-potongan gaji pegawai (iuran wajib, iuran jaminan sosial) dan pemotongan pajak atas belanja daerah (PPh Pasal 21, PPN, dan pajak-pajak lainnya). Seluruh penerimaan PFK wajib disetorkan kembali kepada pihak ketiga yang berhak (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Taspen, dan Kas Negara) dalam periode yang sama. Rincian disajikan pada Tabel 5.144 berikut.

Tabel 5.144 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	39.274.854.573,98	42.932.044.859,68	(8,52)
2	Dana BOS/FKTP/BLUD	986.178.121,38	2.199.064.454,38	(55,15)
Jumlah		**40.261.032.695,36**	**45.131.109.314,06**	**(10,79)**

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp40.711.112.177,36, menurun sebesar (Rp3.207.110.803,70) atau 7,30% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.918.222.981,06. Arus keluar kas transitoris terdiri atas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp39.274.854.573,98, Dana BOS sebesar Rp6.086.000,00, serta Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP/BLUD/Kas Lainnya sebesar Rp1.430.171.603,38 yang mencerminkan akumulasi saldo kas yang belum terpakai pada akhir tahun. Pengeluaran PFK dicatat sebagai arus keluar pada saat pembayaran/penyetoran kepada pihak ketiga yang berhak dan telah diverifikasi kebenarannya oleh Bidang Perbendaharaan BPKPD Kota Pariaman. Rincian disajikan pada Tabel 5.145 berikut.

Tabel 5.145 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	39.274.854.573,98	42.932.044.859,68	(8,52)
2	Dana BOS	6.086.000,00	10.126.000,00	(39,90)
3	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP/BLUD/Kas Lainnya	1.430.171.603,38	976.052.121,38	46,53
Jumlah		**40.711.112.177,36**	**43.918.222.981,06**	**(7,30)**

Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Tabel 5.146 berikut.

Tabel 5.146 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
- Potongan :	**24.852.259.451,00**	**24.852.259.451,00**
1. Iuran Wajib Pegawai 8%	6.533.591.207,00	6.533.591.207,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	578.778,00	578.778,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	681.664,00	681.664,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	74.401,00	74.401,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.044.987,00	2.044.987,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	223.194,00	223.194,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%	9.847.874.318,00	9.847.874.318,00

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	304.222.151,00	304.222.151,00
10. Iuran Jaminan Kematian	912.045.753,00	912.045.753,00
11. Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%	2.178.766.447,00	2.178.766.447,00
16. Taspen	3.560.913.703,00	3.560.913.703,00
18. Lainnya	0,00	0,00
21. Zakat	1.511.242.848,00	1.511.242.848,00
- Pajak :	**14.422.595.122,98**	**14.422.595.122,98**
1. PPH 21	7.631.972.540,50	7.631.972.540,50
2. Pajak Penghasilan Ps 22	449.580.078,61	449.580.078,61
3. Pajak Penghasilan Ps 23	234.020.187,25	234.020.187,25
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	354.882.686,00	354.882.686,00
8. Pajak Pertambahan Nilai	5.752.133.630,62	5.752.133.630,62
10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.000,00	6.000,00
Total	**39.274.854.573,98**	**39.274.854.573,98**

4. Kenaikan/Penurunan Kas	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp18.598.901.648,45	**(Rp3.526.068.534,97).**

Kenaikan Kas Bersih per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.598.901.648,45, yang merupakan penjumlahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp46.484.190.713,79, ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp27.435.209.583,34), dan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp450.079.482,00). Angka kenaikan kas ini menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2025, arus kas masuk dari seluruh aktivitas lebih besar daripada arus kas keluar. Pada Tahun Anggaran 2024, terjadi Penurunan Kas Bersih sebesar (Rp3.526.068.534,97), sehingga Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pemulihan posisi kas yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan kenaikan/(penurunan) kas disajikan sebagai berikut.

5.147 Rekapitulasi Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	46.484.190.713,79	54.785.631.291,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(27.435.209.583,34)	(59.524.586.159,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(450.079.482,00)	1.212.886.333,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	**18.598.901.648,45**	**(3.526.068.534,97)**

5. Saldo Akhir Kas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp21.693.513.841,99	**Rp2.644.532.711,54**

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp21.693.513.841,99 dan Rp2.644.532.711,54**.** Saldo Kas per 31 Desember 2025 lebih besar atau terjadi peningkatan kas sebesar Rp19.048.981.130,45 atau 720,32% dari saldo akhir kas per 31 Desember 2024. Peningkatan saldo kas yang signifikan ini terutama disebabkan oleh keberhasilan Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan PAD, pengurangan signifikan belanja modal, penerimaan Dana Darurat, dan efisiensi belanja operasional pada Tahun Anggaran 2025.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp21.693.513.841,99 tersebut telah direkonsiliasi dengan Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2025, dan tidak terdapat selisih antara keduanya (Tabel 5.150). Rekonsiliasi kas ini merupakan prosedur pengendalian internal yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk memastikan keandalan (reliability) penyajian laporan keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Rincian Saldo Akhir Kas disajikan pada Tabel 5.148 berikut.

Tabel 5.148 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	20.247.256.238,61	1.571.594.340,16	1.188,33
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	86.760.250,00	(100,00)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000.000,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara BOS	6.086.000,00	10.126.000,00	(39,90)
5	Kas di Bendahara BLUD	1.107.484.409,38	507.674.452,38	118,15
6	Kas Lainnya	322.687.194,00	468.377.669,00	(31,11)
Jumlah		**21.693.513.841,99**	**2.644.532.711,54**	**720,32**

Perbandingan Saldo Akhir Kas pada LAK dengan Saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 5.149 berikut. Tidak terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas pada LAK dengan Saldo Kas dan Setara Kas pada Neraca, sehingga LAK TA 2025 telah memenuhi syarat keterkaitan antar laporan keuangan (*articulation*) sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka konseptual SAP.

Tabel 5.149 Perbandingan Rincian Saldo Akhir Kas LAK dan Kas Pada Neraca

No	Uraian	LAK (Rp)	Neraca (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	20.247.256.238,61	20.247.256.238,61	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3	Kas Dana BOS	6.086.000,00	6.086.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	1.107.484.409,38	1.107.484.409,38	0,00
5	Kas Lainnya	322.687.194,00	322.687.194,00	0,00
Jumlah		**21.693.513.841,99**	**21.693.513.841,99**	**0,00**

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas	Tahun 2025	Tahun 2024
	Rp800.092.301.017,48	Rp795.132.246.237,12

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2025. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dengan rincian disajikan pada tabel 5.150 berikut.

Tabel 5.150 Ekuitas

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
1	Ekuitas Awal	795.132.246.237,12	822.917.825.354,19	(3,38)
2	Surplus/Defisit LO	(16.790.922.017,26)	(30.637.307.829,06)	(45,19)
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi ekuitas lainnya	21.750.976.897,62	2.851.728.711,99	662,73
Total		**800.092.301.017,48**	**795.132.246.237,12**	**0,62**

Dari Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ekuitas Awal

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp795.132.246.237,12	Rp822.917.825.354,19

Pada Tahun 2025 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp795.132.246.237,12 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024. Ekuitas awal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp13.846.385.811,80) atau 3,38% dari ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp822.917.825.354,19.

2. Surplus/Defisit LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp16.790.922.017,26)	(Rp30.637.307.829,06)

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat surplus/defisit LO sebesar (Rp16.790.922.017,26). Surplus/defisit LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp13.846.385.811,80) atau 45,19% dari Tahun 2024 sebesar (Rp30.637.307.829,06).

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2025	Tahun 2024
Rp21.750.976.797,62	Rp2.851.728.711,99

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat Koreksi Ekuitas Lain-Lain sebesar Rp21.750.976.797,62, dengan rincian pada tabel 5.151 berikut.

Tabel 5.151 Koreksi Ekuitas Lain-Lain

No	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Selisih (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4-3*
1	Koreksi Nilai Piutang	0,00	1.758.923.689,00	(1.758.923.689,00)
2	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir	7.140.682,00	0,00	7.140.682,00
3	Koreksi Nilai Aset Tetap	23.502.477.481,00	1.001.301.422,00	22.501.176.059,00
4	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	17.011.802,00	390.629.164,00	(373.617.362,00)
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya	17.013.063,00	7.414.220,00	9.598.843,00
6	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Koreksi Nilai Aset Lainnya	1.255.172.498,12	241.380.894,00	1.013.791.604,12
8	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
9	Koreksi Nilai Utang Belanja	344.344.397,00	1.533.736,50	342.810.660,50
Jumlah		25.152.159.923,12	3.401.183.125,50	21.750.976.797,62

Detail rincian dapat dilihat pada **Lampiran 30.**

4. Ekuitas Akhir	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
	Rp800.092.301.017,48	**Rp795.132.246.237,12**

Ekuitas akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp800.092.301.017,48. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.960.054.780,36 atau 0,62% dari ekuitas akhir tahun 2024 sebesar Rp795.132.246.237,12.

BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Pengungkapan Informasi Penting Lainnya merupakan bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang wajib disajikan sesuai amanat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai PSAP Nomor 04 paragraf 57, CaLK harus mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan.

Bab ini menyajikan informasi yang relevan namun tidak tercakup dalam laporan keuangan pokok, terdiri dari: (1) Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan; (2) Komitmen dan Kontinjensi; (3) Pengungkapan Lainnya; (4) Struktur Organisasi; dan (5) Kepemimpinan Daerah. Pengungkapan informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan transparan mengenai kondisi Pemerintah Kota Pariaman kepada para pengguna laporan keuangan, sebagaimana dipersyaratkan dalam prinsip keterbukaan (*disclosure*) laporan keuangan pemerintah.

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Perubahan manajemen atau pejabat selama tahun berjalan merupakan informasi penting yang wajib diungkapkan dalam CaLK sesuai PSAP Nomor 04 paragraf 57. Pengungkapan ini relevan bagi pengguna laporan keuangan karena pergantian pejabat dapat berdampak pada kesinambungan kebijakan keuangan, arah pengelolaan program kerja, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran selama periode pelaporan. Pergantian pejabat yang terjadi di tengah tahun anggaran tidak mengubah tanggung jawab pelaporan, namun penting untuk didokumentasikan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan 3 (tiga) kali pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dengan total 114 (seratus empat belas) orang pejabat yang dilantik, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman dan dalam rangka optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah. Rincian pelantikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Pergantian Manajemen dan Pegawai

No	Pelantikan	Jumlah Yang Dilantik	JPT	Administrator	Pengawas	JFT
1	22 Agustus 2025	104 orang	-	57 orang	44 orang	3 orang
2	4 November 2025	6 orang	4 orang	2 orang	-	-
3	18 Desember 2025	4 orang	4 orang	-	-	-

Pelantikan pejabat pada 22 Agustus 2025 merupakan pelantikan terbesar dengan 104 orang, didominasi oleh Jabatan Administrator (57 orang) dan Jabatan Pengawas (44 orang). Rotasi dan mutasi jabatan ini dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan penempatan pejabat yang kompeten pada posisi strategis sesuai kompetensinya. Pelantikan pada 4 November 2025 dan 18

Desember 2025 difokuskan pada JPT Pratama guna mengisi kekosongan jabatan pimpinan yang terjadi akibat pensiun, promosi, maupun mutasi ke instansi lain.

Seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta telah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai mekanisme yang berlaku. Pergantian manajemen ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pejabat yang dilantik dan memaksimalkan peran Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah Pemerintah Kota Pariaman.

Dari perspektif akuntansi dan pelaporan keuangan, pergantian Kepala Perangkat Daerah dan pejabat pengelola keuangan (PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan) di tengah tahun anggaran tidak mengubah angka-angka dalam laporan keuangan, namun wajib didokumentasikan guna menjamin kesinambungan dan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan. Setiap pergantian Bendahara wajib disertai serah terima kas dan berita acara rekonsiliasi saldo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6.2. Komitmen dan Kontijensi

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Sesuai PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban dan Kerangka Konseptual SAP, kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan (Neraca) karena tidak memenuhi kriteria pengakuan kewajiban, namun wajib diungkapkan dalam CaLK apabila kemungkinan terjadinya pengeluaran sumber daya dinilai lebih dari tidak mungkin (more likely than not).

Pengungkapan komitmen dan kontinjensi bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai risiko keuangan yang potensial dihadapi Pemerintah Kota Pariaman. Sesuai PSAP Nomor 04 paragraf 35, CaLK harus mengungkapkan setiap pos yang mengandung unsur kontinjensi, termasuk perkara hukum yang sedang berjalan, klaim yang diajukan kepada pemerintah daerah, dan komitmen belanja yang bersifat mengikat namun belum terealisasi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 4 (empat) perkara hukum yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman sebagai pihak Tergugat, terdiri dari 3 (tiga) perkara perdata di Pengadilan Negeri Pariaman dan 1 (satu) perkara Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Rekapitulasi status perkara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2 Rekapitulasi Status Perkara Hukum Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Penggugat	Tergugat Utama	Status per 31 Des 2025	Kategori Kontinjensi
1	54/Pdt.G/2024/ PN.Pmn	Perdata	Indra Jaya Malik	Pemko Pariaman dll.	Kasasi di Mahkamah Agung	Kontinjensi Belum Pasti
2	56/Pdt.G/2024/	Perdata	Yusneli	Pemko	Gugatan	Tidak

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Penggugat	Tergugat Utama	Status per 31 Des 2025	Kategori Kontinjensi
	PN.Pmn			Pariaman dll.	Ditolak — PN Pariaman	Menimbulkan Kewajiban
3	33/G/2025/PTUN.PDG	TUN	Yaminu Rizal	Wali Kota Pariaman	Banding di PT TUN	Kontinjensi Kepeg.
4	44/Pdt.G/2025/PN.Pmn	Perdata	Suhelmi	BPKPD BMD, DPUPRP, BPN	Pemeriksaan Saksi — PN Pariaman	Kontinjensi BMD

6.2.1 Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2024/PN.Pmn

Perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diajukan oleh Sdr. Indra Jaya Malik. Pihak Tergugat meliputi Pemerintah Kota Pariaman, DPRD Kota Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pariwisata, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta Ketua Yayasan LP3ESIDA.

Per 31 Desember 2025, perkara ini telah memasuki tahap Proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena perkara masih dalam proses hukum dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), nilai kewajiban yang mungkin timbul dari perkara ini belum dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) sesuai Kerangka Konseptual SAP, kewajiban ini tidak diakui dalam Neraca namun diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi. Pemerintah Kota Pariaman melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Advokat/Kuasa Hukum yang ditunjuk terus melakukan pemantauan dan upaya hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan daerah.

6.2.2 Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2024/PN.Pmn

Perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Sdr. Yusneli terhadap Pemerintah Kota Pariaman bersama DPRD Kota Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Inspektorat, BPKPD Kota Pariaman, dan PT. Nata Konstruksi.

Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan yang menolak seluruh gugatan Penggugat (gugatan tidak dapat diterima). Putusan ini berdampak bahwa perkara ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan langsung bagi Pemerintah Kota Pariaman pada saat ini. Dari perspektif akuntansi, tidak diperlukan pencatatan kewajiban maupun pengungkapan kontinjensi atas perkara ini di dalam laporan keuangan, namun Pemerintah Kota Pariaman tetap waspada terhadap kemungkinan upaya hukum lanjutan berupa banding yang dapat diajukan Penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan hukum acara perdata (14 hari sejak putusan dibacakan).

6.2.3 Perkara Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2025/PTUN.PDG

Perkara Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan oleh Sdr. Yaminu Rizal kepada Wali Kota Pariaman. Objek sengketa adalah Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor:

1220/SK/KEP/WAKO-2025 tentang Pembebasan Tugas Sementara dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagaimana diketahui pula, perkara ini berkaitan erat dengan Perkara TUN Nomor 33/G/2025/PTUN.PDG.

Per 31 Desember 2025, perkara ini sedang dalam tahap Proses Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Perkara ini bersifat administratif kepegawaian dan berpotensi berdampak pada keputusan administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Pariaman. Dari perspektif akuntansi, apabila putusan yang berkekuatan hukum tetap memenangkan Penggugat, maka dapat timbul kewajiban keuangan berupa pembayaran hak-hak kepegawaian yang sempat tertahan selama pembebasan tugas. Nilai kewajiban tersebut belum dapat diestimasi secara andal per 31 Desember 2025. Pemerintah Kota Pariaman telah mengambil langkah-langkah pembelaan hukum yang diperlukan guna mempertahankan keabsahan Keputusan Wali Kota yang telah diterbitkan.

6.2.4 Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2025/PN.Pmn

Perkara ini diajukan oleh Sdr. Suhelmi dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemerintah Kota Pariaman, khususnya BPKPD Bidang Barang Milik Daerah dan Dinas PUPR Bidang Pertanahan, serta Kantor Pertanahan Nasional Kota Pariaman. Perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan dan penguasaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah.

Per 31 Desember 2025, perkara masih berada pada tahap Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Pariaman. Perkara ini memerlukan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan aset daerah berupa tanah yang tercatat dalam Neraca Pemerintah Kota Pariaman. Apabila gugatan dikabulkan, terdapat risiko berkurangnya aset tanah daerah dan/atau timbulnya kewajiban ganti rugi. Nilai aset tanah yang berpotensi terdampak belum dapat ditetapkan secara pasti mengingat proses persidangan masih berlangsung. Pemerintah Kota Pariaman terus menghadiri persidangan dan menyiapkan alat bukti yang diperlukan guna memberikan pembelaan yang memadai dan melindungi aset daerah.

Tabel 6.3 Kesimpulan Penilaian Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2025

No.	Nomor Perkara	Status	Estimasi Kewajiban	Perlakuan Akuntansi	Dasar
1	54/Pdt.G/2024	Kasasi MA	Belum dapat diestimasi	Diungkapkan di CaLK, tidak diakui di Neraca	PSAP 09 par. 55
2	56/Pdt.G/2024	Gugatan DITOLAK	Nihil / tidak ada	Tidak perlu diungkapkan lebih lanjut	PSAP 09 par. 55
3	33/G/2025/PTUN	Banding PT TUN	Belum dapat diestimasi (hak kepeg.)	Diungkapkan di CaLK, tidak diakui di Neraca	PSAP 09 par. 55
4	44/Pdt.G/2025	Pemeriksaan Saksi	Belum dapat diestimasi (risiko aset tanah)	Diungkapkan di CaLK, tidak diakui di Neraca	PSAP 09 par. 55

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) perkara hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman, 1 (satu) perkara telah diputus dengan amar menolak gugatan sehingga tidak menimbulkan kewajiban keuangan. Sebanyak 3 (tiga) perkara masih dalam proses hukum dan dikategorikan sebagai kewajiban kontinjensi yang diungkapkan dalam CaLK namun tidak diakui dalam Neraca per 31 Desember 2025, sesuai PSAP Nomor 09. Nilai kerugian potensial dari ketiga perkara tersebut belum dapat diestimasi secara andal. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen untuk mengungkapkan setiap perkembangan perkara yang berdampak material terhadap laporan keuangan pada periode pelaporan berikutnya.

6.3. Pengungkapan Lainnya

6.3.1 Perubahan Penerapan Basis Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Pariaman telah sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sejak Tahun Anggaran 2015, sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penerapan basis akrual menggantikan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) yang digunakan sebelumnya, dan mewajibkan pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan.

Terkait perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, Pemerintah Kota Pariaman mengacu pada PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan dan Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). IPSAP menegaskan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat tidak berulang dan koreksi kesalahan mendasar diterapkan secara prospektif tanpa penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya (*restatement*), kecuali dalam kondisi yang secara khusus disyaratkan oleh PSAP.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman untuk Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Beberapa kebijakan akuntansi signifikan yang berlaku adalah: (i) penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus untuk Peralatan dan Mesin, JIJ, serta Aset Tetap Lainnya, dan metode saldo menurun berganda untuk Gedung dan Bangunan; (ii) persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan dengan metode pencatatan perpetual; (iii) piutang pajak dan retribusi daerah dinilai bruto dikurangi penyisihan yang dihitung berdasarkan *aging schedule*; dan (iv) investasi permanen dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*).

6.3.2 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (*Subsequent Events*)

Sesuai PSAP Nomor 01 paragraf 79, peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal neraca dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. PSAP membedakan dua jenis peristiwa setelah tanggal pelaporan: (i) *adjusting events*, yaitu peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal neraca, sehingga memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan; dan (ii) *non-adjusting events*, yaitu peristiwa yang menunjukkan kondisi yang timbul setelah tanggal neraca, yang tidak memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan namun perlu diungkapkan.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang terjadi pada periode antara 31 Desember 2025 hingga tanggal otorisasi laporan keuangan yang perlu diungkapkan adalah sebagai berikut: (i) Rekonsiliasi

Kas — Selisih rekening koran RKUD dengan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp440.000,00 yang disebabkan double validasi SP2D pada Dinas PUPR, telah diselesaikan melalui penyetoran kembali ke RKUD pada tanggal 4 Februari 2026 berdasarkan Nota Kredit Bank Nagari, sehingga dikategorikan sebagai *adjusting event* dan telah dicerminkan dalam saldo Kas di Neraca. (ii) Penetapan Utang Belanja BLUD RSUD Sadikin — Pada tanggal 14 Januari 2026, Direktur RSUD dr. Sadikin menerbitkan SK Nomor 800/04/KEP/RS-SDK/2026 yang menetapkan Utang Belanja BLUD RSUD sebesar Rp1.064.957.506,00, dan telah diakui sebagai Utang Belanja dalam Neraca per 31 Desember 2025.

6.3.3 Informasi Segmen dan Entitas Akuntansi

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman merupakan laporan keuangan konsolidasian yang menggabungkan seluruh Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja (UK) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, termasuk RSUD dr. Sadikin dan 8 (delapan) Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Konsolidasi dilakukan dengan metode eliminasi transaksi resiprokal antar entitas.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengacu pada PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pariaman secara keseluruhan, sementara entitas akuntansi adalah masing-masing SKPD/UK yang menyampaikan laporan keuangan individual. Laporan keuangan BLUD (RSUD dan Puskesmas) dikonsolidasikan penuh ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman setelah eliminasi transaksi antar entitas.

6.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pariaman

Pemerintah Kota Pariaman menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman. Pengungkapan struktur organisasi merupakan bagian dari informasi kelembagaan yang relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami entitas pelaporan, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 04.

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari unsur pimpinan daerah, sekretariat daerah beserta staf ahli, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan, dan kecamatan sebagaimana diuraikan berikut.

Tabel 6.4 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman

No	Kelompok	Satuan Kerja / Unit
A	UNSUR PIMPINAN DAERAH	Wali Kota
		Wakil Wali Kota
B	SEKRETARIAT DAERAH	Asisten Tata Praja: Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi
		Asisten Administrasi dan Pembangunan: Bagian Umum, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian Perekonomian & Kesejahteraan Sosial

No	Kelompok	Satuan Kerja / Unit
		Staf Ahli: Bid. Pemerintahan/Hukum/Politik; Bid. Kemasyarakatan & SDM; Bid. Ekonomi/Keuangan/Pembangunan
C	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD Kota Pariaman
D	DINAS DAERAH (16 Dinas)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Dinas Kesehatan
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Dinas Sosial
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
E	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kota Pariaman
F	BADAN DAERAH (4 Badan)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
G	KANTOR DAN KECAMATAN	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kecamatan Pariaman Tengah
		Kecamatan Pariaman Timur
		Kecamatan Pariaman Utara
		Kecamatan Pariaman Selatan

Seluruh Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas merupakan entitas akuntansi yang menyampaikan Laporan Keuangan SKPD secara individual dan dikonsolidasikan menjadi Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKPD dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

6.5. Kepemimpinan Daerah

Pengungkapan kepemimpinan daerah merupakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2025. Perubahan kepemimpinan yang terjadi dalam tahun berjalan juga perlu diungkapkan guna mendukung akuntabilitas dan keterlacakan (audit trail) laporan keuangan.

6.5.1 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tabel 6.5 Daftar Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kota Pariaman

Jabatan	Tahun 2025	Tahun 2024
Ketua	Muhajir Muslim, LC	Harpen Agus Bulyandi (13 Agustus 2024) Muhajir Muslim, LC (14 Agustus 2024-Sekarang)
Wakil Ketua I	Reza Saputra, S. Pd	Reza Saputra, S. Pd
Wakil Ketua II	Yogi Firman	Yogi Firman

6.5.2 Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Pariaman

Pergantian kepemimpinan eksekutif Pemerintah Kota Pariaman terjadi pada awal Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman hasil Pilkada Serentak 2024. Perubahan ini secara langsung mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 20, Wali Kota selaku kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Tabel 6.6 Susunan Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Pariaman

Jabatan	Tahun 2025	Tahun 2024
Walikota	Roberia (1 Januari 2025 – 20 Februari 2025) Yota Balad, S.STP, M.Si (20 Februari 2025 – sekarang)	Roberia (12 Oktober 2023 – 31 Desember 2024)
Wakil Walikota	Mulyadi, S.Ap (20 Februari 2025 – sekarang)	-
Sekretaris Daerah	Mursalim, A.P., M.Si (1 Januari 2025 – 17 September 2025 Drs. Afrizal Azhar, M.Si (17 September 2025 – 6 April 2026) Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM (6 April 2026 - sekarang)	Yota Balad, S.STP, M.Si (1 Agustus 2024 Drs. Yaminu Rizal, M.Si (14 September 2024- 13 Desember 2024) Mursalim, A.P., M.Si (13 Desember 2024-31 Desember 2024)
Bendahara Umum Daerah	Adrial, SE, MM (1 Januari 2025 – 31 September 2025) Willy Firmadian, SE,MM (1 Oktober 2025 – sekarang)	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si (30 September 2024) Adrial, SE, MM (1 Oktober 2024 – 1 Desember 2024)

Pelantikan Wali Kota Pariaman Yota Balad, S.STP, M.Si dan Wakil Wali Kota Mulyadi, S.Ap pada tanggal 20 Februari 2025 merupakan peristiwa kepemimpinan yang paling signifikan dalam Tahun Anggaran 2025. Pergantian ini merupakan konsekuensi dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota baru telah menetapkan dan menandatangani seluruh instrumen kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, termasuk DPA-PD, perubahan anggaran, serta otorisasi atas laporan keuangan tahun anggaran berjalan.

Seluruh pergantian pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dilaksanakan dengan mekanisme serah terima jabatan yang disertai rekonsiliasi saldo kas dan berita acara serah terima sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019. Dengan demikian, kesinambungan pengelolaan keuangan dan integritas data keuangan terjaga sepanjang Tahun Anggaran 2025.

6.6 Pernyataan Tanggungjawab

Seluruh informasi yang diungkapkan dalam Bab VI ini merupakan informasi yang relevan, material, dan dapat diandalkan (*reliable*) sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP Nomor 04. Informasi yang disajikan telah diverifikasi oleh unit-unit terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, termasuk Bagian Hukum Sekretariat Daerah (untuk perkara hukum), BPKPD (untuk data keuangan dan kepegawaian keuangan), dan BKPSDM (untuk data kepegawaian struktural).

Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan guna mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Seluruh pengungkapan dalam Bab ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini mencakup komponen-komponen laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, yaitu: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Secara umum, realisasi keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang memadai. Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mekanisme pengendalian intern yang memadai. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir Tahun Anggaran 2025 (per 31 Desember 2025) tercatat sebesar Rp21.683.513.841,99, mencerminkan efisiensi pelaksanaan anggaran dalam batas yang wajar dan tidak menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025. CaLK memuat informasi tambahan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, pengungkapan kebijakan akuntansi, serta informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pemerintah Kota Pariaman menyadari bahwa laporan keuangan ini masih dapat memiliki keterbatasan mengingat kompleksitas transaksi keuangan daerah dan dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian intern,

peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan, serta penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Atas segala dukungan dan kerja sama seluruh pihak dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Pemerintah Kota Pariaman juga menyambut baik setiap masukan dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel demi sebesar-besar kemakmuran masyarakat Kota Pariaman.

Lampiran 1

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD/UPT	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Belanja Pegawai BLUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	74.260.731.836,00	38.826.543.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.087.275.492,00
2	Dinas Kesehatan	40.544.226.772,00	23.294.153.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838.380.012,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	1.701.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282.659.368,00	4.983.659.368,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	104.843.515,00	0,00	0,00	0,00	377.763.891,00	482.607.406,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	104.953.775,00	0,00	0,00	0,00	478.996.528,00	583.950.303,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	170.400.364,00	0,00	0,00	0,00	970.354.749,00	1.140.755.113,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	73.279.200,00	0,00	0,00	0,00	454.185.711,00	527.464.911,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	83.682.731,00	0,00	0,00	0,00	410.375.057,00	494.057.788,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	97.057.867,00	0,00	0,00	0,00	527.364.373,00	624.422.240,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	93.474.952,00	0,00	0,00	0,00	420.001.767,00	513.476.719,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	3.742.517.318,00	2.030.764.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773.281.494,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	5.237.716.408,00	2.694.527.250,00	0,00	3.640.000,00	0,00	50.415.000,00	7.986.298.658,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.285.147.276,00	1.020.802.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.949.795,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.802.099.870,00	1.910.206.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712.306.162,00
16	Dinas Sosial	1.433.925.999,00	989.365.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.291.158,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	2.042.474.554,00	1.181.330.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.804.936,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.889.155.588,00	1.263.146.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.302.090,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.604.453.637,00	1.176.965.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.419.000,00
20	Dinas Perhubungan	3.302.589.153,00	1.430.970.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.559.448,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.021.145.962,00	1.091.612.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.758.004,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.947.482.930,00	1.720.432.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667.915.690,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	2.386.121.659,00	1.455.798.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.919.703,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.618.164.847,00	1.503.904.567,00	0,00	7.875.000,00	0,00	0,00	4.129.944.414,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.393.761.160,00	898.137.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.898.181,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	8.143.736.797,00	4.913.843.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057.579.936,00
27	Sekretariat Daerah	5.544.791.322,00	4.113.789.150,00	0,00	143.806.716,00	275.000.000,00	0,00	10.077.387.188,00
28	Sekretariat DPRD	2.013.046.995,00	1.212.881.435,00	5.910.156.687,00	0,00	110.880.000,00	0,00	9.246.965.117,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2.230.898.903,00	1.390.698.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.596.974,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	3.502.424.564,00	2.770.096.273,00	0,00	172.173.784,00	0,00	0,00	6.444.694.621,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	2.075.139.671,00	1.232.529.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.669.518,00
32	Inspektorat	4.163.911.245,00	2.946.491.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.403.008,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	1.462.405.365,00	858.763.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.168.932,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	6.496.886.702,00	3.508.160.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005.047.346,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.541.889.639,00	876.938.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.828.191,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	1.052.700.881,00	607.260.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.961.829,00
37	Kantor Kesbangpol	1.074.325.172,00	666.464.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.789.539,00
TOTAL		193.813.872.225,00	110.015.269.428,00	5.910.156.687,00	327.495.500,00	385.880.000,00	6.972.116.444,00	317.424.790.284,00

Lampiran 1.a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD/UPT	Belanja Gaji Pokok ASN	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Belanja Tunjangan Beras ASN	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	56.545.132.335,00	5.401.243.122,00	98.625.000,00	4.434.866.000,00	389.585.000,00	2.970.378.720,00	205.307.653,00	677.733,00	3.744.568.623,00	117.587.624,00	352.760.026,00	74.260.731.836,00
2	Dinas Kesehatan	30.263.534.654,00	2.567.055.835,00	124.674.950,00	3.374.319.850,00	167.780.000,00	1.654.362.480,00	81.425.038,00	441.286,00	2.060.889.584,00	62.435.445,00	187.307.650,00	40.544.226.772,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.852.473.640,00	236.475.450,00	102.480.000,00	53.910.000,00	120.820.000,00	162.510.480,00	1.875.475,00	51.919,00	188.071.368,00	5.962.222,00	17.886.764,00	3.742.517.318,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	3.982.218.160,00	339.206.078,00	142.380.000,00	60.606.000,00	183.805.000,00	232.902.720,00	5.501.049,00	64.691,00	257.515.466,00	8.379.318,00	25.137.926,00	5.237.716.408,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.686.806.200,00	165.112.480,00	106.315.000,00	28.840.000,00	61.960.000,00	110.232.992,00	3.776.372,00	26.525,00	107.294.990,00	3.695.713,00	11.087.004,00	2.285.147.276,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.168.565.020,00	461.801.246,00	98.450.000,00	147.930.000,00	240.805.000,00	341.098.200,00	2.784.857,00	77.832,00	294.261.803,00	11.581.739,00	34.744.173,00	6.802.099.870,00
16	Dinas Sosial	1.047.518.820,00	94.054.816,00	81.830.000,00	36.120.000,00	27.330.000,00	54.677.100,00	4.418.554,00	15.539,00	79.183.579,00	2.194.393,00	6.583.198,00	1.433.925.999,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.546.644.980,00	101.365.870,00	66.815.000,00	67.956.000,00	57.825.000,00	77.489.400,00	5.618.183,00	20.332,00	105.639.080,00	3.275.182,00	9.825.527,00	2.042.474.554,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.370.136.180,00	125.923.070,00	88.550.000,00	77.840.000,00	34.750.000,00	71.550.960,00	6.057.081,00	21.842,00	102.870.388,00	2.864.023,00	8.592.044,00	1.889.155.588,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.158.498.920,00	102.059.062,00	77.174.950,00	64.960.000,00	36.010.000,00	61.267.320,00	4.561.592,00	15.819,00	90.338.200,00	2.391.925,00	7.175.849,00	1.604.453.637,00
20	Dinas Perhubungan	2.510.486.796,00	217.685.008,00	113.260.000,00	20.050.000,00	111.880.000,00	148.026.480,00	3.082.982,00	37.440,00	156.429.728,00	5.412.725,00	16.237.994,00	3.302.589.153,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.452.887.780,00	136.646.928,00	77.070.000,00	105.704.000,00	44.805.000,00	83.789.940,00	4.500.575,00	22.517,00	103.193.297,00	3.131.515,00	9.394.410,00	2.021.145.962,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.212.047.880,00	182.833.326,00	108.710.000,00	73.400.000,00	76.590.000,00	116.378.940,00	5.794.113,00	33.406,00	153.040.732,00	4.663.635,00	13.990.898,00	2.947.482.930,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	1.758.896.960,00	155.616.340,00	87.290.000,00	73.450.000,00	65.710.000,00	98.925.720,00	6.192.318,00	26.555,00	125.256.483,00	3.689.291,00	11.067.992,00	2.386.121.659,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.939.849.605,00	169.076.042,00	75.509.950,00	99.876.000,00	71.030.000,00	107.109.180,00	5.218.725,00	26.354,00	134.064.708,00	4.101.070,00	12.303.213,00	2.618.164.847,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.017.641.774,00	81.092.338,00	80.990.000,00	59.840.000,00	16.990.000,00	46.421.220,00	5.236.153,00	13.343,00	77.105.880,00	2.107.607,00	6.322.845,00	1.393.761.160,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	5.971.654.981,00	535.225.784,00	123.020.000,00	556.149.950,00	142.410.000,00	329.438.580,00	12.986.411,00	86.031,00	423.237.009,00	12.381.895,00	37.146.156,00	8.143.736.797,00
27	Sekretariat Daerah	4.006.836.739,00	369.914.420,00	237.225.000,00	208.493.000,00	133.480.000,00	222.619.080,00	15.393.818,00	58.514,00	317.044.701,00	8.431.544,00	25.294.506,00	5.544.791.322,00
28	Sekretariat DPRD	1.508.344.140,00	121.167.992,00	74.970.000,00	66.948.000,00	48.760.000,00	67.350.600,00	6.837.114,00	23.052,00	105.942.607,00	3.175.874,00	9.527.616,00	2.013.046.995,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	1.593.306.843,00	158.445.170,00	76.345.000,00	127.380.000,00	47.740.000,00	90.959.520,00	6.474.917,00	25.430,00	117.061.919,00	3.290.006,00	9.870.098,00	2.230.898.903,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.644.986.208,00	255.374.640,00	133.939.950,00	10.560.000,00	101.060.000,00	148.461.000,00	4.487.492,00	38.630,00	181.308.028,00	5.552.149,00	16.656.467,00	3.502.424.564,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.527.682.140,00	147.027.982,00	74.915.000,00	63.455.000,00	51.750.000,00	84.948.660,00	5.223.643,00	20.905,00	107.498.073,00	3.154.564,00	9.463.704,00	2.075.139.671,00
32	Inspektorat	2.960.844.019,00	239.469.908,00	97.024.950,00	422.514.950,00	29.285.000,00	138.901.560,00	18.614.457,00	45.303,00	232.636.663,00	6.143.582,00	18.430.853,00	4.163.911.245,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	1.081.613.836,00	119.313.354,00	69.380.000,00	0,00	37.225.000,00	68.074.800,00	2.623.540,00	14.828,00	75.166.128,00	2.248.457,00	6.745.422,00	1.462.405.365,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	4.929.496.920,00	444.140.834,00	386.475.000,00	0,00	106.635.000,00	257.887.620,00	5.248.388,00	66.299,00	325.836.296,00	10.275.038,00	30.825.307,00	6.496.886.702,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.151.277.900,00	120.024.522,00	70.689.950,00	0,00	38.510.000,00	72.275.160,00	1.778.801,00	17.935,00	77.835.646,00	2.369.923,00	7.109.802,00	1.541.889.639,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	778.978.780,00	80.016.590,00	56.580.000,00	0,00	25.920.000,00	48.666.240,00	1.482.813,00	12.685,00	54.434.657,00	1.652.276,00	4.956.840,00	1.052.700.881,00
37	Kantor Kesbangpol	803.652.920,00	81.742.486,00	41.940.000,00	0,00	32.325.000,00	50.476.740,00	1.268.418,00	13.017,00	56.257.892,00	1.662.145,00	4.986.554,00	1.074.325.172,00
TOTAL		145.472.015.130,00	13.209.110.693,00	2.972.629.700,00	10.235.168.750,00	2.502.775.000,00	7.917.181.412,00	433.770.532,00	1.995.762,00	9.853.983.528,00	303.810.880,00	911.430.838,00	193.813.872.225,00

Lampiran 1.b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD/UPT	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5.128.142.687,00	82.850.913,00	0,00	2.378.117.661,00	31.237.432.395,00	38.826.543.656,00
2	Dinas Kesehatan	15.317.887.804,00	560.146.405,00	0,00	7.340.152.534,00	75.966.497,00	23.294.153.240,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	1.701.000.000,00	0,00	0,00	1.701.000.000,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	104.843.515,00	104.843.515,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	104.953.775,00	104.953.775,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400.364,00	170.400.364,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	73.279.200,00	73.279.200,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	83.682.731,00	83.682.731,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	97.057.867,00	97.057.867,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	93.474.952,00	93.474.952,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.303.729.674,00	121.910.699,00	0,00	596.016.161,00	9.107.642,00	2.030.764.176,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.767.262.602,00	108.341.561,00	0,00	793.462.284,00	25.460.803,00	2.694.527.250,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632.301.009,00	115.202.014,00	0,00	272.899.068,00	400.428,00	1.020.802.519,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.199.049.084,00	172.600.368,00	0,00	537.797.675,00	759.165,00	1.910.206.292,00
16	Dinas Sosial	654.197.453,00	72.356.324,00	0,00	262.415.174,00	396.208,00	989.365.159,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	780.524.315,00	66.774.728,00	0,00	333.663.605,00	367.734,00	1.181.330.382,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	830.917.029,00	79.333.932,00	0,00	352.497.143,00	398.398,00	1.263.146.502,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	776.037.475,00	71.554.287,00	0,00	328.993.174,00	380.427,00	1.176.965.363,00
20	Dinas Perhubungan	937.354.817,00	93.036.307,00	0,00	399.877.685,00	701.486,00	1.430.970.295,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	713.045.057,00	78.149.971,00	0,00	300.016.628,00	400.386,00	1.091.612.042,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.146.228.663,00	78.585.708,00	0,00	494.631.079,00	987.310,00	1.720.432.760,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	972.349.853,00	64.480.032,00	0,00	418.567.255,00	400.904,00	1.455.798.044,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	994.454.837,00	51.280.080,00	0,00	428.144.180,00	30.025.470,00	1.503.904.567,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	578.030.035,00	75.842.843,00	0,00	243.869.410,00	394.733,00	898.137.021,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	3.293.309.422,00	117.931.453,00	0,00	1.498.253.063,00	4.349.201,00	4.913.843.139,00
27	Sekretariat Daerah	2.529.568.900,00	409.722.046,00	17.891.780,00	1.156.606.424,00	0,00	4.113.789.150,00
28	Sekretariat DPRD	794.605.363,00	87.036.417,00	0,00	330.839.307,00	400.348,00	1.212.881.435,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	936.344.301,00	49.430.793,00	0,00	404.225.106,00	697.871,00	1.390.698.071,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.299.202.435,00	157.572.239,00	0,00	597.165.863,00	716.155.736,00	2.770.096.273,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	828.581.203,00	61.279.802,00	0,00	342.268.394,00	400.448,00	1.232.529.847,00
32	Inspektorat	1.974.160.870,00	75.151.824,00	0,00	887.580.165,00	9.598.904,00	2.946.491.763,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	573.800.992,00	35.814.244,00	0,00	248.740.911,00	407.420,00	858.763.567,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.273.743.159,00	217.715.809,00	0,00	1.011.837.957,00	4.863.719,00	3.508.160.644,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	584.188.803,00	36.855.871,00	0,00	255.559.566,00	334.312,00	876.938.552,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	401.722.788,00	35.447.914,00	0,00	170.090.246,00	0,00	607.260.948,00
37	Kantor Kesbangpol	446.296.156,00	22.182.220,00	0,00	197.586.422,00	399.569,00	666.464.367,00
Total		49.667.036.786,00	3.198.586.804,00	1.718.891.780,00	22.581.874.140,00	32.848.879.918,00	110.015.269.428,00

Lampiran 1.c

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Uang Representasi DPRD	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Belanja Uang Paket DPRD	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 1.c

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Uang Representasi DPRD	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Belanja Uang Paket DPRD	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Total
27	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	451.290.000,00	23.373.000,00	37.513.520,00	38.682.000,00	654.370.500,00	62.574.750,00	1.512.000.000,00	378.000.000,00	1.343.050,00	989.850.612,00	1.755.267.180,00	5.910.156.687,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		451.290.000,00	23.373.000,00	37.513.520,00	38.682.000,00	654.370.500,00	62.574.750,00	1.512.000.000,00	378.000.000,00	1.343.050,00	989.850.612,00	1.755.267.180,00	5.910.156.687,00

Lampiran 1.d

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	46.799.960,00	3.024.000,00	84.240.000,00	4.345.200,00	553.356,00	1.000,00	4.468.800,00	93.600,00	280.800,00	0,00	143.806.716,00
28	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 1.d

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Total
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.771.110,00	1.402.674,00	172.173.784,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		46.799.960,00	3.024.000,00	84.240.000,00	4.345.200,00	553.356,00	1.000,00	4.468.800,00	93.600,00	280.800,00	170.771.110,00	12.917.674,00	327.495.500,00

Lampiran 1.e

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH, BELANJA PEGAWAI BOS DAN BELANJA PEGAWAI BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Belanja Pegawai BLUD	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	3.282.659.368,00	3.282.659.368,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	377.763.891,00	377.763.891,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	478.996.528,00	478.996.528,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	970.354.749,00	970.354.749,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	454.185.711,00	454.185.711,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	410.375.057,00	410.375.057,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	527.364.373,00	527.364.373,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	420.001.767,00	420.001.767,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	50.415.000,00	50.415.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	0,00	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00
28	Sekretariat DPRD	110.880.000,00	0,00	0,00	110.880.000,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**110.880.000,00**	**275.000.000,00**	**6.972.116.444,00**	**7.357.996.444,00**

Lampiran 2

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BELANJA BARANG DAN JASA				TOTAL
		BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA PERJALANAN DINAS	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.717.921.861,00	15.896.648.174,00	1.334.487.776,00	266.042.794,00	19.215.100.605,00
2	Dinas Kesehatan	4.570.807.958,00	14.638.731.535,00	487.394.514,00	351.052.795,00	20.047.986.802,00
3	RSUD dr Sadikin	284.663.798,00	5.269.986.898,00	81.855.507,00	0,00	5.636.506.203,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	10.105.000,00	740.657.124,00	42.831.850,00	0,00	793.593.974,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	18.489.500,00	901.412.340,00	64.596.000,00	0,00	984.497.840,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	15.394.000,00	1.570.584.581,00	86.324.000,00	0,00	1.672.302.581,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	14.753.600,00	960.298.965,00	69.827.795,00	1.125.000,00	1.046.005.360,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	15.799.000,00	826.515.409,00	74.787.200,00	0,00	917.101.609,00
9	UPT. Puskesmas Naras	23.668.000,00	782.163.727,00	48.500.000,00	0,00	854.331.727,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	18.530.000,00	763.341.258,00	62.653.000,00	0,00	844.524.258,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	515.711.030,00	204.481.780,00	34.213.000,00	17.457.500,00	771.863.310,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.092.939.890,00	5.209.167.437,00	2.048.782.563,00	197.421.330,00	9.548.311.220,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.664.256.316,00	7.533.833.691,00	1.226.073.575,00	139.451.901,00	10.563.615.483,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.392.730,00	1.083.593.314,00	233.231.740,00	54.304.086,00	1.534.521.870,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	357.025.240,00	3.967.902.436,56	550.095.595,00	35.575.500,00	4.910.598.771,56
16	Dinas Sosial	523.930.200,00	521.050.940,00	96.908.410,00	70.395.949,00	1.212.285.499,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	648.988.900,00	3.182.619.129,00	243.249.835,00	227.592.990,00	4.302.450.854,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	234.018.117,00	183.722.532,00	97.122.000,00	54.916.315,00	569.778.964,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	234.877.700,00	1.530.111.681,00	120.061.012,00	138.393.539,00	2.023.443.932,00
20	Dinas Perhubungan	473.515.930,00	1.604.770.103,00	1.022.997.504,00	68.638.967,00	3.169.922.504,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	52.301.250,00	3.235.059.083,00	314.452.810,00	159.957.914,00	3.761.771.057,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	765.317.500,00	2.685.231.536,00	328.269.983,00	149.013.214,00	3.927.832.233,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	182.942.000,00	561.357.480,00	136.398.911,00	96.117.368,00	976.815.759,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	331.568.100,00	1.626.802.441,00	203.599.910,00	174.605.458,00	2.336.575.909,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	304.759.200,00	497.030.478,00	110.991.500,00	57.516.614,00	970.297.792,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.975.078.962,00	1.193.453.233,00	390.866.900,00	157.076.685,00	3.716.475.780,00
27	Sekretariat Daerah	5.748.308.020,00	10.169.145.453,00	2.200.509.458,08	2.602.528.187,00	20.720.491.118,08
28	Sekretariat DPRD	2.452.788.911,00	3.207.128.922,00	639.083.335,00	8.700.953.705,00	14.999.954.873,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	393.215.010,00	683.401.609,00	121.126.849,00	129.916.054,00	1.327.659.522,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.665.786.005,00	5.109.013.904,00	373.978.174,46	880.796.815,00	8.029.574.898,46
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	240.106.778,00	962.216.442,00	94.677.057,00	540.203.510,00	1.837.203.787,00
32	Inspektorat	71.974.000,00	333.379.754,00	102.364.483,00	784.106.188,00	1.291.824.425,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	62.176.796,00	171.732.511,00	39.538.000,00	21.161.477,00	294.608.784,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	914.633.560,00	2.907.105.334,00	353.578.970,00	147.944.805,00	4.323.262.669,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	55.040.000,00	163.275.399,00	47.320.440,00	17.938.500,00	283.574.339,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	31.508.500,00	167.436.976,00	45.100.400,00	17.007.621,00	261.053.497,00
37	Kantor Kesbangpol	431.503.030,00	633.746.100,00	34.127.000,00	133.821.859,00	1.233.197.989,00
TOTAL		**29.277.796.392,00**	**101.678.109.709,56**	**13.561.977.056,54**	**16.393.034.640,00**	**160.910.917.798,10**

Lampiran 2.a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.530.551.000,00	187.370.861,00	1.717.921.861,00
2	Dinas Kesehatan	4.570.807.958,00	0,00	4.570.807.958,00
3	RSUD dr Sadikin	284.663.798,00	0,00	284.663.798,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	10.105.000,00	0,00	10.105.000,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	18.489.500,00	0,00	18.489.500,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	15.394.000,00	0,00	15.394.000,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	14.753.600,00	0,00	14.753.600,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	15.799.000,00	0,00	15.799.000,00
9	UPT. Puskesmas Naras	23.668.000,00	0,00	23.668.000,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	18.530.000,00	0,00	18.530.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	515.711.030,00	0,00	515.711.030,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.092.939.890,00	0,00	2.092.939.890,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.664.256.316,00	0,00	1.664.256.316,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.392.730,00	0,00	163.392.730,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	357.025.240,00	0,00	357.025.240,00
16	Dinas Sosial	523.930.200,00	0,00	523.930.200,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	648.988.900,00	0,00	648.988.900,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	234.018.117,00	0,00	234.018.117,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	234.877.700,00	0,00	234.877.700,00
20	Dinas Perhubungan	473.515.930,00	0,00	473.515.930,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	52.301.250,00	0,00	52.301.250,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	765.317.500,00	0,00	765.317.500,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	182.942.000,00	0,00	182.942.000,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	331.568.100,00	0,00	331.568.100,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	303.259.200,00	1.500.000,00	304.759.200,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.975.078.962,00	0,00	1.975.078.962,00
27	Sekretariat Daerah	5.748.308.020,00	0,00	5.748.308.020,00
28	Sekretariat DPRD	1.973.092.540,00	479.696.371,00	2.452.788.911,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	393.215.010,00	0,00	393.215.010,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.665.786.005,00	0,00	1.665.786.005,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	240.106.778,00	0,00	240.106.778,00
32	Inspektorat	71.974.000,00	0,00	71.974.000,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	62.176.796,00	0,00	62.176.796,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	912.633.560,00	2.000.000,00	914.633.560,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	55.040.000,00	0,00	55.040.000,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	31.508.500,00	0,00	31.508.500,00
37	Kantor Kesbangpol	431.503.030,00	0,00	431.503.030,00
TOTAL		**28.607.229.160,00**	**670.567.232,00**	**29.277.796.392,00**

Lampiran 2.b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BELANJA JASA															TOTAL
		Belanja Jasa Kantor	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Belanja Sewa Tanah	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Daerah	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Barang Dan Jasa BOS	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5.472.626.369,00	39.042.000,00	13.945.000,00	35.500.000,00	11.100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900.000,00	648.887.608,00	9.568.647.197,00	0,00	0,00	15.896.648.174,00
2	Dinas Kesehatan	1.240.027.102,00	12.199.005.783,00	0,00	52.000.000,00	504.580.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.618.650,00	0,00	0,00	0,00	14.638.731.535,00
3	RSUD dr Sadikin	1.276.698.881,00	2.196.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933.210,00	0,00	0,00	3.834.158.411,00	5.269.986.898,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	127.683.991,00	278.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048.600,00	0,00	488.450.499,00	115.195.394,00	740.657.124,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	159.282.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	0,00	547.404.000,00	189.100.901,00	901.412.340,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	197.435.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625.000,00	0,00	984.964.500,00	373.559.358,00	1.570.584.581,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	135.451.232,00	360.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625.000,00	0,00	569.867.500,00	239.994.378,00	960.298.965,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	166.969.376,00	356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702.760,00	0,00	481.398.600,00	163.088.273,00	826.515.409,00
9	UPT. Puskesmas Naras	126.280.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.868,00	0,00	505.745.000,00	146.175.063,00	782.163.727,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	108.799.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125.000,00	0,00	490.206.500,00	154.209.900,00	763.341.258,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	140.966.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.515.000,00	0,00	0,00	0,00	204.481.780,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	4.977.430.537,00	12.999.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.312.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.425.000,00	0,00	0,00	0,00	5.209.167.437,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	4.941.469.150,00	168.326.995,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.039.919,00	0,00	0,00	1.286.997.627,00	7.533.833.691,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.062.141.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451.634,00	0,00	0,00	0,00	1.083.593.314,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.768.118.423,00	145.259.713,56	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.300,00	0,00	0,00	0,00	3.967.902.436,56
16	Dinas Sosial	307.209.700,00	197.640,00	0,00	8.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.443.600,00	0,00	0,00	0,00	521.050.940,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	726.407.625,00	711.504,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.408.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182.619.129,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	180.234.100,00	488.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	183.722.532,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	751.766.681,00	0,00	0,00	19.985.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	724.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.111.681,00
20	Dinas Perhubungan	1.467.737.477,00	4.207.626,00	0,00	16.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.604.770.103,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.755.020.250,00	1.617.840,00	0,00	0,00	18.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.973.993,00	0,00	0,00	0,00	3.235.059.083,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.149.028.377,00	955.800,00	0,00	38.500.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.497.359,00	0,00	0,00	0,00	2.685.231.536,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	360.280.000,00	134.577.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	561.357.480,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	855.515.061,00	1.699.380,00	0,00	191.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626.802.441,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	347.511.428,00	0,00	0,00	18.550.000,00	0,00	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450.000,00	61.019.050,00	0,00	0,00	0,00	497.030.478,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.120.725.183,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728.050,00	0,00	0,00	0,00	1.193.453.233,00
27	Sekretariat Daerah	3.977.940.994,00	0,00	0,00	1.450.524.700,00	368.730.000,00	96.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.288.000,00	1.273.091.759,00	0,00	0,00	0,00	10.169.145.453,00
28	Sekretariat DPRD	2.457.300.563,00	2.415.204,00	0,00	201.500.000,00	428.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.953.155,00	0,00	0,00	0,00	3.207.128.922,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	650.823.710,00	477.899,00	0,00	1.200.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	683.401.609,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.927.710.059,00	1.851.345.780,00	0,00	0,00	243.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.236.065,00	0,00	47.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.109.013.904,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	759.436.028,00	402.414,00	0,00	0,00	30.150.000,00	0,00	0,00	125.978.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	962.216.442,00
32	Inspektorat	231.539.264,00	311.038,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	55.029.452,00	0,00	0,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	333.379.754,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	158.232.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	171.732.511,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.734.197.932,00	1.453.427,00	0,00	3.000.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.853.975,00	0,00	0,00	0,00	2.907.105.334,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	145.480.299,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572.900,00	0,00	0,00	0,00	163.275.399,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	146.932.476,00	291.600,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.212.900,00	0,00	0,00	0,00	167.436.976,00
37	Kantor Kesbangpol	300.670.000,00	136.800,00	0,00	46.550.000,00	192.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	93.089.300,00	0,00	0,00	0,00	633.746.100,00
JUMLAH		**47.413.082.055,00**	**14.569.338.686,56**	**13.945.000,00**	**2.097.498.700,00**	**1.986.817.000,00**	**160.570.000,00**	**170.312.060,00**	**125.978.000,00**	**102.029.452,00**	**39.236.065,00**	**3.202.838.000,00**	**11.657.301.590,00**	**9.568.647.197,00**	**4.068.036.599,00**	**6.502.479.305,00**	**101.678.109.709,56**

Lampiran 2.c

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Pemeliharaan			TOTAL
		Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	131.862.350,00	1.202.625.426,00	0,00	1.334.487.776,00
2	Dinas Kesehatan	158.222.667,00	329.171.847,00	0,00	487.394.514,00
3	RSUD dr Sadikin	81.855.507,00	0,00	0,00	81.855.507,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	42.831.850,00	0,00	0,00	42.831.850,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	64.596.000,00	0,00	0,00	64.596.000,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	61.324.000,00	25.000.000,00	0,00	86.324.000,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	67.015.445,00	0,00	2.812.350,00	69.827.795,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	39.787.200,00	35.000.000,00	0,00	74.787.200,00
9	UPT. Puskesmas Naras	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	52.653.000,00	10.000.000,00	0,00	62.653.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	34.213.000,00	0,00	0,00	34.213.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	287.984.821,00	350.747.457,00	1.410.050.285,00	2.048.782.563,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	851.330.525,00	175.446.050,00	199.297.000,00	1.226.073.575,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	233.231.740,00	0,00	0,00	233.231.740,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	550.095.595,00	0,00	0,00	550.095.595,00
16	Dinas Sosial	88.508.410,00	8.400.000,00	0,00	96.908.410,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	243.249.835,00	0,00	0,00	243.249.835,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	97.122.000,00	0,00	0,00	97.122.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	96.735.512,00	23.325.500,00	0,00	120.061.012,00
20	Dinas Perhubungan	882.412.055,00	140.585.449,00	0,00	1.022.997.504,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	314.452.810,00	0,00	0,00	314.452.810,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	228.400.200,00	99.869.783,00	0,00	328.269.983,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	130.051.911,00	6.347.000,00	0,00	136.398.911,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	114.850.000,00	88.749.910,00	0,00	203.599.910,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	110.991.500,00	0,00	0,00	110.991.500,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	384.866.900,00	6.000.000,00	0,00	390.866.900,00
27	Sekretariat Daerah	619.365.876,00	1.581.143.582,08	0,00	2.200.509.458,08
28	Sekretariat DPRD	370.311.684,00	258.996.651,00	9.775.000,00	639.083.335,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	121.126.849,00	0,00	0,00	121.126.849,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	209.455.389,00	164.522.785,46	0,00	373.978.174,46
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	94.677.057,00	0,00	0,00	94.677.057,00
32	Inspektorat	96.365.098,00	5.999.385,00	0,00	102.364.483,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	39.538.000,00	0,00	0,00	39.538.000,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	288.503.970,00	65.075.000,00	0,00	353.578.970,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	47.320.440,00	0,00	0,00	47.320.440,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	45.100.400,00	0,00	0,00	45.100.400,00
37	Kantor Kesbangpol	34.127.000,00	0,00	0,00	34.127.000,00
TOTAL		**7.363.036.596,00**	**4.577.005.825,54**	**1.621.934.635,00**	**13.561.977.056,54**

Lampiran 2.d

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	266.042.794,00	266.042.794,00
2	Dinas Kesehatan	351.052.795,00	351.052.795,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	1.125.000,00	1.125.000,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	17.457.500,00	17.457.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	197.421.330,00	197.421.330,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	139.451.901,00	139.451.901,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.304.086,00	54.304.086,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	35.575.500,00	35.575.500,00
16	Dinas Sosial	70.395.949,00	70.395.949,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	227.592.990,00	227.592.990,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	54.916.315,00	54.916.315,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	138.393.539,00	138.393.539,00
20	Dinas Perhubungan	68.638.967,00	68.638.967,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	159.957.914,00	159.957.914,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	149.013.214,00	149.013.214,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	96.117.368,00	96.117.368,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	174.605.458,00	174.605.458,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	57.516.614,00	57.516.614,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	157.076.685,00	157.076.685,00
27	Sekretariat Daerah	2.602.528.187,00	2.602.528.187,00
28	Sekretariat DPRD	8.700.953.705,00	8.700.953.705,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	129.916.054,00	129.916.054,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	880.796.815,00	880.796.815,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	540.203.510,00	540.203.510,00
32	Inspektorat	784.106.188,00	784.106.188,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	21.161.477,00	21.161.477,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	147.944.805,00	147.944.805,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	17.938.500,00	17.938.500,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	17.007.621,00	17.007.621,00
37	Kantor Kesbangpol	133.821.859,00	133.821.859,00
TOTAL		**16.393.034.640,00**	**16.393.034.640,00**

Lampiran 2.e

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Belanja Hibah Dana BOS	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	3.928.605.110,00	0,00	2.341.735.000,00	6.270.340.110,00
2	Dinas Kesehatan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00
4	Kantor Kesbangpol	0,00	925.776.000,00	0,00	925.776.000,00
Jumlah		**4.288.605.110,00**	**925.776.000,00**	**2.341.735.000,00**	**7.556.116.110,00**

Lampiran 3

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
IKHTISAR DANA DESA TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA DESA	PENDAPATAN		%	BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SiLPA	BELANJA DESA (KEUANGAN)						%
												ANGGARAN			REALISASI			
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%		ADD	DD	TOTAL	ADD	DD	TOTAL	
A	**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**	**10.020.015.414,00**	**9.784.969.729,00**	**97,65**	**10.156.464.032,00**	**9.017.471.033,00**	**88,79**	**136.448.618,00**	**883.633.218,00**	**648**	**1.651.131.913,00**	**4.835.859.224,00**	**4.726.855.400,00**	**9.562.714.624,00**	**4.835.859.224,00**	**4.726.855.400,00**	**9.562.714.624,00**	**100,00**
1	DESA PAUH BARAT	1.577.592.586,00	1.560.010.470,00	98,89	1.684.916.446,00	1.406.261.024,00	83,46	107.323.859,00	254.026.259,00	237	407.775.705,00	795.834.704,00	733.512.000,00	1.529.346.704,00	795.834.704,00	733.512.000,00	1.529.346.704,00	100,00
2	DESA PAUH TIMUR	1.696.643.002,00	1.582.562.428,00	93,28	1.682.644.586,00	1.511.748.778,00	89,84	(13.998.416,00)	137.146.584,00	(979,73)	207.960.234,00	883.440.704,00	673.840.400,00	1.557.281.104,00	883.440.704,00	673.840.400,00	1.557.281.104,00	100,00
3	DESA RAWANG	1.515.988.447,00	1.495.359.370,00	98,64	1.521.792.294,00	1.437.009.375,00	94,43	5.803.848,00	155.952.648,00	2.687,06	214.302.643,00	718.505.704,00	750.744.000,00	1.469.249.704,00	718.505.704,00	750.744.000,00	1.469.249.704,00	100,00
4	DESA KAMPUNG BARU	1.949.150.377,00	1.920.838.235,00	98,55	1.832.971.202,00	1.690.608.892,00	92,23	(116.179.175,00)	(116.179.175,00)	100,00	114.050.168,00	768.640.704,00	1.072.817.000,00	1.841.457.704,00	768.640.704,00	1.072.817.000,00	1.841.457.704,00	100,00
5	DESA CIMPARUH	1.901.183.178,00	1.860.542.689,00	97,86	1.886.414.102,00	1.676.852.350,00	88,89	(14.769.076,00)	156.016.524,00	(1.056,37)	339.706.863,00	971.010.704,00	853.928.000,00	1.824.938.704,00	971.010.704,00	853.928.000,00	1.824.938.704,00	100,00
6	DESA JATI MUDIK	1.379.457.824,00	1.365.656.537,00	99,00	1.547.725.402,00	1.294.990.614,00	83,67	168.267.578,00	296.670.378,00	176,31	367.336.301,00	698.426.704,00	642.014.000,00	1.340.440.704,00	698.426.704,00	642.014.000,00	1.340.440.704,00	100,00
B	**KECAMATAN PARIAMAN UTARA**	**27.150.313.941,00**	**26.892.948.840,00**	**99,05**	**26.468.090.766,00**	**24.472.428.497,00**	**92,46**	**(682.223.174,00)**	**585.894.226,00**	**(85,88)**	**3.006.414.569,00**	**12.992.732.968,00**	**13.228.152.000,00**	**26.220.884.968,00**	**12.992.732.968,00**	**13.228.152.000,00**	**26.220.884.968,00**	**100,00**
1	DESA AMPALU	1.584.379.557,00	1.564.401.869,00	98,74	1.472.681.577,00	1.398.049.736,00	94,93	(111.697.980,00)	(111.697.980,00)	100,00	54.654.153,00	746.111.704,00	789.159.000,00	1.535.270.704,00	746.111.704,00	789.159.000,00	1.535.270.704,00	100,00
2	DESA APAR	1.401.121.444,00	1.381.919.871,00	98,63	1.358.144.162,00	1.247.210.273,00	91,83	(42.977.282,00)	87.030.518,00	(202,50)	221.740.116,00	709.604.704,00	650.039.000,00	1.359.643.704,00	709.604.704,00	650.039.000,00	1.359.643.704,00	100,00
3	DESA TANJUNG SABAR	1.418.675.893,00	1.404.426.960,00	99,00	1.419.765.676,00	1.354.605.629,00	95,41	1.089.783,00	1.089.783,00	100,00	50.911.114,00	703.255.704,00	677.462.000,00	1.380.717.704,00	703.255.704,00	677.462.000,00	1.380.717.704,00	100,00
4	DESA CUBADAK AIR SELATAN	1.756.097.382,00	1.740.553.201,00	99,11	1.604.236.773,00	1.447.278.632,00	90,22	(151.860.610,00)	35.005.590,00	(23,05)	328.280.159,00	780.378.704,00	934.331.000,00	1.714.709.704,00	780.378.704,00	934.331.000,00	1.714.709.704,00	100,00
5	DESA SIKAPAK BARAT	1.893.697.228,00	1.872.464.175,00	98,88	1.925.040.618,00	1.710.477.746,00	88,85	31.343.390,00	49.343.390,00	157,43	211.329.819,00	793.797.704,00	1.002.423.000,00	1.796.220.704,00	793.797.704,00	1.002.423.000,00	1.796.220.704,00	100,00
6	DESA SIKAPAK TIMUR	1.623.264.747,00	1.581.728.726,00	97,44	1.534.489.408,00	1.422.002.944,00	92,67	(88.775.339,00)	46.931.261,00	(52,87)	206.657.043,00	836.609.704,00	678.533.000,00	1.515.142.704,00	836.609.704,00	678.533.000,00	1.515.142.704,00	100,00
7	DESA MANGGUNG	1.593.947.521,00	1.588.285.342,00	99,64	1.531.424.893,00	1.420.030.178,00	92,73	(62.522.628,00)	101.857.372,00	(162,91)	270.112.536,00	774.556.704,00	750.189.000,00	1.524.745.704,00	774.556.704,00	750.189.000,00	1.524.745.704,00	100,00
8	DESA CUBADAK AIR UTARA	1.640.679.818,00	1.621.341.551,00	98,82	1.556.593.555,00	1.466.753.951,00	94,23	(84.086.263,00)	(84.086.263,00)	100,00	70.501.337,00	812.933.704,00	776.007.000,00	1.588.940.704,00	812.933.704,00	776.007.000,00	1.588.940.704,00	100,00
9	DESA TUNGKAL SELATAN	1.627.509.709,00	1.605.749.063,00	98,66	1.695.231.752,00	1.475.816.954,00	87,06	67.722.043,00	67.722.043,00	100,00	197.654.152,00	805.863.704,00	768.504.000,00	1.574.367.704,00	805.863.704,00	768.504.000,00	1.574.367.704,00	100,00
10	DESA NARAS HILIR	1.512.121.783,00	1.520.357.369,00	100,54	1.551.239.826,00	1.505.138.293,00	97,03	39.118.043,00	189.003.443,00	483,16	204.222.519,00	725.156.704,00	749.427.000,00	1.474.583.704,00	725.156.704,00	749.427.000,00	1.474.583.704,00	100,00
11	DESA NARAS I	1.661.584.401,00	1.657.661.954,00	99,76	1.646.944.853,00	1.525.614.592,00	92,63	(14.639.548,00)	148.284.452,00	(1.012,90)	280.331.814,00	793.062.704,00	814.620.000,00	1.607.682.704,00	793.062.704,00	814.620.000,00	1.607.682.704,00	100,00
12	DESA BALAI NARAS	1.863.017.963,00	1.837.503.108,00	98,63	1.750.335.352,00	1.667.619.281,00	95,27	(112.682.611,00)	(112.682.611,00)	100,00	57.201.216,00	781.392.704,00	1.022.112.000,00	1.803.504.704,00	781.392.704,00	1.022.112.000,00	1.803.504.704,00	100,00
13	DESA PADANG BIRIK BIRIK	1.675.452.036,00	1.659.777.629,00	99,06	1.613.496.329,00	1.473.016.837,00	91,29	(61.955.708,00)	119.091.092,00	(192,22)	305.851.884,00	711.595.704,00	905.234.000,00	1.616.829.704,00	711.595.704,00	905.234.000,00	1.616.829.704,00	100,00
14	DESA SINTUK	1.490.257.949,00	1.482.996.004,00	99,51	1.552.525.515,00	1.320.737.368,00	85,07	62.267.566,00	201.568.166,00	323,71	363.826.802,00	752.513.704,00	696.503.000,00	1.449.016.704,00	752.513.704,00	696.503.000,00	1.449.016.704,00	100,00
15	DESA SUNGAI RAMBAI	1.463.636.548,00	1.448.681.640,00	98,98	1.384.052.858,00	1.300.344.622,00	93,95	(79.583.690,00)	(79.583.690,00)	100,00	68.753.328,00	755.897.704,00	666.065.000,00	1.421.962.704,00	755.897.704,00	666.065.000,00	1.421.962.704,00	100,00
16	DESA TUNGKAL UTARA	1.462.228.480,00	1.447.229.089,00	98,97	1.513.935.003,00	1.413.152.972,00	93,34	51.706.523,00	51.706.523,00	100,00	85.782.640,00	741.887.704,00	677.072.000,00	1.418.959.704,00	741.887.704,00	677.072.000,00	1.418.959.704,00	100,00
17	DESA CUBADAK AIR	1.482.641.482,00	1.477.871.289,00	99,68	1.357.952.616,00	1.324.578.489,00	97,54	(124.688.865,00)	(124.688.865,00)	100,00	28.603.935,00	768.113.704,00	670.472.000,00	1.438.585.704,00	768.113.704,00	670.472.000,00	1.438.585.704,00	100,00
C	**KECAMATAN PARIAMAN SELATAN**	**24.256.567.935,00**	**24.032.208.644,00**	**99,08**	**24.666.852.905,00**	**21.982.358.191,00**	**89,12**	**416.124.969,00**	**1.230.437.961,00**	**295,69**	**3.280.288.414,00**	**12.051.067.839,00**	**11.466.450.000,00**	**23.517.517.839,00**	**12.051.067.839,00**	**11.466.450.000,00**	**23.517.517.839,00**	**100,00**
1	DESA PASIR SUNUR	1.309.613.194,00	1.297.581.679,00	99,08	1.333.693.292,00	1.259.449.559,00	94,43	24.080.097,00	138.858.897,00	576,65	176.991.017,00	685.207.279,00	573.894.000,00	1.259.101.279,00	685.207.279,00	573.894.000,00	1.259.101.279,00	100,00
2	DESA BALAI KURAI TAJI	1.406.647.173,00	1.386.448.104,00	98,56	1.565.394.497,00	1.387.771.799,00	88,65	158.747.323,00	158.747.323,00	100,00	157.423.628,00	734.508.704,00	623.585.000,00	1.358.093.704,00	734.508.704,00	623.585.000,00	1.358.093.704,00	100,00
3	DESA PAUH KURAI TAJI	1.415.656.278,00	1.402.151.947,00	99,05	1.571.940.278,00	1.332.514.620,00	84,77	156.283.999,00	156.283.999,00	100,00	225.921.326,00	757.893.704,00	618.359.000,00	1.376.252.704,00	757.893.704,00	618.359.000,00	1.376.252.704,00	100,00
4	DESA SIMPANG KURAI TAJI	1.437.535.276,00	1.431.964.349,00	99,61	1.510.651.573,00	1.325.355.000,00	87,73	73.116.297,00	206.653.249,00	282,64	313.262.598,00	730.742.704,00	664.763.000,00	1.395.505.704,00	730.742.704,00	664.763.000,00	1.395.505.704,00	100,00
5	DESA TOBOH PALABAH	1.776.103.002,00	1.756.373.070,00	98,89	1.663.576.770,00	1.527.238.999,00	91,80	(112.526.232,00)	(112.526.232,00)	100,00	116.607.839,00	749.571.704,00	978.411.000,00	1.727.982.704,00	749.571.704,00	978.411.000,00	1.727.982.704,00	100,00
6	DESA MARABAU	1.464.617.847,00	1.448.969.473,00	98,93	1.412.339.351,00	1.347.209.897,00	95,39	(52.278.495,00)	(52.278.495,00)	100,00	49.481.081,00	748.362.704,00	672.374.000,00	1.420.736.704,00	748.362.704,00	672.374.000,00	1.420.736.704,00	100,00
7	DESA BATANG TAJONGKEK	1.447.933.425,00	1.432.752.362,00	98,95	1.483.939.711,00	1.125.773.946,00	75,86	36.006.285,00	170.356.285,00	473,13	477.334.701,00	738.194.704,00	671.726.000,00	1.409.920.704,00	738.194.704,00	671.726.000,00	1.409.920.704,00	100,00
8	DESA SIKABU	1.308.655.304,00	1.296.294.188,00	99,06	1.426.544.159,00	1.216.903.916,00	85,30	117.888.855,00	117.888.855,00	100,00	197.279.127,00	689.205.704,00	586.080.000,00	1.275.285.704,00	689.205.704,00	586.080.000,00	1.275.285.704,00	100,00
9	DESA SUNGAI KASAI	1.410.059.254,00	1.394.424.526,00	98,89	1.431.649.149,00	1.273.943.282,00	88,98	27.429.895,00	155.404.295,00	566,55	275.885.539,00	727.786.704,00	638.897.000,00	1.366.683.704,00	727.786.704,00	638.897.000,00	1.366.683.704,00	100,00
10	DESA PALAK ANEH	1.502.548.246,00	1.477.439.389,00	98,33	1.407.957.093,00	1.331.785.896,00	94,59	(94.591.154,00)	(94.591.154,00)	100,00	51.062.339,00	756.967.704,00	691.619.000,00	1.448.586.704,00	756.967.704,00	691.619.000,00	1.448.586.704,00	100,00
11	DESA KAMPUNG APAR	1.421.775.859,00	1.408.835.844,00	99,09	1.465.030.580,00	1.198.359.047,00	81,80	43.254.721,00	43.254.721,00	100,00	253.731.518,00	733.397.704,00	651.029.000,00	1.384.426.704,00	733.397.704,00	651.029.000,00	1.384.426.704,00	100,00
12	DESA MARUNGGI	1.933.738.579,00	1.900.164.936,00	98,26	2.041.108.609,00	1.757.874.576,00	86,12	107.370.030,00	107.370.030,00	100,00	249.660.390,00	989.054.704,00	868.352.000,00	1.857.406.704,00	989.054.704,00	868.352.000,00	1.857.406.704,00	100,00
13	DESA TALUK	2.067.379.881,00	2.050.196.696,00	99,17	2.066.932.212,00	1.863.091.638,00	90,14	(447.668,00)	(447.668,00)	100,00	186.657.390,00	818.924.704,00	1.174.496.000,00	1.993.420.704,00	818.924.704,00	1.174.496.000,00	1.993.420.704,00	100,00
14	DESA PADANG CAKUR	1.406.094.197,00	1.390.382.188,00	98,88	1.308.279.240,00	1.271.050.100,00	97,15	(97.814.957,00)	(97.814.957,00)	100,00	21.517.131,00	700.757.704,00	654.305.000,00	1.355.062.704,00	700.757.704,00	654.305.000,00	1.355.062.704,00	100,00
15	DESA PUNGGUNG LADING	1.573.825.018,00	1.597.820.069,00	101,52	1.560.620.641,00	1.461.193.326,00	93,63	(13.204.377,00)	140.561.823,00	(1.064,51)	277.188.565,00	787.705.704,00	768.831.000,00	1.556.536.704,00	787.705.704,00	768.831.000,00	1.556.536.704,00	100,00
16	DESA RAMBAI	1.374.385.402,00	1.360.409.824,00	98,98	1.417.195.750,00	1.302.842.590,00	91,93	42.810.348,00	192.716.988,00	450,16	250.284.222,00	702.785.704,00	629.729.000,00	1.332.514.704,00	702.785.704,00	629.729.000,00	1.332.514.704,00	100,00
D	**KECAMATAN PARIAMAN TIMUR**	**24.488.446.010,00**	**24.231.779.808,00**	**98,95**	**24.342.146.837,00**	**21.701.098.213,00**	**89,15**	**(146.299.176,00)**	**962.223.024,00**	**(657,71)**	**3.492.904.619,00**	**12.174.718.264,00**	**11.524.334.000,00**	**23.699.052.264,00**	**12.174.718.264,00**	**11.524.334.000,00**	**23.699.052.264,00**	**100,00**
1	DESA TALAGO SARIK	1.644.363.932,00	1.622.976.008,00	98,70	1.523.248.631,00	1.394.915.128,00	91,58	(121.115.300,00)	31.387.300,00	(25,92)	259.448.180,00	803.802.704,00	762.513.000,00	1.566.315.704,00	803.802.704,00	762.513.000,00	1.566.315.704,00	100,00
2	DESA PAKASAI	1.758.047.398,00	1.741.886.416,00	99,08	1.735.478.935,00	1.420.527.266,00	81,85	(22.568.463,00)	(22.568.463,00)	100,00	298.790.687,00	760.618.704,00	951.227.000,00	1.711.845.704,00	760.618.704,00	951.227.000,00	1.711.845.704,00	100,00
3	DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN	1.516.293.447,00	1.494.654.804,00	98,57	1.477.361.605,00	1.329.203.061,00	89,97	(38.931.842,00)	96.717.758,00	(248,43)	262.169.501,00	788.846.704,00	678.248.000,00	1.467.094.704,00	788.846.704,00	678.248.000,00	1.467.094.704,00	100,00
4	DESA KAMPUNG GADANG	1.556.496.538,00	1.525.357.319,00	98,00	1.611.390.506,00	1.439.389.853,00	89,33	54.893.968,00	195.449.968,00	356,05	281.417.434,00	797.273.704,00	702.780.000,00	1.500.053.704,00	797.273.704,00	702.780.000,00	1.500.053.704,00	100,00
5	DESA KOTO MARAPAK	1.644.371.283,00	1.639.194.070,00	99,69	1.710.050.760,00	1.503.534.924,00	87,92	65.679.477,00	65.679.477,00	100,00	201.338.623,00	822.413.704,00	780.675.000,00	1.603.088.704,00	822.413.704,00	780.675.000,00	1.603.088.704,00	100,00
6	DESA BATANG KABUNG	1.490.468.959,00	1.473.796.714,00	98,88	1.509.166.028,00	1.321.098.780,00	87,54	18.697.069,00	18.697.069,00	100,00	171.395.003,00	757.316.704,00	691.289.000,00	1.448.605.704,00	757.316.704,00	691.289.000,00	1.448.605.704,00	100,00
7	DESA BATO	1.441.624.376,00	1.427.714.015,00	99,04	1.411.266.684,00	1.287.693.154,00	91,24	(30.357.693,00)	(30.357.693,00)	100,00	109.663.168,00	747.681.704,00	650.945.000,00	1.398.626.704,00	747.681.704,00	650.945.000,00	1.398.626.704,00	100,00

Lampiran 3

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA DESA	PENDAPATAN		%	BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SiLPA	BELANJA DESA (KEUANGAN)						%
												ANGGARAN			REALISASI			
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%		ADD	DD	TOTAL	ADD	DD	TOTAL	
8	DESA AIR SANTOK	1.612.964.967,00	1.592.684.912,00	98,74	1.540.596.018,00	1.406.752.102,00	91,31	(72.368.949,00)	72.829.851,00	(100,64)	258.762.661,00	793.837.704,00	725.994.000,00	1.519.831.704,00	793.837.704,00	725.994.000,00	1.519.831.704,00	100,00
9	DESA CUBADAK MENTAWAI	1.445.313.477,00	1.430.222.559,00	98,96	1.415.866.385,00	1.283.035.770,00	90,62	(29.447.093,00)	(29.447.093,00)	100,00	117.739.696,00	746.019.704,00	653.396.000,00	1.399.415.704,00	746.019.704,00	653.396.000,00	1.399.415.704,00	100,00
10	DESA SUNGAI SIRAH	1.324.040.171,00	1.313.150.484,00	99,18	1.290.017.794,00	1.207.709.029,00	93,62	(34.022.378,00)	84.166.822,00	(247,39)	189.608.277,00	697.509.704,00	590.946.000,00	1.288.455.704,00	697.509.704,00	590.946.000,00	1.288.455.704,00	100,00
11	DESA SUNGAI PASAK	1.517.185.909,00	1.504.434.522,00	99,16	1.463.150.758,00	1.317.937.804,00	90,08	(54.035.151,00)	81.064.849,00	(150,02)	267.561.567,00	795.973.704,00	675.353.000,00	1.471.326.704,00	795.973.704,00	675.353.000,00	1.471.326.704,00	100,00
12	DESA BUNGO TANJUNG	1.747.880.396,00	1.725.695.568,00	98,73	1.643.554.433,00	1.428.560.805,00	86,92	(104.325.963,00)	(104.325.963,00)	100,00	192.808.800,00	781.147.704,00	917.069.000,00	1.698.216.704,00	781.147.704,00	917.069.000,00	1.698.216.704,00	100,00
13	DESA KAMPUNG TANGAH	1.365.585.388,00	1.365.776.207,00	100,01	1.436.147.997,00	1.253.302.884,00	87,27	70.562.609,00	198.888.609,00	281,86	311.361.931,00	688.475.704,00	641.630.000,00	1.330.105.704,00	688.475.704,00	641.630.000,00	1.330.105.704,00	100,00
14	DESA KAMPUNG KANDANG	1.579.373.733,00	1.558.974.841,00	98,71	1.666.904.852,00	1.515.949.424,00	90,94	87.531.119,00	240.531.119,00	274,79	283.556.536,00	766.723.704,00	764.604.000,00	1.531.327.704,00	766.723.704,00	764.604.000,00	1.531.327.704,00	100,00
15	DESA KALUAT	1.419.089.927,00	1.405.258.368,00	99,03	1.413.659.590,00	1.294.929.290,00	91,60	(5.430.337,00)	(5.430.337,00)	100,00	104.898.741,00	712.711.704,00	667.325.000,00	1.380.036.704,00	712.711.704,00	667.325.000,00	1.380.036.704,00	100,00
16	DESA KAJAI	1.425.346.109,00	1.410.003.001,00	98,92	1.494.285.861,00	1.296.558.939,00	86,77	68.939.752,00	68.939.752,00	100,00	182.383.814,00	714.364.704,00	670.340.000,00	1.384.704.704,00	714.364.704,00	670.340.000,00	1.384.704.704,00	100,00
Total		**85.915.343.300,00**	**84.941.907.021,00**	**98,87**	**85.633.554.540,00**	**77.173.355.934,00**	**90,12**	**(275.948.763,00)**	**3.662.188.429,00**	**(1.327,13)**	**11.430.739.516,00**	**42.054.378.295,00**	**40.945.791.400,00**	**83.000.169.695,00**	**42.054.378.295,00**	**40.945.791.400,00**	**83.000.169.695,00**	**100,00**

Lampiran 4

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI DANA BLUD TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

		SALDO AWAL	PENERIMAAN BLUD 2025	TOTAL SPJ BELANJA	SISA KAS	SPJ BELANJA								JUMLAH
						Pegawai	Persediaan	Brg & DJS	Pemeliharaan	SPPD	Mesin	Gedung	JIJ	
1	2	3	4	5	6=3+4-5									
1	RSUD SADIKIN	274.743.994,00	8.379.333.730,00	7.762.629.305,00	891.448.419,00	3.282.659.368,00	2.593.117.663,00	652.408.604,00	232.944.071,00	355.688.073,00	645.811.526,00			7.762.629.305,00
2	UPTD AIR BERSIH	77.770.661,00	1.463.111.284,00	1.452.525.795,00	88.356.150,00	50.415.000,00	387.191.378,00	598.402.049,00	255.638.000,00	45.766.200,00	65.130.168,00	0,00	49.983.000,00	1.452.525.795,00
3	PUSKESMAS NARAS	31.217.681,00	863.747.777,00	886.617.525,00	8.347.933,00	527.364.373,00	107.054.158,00	0,00	10.826.500,00	28.294.405,00	192.278.089,00	20.800.000,00	0,00	886.617.525,00
4	PUSKESMAS PARIAMAN	62.419.676,00	1.590.406.034,00	1.575.783.992,00	77.041.718,00	970.354.749,00	235.403.315,00	35.574.803,00	45.728.025,00	56.853.215,00	231.869.885,00	0,00	0,00	1.575.783.992,00
5	PUSKESMAS KP BARU PADUSUNAN	5.547.906,00	784.994.312,00	790.517.429,00	24.789,00	478.996.528,00	83.593.354,00	3.335.007,00	52.973.000,00	49.199.540,00	122.420.000,00	0,00	0,00	790.517.429,00
6	PUSKESMAS KURAITAJI	24.585.110,00	761.291.628,00	783.879.839,00	1.996.899,00	454.185.711,00	94.645.400,00	39.391.611,00	50.807.367,00	55.150.000,00	89.699.750,00	0,00	0,00	783.879.839,00
7	PUSKESMAS MARUNGGI	18.354.947,00	670.827.921,00	670.487.839,00	18.695.029,00	410.375.057,00	91.484.786,00	1.244.952,00	34.300.000,00	36.058.535,00	97.024.509,00	0,00	0,00	670.487.839,00
8	PUSKESMAS AIR SANTOK	12.155.087,38	619.720.462,00	611.634.755,00	20.240.794,38	377.763.891,00	62.776.084,00		30.250.000,00	22.169.310,00	118.675.470,00	0,00	0,00	611.634.755,00
9	PUSKESMAS SIKAPAK	879.390,00	685.564.955,00	685.111.667,00	1.332.678,00	420.001.767,00	80.034.495,00	7.500.000,00	26.540.000,00	40.135.405,00	110.900.000,00	0,00	0,00	685.111.667,00
J U M L A H		**507.674.452,38**	**15.818.998.103,00**	**15.219.188.146,00**	**1.107.484.409,38**	**6.972.116.444,00**	**3.735.300.633,00**	**1.337.857.026,00**	**740.006.963,00**	**689.314.683,00**	**1.673.809.397,00**	**20.800.000,00**	**49.983.000,00**	**15.219.188.146,00**

Lampiran 5

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI DANA BOS TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SMP	2024			2025			REKON PENERIMAAN	PENERIMAAN 2025	SPJ PENGELUARAN	PAJAK BOS	
		KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL	KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL				POTONG	SETOR
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	11	12	13	14	15
1	SMP KOTA PARIAMAN	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00	2.050.000,00	4.269.506.040,00	4.269.506.040,00	4.267.456.040,00	115.685.005,00	115.685.005,00
2	SD SE KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	0,00	4.036.000,00	4.036.000,00	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00	2.576.107.750,00	2.572.071.750,00	2.576.107.750,00	15.693.456,00	15.693.456,00
3	SD SE KECAMATAN PARIAMAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.063.607,00	2.132.063.607,00	2.132.063.607,00	18.291.360,00	18.291.360,00
4	SD SE KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779.561.000,00	1.773.471.000,00	1.779.561.000,00	17.802.086,00	17.802.086,00
5	SD SE KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.505.070,00	1.523.505.070,00	1.523.505.070,00	11.730.869,00	11.730.869,00
J U M L A H		**0,00**	**10.126.000,00**	**10.126.000,00**	**5.086.000,00**	**1.000.000,00**	**6.086.000,00**	**12.280.743.467,00**	**12.270.617.467,00**	**12.278.693.467,00**	**179.202.776,00**	**179.202.776,00**

Lampiran 6

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI DANA BOK PUSKESMAS TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENERIMAAN BOK	TOTAL SPJ BELANJA	SISA KAS	SPJ BELANJA				JUMLAH
						Pegawai	Persediaan	Brg & DJS	SPPD	
1	2	3	4	5	6=3+4-5					
1	PUSKESMAS NARAS	57.743.125,00	624.994.901,00	602.802.867,00	79.935.159,00	97.057.867,00	0,00	289.495.000,00	216.250.000,00	602.802.867,00
2	PUSKESMAS PARIAMAN	94.409.103,00	1.119.955.596,00	1.155.364.864,00	58.999.835,00	170.400.364,00	187.280.390,00	232.984.110,00	564.700.000,00	1.155.364.864,00
3	PUSKESMAS KP BARU PADUSUNAN	8.948.152,00	649.783.409,00	652.357.775,00	6.373.786,00	104.953.775,00	82.476.600,00	129.627.400,00	335.300.000,00	652.357.775,00
4	PUSKESMAS KURAITAJI	40.095.175,00	609.749.538,00	643.146.700,00	6.698.013,00	73.279.200,00	168.798.800,00	55.868.700,00	345.200.000,00	643.146.700,00
5	PUSKESMAS MARUNGGI	110.665.039,00	542.538.200,00	565.081.331,00	88.121.908,00	83.682.731,00	147.732.550,00	54.016.050,00	279.650.000,00	565.081.331,00
6	PUSKESMAS AIR SANTOK	75.996.296,00	552.740.748,00	593.294.014,00	35.443.030,00	104.843.515,00	0,00	215.950.499,00	272.500.000,00	593.294.014,00
7	PUSKESMAS SIKAPAK	80.520.779,00	550.276.136,00	583.681.452,00	47.115.463,00	93.474.952,00	7.051.900,00	483.154.600,00	0,00	583.681.452,00
J U M L A H		**468.377.669,00**	**4.650.038.528,00**	**4.795.729.003,00**	**322.687.194,00**	**727.692.404,00**	**593.340.240,00**	**1.461.096.359,00**	**2.013.600.000,00**	**4.795.729.003,00**

Lampiran 7

DAFTAR PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A	Piutang Pajak, Pendapatan dan Transfer	18.502.845.140,00	14.589.325.688,00	818.428.993,00	1.549.247.512,00	1.209.432.995,00	1.703.988.234,00	5.281.097.734,00
B	Piutang Retribusi	2.411.280.523,00	3.619.235.549,00	0,00	16.562.208,00	119.615.000,00	268.134.158,00	1.917.299.808,00
C	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	243.823.161,85	1.261.022.982,00	111.042.558,00	258.845.017,00	461.333.403,00	306.802.004,00	1.138.022.982,00
D	Piutang Lain-Lain	608.409.748,66	615.550.430,66	0,00	0,00	0,00	601.864.086,66	601.864.086,66
Jumlah Piutang All		**21.766.358.573,51**	**20.085.134.649,66**	**929.471.551,00**	**1.824.654.737,00**	**1.790.381.398,00**	**2.880.788.482,66**	**8.938.284.610,66**

Lampiran 7a

DAFTAR PIUTANG PAJAK, PENDAPATAN, DAN TRANSFER KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
A	**Piutang Pendapatan dan Transfer**								
a	**Piutang Pajak**								
1	Piutang Pajak Restoran	BPKPD	15.030.200,00	15.030.200,00	0,00	0,00	0,00	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Piutang Pajak Parkir	BPKPD	166.700,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	166.700,00
3	Piutang PBB P2	BPKPD	4.840.177.475,00	5.265.900.834,00	818.428.993,00	1.549.247.512,00	1.209.432.995,00	1.688.791.334,00	5.265.900.834,00
Sub Jumlah Piutang Pajak			**4.855.374.375,00**	**5.281.097.734,00**	**818.428.993,00**	**1.549.247.512,00**	**1.209.432.995,00**	**1.703.988.234,00**	**5.281.097.734,00**
b	**Piutang Transfer Bagi Hasil**	BPKPD-SKPKD							
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat	BPKPD	1.758.923.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer			**1.758.923.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c	**Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi**	BPKPD-SKPKD							
1	Piutang PKB		2.421.608.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang BBNKB		874.295.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang PBBKB		8.539.408.766,00	9.308.083.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PAP		53.233.889,00	144.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Rokok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer			**11.888.547.076,00**	**9.308.227.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Piutang Pendapatan			**18.502.845.140,00**	**14.589.325.688,00**	**818.428.993,00**	**1.549.247.512,00**	**1.209.432.995,00**	**1.703.988.234,00**	**5.281.097.734,00**

Lampiran 7b

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
B	**Piutang Retribusi**								
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Diskominfo							
	Menara Telekomunikasi thn 2015	Dishub	558.943,00	558.943,00	0,00	0,00	0,00	558.943,00	558.943,00
	PT. TOWER BERSAMA eks IBS	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi ex PT INDOSAT, Tbk	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia eks PT INDOSAT, Tbk	Diskominfo	10.624.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624.000,00	10.624.000,00
	PT XL AXIATA	Diskominfo	21.248.000,00	21.248.000,00	0,00	0,00	0,00	21.248.000,00	21.248.000,00
	PT Telkomsel	Diskominfo	7.968.000,00	7.968.000,00	0,00	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
	PT. Solusi Tunas Pratama	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT. PERMATA KARYA PERDANA	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT Protelindo	Diskominfo	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	0,00	0,00	23.904.000,00	23.904.000,00
	PT. Smart Telecom	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**88.206.943,00**	**88.206.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.206.943,00**	**88.206.943,00**
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah								
	1) Piutang Sewa Toko Pasar Pariaman	Diskoperindag							
	BLOK A								
	Sutan syah johan		3.360.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Syahlina		3.360.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	H.syokri sama. BBA		33.600.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240.000,00
	Amrina thaib / martias		18.480.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Roswita		23.520.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Nurbaiti		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Drs. H. Rasidin zain said		33.600.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080.000,00
	Roswita		23.520.000,00	15.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040.000,00
	Hasymar detty		23.520.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160.000,00
	Hj. Fatimah		13.440.000,00	15.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040.000,00
	BLOK B						0,00	0,00	
	Zahirman/Yunimar UT		3.896.400,00	3.896.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.400,00
	Beni		0,00	3.896.400,00			0,00	0,00	3.896.400,00
	Zul ala apuak		18.768.000,00	25.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.806.000,00
	Jhon		18.768.000,00	11.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730.000,00
	Asma Zaunit		0,00	4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Zalman zaunit		18.768.000,00	25.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.806.000,00
	H. Nursam		53.920.000,00	46.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920.000,00
	Syaiful ilmi		39.882.000,00	39.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882.000,00
	Yuherman		32.844.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844.000,00
	Khaidir		60.920.000,00	67.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.958.000,00
	Nasrul		43.964.000,00	49.808.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.808.600,00
	B. Tanjung		53.964.000,00	59.808.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.808.600,00
	BLOK C						0,00	0,00	
	Ali Amri/ Uyun		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.625,00
	Sywalluddin		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.625,00
	Jasmawati/elok		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803.750,00
	Yosef afrizal		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803.750,00
	Sudirman		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803.750,00
	Syaiful		6.745.000,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274.375,00
	Awalluddin/awl tanjung		16.862.500,00	19.391.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391.875,00
	Natin 30%		2.023.501,00	2.023.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.501,00
	Emi junik 30%		5.808.753,00	6.567.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.566,00
	Syamsir alam		0,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.250,00
	Feri asrinaldi/feri		14.333.125,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333.125,00
	Ernida sosi/rida		19.362.500,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862.500,00
	Janubarti jasman		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.625,00
	Maizul husni		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803.750,00
	Ben surya/ben		16.862.500,00	19.391.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391.875,00
	Yulius		14.333.125,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862.500,00
	Muslim		11.803.750,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274.375,00
	Susi		16.862.500,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862.500,00
	Julinasri/anas tanjung		11.803.750,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333.125,00
	Lis DT/Nurlis		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803.750,00
	Darmawan/murni		19.362.500,00	21.891.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891.875,00
	Musidah/ Hendri Saputra		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.625,00
	Neldawati		6.745.000,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.625,00
	Ridwan zaimarni		6.745.000,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.625,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**744.864.779,00**	**784.675.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784.675.942,00**
	2) Piutang Sewa Toko Pasar Kurai Taji	Diskoperindag							
	BLOK A								
	Edmar alam		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Edmar alam		2.250.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00
	Martias		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Martias		3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.500,00
	Indra Wadi		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mashuri		3.937.500,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
	Azwir		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312.500,00
	Mursal		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Naadiya		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Syafriadi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	El amel muzna		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Animar		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Eli Marnia Herina		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Rusli		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Nurdani		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Yunasdi		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Naadiya		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	BLOK B						0,00	0,00	
	Maison		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875.000,00
	Naadiya		562.500,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	Afrizon		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Hilma kahar / lidarni		9.000.000,00	10.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687.500,00
	Imrawati		9.000.000,00	10.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687.500,00
	Maili susi yeti		3.937.500,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00
	Gusri yeni		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Firma linda		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Arizal/hendrik saputra		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Ermawati		11.875.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
	Dirmayati		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Anhar		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Anhar		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	M. Nasir		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Asma		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Fahmi		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Efiardi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	BLOK C						0,00	0,00	
	Sawirna		8.775.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
	Uzma		2.700.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00
	Mawardi		8.775.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
	Eva Eka Putriana		4.725.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
	Anasri		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Erni Opet		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Nurleli		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Farida Syam		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
	Syukri/Surya Netti		2.400.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
	Wahyunis		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
	Agusnimar		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
	Fitri Nengsih		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	Three Nilta		2.400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Tarmuni		4.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	BLOK D						0,00	0,00	
	Maya defita / edi muncok		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Asri bakaruddin		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Muhammad fauzan		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Eva Zelvi		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Mimi elfita		13.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	Faizah		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Asmaul husna		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Aslim		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	Rasmi harun		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	Mimi elfita		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	Asnita Yulina		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
	Sulastri irfan		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
	Dalimi		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
	Zainab		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	BLOK E						0,00	0,00	
	Murshall Jalaludin		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Maryulis		500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Hartina		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Nurlisman		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Janewar		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Edi efendi		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	HJ. Ramalah		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Nurtini		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Bainar		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.875.000,00
	Yolla puti pariagam		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Maliyus		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Mahendra Gustiawan		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Dahniar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Uyung candra		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Sumarni		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Jasril (Alm. H.Maniar)		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Roslaini		4.375.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
	BLOK F						0,00	0,00	
	Ridwan		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Yusni Z, S.Pd		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Yusni Z, S.Pd		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	H. Nurmani		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Nurkasmi		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Mainida		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	Nurmimah		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Zairis bakaruddin		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Asniati / rasni		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Lasminah		11.875.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
	Rizki mardila		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Nurcaya		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Burdin		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Arifin / fatika nadia maharani		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Asri bakaruddin		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Hj. Rosmanidar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Hj. Rosna / joneidi		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**605.350.000,00**	**728.312.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.312.500,00**
	3) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Diskoperindag	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**
	4) Piutang Sewa Pujasera	Disbudpar							
	IYEL / BUK MAI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EPI / MANSURIATI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	INIK / ASLINI		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	ATENG / ERNITA		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	IFZAN LAIB / IRMASTATI		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	BUK ROS / ROSNANI		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	ROZA / ALFITRIA NUZLA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RINA		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	INANG / JASNIMAR		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	SI LAS / AMEL RAMADHANI		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	LISA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	UPIK / YUHARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	INA KALIANG		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	MARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	LENI MARLINA		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	NIZHAMUL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO II)		500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
	UPIT MAWATI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EMI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	EL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	EFA ERAWATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	BESRIATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ELI MUZARNI (IFKHAR F)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ROZA ERIYA		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	ELFINA (AYANG)		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	ERLINDA WATI		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	DAVID		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	AREA MEGA		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	SANDRA HELMIYATI		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	DEDI EFENDI / ELI SUARNI (ELI INDUAK)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	MEGA ASTUTI		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	RINI ASTUTI/ / EKA PURNAMA SARI		2.700.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.700.000,00	5.200.000,00
	NOFRIAL SONI SALMI		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	MEGA SILVIA MARSA		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	YUSWARNITA		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	ROSNANI (4 DARA)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	IRMA SANTI		2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	AURA INGRID		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	DEDI PUTRA / YULIHARTINI		2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
	WULAN YUNI P		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	ANTO (YUSMELI)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	MERI ASTUTI		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	SYAFNI ANANDA PUTRI		2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
	SOLFIHARDI		2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	SYAFNI EFENDI (EKA SUARNI)		2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	MARNELIS (BUK LIS)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	CITRA DEWI (TEMOK)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	NURMAINI		2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	SRI WAHYUNI		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	LIFE ISWAR		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	NURSEHA		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	SUWARNI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	DESI ERMAYENI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	NURLELA		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	DARNISTATI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	NETRAWATI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	UPIK (UPIT MAWATI)		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	ANNISA PERMATA AYUNDA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	MAWARNI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	ELIWATI (LANGKITANG)		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	RAHMI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	MARNI PILIANG		4.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.250.000,00	5.250.000,00
	HELMI SAFITRI		1.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.750.000,00	2.750.000,00
	AFRIZAL		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**112.100.000,00**	**165.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000.000,00**	**80.100.000,00**	**165.100.000,00**
	5) Piutang Pelayanan Pasar (WC Umum)	Diskoperindag	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
	6) Piutang Pelayanan Pasar (WC Los Ikan)		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	Perkim & LH							
	Kelurahan Pasir		1.050.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	1.050.000,00	3.130.000,00
	Kelurahan Kp. Perak		300.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	300.000,00	1.560.000,00
	Kelurahan Jati Hilir		0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	Kelurahan Lohong		4.510.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	4.510.000,00	6.350.000,00
	Kelurahan Jawi-Jawi II		4.545.000,00	5.545.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.545.000,00	5.545.000,00
	Kelurahan Taratak		4.705.000,00	6.385.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	4.705.000,00	6.385.000,00
	Kelurahan Jawi-jawi I		500.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	790.000,00	500.000,00	1.290.000,00
	Kelurahan Kp. Jawa II		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Kelurahan Alai Gelombang		0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
	Kelurahan Pondok II		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Kp. Pondok		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	Kelurahan Kp. Jawa I		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Jalan Baru		6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00
	Kelurahan Kereta Api		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Rawang		500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00
	Pasar Jurai Taji		2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Desa Kp. Baru		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Desa Cimparuh		6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00
	Desa Taluak Binasi		3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	Desa Bungo Tanjung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSUD Pariaman		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	Dinas Sosial Kab. PP		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	RS. Aisyah Taratak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Toboh Palabah		1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00
	Perumahan Toboh		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	RS. Sadikin		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	Perumahan Talago Sariak		250.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00
	Desa Pauah Timur (Koto Kaciak)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS. TMC Pariaman		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kel. Ujung batung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perumahan Laneva		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Perumahan Nan Tongga		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Perumahan Residence		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	Perumahan Griya Taluak		1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
	Perumahan Rawang		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Desa Jati Mudik		435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
	Desa Bato		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Perum. Simpang Kasai		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Perumahan Koto Marapak		500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Perumahan Kp. Kandang		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Perumahan Manohara Asri		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Perumahan Bato		800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
	Kel. Karan Aur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Rambai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MTSN 1 PARIAMAN		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	SD 02 KARAN AUR		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	Desa Pasia Sunua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMPN 4 PARIAMAN		750.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00	1.050.000,00
	SMAN 1 PARIAMAN		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	SMPN 2 PARIAMAN		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	SD IT AT TIN TALAGO SARIK		100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	450.000,00	100.000,00	550.000,00
	UNISBAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT SKM		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	PARIAMAN BARAYO KAKI LIMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	SD 11 KOTO MARAPAK		100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
	SD 09 BATO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	MANGGUNG - NARAS		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	SAFARI IN		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	IAI SUMBAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINKES PARIAMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESA PAUH BARAT		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	SUPM		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	MTSN 3 PARIAMAN		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	SMPN 7 PARIAMAN		150.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00
	PUSKESMAS NARAS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	BUMBU		300.000,00	850.000,00	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	850.000,00
	SMAN 4 PARIAMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPBU KURAITAJI		150.000,00	900.000,00	0,00	0,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
	SPPG MBG		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	SDN 01 KAMPUNG JAWA		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**73.954.000,00**	**108.569.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.615.000,00**	**73.954.000,00**	**108.569.000,00**
4	Piutang Retribusi Parkir	Dishub							
	1) Endrizal		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2) Ferdi Ferdian		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	3) Mulyadi		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4) Nurmasrizal		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**
5	Piutang Retribusi IMB	KP2TPM	10.983.848,00	10.983.848,00	0,00	0,00	0,00	10.983.848,00	10.983.848,00
	Piutang Persetujuan Bangunan Gedung	PUPRP	4.854.447,00	18.580.575,00	0,00	16.562.208,00	0,00	2.018.367,00	18.580.575,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**15.838.295,00**	**29.564.423,00**	**0,00**	**16.562.208,00**	**0,00**	**13.002.215,00**	**29.564.423,00**
6	Piutang Retribusi Air Bersih	Perkim & LH	758.095.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**758.095.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Piutang Retribusi dari Jasa Layanan	RSUD Sadikin	0,00	1.701.935.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**0,00**	**1.701.935.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Piutang Retribusi			**2.411.280.523,00**	**3.619.235.549,00**	**0,00**	**16.562.208,00**	**119.615.000,00**	**268.134.158,00**	**1.917.299.808,00**

Lampiran 7c

DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
D	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**								
1	Piutang Denda Air Bersih	Perkim&LH	120.823.161,85	70.262.551,00	1.098.558,00	2.560.717,00	23.961.672,00	42.641.604,00	70.262.551,00
2	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Perkim & LH	0,00	1.067.760.431,00	109.944.000,00	256.284.300,00	437.371.731,00	264.160.400,00	1.067.760.431,00
3	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR	BPKPD	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			**243.823.161,85**	**1.261.022.982,00**	**111.042.558,00**	**258.845.017,00**	**461.333.403,00**	**306.802.004,00**	**1.138.022.982,00**
C	**Piutang Lain-Lain**								
1	Piutang Bunga Dana Bergulir KSP/USP		24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR		117.367.333,33	117.367.333,33	0,00	0,00	0,00	117.367.333,33	117.367.333,33
3	Piutang Lain-lain TGR		412.549,17	412.549,17	0,00	0,00	0,00	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR		6.545.662,00	6.679.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Bunga Tabungan BPR		0,00	7.006.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Jaminan Pemeliharaan	RSUD	320.434.635,00	320.434.635,00	0,00	0,00	0,00	320.434.635,00	320.434.635,00
7	Piutang Kelebihan Pembayaran	RSUD	139.049.569,16	139.049.569,16	0,00	0,00	0,00	139.049.569,16	139.049.569,16
8	Piutang Denda Air Bersih	Perkim&LH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-Lain			**608.409.748,66**	**615.550.430,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.864.086,66**	**601.864.086,66**

Lampiran 8

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2 3	3	4	5	6	7	8	9
A	Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer	18.502.845.140,00	14.589.325.688,00	818.428.993,00	1.549.247.512,00	1.209.432.995,00	1.703.988.234,00	5.281.097.734,00
	Rate			0,5%	10%	50%	100%	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Pajak			**4.092.144,97**	**154.924.751,20**	**604.716.497,50**	**1.703.988.234,00**	**2.467.721.627,66**
B	Piutang Retribusi	2.411.280.523,00	3.619.235.549,00	-	16.562.208,00	119.615.000,00	268.134.158,00	404.311.366,00
	Rate			**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi			**-**	**1.656.220,80**	**59.807.500,00**	**268.134.158,00**	**329.597.878,80**
C	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	243.823.161,85	1.261.022.982,00	111.042.558,00	258.845.017,00	461.333.403,00	306.802.004,00	1.138.022.982,00
	Rate			**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			**555.212,79**	**25.884.501,70**	**230.666.701,50**	**306.802.004,00**	**563.908.419,99**
D	Piutang Lain-Lain	608.409.748,66	615.550.430,66	-	-	-	601.864.086,65	601.864.086,65
	Rate			0,5%	10%	50%	100%	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain			**-**	**-**	**-**	**601.864.086,65**	**601.864.086,65**
	Jumlah Piutang All	21.766.358.573,51	20.085.134.649,66	818.428.993,00	1.565.809.720,00	1.329.047.995,00	2.573.986.478,65	6.287.273.186,65
	Jumlah Penyisihan Piutang All			**4.647.357,76**	**182.465.473,70**	**895.190.699,00**	**2.880.788.482,65**	**3.963.092.013,11**

Lampiran 8a

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAN TRANSFER KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Piutang Pendapatan dan Transfer								
A	**Piutang Pajak**								
1	Piutang Pajak Restoran	BPKPD	15.030.200,00	15.030.200,00	0,00	0,00	0,00	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Piutang Pajak Parkir	BPKPD	166.700,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	166.700,00
Jumlah			**15.196.900,00**	**15.196.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.196.900,00**	**15.196.900,00**
Rate					0,5%	10%	50%	100%	
Jumlah Penyisihan Piutang					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.196.900,00**	**15.196.900,00**
3	Piutang PBB P2	BPKPD	4.840.177.475,00	5.265.900.834,00	818.428.993,00	1.549.247.512,00	1.209.432.995,00	1.688.791.334,00	5.265.900.834,00
Jumlah			**4.840.177.475,00**	**5.265.900.834,00**	**818.428.993,00**	**1.549.247.512,00**	**1.209.432.995,00**	**1.688.791.334,00**	**5.265.900.834,00**
Rate					0,5%	10%	50%	100%	
Jumlah Penyisihan Piutang					**4.092.144,97**	**154.924.751,20**	**604.716.497,50**	**1.688.791.334,00**	**2.452.524.727,66**
Sub Jumlah Piutang Pajak Daerah			**4.855.374.375,00**	**5.281.097.734,00**	**818.428.993,00**	**1.549.247.512,00**	**1.209.432.995,00**	**1.703.988.234,00**	**5.281.097.734,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Jumlah Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer			**4.855.374.375,00**	**5.281.097.734,00**	**4.092.144,97**	**154.924.751,20**	**604.716.497,50**	**1.703.988.234,00**	**2.467.721.627,67**
B	**Piutang Transfer Bagi Hasil**	BKD							
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat		1.758.923.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi			**1.758.923.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
B	**Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi**	BKD							
1	Piutang PKB		2.421.608.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang BBNKB		874.295.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang PBBKB		8.539.408.766,00	9.308.083.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PAP		53.233.889,00	144.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Rokok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi			**11.888.547.076,00**	**9.308.227.954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Jumlah Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer			**18.502.845.140,00**	**14.589.325.688,00**	**818.428.993,00**	**1.549.247.512,00**	**1.209.432.995,00**	**1.688.791.334,00**	**5.265.900.834,00**
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak, Pendapatan dan Transfer					**4.092.144,97**	**154.924.751,20**	**604.716.497,50**	**1.688.791.334,00**	**2.467.721.627,66**

Lampiran 8b

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**Piutang Retribusi**								-
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPMPTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menara Telekomunikasi thn 2015	Dishub	558.943,00	558.943,00	0,00	0,00	0,00	558.943,00	558.943,00
	PT. TOWER BERSAMA eks IBS	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi ex PT INDOSAT, Tbk	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia eks PT INDOSAT, Tbk	Diskominfo	10.624.000,00	10.624.000,00	0,00	0,00	0,00	10.624.000,00	10.624.000,00
	PT XL AXIATA	Diskominfo	21.248.000,00	21.248.000,00	0,00	0,00	0,00	21.248.000,00	21.248.000,00
	PT Telkomsel	Diskominfo	7.968.000,00	7.968.000,00	0,00	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
	PT. Solusi Tunas Pratama	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT. PERMATA KARYA PERDANA	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT Protelindo	Diskominfo	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	0,00	0,00	23.904.000,00	23.904.000,00
	PT. Smart Telecom	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**88.206.943,00**	**88.206.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.206.943,00**	**88.206.943,00**
	Rate				0,5%	10%	50%	100%	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**-**	**-**	**-**	**88.206.943,00**	**88.206.943,00**
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah								-
	1) Piutang Sewa Toko Pasar Pariaman	Diskoperindag							-
	BLOK A								
	Sutan syah johan		3.360.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syahlina		3.360.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H.syokri sama. BBA		33.600.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amrina thaib / martias		18.480.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roswita		23.520.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurbaiti		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drs. H. Rasidin zain said		33.600.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roswita		23.520.000,00	15.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasymar detty		23.520.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Fatimah		13.440.000,00	15.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK B						0,00	0,00	
	Zahirman/Yunimar UT		3.896.400,00	3.896.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni		0,00	3.896.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zul ala apuak		18.768.000,00	25.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jhon		18.768.000,00	11.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asma Zaunit		0,00	4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zalman zaunit		18.768.000,00	25.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H. Nursam		53.920.000,00	46.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syaiful ilmi		39.882.000,00	39.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yuherman		32.844.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Khaidir		60.920.000,00	67.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nasrul		43.964.000,00	49.808.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Tanjung		53.964.000,00	59.808.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK C						0,00	0,00	
	Ali Amri/ Uyun		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sywalluddin		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasmawati/elok		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yosef afrizal		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sudirman		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syaiful		6.745.000,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Awalluddin/awl tanjung		16.862.500,00	19.391.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natin 30%		2.023.501,00	2.023.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emi junik 30%		5.808.753,00	6.567.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syamsir alam		0,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Feri asrinaldi/feri		14.333.125,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ernida sosi/rida		19.362.500,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Janubarti jasman		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maizul husni		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ben surya/ben		16.862.500,00	19.391.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yulius		14.333.125,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muslim		11.803.750,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Susi		16.862.500,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julinasri/anas tanjung		11.803.750,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lis DT/Nurlis		9.274.375,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darmawan/murni		19.362.500,00	21.891.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Musidah/ Hendri Saputra		1.686.250,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neldawati		6.745.000,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ridwan zaimarni		6.745.000,00	4.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**744.864.779,00**	**784.675.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2) Piutang Sewa Toko Pasar Kurai Taji	Diskoperindag							
	BLOK A								
	Edmar alam		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edmar alam		2.250.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Martias		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Martias		3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indra Wadi		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mashuri		3.937.500,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azwir		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mursal		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syafriadi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	El amel muzna		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Animar		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eli Marnia Herina		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rusli		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nurdani		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yunasdi		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK B								
	Maison		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		562.500,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Afrizon		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hilma kahar / lidarni		9.000.000,00	10.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imrawati		9.000.000,00	10.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maili susi yeti		3.937.500,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gusri yeni		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma linda		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arizal/hendrik saputra		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ermawati		11.875.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dirmayati		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anhar		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anhar		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M. Nasir		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asma		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fahmi		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efiardi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK C								
	Sawirna		8.775.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzma		2.700.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mawardi		8.775.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eva Eka Putriana		4.725.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anasri		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erni Opet		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurleli		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Farida Syam		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syukri/Surya Netti		2.400.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wahyunis		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agusnimar		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fitri Nengsih		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Three Nilta		2.400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tarmuni		4.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK D								
	Maya defita / edi muncok		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asri bakaruddin		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muhammad fauzan		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eva Zelvi		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mimi elfita		13.200.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faizah		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asmaul husna		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aslim		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rasmi harun		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mimi elfita		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asnita Yulina		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sulastri irfan		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dalimi		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zainab		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK E								
	Murshall Jalaludin		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maryulis		500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hartina		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurlisman		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Janewar		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edi efendi		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HJ. Ramalah		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurtini		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bainar		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yolla puti pariagam		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maliyus		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mahendra Gustiawan		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dahniar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uyung candra		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sumarni		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasril (Alm. H.Maniar)		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roslaini		4.375.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK F								
	Ridwan		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yusni Z, S.Pd		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yusni Z, S.Pd		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H. Nurmani		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurkasmi		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mainida		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurmimah		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zairis bakaruddin		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asniati / rasni		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lasminah		11.875.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rizki mardila		9.500.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurcaya		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Burdin		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arifin / fatika nadia maharani		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asri bakaruddin		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Rosmanidar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Rosna / joneidi		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**605.350.000,00**	**728.312.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Diskoperindag	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rate			**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**
	2) Piutang Sewa Pujasera	Disbudpar							
	IYEL / BUK MAI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EPI / MANSURIATI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	INIK / ASLINI		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	ATENG / ERNITA		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	IFZAN LAIB / IRMASTATI		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	BUK ROS / ROSNANI		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	ROZA / ALFITRIA NUZLA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RINA		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	INANG / JASNIMAR		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	SI LAS / AMEL RAMADHANI		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	LISA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	UPIK / YUHARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	INA KALIANG		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	MARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	LENI MARLINA		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	NIZHAMUL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO II)		500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
	UPIT MAWATI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EMI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	EL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	EFA ERAWATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	BESRIATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ELI MUZARNI (IFKHAR F)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ROZA ERIYA		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	ELFINA (AYANG)		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	ERLINDA WATI		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	DAVID		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	AREA MEGA		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	SANDRA HELMIYATI		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	DEDI EFENDI / ELI SUARNI (ELI INDUAK)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	MEGA ASTUTI		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	RINI ASTUTI/ / EKA PURNAMA SARI		2.700.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.700.000,00	5.200.000,00
	NOFRIAL SONI SALMI		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	MEGA SILVIA MARSA		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	YUSWARNITA		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	ROSNANI (4 DARA)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	IRMA SANTI		2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	AURA INGRID		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	DEDI PUTRA / YULIHARTINI		2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
	WULAN YUNI P		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	ANTO (YUSMELI)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	MERI ASTUTI		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SYAFNI ANANDA PUTRI		2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
	SOLFIHARDI		2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	SYAFNI EFENDI (EKA SUARNI)		2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	MARNELIS (BUK LIS)		2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
	CITRA DEWI (TEMOK)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	NURMAINI		2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	SRI WAHYUNI		2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
	LIFE ISWAR		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	NURSEHA		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	SUWARNI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	DESI ERMAYENI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	NURLELA		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	DARNISTATI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	NETRAWATI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	UPIK (UPIT MAWATI)		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	ANNISA PERMATA AYUNDA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	MAWARNI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	ELIWATI (LANGKITANG)		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	RAHMI		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	MARNI PILIANG		4.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.250.000,00	5.250.000,00
	HELMI SAFITRI		1.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.750.000,00	2.750.000,00
	AFRIZAL		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Jumlah Piutang Sewa Puja Sera		**112.100.000,00**	**165.100.000,00**	**-**	**-**	**85.000.000,00**	**80.100.000,00**	**165.100.000,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**-**	**-**	**42.500.000,00**	**80.100.000,00**	**122.600.000,00**
	5) Piutang Pelayanan Pasar (WC Umum)	Diskoperindag	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
	6) Piutang Pelayanan Pasar (WC Los Ikan)		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	Perkim & LH							
	Kelurahan Pasir		1.050.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	1.050.000,00	3.130.000,00
	Kelurahan Kp. Perak		300.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	300.000,00	1.560.000,00
	Kelurahan Jati Hilir		0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	Kelurahan Lohong		4.510.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	4.510.000,00	6.350.000,00
	Kelurahan Jawi-Jawi II		4.545.000,00	5.545.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.545.000,00	5.545.000,00
	Kelurahan Taratak		4.705.000,00	6.385.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	4.705.000,00	6.385.000,00
	Kelurahan Jawi-jawi I		500.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	790.000,00	500.000,00	1.290.000,00
	Kelurahan Kp. Jawa II		0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Kelurahan Alai Gelombang		0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
	Kelurahan Pondok II		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Kp. Pondok		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	Kelurahan Kp. Jawa I		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Jalan Baru		6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00
	Desa Rawang		500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pasar Jurai Taji		2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
	Desa Kp. Baru		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Desa Cimparuh		6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00
	Desa Taluak Binasi		3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	RSUD Pariaman		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	Dinas Sosial Kab. PP		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	Desa Toboh Palabah		1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00
	Perumahan Toboh		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	RS. Sadikin		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	Perumahan Talago Sariak		250.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00
	Perumahan Laneva		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Perumahan Nan Tongga		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Perumahan Residence		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	Perumahan Griya Taluak		1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
	Perumahan Rawang		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Desa Jati Mudik		435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
	Desa Bato		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Perum. Simpang Kasai		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Perumahan Koto Marapak		500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Perumahan Kp. Kandang		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Perumahan Manohara Asri		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Perumahan Bato		800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
	MTSN 1 PARIAMAN		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	SD 02 KARAN AUR		750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	SMPN 4 PARIAMAN		750.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	300.000,00	750.000,00	1.050.000,00
	SMAN 1 PARIAMAN		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	SMPN 2 PARIAMAN		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	SD IT AT TIN TALAGO SARIK		100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	450.000,00	100.000,00	550.000,00
	PT SKM		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
	SD 11 KOTO MARAPAK		100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
	SD 09 BATO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	MANGGUNG - NARAS		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	SAFARI IN		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	DESA PAUH BARAT		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	SUPM		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	MTSN 3 PARIAMAN		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	SMPN 7 PARIAMAN		150.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00
	PUSKESMAS NARAS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	BUMBU		300.000,00	850.000,00	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	850.000,00
	SPBU KURAITAJI		150.000,00	900.000,00	0,00	0,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
	SPPG MBG		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	SDN 01 KAMPUNG JAWA		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**73.954.000,00**	**108.569.000,00**	**-**	**-**	**34.615.000,00**	**73.954.000,00**	**108.569.000,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**-**	**-**	**17.307.500,00**	**73.954.000,00**	**91.261.500,00**
4	Piutang Retribusi Parkir	Dishubkominfo							

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1) Endrizal		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2) Ferdi Ferdian		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	3) Mulyadi		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4) Nurmasrizal		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**
5	Piutang Retribusi IMB	KP2TPM	10.983.848,00	10.983.848,00	0,00	0,00	0,00	10.983.848,00	10.983.848,00
	Piutang Persetujuan Bangunan Gedung	PUPRP	4.854.447,00	18.580.575,00	0,00	16.562.208,00	0,00	2.018.367,00	18.580.575,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**15.838.295,00**	**29.564.423,00**	**-**	**16.562.208,00**	**-**	**13.002.215,00**	**29.564.423,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**1.656.220,80**	**0,00**	**13.002.215,00**	**14.658.435,80**
6	Piutang Air Bersih	Perkim & LH	758.095.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**758.095.506,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Piutang Retribusi dari Jasa Layanan	RSUD Sadikin	0,00	1.701.935.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**0,00**	**1.701.935.741,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Piutang Retribusi		**2.411.280.523,00**	**3.619.235.549,00**	0,00	**16.562.208,00**	**119.615.000,00**	**268.134.158,00**	**404.311.366,00**
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				0,00	**1.656.220,80**	**59.807.500,00**	**268.134.158,00**	**329.597.878,80**

Lampiran 8c

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Jumlah Piutang Per 31 Des 2025	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**								
1	Piutang Denda Air Bersih	Perkim&LH	120.823.161,85	70.262.551,00	1.098.558,00	2.560.717,00	23.961.672,00	42.641.604,00	70.262.551,00
3	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Perkim & LH	-	1.067.760.431,00	109.944.000,00	256.284.300,00	437.371.731,00	264.160.400,00	1.067.760.431,00
4	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR	BPKPD	123.000.000,00	123.000.000,00	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			**243.823.161,85**	**1.261.022.982,00**	**111.042.558,00**	**258.845.017,00**	**461.333.403,00**	**306.802.004,00**	**1.138.022.982,00**
					0,5%	**10%**	**50%**	**100%**	
Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah					**555.212,79**	**25.884.501,70**	**230.666.701,50**	**306.802.004,00**	**563.908.419,99**
C	**Piutang Lain-Lain**								
1	Piutang Bunga Dana Bergulir KSP/USP	BPKPD (SKPKD)	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR		117.367.333,33	117.367.333,33	0,00	0,00	0,00	117.367.333,32	117.367.333,31
3	Piutang Lain-lain TGR		412.549,17	412.549,17	0,00	0,00	0,00	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR		6.545.662,00	6.679.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Bunga Tabungan BPR		0,00	7.006.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Jaminan Pemeliharaan		320.434.635,00	320.434.635,00	0,00	0,00	0,00	320.434.635,00	320.434.635,00
7	Piutang Kelebihan Pembayaran	RSUD	139.049.569,16	139.049.569,16	0,00	0,00	0,00	139.049.569,16	139.049.569,16
8	Piutang Denda Air Bersih		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Lain-Lain			**608.409.748,66**	**615.550.430,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.864.086,65**	**601.864.086,64**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.864.086,65**	**601.864.086,65**

Lampiran 9

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	ATK	Cetakan	Alat-alat Listrik	Alat-alat komputer	Materai/ Perangko	Peralatan Kebersihan	Bahan Baku Bangunan/Bahan Material Lainnya Bangunan	Bibit Ternak	karcis Retribusi	Obat Lainnya	Obat-Obatan/ BMHP	Obat JKN	Bahan Makanan	Bahan Kimia	Pakan Ternak	Peralatan Kesehatan Lainnya	Peralatan Lain-Lain	Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566.000,00
3	PUSKESMAS NARAS	0,00	0,00	100.000,00			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.756.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.898.730,00
4	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.886.084,34	3.354.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.240.716,34
5	PUSKESMAS PARIAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.668.101,92	8.733.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.401.202,23
6	PUSKESMAS KURAI TAJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.833.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.833.513,97
7	PUSKESMAS MARUNGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.329.979,62	9.282.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.612.043,32
8	PUSKESMAS AIR SANTOK	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.945.345,44	3.294.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200.049,44
9	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.094.519,00	6.229.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.324.413,20
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD SADIKIN) KOTA PARIAMAN	4.245.500,00	0,00	9.109.600,00	0,00	900.000,00	3.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.081.108,00	0,00	7.153.958,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.057.666,00
11	UPT. INSTALASI FARMASI	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.250.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.475.307,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	187.500,00	180.000,00	115.000,00	0,00	0,00	473.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.900,00
13	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	0,00	0,00	292.342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.342.400,00
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
15	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.651.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.934.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.959.260,00
16	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.024.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00		28.440.000,00
17	KANTOR KESBANG POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225.000,00
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.535.000,00
20	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	5.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.198.000,00
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	12.590.600,00	0,00	360.794.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		373.385.150,00
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		526.000,00
24	DINAS PERHUBUNGAN	636.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		1.238.000,00
25	UPT. PARKIR	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		267.000,00
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.500,00

Lampiran 9

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	ATK	Cetakan	Alat-alat Listrik	Alat-alat komputer	Materai/ Perangko	Peralatan Kebersihan	Bahan Baku Bangunan/Bahan Material Lainnya Bangunan	Bibit Ternak	karcis Retribusi	Obat Lainnya	Obat-Obatan/ BMHP	Obat JKN	Bahan Makanan	Bahan Kimia	Pakan Ternak	Peralatan Kesehatan Lainnya	Peralatan Lain-Lain	Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	TOTAL
27	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00
28	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
29	UPT. METROLOGI LEGAL	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.200,00
30	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	842.000,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.000,00
32	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.802.731,33	64.916.731,33
33	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PARIAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	4.542.500,00
35	UPT. BALAI BENIH IKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	24.179.530,00	0,00	0,00	0,00	57.108.530,00
36	BAGIAN PEMERINTAHAN	2.312.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.233,00
37	BAGIAN HUKUM DAN HAM	2.850.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.600,00
38	BAGIAN ORGANISASI & APARATUR	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.000,00
39	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	7.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042.000,00
40	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN	1.211.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.250,00
41	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.500,00
42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
43	SEKRETARIAT DPRD	1.201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.800,00
44	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
45	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.000,00
47	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
48	INSPEKTORAT	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00
49	BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.043.931,00	0,00	345.000,00	1.839.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594.931,00
50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	14.112.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	70.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.496.000,00
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	KELURAHAN KAMPUNG JAWA 1	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00

Lampiran 9

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	ATK	Cetakan	Alat-alat Listrik	Alat-alat komputer	Materai/ Perangko	Peralatan Kebersihan	Bahan Baku Bangunan/Bahan Material Lainnya Bangunan	Bibit Ternak	karcis Retribusi	Obat Lainnya	Obat-Obatan/ BMHP	Obat JKN	Bahan Makanan	Bahan Kimia	Pakan Ternak	Peralatan Kesehatan Lainnya	Peralatan Lain-Lain	Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	TOTAL
53	KELURAHAN JATI HILIR	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
54	KELURAHAN JALAN KERETA API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	KELURAHAN KARAN AUR	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
56	KELURAHAN PONDOK DUO	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
57	KELURAHAN KAMPUNG PERAK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	KELURAHAN KAMPUNG JAWA 2	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
60	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	KELURAHAN LOHONG	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
62	KELURAHAN PASIR	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
63	KELURAHAN TARATAK	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
64	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00
65	KELURAHAN UJUNG BATUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	KELURAHAN KP PONDOK	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
76	KELURAHAN JALAN BARU	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total Persediaan		64.681.814,00	12.880.600,00	302.653.000,00	362.633.550,00	950.000,00	7.696.600,00	248.651.360,00	31.569.000,00	70.975.000,00	5.566.000,00	4.217.489.689,29	30.894.394,21	14.688.958,00	95.478.400,00	24.179.530,00	2.877.500,00	450.000,00	64.802.731,33	5.559.118.126,83

Lampiran 10a

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BANTUAN DANA BERGULIR UKM DAN ROVOLVING FUND

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Plafond	Posisi Per 31 Desember 2025									Dana Bergulir Yang Diragukan Tidak Tertagih	
		Pokok	Bunga	Jumlah	6	7	8	9	10	>10	75%	100%
A Sektor Pertanian dan Peternakan	351.500.000	279.534.500	32.742.500	312.277.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.534.500,00	0,00	279.534.500,00
B Sektor Kelautan dan Perikanan	412.500.000	321.747.500	34.467.000	356.214.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.747.500,00	0,00	321.747.500,00
C Sektor Industri	588.500.000	434.986.500	49.705.000	484.691.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.986.500,00	0,00	434.986.500,00
D Sektor Perdagangan	739.000.000	565.257.000	59.136.500	624.393.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.257.000,00	0,00	565.257.000,00
TOTAL	**2.091.500.000**	**1.601.525.500**	**176.051.000**	**1.777.576.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.601.525.500,00**	**0,00**	**1.601.525.500,00**

Data Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir Revolving Fund Tahun 2025 **117.367.333,33**

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BANTUAN DANA BERGULIR KSP/USP

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Plafond	Posisi Per 31 Desember 2025									Dana Bergulir Yang Diragukan Tidak Tertagih	
		Pokok	Bunga	Jumlah	6	7	8	9	10	>10	Jangka Waktu (> 3 s/d 5 thn) 75%	Jangka Waktu (> 5 thn) 100%
1 Takapalo Saiyo	50.000.000	35.000.000	10.500.000	45.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000	0,00	35.000.000
2 Jambak Sakato	50.000.000	27.500.000	8.250.000	35.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000	0,00	27.500.000
3 Tuah Sakato	50.000.000	37.500.000	11.250.000	48.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000	0,00	37.500.000
4 KPP Laskar Cimparuh	50.000.000	10.000.000	3.000.000	13.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	0,00	10.000.000
5 Primkoptama	50.000.000	7.500.000	2.250.000	9.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000	0,00	7.500.000
6 Kop. Nly Pasie Nrh	10.000.000	5.500.000	1.650.000	7.150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000	0,00	5.500.000
TOTAL	**260.000.000**	**123.000.000**	**36.900.000**	**159.900.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.000.000**	**0,00**	**123.000.000**

Data Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir KSP/USP Tahun 2025 **24.600.000**

Pemerintah Kota Pariaman
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
I.	**Sektor Pertanian dan Peternakan**															
1	ST. Darjis	8.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	840.000,00	8.840.000,00	27/10/06
2	Omo Aldrin Hasan, SP	15.000.000	25/10/04	36	bln	36	134	146	158	170	206	17,2	15.000.000,00	2.625.000,00	17.625.000,00	25/10/07
3	Syahfinasri	20.000.000	23/10/04	36	bln	28	134	146	158	170	198	16,5	15.552.000,00	2.700.000,00	18.252.000,00	23/10/07
4	Juarman	3.000.000	28/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	28/10/05
5	Syahrul	3.000.000	30/10/04	12	bln	2	158	170	182	194	196	16,3	500.000,00	15.000,00	515.000,00	30/10/05
6	Risnawati	10.000.000	25/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,8	8.092.000,00	900.000,00	8.992.000,00	25/10/06
7	Mahyudin / Appaludin	8.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00	27/10/06
8	Narasli	8.000.000	28/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	840.000,00	8.840.000,00	28/10/06
9	Erman Safni	8.000.000	29/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	7.555.000,00	640.000,00	8.195.000,00	29/10/06
10	Khairul	8.000.000	21/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	21/10/06
11	Majelis / Marjailis, BA	8.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	920.000,00	8.920.000,00	25/10/06
12	Jakimar	8.000.000	23/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,7	6.220.000,00	480.000,00	6.700.000,00	23/10/06
13	Drs. Agusman	5.000.000	15/01/05	18	bln	15	149	161	173	185	200	16,7	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	15/07/06
14	Rp. Gazali	10.000.000	23/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00	23/10/06
15	Syafrial	20.000.000	22/10/04	36	bln	35	134	146	158	170	205	17,1	19.333.000,00	3.500.000,00	22.833.000,00	22/10/07
16	Drs. John Hendry	20.000.000	23/10/04	36	bln	23	134	146	158	170	193	16,1	12.663.000,00	1.800.000,00	14.463.000,00	23/10/07
17	Marzuki	10.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	600.000,00	10.600.000,00	25/10/06
18	Sridayeti	4.000.000	25/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	3.777.000,00	320.000,00	4.097.000,00	25/04/06
19	Metri Evita	10.000.000	29/10/04	24	bln	11	146	158	170	182	193	16,1	4.480.000,00	500.000,00	4.980.000,00	29/10/06
20	Ali Zuarman	10.000.000	23/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	8.963.000,00	1.050.000,00	10.013.000,00	23/10/06
21	Suhaimi	5.000.000	27/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	25.000,00	5.025.000,00	27/04/06
22	Nurman /HM Umar LW	20.000.000	27/10/04	36	bln	29	134	146	158	170	199	16,6	15.998.000,00	2.500.000,00	18.498.000,00	27/10/07
23	H. Masrial / BY. Gurun	20.000.000	25/10/04	36	bln	23	134	146	158	170	193	16,0	12.500.000,00	1.900.000,00	14.400.000,00	25/10/07
24	Arisma Agus, S.Pd	5.000.000	23/10/04	18	bln	15	152	164	176	188	203	16,9	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	23/04/06
25	Yusmanlina Rita	5.000.000	28/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	28/04/06
26	Yulmaneti	8.000.000	12/03/04	24	bln	24	153	165	177	189	213	17,8	8.000.000,00	840.000,00	8.840.000,00	12/03/06
27	M. Darman	8.000.000	12/03/04	24	bln	24	153	165	177	189	213	17,8	8.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00	12/03/06
28	Hendri	2.500.000	12/03/04	36	bln	28	141	153	165	177	205	17,0	1.915.000,00	300.000,00	2.215.000,00	12/03/07
29	Yuzarlis Uyun	8.000.000	12/02/04	24	bln	5	154	166	178	190	195	16,3	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	12/02/06
30	Syukri, S.Pt	8.000.000	12/06/04	24	bln	7	150	162	174	186	193	16,1	2.324.000,00	360.000,00	2.684.000,00	12/06/06
31	Darmansyah	6.000.000	17/05/05	24	bln	15	139	151	163	175	190	15,8	3.700.000,00	420.000,00	4.120.000,00	17/05/07
32	Irja, SE	8.000.000	12/02/04	24	bln	19	154	166	178	190	209	17,4	6.220.000,00	560.000,00	6.780.000,00	12/02/06
33	Hendri	4.000.000	05/06/05	36	bln	34	126	138	150	162	196	16,3	3.732.000,00	580.000,00	4.312.000,00	05/06/08
34	H. Hasan Basri	5.000.000	09/09/05	24	bln	24	135	147	159	171	195	16,3	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	09/09/07
35	Mulyadi	5.000.000	17/09/05	24	bln	24	135	147	159	171	195	16,3	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	17/09/07
36	Darnengsih	3.000.000	20/09/05	12	bln	10	147	159	171	183	193	16,1	2.500.000,00	135.000,00	2.635.000,00	20/09/06

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
37	Firdaus	4.000.000	09/07/05	24	bln	22	137	149	161	173	195	16,2	3.666.000,00	420.000,00	4.086.000,00	09/07/07
38	Asrul Joya	2.500.000	16/09/05	24	bln	24	135	147	159	171	195	16,3	2.500.000,00	287.500,00	2.787.500,00	16/09/07
39	Awaluddin	2.500.000	09/06/05	24	bln	21	138	150	162	174	195	16,2	2.186.500,00	250.000,00	2.436.500,00	09/06/07
40	Afni	10.000.000	30/01/06	36	bln	4	119	131	143	155	159	13,3	0,00	0,00	0,00	30/01/09
41	Liberty	3.500.000	26/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	3.500.000,00	402.500,00	3.902.500,00	26/07/08
42	Basril / Delmawati	7.500.000	07/12/06	24	bln	20	120	132	144	156	176	14,7	6.250.000,00	712.500,00	6.962.500,00	07/12/08
43	Syafrizal	5.000.000	20/07/07	24	bln	7	113	125	137	149	156	13,0	1.386.000,00	100.000,00	1.486.000,00	20/07/09
42 Org	**Total**	**351.500.000**											**279.534.500,00**	**32.742.500,00**	**312.277.000,00**	
II.	**Sektor Kelautan dan Perikanan**															
1	Afrianto	2.500.000	21/10/04	12	bln	9	158	170	182	194	203	16,9	1.873.000,00	100.000,00	1.973.000,00	21/10/05
2	Damril	3.000.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	2.750.000,00	150.000,00	2.900.000,00	27/10/05
3	Nofri Indra Gunawan	2.500.000	28/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	28/10/05
4	Erdiman	2.000.000	29/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	1.778.000,00	150.000,00	1.928.000,00	29/04/06
5	Erman	5.000.000	27/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	27/04/06
6	Ardison	7.000.000	21/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	21/10/06
7	Kanak	5.000.000	25/10/04	18	bln	15	152	164	176	188	203	16,9	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	25/04/06
8	Sukirman	2.500.000	26/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	37.500,00	2.537.500,00	26/10/05
9	Zafrinal	5.000.000	28/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	28/04/06
10	Ajismar	7.000.000	21/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	21/10/06
11	BY. Yardin	2.000.000	26/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	1.832.000,00	210.000,00	2.042.000,00	26/10/06
12	Dayardi Alek	5.000.000	25/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.775.000,00	250.000,00	5.025.000,00	25/10/05
13	Ibra Wendi	3.500.000	26/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	3.500.000,00	297.500,00	3.797.500,00	26/04/06
14	Mazona / Chandra Sonedi	6.000.000	23/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	5.620.000,00	510.000,00	6.130.000,00	23/10/06
15	Ali Buzar	5.000.000	27/10/04	18	bln	1	152	164	176	188	189	15,7	274.000,00	0,00	274.000,00	27/04/06
16	Asril	8.000.000	22/10/04	36	bln	10	134	146	158	170	180	15,0	1.295.000,00	640.000,00	1.935.000,00	22/10/07
17	Agusman / Mahdi Bermana	5.000.000	25/10/04	12	bln	2	158	170	182	194	196	16,3	939.000,00	0,00	939.000,00	25/10/05
18	Agus Neri Ambi	5.000.000	29/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	29/04/06
19	H. SD. Ramli	20.000.000	21/10/04	30	bln	7	140	152	164	176	183	15,2	4.432.000,00	700.000,00	5.132.000,00	21/04/07
20	Ali Akbar	7.000.000	26/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,2	3.788.000,00	420.000,00	4.208.000,00	26/10/06
21	H. Suardi Alek	10.000.000	28/10/04	24	bln	18	146	158	170	182	200	16,7	0,00	0,00	0,00	28/10/06
22	Hendri Johan	5.000.000	26/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.394.000,00	375.000,00	4.769.000,00	26/04/06
23	Masri Husen	10.000.000	29/10/04	36	bln	35	134	146	158	170	205	17,1	9.722.000,00	1.700.000,00	11.422.000,00	29/10/07
24	Mesrawati	2.500.000	29/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.664.000,00	85.500,00	1.749.500,00	29/10/05
25	Mulhendri	7.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.000.000,00	805.000,00	7.805.000,00	27/10/06
26	Ros Kamil	7.000.000	26/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,2	3.788.000,00	420.000,00	4.208.000,00	26/10/06
27	Syaripudin	7.000.000	25/10/04	12	bln	10	158	170	182	194	204	17,0	5.832.000,00	315.000,00	6.147.000,00	25/10/05
28	Yusrizal	7.500.000	23/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,1	7.400.000,00	862.500,00	8.262.500,00	23/10/06
29	Edi Permana	2.000.000	25/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	25/10/05
30	Yulius Kaisar	5.000.000	22/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.583.000,00	250.000,00	4.833.000,00	22/10/05
31	Asril Thaib	5.000.000	22/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.372.000,00	350.000,00	4.722.000,00	22/04/06

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
32	Rusyafni	5.000.000	25/10/04	12	bln	5	158	170	182	194	199	16,6	2.081.000,00	100.000,00	2.181.000,00	25/10/05
33	Erizal	5.000.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.583.000,00	250.000,00	4.833.000,00	27/10/05
34	Syamsurizal	5.000.000	27/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	27/04/06
35	Musyirwan	5.000.000	22/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	22/04/06
36	Yuliardi	5.000.000	28/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	28/04/06
37	Darmawan	15.000.000	27/10/04	36	bln	26	134	146	158	170	196	16,3	10.830.000,00	1.875.000,00	12.705.000,00	27/10/07
38	H. Jufri Jamal	10.000.000	29/10/04	36	bln	34	134	146	158	170	204	17,0	9.583.000,00	1.700.000,00	11.283.000,00	29/10/07
39	Zaldi	2.500.000	23/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	23/10/05
40	Zulfajar	5.000.000	22/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	5.000.000,00	275.000,00	5.275.000,00	22/10/05
41	Alinur	6.500.000	23/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	6.500.000,00	747.500,00	7.247.500,00	23/10/06
42	Fadillah	5.000.000	27/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	4.440.000,00	375.000,00	4.815.000,00	27/10/06
43	Mulyadi	2.500.000	26/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	1.944.000,00	162.500,00	2.106.500,00	26/04/06
44	Erwin	7.000.000	26/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.000.000,00	805.000,00	7.805.000,00	26/10/06
45	Hendrik Budiyono	3.500.000	26/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	3.110.000,00	261.500,00	3.371.500,00	26/04/06
46	Zahari	2.000.000	25/10/04	12	bln	6	158	170	182	194	200	16,7	998.000,00	50.000,00	1.048.000,00	25/10/05
47	Asrizal	1.000.000	26/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00	26/10/05
48	Zakriman	4.000.000	25/10/04	12	bln	7	158	170	182	194	201	16,7	2.330.000,00	120.000,00	2.450.000,00	25/10/05
49	H. Fadli Jalil	7.000.000	26/10/04	24	bln	14	146	158	170	182	196	16,3	4.025.000,00	0,00	4.025.000,00	26/10/06
50	Almiarti	5.000.000	27/10/04	18	bln	12	152	164	176	188	200	16,7	3.332.000,00	275.000,00	3.607.000,00	27/04/06
51	Jafrinal	5.000.000	29/10/04	18	bln	5	152	164	176	188	193	16,1	1.386.000,00	100.000,00	1.486.000,00	29/04/06
52	Jarunasdi	5.000.000	27/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.442.000,00	375.000,00	4.817.000,00	27/04/06
53	Martias	5.000.000	27/10/04	18	bln	13	152	164	176	188	201	16,7	3.610.000,00	300.000,00	3.910.000,00	27/04/06
54	Ismael	5.000.000	27/10/04	18	bln	12	152	164	176	188	200	16,7	3.332.000,00	275.000,00	3.607.000,00	27/04/06
55	Ali Nuzar	5.000.000	27/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	27/04/06
56	M. Nasir	5.000.000	27/10/04	18	bln	4	152	164	176	188	192	16,0	1.108.000,00	75.000,00	1.183.000,00	27/04/06
57	Herman Uncu	5.000.000	25/11/04	36	bln	36	133	145	157	169	205	17,1	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	25/11/07
58	Johan. BSC	5.000.000	21/12/04	24	bln	22	144	156	168	180	202	16,8	4.582.000,00	525.000,00	5.107.000,00	21/12/06
59	Syofyan Oyon	7.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.000.000,00	805.000,00	7.805.000,00	25/10/06
60	Hasrizal	5.000.000	28/10/04	18	bln	13	152	164	176	188	201	16,7	3.610.000,00	300.000,00	3.910.000,00	28/04/06
61	Yulisyenti	5.000.000	12/02/04	18	bln	16	160	172	184	196	212	17,7	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	12/08/05
62	M. Salim	7.500.000	12/02/04	24	bln	24	154	166	178	190	214	17,8	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	12/02/06
63	Syafinal	8.000.000	12/02/04	24	bln	19	154	166	178	190	209	17,4	6.330.000,00	720.000,00	7.050.000,00	12/02/06
64	Hendri Suarman	5.000.000	12/02/04	18	bln	18	160	172	184	196	214	17,8	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	12/08/05
65	Suardi Ahmad	7.500.000	28/06/05	36	bln	36	126	138	150	162	198	16,5	7.500.000,00	1.350.000,00	8.850.000,00	28/06/08
66	Dalimar	4.000.000	21/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	3.666.000,00	220.000,00	3.886.000,00	21/08/06
67	Hanibal	2.500.000	05/09/05	12	bln	11	147	159	171	183	194	16,2	2.291.500,00	125.000,00	2.416.500,00	05/09/06
68	Dahlan	2.500.000	05/10/05	18	bln	12	140	152	164	176	188	15,7	1.666.000,00	37.500,00	1.703.500,00	05/04/07
69	Syamsunar	2.500.000	05/10/05	12	bln	12	146	158	170	182	194	16,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	05/10/06
70	Hazwir Zaini	4.000.000	09/08/05	24	bln	24	136	148	160	172	196	16,3	4.000.000,00	380.000,00	4.380.000,00	09/08/07
71	Afrizal, S.Pd	4.000.000	09/01/05	26	bln	26	141	153	165	177	203	16,9	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	09/03/07
72	Zulkorneli	20.000.000	17/07/06	36	bln	36	113	125	137	149	185	15,4	20.000.000,00	3.500.000,00	23.500.000,00	17/07/09

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
73	Zulnaidi. A	4.000.000	20/07/06	24	bln	23	125	137	149	161	184	15,3	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	20/07/08
74	Raysoni	7.000.000	02/03/07	36	bln	36	105	117	129	141	177	14,8	7.000.000,00	1.225.000,00	8.225.000,00	02/03/10
73 Org	**Total**	**412.500.000**											**321.747.500,00**	**34.467.000,00**	**356.214.500,00**	
III.	**Sektor Industri**															
1	Syafruddin. Z	8.000.000	21/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,7			0,00	21/10/06
2	Maya Oktafarina	10.000.000	27/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	8.749.000,00	1.000.000,00	9.749.000,00	27/10/06
3	Rini Sasmita	10.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	1.150.000,00	11.150.000,00	27/10/06
4	M. Subuh	7.500.000	25/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	6.875.000,00	787.500,00	7.662.500,00	25/10/06
5	Azwarni	15.000.000	27/10/04	36	bln	36	134	146	158	170	206	17,2	15.000.000,00	2.625.000,00	17.625.000,00	27/10/07
6	Alimah	8.000.000	26/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	7.332.000,00	840.000,00	8.172.000,00	26/10/06
7	ST Anis	7.500.000	29/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,2	4.062.000,00	450.000,00	4.512.000,00	29/10/06
8	Alfian	7.500.000	27/10/04	24	bln	9	146	158	170	182	191	15,9	2.812.500,00	292.000,00	3.104.500,00	27/10/06
9	Tsamratul Fuadi	7.500.000	25/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	7.187.500,00	824.500,00	8.012.000,00	25/10/06
10	Sulaiman	7.500.000	22/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	7.187.000,00	824.000,00	8.011.000,00	22/10/06
11	**Nofiati (LUNAS)**	10.000.000	23/10/04	24	bln	-	146	158	170	182	182	15,2	0,00	0,00	0,00	23/10/06
12	**Netti Winda Sari**	7.000.000	21/10/04	36	bln	20	134	146	158	170	190	15,9	0,00	0,00	0,00	21/10/07
13	Syafti Yeni	5.000.000	29/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	29/04/06
14	Maiyusti	5.000.000	29/10/04	18	bln	8	152	164	176	188	196	16,3	2.220.000,00	175.000,00	2.395.000,00	29/04/06
15	Rismarni	5.000.000	21/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,1	4.900.000,00	275.000,00	5.175.000,00	21/10/05
16	Maizonal	15.000.000	23/10/04	36	bln	35	134	146	158	170	205	17,1	14.583.000,00	2.550.000,00	17.133.000,00	23/10/07
17	Syahrial Beren	7.500.000	22/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.000,00	8.362.000,00	22/10/06
18	Jamaluddin	10.000.000	29/10/04	24	bln	18	146	158	170	182	200	16,7	7.466.000,00	950.000,00	8.416.000,00	29/10/06
19	Dra. Endrawati	7.500.000	23/10/04	24	bln	0	146	158	170	182	182	15,2	35.000,00	0,00	35.000,00	23/10/06
20	Adi Putra	7.500.000	26/10/04	24	bln	17	146	158	170	182	199	16,6	5.425.500,00	634.000,00	6.059.500,00	26/10/06
21	Rismadona Iskandar	7.500.000	27/10/04	24	bln	18	146	158	170	182	200	16,7	5.636.500,00	674.500,00	6.311.000,00	27/10/06
22	M. Nur	10.000.000	22/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	6.664.000,00	350.000,00	7.014.000,00	22/10/05
23	Mawardi, SE	7.500.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.000,00	8.362.000,00	25/10/06
24	Jonasri	7.500.000	29/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	29/10/06
25	Mayar	5.000.000	26/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	26/04/06
26	Yuliani	7.500.000	26/10/04	24	bln	16	146	158	170	182	198	16,5	5.000.000,00	562.000,00	5.562.000,00	26/10/06
27	Salmiwati	7.500.000	21/10/04	24	bln	17	146	158	170	182	199	16,6	5.312.500,00	599.500,00	5.912.000,00	21/10/06
28	Zarlaini	7.500.000	27/10/04	24	bln	20	146	158	170	182	202	16,8	6.248.000,00	712.000,00	6.960.000,00	27/10/06
29	Alam Nur	7.500.000	28/10/04	24	bln	11	146	158	170	182	193	16,1	3.362.500,00	0,00	3.362.500,00	28/10/06
30	Mardinis	7.500.000	22/10/04	36	bln	34	134	146	158	170	204	17,0	7.084.000,00	1.236.000,00	8.320.000,00	22/10/07
31	Kadir / Khaidir	5.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	25/10/06
32	Aldinur	5.000.000	26/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	26/04/06
33	Opet Martini	5.000.000	11/11/04	18	bln	18	151	163	175	187	205	17,1	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	11/05/06
34	Elmi Marlinda	5.000.000	11/10/04	18	bln	6	152	164	176	188	194	16,2	1.767.000,00	125.000,00	1.892.000,00	11/04/06
35	Ratna Juwita	5.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	4.250.000,00	225.000,00	4.475.000,00	11/11/05
36	Nurbaya	5.000.000	11/11/04	18	bln	8	151	163	175	187	195	16,2	2.220.000,00	175.000,00	2.395.000,00	11/05/06

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
37	Sumarni	5.000.000	11/11/04	18	bln	14	151	163	175	187	201	16,7	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	11/05/06
38	Dona Karmila	4.000.000	11/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	2.664.000,00	140.000,00	2.804.000,00	11/10/05
39	Nasril Rahman	10.000.000	11/11/04	24	bln	24	145	157	169	181	205	17,1			0,00	11/11/06
40	Rosmawati	5.000.000	12/03/04	18	bln	16	159	171	183	195	211	17,6	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	12/09/05
41	Zuraida	3.000.000	11/11/04	12	bln	4	157	169	181	193	197	16,4	1.000.000,00	45.000,00	1.045.000,00	11/11/05
42	Haji Zainir	7.500.000	29/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	29/10/06
43	Nurhayati	6.000.000	12/02/04	24	bln	23	154	166	178	190	213	17,8	5.750.000,00	660.000,00	6.410.000,00	12/02/06
44	Umar Ali	5.000.000	12/02/04	12	bln	10	166	178	190	202	212	17,7	4.166.000,00	225.000,00	4.391.000,00	12/02/05
45	Agustami	10.000.000	12/02/04	24	bln	23	154	166	178	190	213	17,7	9.583.000,00	1.100.000,00	10.683.000,00	12/02/06
46	Sumiarni	3.000.000	21/02/05	18	bln	18	148	160	172	184	202	16,8	3.000.000,00	255.000,00	3.255.000,00	21/08/06
47	Kharnelis	4.000.000	21/02/05	12	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	4.000.000,00	220.000,00	4.220.000,00	21/02/06
48	Betrida Yanti	3.000.000	11/05/05	18	bln	10	145	157	169	181	191	15,9	1.664.000,00	135.000,00	1.799.000,00	11/11/06
49	Irni	5.000.000	23/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	23/08/06
50	Nurleli	7.500.000	21/02/05	24	bln	9	142	154	166	178	187	15,6	2.812.500,00	300.000,00	3.112.500,00	21/02/07
51	Sumarni	6.000.000	22/02/05	24	bln	20	142	154	166	178	198	16,5	5.000.000,00	570.000,00	5.570.000,00	22/02/07
52	Yusmini	4.000.000	22/02/05	18	bln	14	148	160	172	184	198	16,5	3.108.000,00	260.000,00	3.368.000,00	22/08/06
53	Mursyida Layna	7.000.000	30/04/05	24	bln	23	140	152	164	176	199	16,6	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	30/04/07
54	Afrizal	3.000.000	11/05/05	18	bln	15	145	157	169	181	196	16,3	2.499.000,00	210.000,00	2.709.000,00	11/11/06
55	Dedi Hidayat	4.000.000	10/05/05	18	bln	18	145	157	169	181	199	16,6	4.000.000,00	340.000,00	4.340.000,00	10/11/06
56	Fahmi. AS	10.000.000	27/08/05	24	bln	19	136	148	160	172	191	15,9	7.915.000,00	900.000,00	8.815.000,00	27/08/07
57	Netalia	7.000.000	09/01/05	30	bln	21	137	149	161	173	194	16,2	4.894.000,00	700.000,00	5.594.000,00	09/07/07
58	Asneriyanti	3.000.000	09/08/05	24	bln	8	136	148	160	172	180	15,0	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00	09/08/07
59	Mardianis	7.000.000	17/01/06	24	bln	15	131	143	155	167	182	15,2	4.372.000,00	490.000,00	4.862.000,00	17/01/08
60	Novit Tasniati	4.000.000	20/01/06	24	bln	23	131	143	155	167	190	15,8	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	20/01/08
61	Sufarmaiteti	5.000.000	23/01/06	18	bln	13	137	149	161	173	186	15,5	3.610.000,00	300.000,00	3.910.000,00	23/07/07
62	Paimin	5.000.000	23/01/06	24	bln	18	131	143	155	167	185	15,4	3.749.000,00	425.000,00	4.174.000,00	23/01/08
63	Yulinar	4.000.000	16/02/06	24	bln	19	130	142	154	166	185	15,4	3.165.000,00	360.000,00	3.525.000,00	16/02/08
64	Yeni Latifah	4.000.000	17/07/06	24	bln	5	125	137	149	161	166	13,8	827.000,00	80.000,00	907.000,00	17/07/08
65	Erma Yetti	10.000.000	18/07/06	36	bln	32	113	125	137	149	181	15,1	8.888.000,00	1.550.000,00	10.438.000,00	18/07/09
66	Nurmaini	5.000.000	18/07/06	12	bln	10	137	149	161	173	183	15,2	4.166.000,00	225.000,00	4.391.000,00	18/07/07
67	Asni Arti	5.000.000	19/07/06	24	bln	4	125	137	149	161	165	13,7	820.000,00	75.000,00	895.000,00	19/07/08
68	Syahril	4.000.000	19/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	19/07/08
69	Werisma Yani	3.000.000	21/07/06	18	bln	18	131	143	155	167	185	15,4	3.000.000,00	255.000,00	3.255.000,00	21/01/08
70	**Zainidar (LUNAS)**	4.000.000	21/07/06	18	bln	-	131	143	155	167	167	13,9	0,00	0,00	0,00	21/01/08
71	Kamaldi	3.000.000	21/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	21/07/08
72	Syafwit	5.000.000	27/07/06	24	bln	18	125	137	149	161	179	14,9	3.746.000,00	425.000,00	4.171.000,00	27/07/08
73	Revi Syukrina	4.000.000	10/10/06	24	bln	23	122	134	146	158	181	15,1	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	10/10/08
74	Suharni	5.000.000	11/10/06	24	bln	21	122	134	146	158	179	14,9	4.374.500,00	500.000,00	4.874.500,00	11/10/08
75	Yufetra Asra	7.000.000	08/12/06	18	bln	13	126	138	150	162	175	14,6	5.055.000,00	420.000,00	5.475.000,00	08/06/08
76	Eliarnita	8.000.000	20/02/07	24	bln	22	118	130	142	154	176	14,7	7.332.000,00	840.000,00	8.172.000,00	20/02/09
77	Syamsurizal	3.000.000	21/03/07	24	bln	24	117	129	141	153	177	14,8	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	21/03/09

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
78	Burhanuddin	5.000.000	30/07/07	24	bln	9	113	125	137	149	158	13,2	1.865.000,00	200.000,00	2.065.000,00	30/07/09
79	Deni Fahmi	5.000.000	19/07/07	24	bln	22	113	125	137	149	171	14,2	4.582.000,00	525.000,00	5.107.000,00	19/07/09
80	Hayati	4.000.000	20/07/07	24	bln	20	113	125	137	149	169	14,1	3.332.000,00	380.000,00	3.712.000,00	20/07/09
81	Idi Amin	3.000.000	19/09/07	12	bln	12	123	135	147	159	171	14,3	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	19/09/08
82	Gustiyawarman	4.000.000	24/09/07	24	bln	23	111	123	135	147	170	14,2	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	24/09/09
83	Sawirna	4.000.000	07/04/08	18	bln	12	110	122	134	146	158	13,2	2.662.000,00	220.000,00	2.882.000,00	07/10/09
84	Harisli	4.000.000	07/04/08	24	bln	12	104	116	128	140	152	12,7	1.996.000,00	220.000,00	2.216.000,00	07/04/10
85	Emransyah	5.000.000	08/04/08	24	bln	10	104	116	128	140	150	12,5	2.074.000,00	225.000,00	2.299.000,00	08/04/10
86	Agustanil	5.000.000	09/04/08	24	bln	23	104	116	128	140	163	13,6	4.791.000,00	550.000,00	5.341.000,00	09/04/10
87	Efriyeni	5.000.000	13/01/09	36	bln	36	83	95	107	119	155	12,9	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	13/01/12
88	Muchtar TJ	8.000.000	16/01/09	24	bln	21	95	107	119	131	152	12,7	6.982.000,00	840.000,00	7.822.000,00	16/01/11
89	Baharuddin	5.000.000	20/01/09	24	bln	10	95	107	119	131	141	11,7	2.074.000,00	225.000,00	2.299.000,00	20/01/11
90	Nurbaiti	5.000.000	21/01/09	18	bln	11	101	113	125	137	148	12,3	3.054.000,00	250.000,00	3.304.000,00	21/07/10
91	Maini Lidia	5.000.000	22/01/09	36	bln	21	83	95	107	119	140	11,7	2.915.000,00	500.000,00	3.415.000,00	22/01/12
92	Rita Zahara	5.000.000	22/01/09	36	bln	35	83	95	107	119	154	12,8	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/01/12
93	Yurneli	5.000.000	29/01/09	36	bln	35	83	95	107	119	154	12,8	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	29/01/12
94	Erlina	5.000.000	27/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	27/04/12
95	Hermanto	5.000.000	08/05/09	36	bln	36	79	91	103	115	151	12,6	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	08/05/12
96	Yuni Sukma Sari	7.500.000	04/09/09	24	bln	16	87	99	111	123	139	11,6	5.000.500,00	600.000,00	5.600.500,00	04/09/11
97	Rosnaini	4.000.000	07/09/09	24	bln	22	87	99	111	123	145	12,1	3.666.000,00	420.000,00	4.086.000,00	07/09/11
94 Org	**Total**	**588.500.000**											**434.986.500,00**	**49.705.000,00**	**484.691.500,00**	
IV.	**Sektor Perdagangan**															
1	Yulisman	2.500.000	21/10/04	12	bln	6	158	170	182	194	200	16,7	1.246.500,00	62.000,00	1.308.500,00	21/10/05
2	Ade Suryatman	3.000.000	22/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	22/10/05
3	Asmiarti	10.000.000	27/10/04	24	bln	12	146	158	170	182	194	16,2	4.996.000,00	500.000,00	5.496.000,00	27/10/06
4	Halimah	2.500.000	25/10/04	12	bln	6	158	170	182	194	200	16,7	1.245.000,00	62.000,00	1.307.000,00	25/10/05
5	Azizah	2.500.000	21/10/04	12	bln	9	158	170	182	194	203	16,9	1.882.500,00	99.500,00	1.982.000,00	21/10/05
6	Azimah	8.000.000	25/10/04	24	bln	6	146	158	170	182	188	15,7	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	25/10/06
7	Maisuri Z	4.000.000	27/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.108.000,00	260.000,00	3.368.000,00	27/04/06
8	Osmiati	2.500.000	26/10/04	12	bln	10	158	170	182	194	204	17,0	2.082.000,00	112.000,00	2.194.000,00	26/10/05
9	Candra	5.000.000	29/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	29/04/06
10	Nurtini	7.500.000	23/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,3	4.062.500,00	449.500,00	4.512.000,00	23/10/06
11	Bgd Asril	5.000.000	26/10/04	18	bln	6	152	164	176	188	194	16,2	1.664.000,00	125.000,00	1.789.000,00	26/04/06
12	Zainal Abidin	7.500.000	23/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	6.561.000,00	750.000,00	7.311.000,00	23/10/06
13	Zita Herlina	5.000.000	22/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	3.332.000,00	175.000,00	3.507.000,00	22/10/05
14	Nofrizal	2.500.000	29/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	29/10/05
15	Erlinda Yenti	2.500.000	25/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	2.291.000,00	125.000,00	2.416.000,00	25/10/05
16	Murniati	2.500.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	2.291.000,00	125.000,00	2.416.000,00	27/10/05
17	Marwilisni	3.000.000	23/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	2.833.000,00	240.000,00	3.073.000,00	23/04/06
18	Efrizaldi	7.000.000	11/02/04	30	bln	23	148	160	172	184	207	17,2	5.362.000,00	770.000,00	6.132.000,00	11/08/06

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
19	Bujang	2.000.000	29/10/04	12	bln	3	158	170	182	194	197	16,4	497.000,00	20.000,00	517.000,00	29/10/05
20	Azwardi	2.000.000	28/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.332.000,00	70.000,00	1.402.000,00	28/10/05
21	Ade Bursa	2.000.000	25/10/04	12	bln	1	158	170	182	194	195	16,2	163.000,00	0,00	163.000,00	25/10/05
22	Solfihardi	5.000.000	28/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	28/04/06
23	Yusran Yatim	2.500.000	23/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	23/10/05
24	Fitmawati	2.500.000	28/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	1.944.000,00	169.000,00	2.113.000,00	28/04/06
25	Joni Indra	10.000.000	28/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	1.150.000,00	11.150.000,00	28/10/06
26	Atos Austri	2.000.000	26/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	26/10/05
27	Azmawati	1.000.000	23/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00	23/10/05
28	Elimarnis	4.000.000	28/10/04	12	bln	3	158	170	182	194	197	16,4	994.000,00	40.000,00	1.034.000,00	28/10/05
29	Ramlan	5.000.000	28/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	28/04/06
30	Elni Pudin / Elmi	2.500.000	29/10/04	12	bln	10	158	170	182	194	204	17,0	2.082.000,00	112.500,00	2.194.500,00	29/10/05
31	Yasnimar	2.500.000	29/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	29/10/05
32	Mimi Elfita	10.000.000	21/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	1.150.000,00	11.150.000,00	21/10/06
33	ST. Maryadi	10.000.000	26/10/04	24	bln	17	146	158	170	182	199	16,6	7.081.000,00	800.000,00	7.881.000,00	26/10/06
34	Zumardi, ST	5.000.000	25/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	5.000.000,00	275.000,00	5.275.000,00	25/10/05
35	Yusniar	5.000.000	22/10/04	12	bln	1	158	170	182	194	195	16,3	413.000,00	25.000,00	438.000,00	22/10/05
36	Jasmi	3.000.000	22/10/04	12	bln	7	158	170	182	194	201	16,8	1.750.000,00	90.000,00	1.840.000,00	22/10/05
37	Martianas	5.000.000	23/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	4.791.000,00	550.000,00	5.341.000,00	23/10/06
38	Ilham Ilyas Can	10.000.000	21/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	9.583.000,00	1.100.000,00	10.683.000,00	21/10/06
39	Herman Usman	7.000.000	27/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,7	5.540.000,00	63.000,00	5.603.000,00	27/10/06
40	Aprijon	4.000.000	23/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	3.666.000,00	200.000,00	3.866.000,00	23/10/05
41	Yurisman	10.000.000	26/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	8.749.000,00	1.000.000,00	9.749.000,00	26/10/06
42	Syafriyanti	1.500.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	27/10/05
43	Syamsimar	3.000.000	26/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	26/10/06
44	Sarmadani	1.500.000	26/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	1.375.000,00	7.500,00	1.382.500,00	26/10/05
45	Syahrul	2.000.000	29/10/04	12	bln	9	158	170	182	194	203	16,9	1.501.000,00	80.000,00	1.581.000,00	29/10/05
46	Basrida Basir	10.000.000	29/10/04	36	bln	-	134	146	158	170	170	14,2	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	29/10/07
47	Rosmaini	5.000.000	27/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	27/04/06
48	Syafriadi	5.000.000	11/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.583.000,00	25.000,00	4.608.000,00	11/10/05
49	Ismail, S.Ag	6.000.000	10/11/04	24	bln	13	145	157	169	181	194	16,2	3.250.000,00	180.000,00	3.430.000,00	10/11/06
50	Asni. M	6.000.000	11/11/04	24	bln	20	145	157	169	181	201	16,8	5.000.000,00	570.000,00	5.570.000,00	11/11/06
51	Fera Indriani	2.000.000	11/10/05	12	bln	3	146	158	170	182	185	15,4	496.000,00	0,00	496.000,00	11/10/06
52	Bayu Pratama	6.000.000	11/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	5.250.000,00	600.000,00	5.850.000,00	11/10/06
53	Mitra Lindawati	2.500.000	11/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.666.000,00	87.500,00	1.753.500,00	11/10/05
54	Ruhneli / Yulidar	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
55	Syafril Sanik	8.500.000	11/11/04	24	bln	23	145	157	169	181	204	17,0	8.145.000,00	935.000,00	9.080.000,00	11/11/06
56	Syamsuwir	7.500.000	11/11/04	24	bln	24	145	157	169	181	205	17,1	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	11/11/06
57	Zailis Oyong	1.500.000	11/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	11/10/05
58	Rasmita	5.000.000	11/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	11/04/06
59	Linawati	2.000.000	11/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.332.000,00	70.000,00	1.402.000,00	11/10/05

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
60	Upik	5.000.000	11/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	11/04/06
61	Osmansyah	7.000.000	11/11/04	24	bln	15	145	157	169	181	196	16,3	4.372.000,00	490.000,00	4.862.000,00	11/11/06
62	Maiyulis Kalis	7.500.000	11/11/04	24	bln	23	145	157	169	181	204	17,0	7.187.500,00	825.000,00	8.012.500,00	11/11/06
63	Idil Taufik	6.000.000	10/11/04	24	bln	17	145	157	169	181	198	16,5	4.250.000,00	510.000,00	4.760.000,00	10/11/06
64	Anwar Sawin	5.000.000	10/11/04	18	bln	16	151	163	175	187	203	16,9	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	10/05/06
65	Mairawati	5.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,7	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00	11/11/05
66	Sugiarto	7.000.000	11/11/04	24	bln	12	145	157	169	181	193	16,1	3.496.000,00	385.000,00	3.881.000,00	11/11/06
67	M. Yeni Mucti	5.000.000	11/11/04	18	bln	18	151	163	175	187	205	17,1	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	11/05/06
68	Rusdi MT	2.000.000	11/11/04	12	bln	9	157	169	181	193	202	16,8	1.499.000,00	80.000,00	1.579.000,00	11/11/05
69	Desmawati	2.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,7	1.332.000,00	70.000,00	1.402.000,00	11/11/05
70	Runeli	3.000.000	11/11/04	12	bln	12	157	169	181	193	205	17,1	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	11/11/05
71	Orbainur	2.000.000	11/11/04	12	bln	12	157	169	181	193	205	17,1	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	11/11/05
72	Yandri	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
73	Amrialis	5.000.000	11/11/04	18	bln	15	151	163	175	187	202	16,8	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	11/05/06
74	Bainis	1.500.000	11/11/04	12	bln	6	157	169	181	193	199	16,6	750.000,00	37.500,00	787.500,00	11/11/05
75	Jupri Syarif	2.000.000	11/11/04	12	bln	11	157	169	181	193	204	17,0	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	11/11/05
76	Yeni Y	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
77	Lindawati	2.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,8	1.399.000,00	80.000,00	1.479.000,00	11/11/05
78	Nurhelma	2.000.000	25/11/04	12	bln	3	157	169	181	193	196	16,3	497.000,00	20.000,00	517.000,00	25/11/05
79	Hayati	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
80	Todi Novel	2.000.000	11/11/04	12	bln	11	157	169	181	193	204	17,0	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	11/11/05
81	Rosla Aslinda	2.000.000	11/11/04	12	bln	4	157	169	181	193	197	16,4	664.000,00	30.000,00	694.000,00	11/11/05
82	Suarni	2.000.000	25/11/04	12	bln	9	157	169	181	193	202	16,8	1.499.000,00	80.000,00	1.579.000,00	25/11/05
83	Maiyusni	3.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,8	2.000.000,00	105.000,00	2.105.000,00	11/11/05
84	Zailim	5.000.000	11/11/04	18	bln	17	151	163	175	187	204	17,0	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	11/05/06
85	Erman KH	5.000.000	11/11/04	24	bln	19	145	157	169	181	200	16,7	3.955.000,00	450.000,00	4.405.000,00	11/11/06
86	Iswardi	5.000.000	11/11/04	18	bln	17	151	163	175	187	204	17,0	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	11/05/06
87	Amril Amir Napia	10.000.000	11/11/04	36	bln	34	133	145	157	169	203	16,9	9.444.000,00	1.650.000,00	11.094.000,00	11/11/07
88	Nasril	6.000.000	12/02/04	24	bln	24	154	166	178	190	214	17,8	6.000.000,00	690.000,00	6.690.000,00	12/02/06
89	**Gafur, S.Ag**	**7.000.000**	**12/02/04**	**24**	**bln**	**18**	**154**	**166**	**178**	**190**	**208**	**17,3**				**12/02/06**
90	**Budi Kurniawan**	**7.000.000**	**12/04/04**	**36**	**bln**	**33**	**140**	**152**	**164**	**176**	**209**	**17,4**	**0,00**			**12/04/07**
91	Usdi Rusli	7.000.000	12/02/04	24	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	3.496.000,00	385.000,00	3.881.000,00	12/02/06
92	Risnawati	4.000.000	12/02/04	18	bln	17	160	172	184	196	213	17,7	3.777.000,00	320.000,00	4.097.000,00	12/08/05
93	Jonly	5.000.000	12/02/04	18	bln	18	160	172	184	196	214	17,8	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	12/08/05
94	Fajri, SH	7.500.000	12/02/04	24	bln	20	154	166	178	190	210	17,5	6.248.000,00	712.500,00	6.960.500,00	12/02/06
95	Sudirman	4.000.000	12/03/04	18	bln	16	159	171	183	195	211	17,6	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	12/09/05
96	Edir Asnadi, SH	4.000.000	12/02/04	18	bln	15	160	172	184	196	211	17,6	3.331.000,00	280.000,00	3.611.000,00	12/08/05
97	Suardi	7.000.000	12/02/04	24	bln	23	154	166	178	190	213	17,7	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	12/02/06
98	Ali Indra, SS	4.000.000	21/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	21/08/06
99	Firdaus,Bsc	5.000.000	21/02/05	18	bln	18	148	160	172	184	202	16,8	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	21/08/06
100	Yuli Reni	2.000.000	21/02/05	12	bln	11	154	166	178	190	201	16,7	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	21/02/06

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
101	Darnelis	1.500.000	21/02/05	12	bln	5	154	166	178	190	195	16,3	625.000,00	30.000,00	655.000,00	21/02/06
102	Asni	1.500.000	21/02/05	12	bln	4	154	166	178	190	194	16,2	500.000,00	22.500,00	522.500,00	21/02/06
103	M. Ridwan	4.000.000	22/02/05	18	bln	12	148	160	172	184	196	16,3	2.662.000,00	220.000,00	2.882.000,00	22/08/06
104	Dedi Jamal	4.000.000	22/02/05	18	bln	17	148	160	172	184	201	16,7	3.777.000,00	320.000,00	4.097.000,00	22/08/06
105	Juliani	1.000.000	22/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	888.000,00	75.000,00	963.000,00	22/08/06
106	Julia	3.000.000	22/02/05	12	bln	10	154	166	178	190	200	16,7	2.500.000,00	135.000,00	2.635.000,00	22/02/06
107	Erik Alvan	4.000.000	05/07/05	24	bln	-	137	149	161	173	173	14,4	0,00	300.000,00	300.000,00	05/07/07
108	Khaidir	4.000.000	22/02/05	18	bln	13	148	160	172	184	197	16,4	2.885.000,00	240.000,00	3.125.000,00	22/08/06
109	Yessi Raswati	5.000.000	22/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	22/08/06
110	Alfitra Nuzia	1.500.000	22/02/05	18	bln	18	148	160	172	184	202	16,8	1.500.000,00	127.500,00	1.627.500,00	22/08/06
111	Eti Ronita	1.500.000	22/02/05	12	bln	11	154	166	178	190	201	16,8	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	22/02/06
112	Lidarni	3.000.000	22/02/05	12	bln	3	154	166	178	190	193	16,1	750.000,00	30.000,00	780.000,00	22/02/06
113	Marni	5.000.000	22/02/05	18	bln	14	148	160	172	184	198	16,5	3.838.000,00	325.000,00	4.163.000,00	22/08/06
114	Adrian	3.000.000	22/02/05	12	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	22/02/06
115	Ely Darni	3.000.000	22/02/05	18	bln	15	148	160	172	184	199	16,6	2.490.000,00	210.000,00	2.700.000,00	22/08/06
116	Zainal	4.000.000	22/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	22/08/06
117	Rosli Achmad	2.000.000	22/02/05	12	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	22/02/06
118	Hasan Basri	2.000.000	17/05/05	12	bln	12	151	163	175	187	199	16,6	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	17/05/06
119	Zainal / Zainuddin	4.000.000	05/11/05	24	bln	24	133	145	157	169	193	16,1	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	05/11/07
120	Nasrudin Nasir	3.000.000	05/10/05	12	bln	5	146	158	170	182	187	15,6	1.250.000,00	60.000,00	1.310.000,00	05/10/06
121	Zainuddin L	1.500.000	05/12/05	12	bln	11	144	156	168	180	191	15,9	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	05/12/06
122	Syafril Broyon	3.000.000	05/11/05	18	bln	18	139	151	163	175	193	16,1	3.000.000,00	255.000,00	3.255.000,00	05/05/07
123	Darmayanti	9.000.000	05/04/05	36	bln	35	128	140	152	164	199	16,6	8.750.000,00	1.530.000,00	10.280.000,00	05/04/08
124	Hendri	3.000.000	05/11/05	12	bln	6	145	157	169	181	187	15,6	1.500.000,00	75.000,00	1.575.000,00	05/11/06
125	Nasrun Basri	2.000.000	05/10/05	12	bln	11	146	158	170	182	193	16,1	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	05/10/06
126	Afrizal	3.000.000	05/11/05	12	bln	12	145	157	169	181	193	16,1	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	05/11/06
127	Rudi Hermansyah	7.500.000	05/12/05	24	bln	8	132	144	156	168	176	14,7	2.500.000,00	262.500,00	2.762.500,00	05/12/07
128	**Ir. Harwance Novan (LUNAS)**	4.000.000	09/01/05	24	bln	-	143	155	167	179	179	14,9	0,00	0,00	0,00	09/01/07
129	Novit	4.000.000	09/05/05	24	bln	24	139	151	163	175	199	16,6	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	09/05/07
130	Itromi Saputra	3.000.000	13/09/05	24	bln	18	135	147	159	171	189	15,8	2.250.000,00	255.000,00	2.505.000,00	13/09/07
131	Anisah Mahfud	5.000.000	09/06/05	24	bln	15	138	150	162	174	189	15,7	3.119.000,00	350.000,00	3.469.000,00	09/06/07
132	Herman Harun	5.000.000	09/01/05	36	bln	36	131	143	155	167	203	16,9	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	09/01/08
133	Zuherman	4.000.000	09/06/05	24	bln	23	138	150	162	174	197	16,4	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	09/06/07
134	Nursyamsi	2.000.000	09/09/05	18	bln	16	141	153	165	177	193	16,1	1.776.000,00	150.000,00	1.926.000,00	09/03/07
135	Febbi Hendry	5.000.000	09/07/05	36	bln	33	125	137	149	161	194	16,2	4.583.000,00	800.000,00	5.383.000,00	09/07/08
136	Erlina	2.000.000	27/09/05	18	bln	17	141	153	165	177	194	16,2	1.888.000,00	160.000,00	2.048.000,00	27/03/07
137	Sesmita	4.000.000	17/01/06	18	bln	15	137	149	161	173	188	15,7	3.331.000,00	280.000,00	3.611.000,00	17/07/07
138	Rahmani	4.000.000	19/01/06	18	bln	16	137	149	161	173	189	15,7	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	19/07/07
139	Marjohan	4.000.000	20/01/06	24	bln	22	131	143	155	167	189	15,7	3.666.000,00	420.000,00	4.086.000,00	20/01/08
140	Irwan	3.500.000	20/01/06	12	bln	12	143	155	167	179	191	15,9	3.500.000,00	192.500,00	3.692.500,00	20/01/07
141	Masril	4.000.000	23/01/06	18	bln	13	137	149	161	173	186	15,5	2.885.000,00	240.000,00	3.125.000,00	23/07/07

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2025			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
142	Zainul Hakim	4.000.000	23/01/06	24	bln	5	131	143	155	167	172	14,3	827.000,00	80.000,00	907.000,00	23/01/08
143	Sukri Harmia	4.000.000	24/01/06	24	bln	24	131	143	155	167	191	15,9	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	24/01/08
144	Yulius Syarif	7.000.000	02/02/06	36	bln	26	118	130	142	154	180	15,0	5.050.000,00	875.000,00	5.925.000,00	02/02/09
145	Nazril	5.000.000	25/01/06	24	bln	23	131	143	155	167	190	15,8	4.791.500,00	550.000,00	5.341.500,00	25/01/08
146	Anis Hayati	5.000.000	17/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	17/07/08
147	Handi Monalisa, ST	4.000.000	17/07/06	18	bln	11	131	143	155	167	178	14,8	2.439.000,00	200.000,00	2.639.000,00	17/01/08
148	Ida Mutia Farida	2.000.000	19/07/06	12	bln	6	137	149	161	173	179	14,9	998.000,00	80.000,00	1.078.000,00	19/07/07
149	Nurmi	3.000.000	20/07/06	12	bln	9	137	149	161	173	182	15,2	2.250.000,00	120.000,00	2.370.000,00	20/07/07
150	Mahyouddin	5.000.000	20/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	20/07/08
151	M. Roem	3.000.000	21/07/06	24	bln	23	125	137	149	161	184	15,3	2.875.000,00	330.000,00	3.205.000,00	21/07/08
152	**Sawinar (LUNAS)**	3.000.000	24/07/06	24	bln	-	125	137	149	161	161	13,4	0,00	0,00	0,00	24/07/08
153	Adhinir	6.000.000	09/10/06	24	bln	23	122	134	146	158	181	15,1	5.750.000,00	660.000,00	6.410.000,00	09/10/08
154	Yusmatati	5.000.000	11/10/06	24	bln	23	122	134	146	158	181	15,1	4.791.500,00	550.000,00	5.341.500,00	11/10/08
155	HM. Kaulan	10.000.000	11/10/06	24	bln	20	122	134	146	158	178	14,8	8.332.000,00	950.000,00	9.282.000,00	11/10/08
156	Taufik	9.000.000	20/02/07	30	bln	28	112	124	136	148	176	14,7	8.400.000,00	1.215.000,00	9.615.000,00	20/08/09
157	Syamsuardi	12.000.000	21/02/07	36	bln	23	106	118	130	142	165	13,8	7.732.000,00	1.980.000,00	9.712.000,00	21/02/10
158	Gusmalizar	5.000.000	23/07/07	24	bln	23	113	125	137	149	172	14,3	4.791.000,00	550.000,00	5.341.000,00	23/07/09
159	Syamsir Alam	3.000.000	20/09/07	18	bln	16	117	129	141	153	169	14,1	2.666.000,00	225.000,00	2.891.000,00	20/03/09
160	Maizul Husni, SH	3.000.000	20/09/07	24	bln	24	111	123	135	147	171	14,3	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	20/09/09
161	Arni Susilawati	3.000.000	21/09/07	18	bln	13	117	129	141	153	166	13,8	2.165.000,00	180.000,00	2.345.000,00	21/03/09
162	Ali Bakri	4.000.000	07/04/08	24	bln	24	104	116	128	140	164	13,7	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	07/04/10
163	Edi Candra (Meninggal)	5.500.000	09/01/09	36	bln	-	83	95	107	119	119	9,9	0,00	807.000,00	807.000,00	09/01/12
164	Faisal Tamin	5.000.000	22/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/04/12
165	Riko Henra	5.000.000	22/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/04/12
166	Irwan Candra	5.000.000	22/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/04/12
167	A. Yamin	8.000.000	23/04/09	36	bln	36	80	92	104	116	152	12,7	8.000.000,00	1.400.000,00	9.400.000,00	23/04/12
168	Fitriwati	5.000.000	30/04/09	24	bln	18	92	104	116	128	146	12,2	3.714.000,00	425.000,00	4.139.000,00	30/04/11
169	Nurhaida	5.000.000	08/05/09	24	bln	22	91	103	115	127	149	12,4	4.582.000,00	525.000,00	5.107.000,00	08/05/11
170	Syafarudin	3.000.000	09/09/09	12	bln	12	99	111	123	135	147	12,3	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	09/09/10
	Total	**739.000.000**											**565.257.000,00**	**59.136.500,00**	**624.393.500,00**	

Lampiran 11

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Nilai (Rp)
1	2		3
1	**Mutasi Tahun 2003 s/d 2006**		7.100.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SPMU No. 156/PT/03 19 Desember 2003	100.000.000,00	
	SPMU No. 68/BT/2004 15 April 2004	2.000.000.000,00	
	SPMU No. 37/BT/PBY-2005 18 April 2005	3.000.000.000,00	
	SPMU No. 606/BT/PB-2006 13 Juli 2006	2.000.000.000,00	
2	**Mutasi Tahun 2007**		2.500.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 206/SP2D/LS/6/2007 12 Juni 2007	1.000.000.000,00	
	SP2D No. 2145/SP2D/LS/12/2007 28 Desember 2007	500.000.000,00	
	Penyertaan Modal Pembangunan Kantor Perwakilan Sumbar di Jakarta		
	SP2D No. 1350/SP2D/LS/12/2007 06 Desember 2007	1.000.000.000,00	
3	**Mutasi Tahun 2009**		2.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 2697/SP2D/LS/12/2009 23 Desember 2009	2.000.000,00	
4	**Mutasi Tahun 2010**		742.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 2043/SP2D/LS/12/2010 2 Desember 2010	742.000.000,00	
5	**Mutasi Tahun 2011**		1.479.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3424/SP2D/LS/12/2011 28 Desember 2011	1.479.000.000,00	
6	**Mutasi Tahun 2012**		5.008.899.000,00
	Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar		
	SP2D No. 2627/SP2D/LS/12/2012 7 Desember 2012	1.824.899.000,00	
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3276/SP2D/LS/12/2011 28 Desember 2012	3.184.000.000,00	
7	**Mutasi Tahun 2013**		5.582.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3456/SP2D/LS/12/2013 18 Desember 2013	5.582.000.000,00	
8	**Mutasi Tahun 2014**		5.111.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3272/SP2D/LS/12/2014 29 Desember 2014	5.111.000.000,00	
9	**Mutasi Tahun 2015**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		7.515.000.000,00
	SP2D No. 2012/SP2D/LS/10/2014 30 Oktober 2015	7.515.000.000,00	
10	**Mutasi Tahun 2017**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		11.183.000.000,00
	SP2D No. 2323/SP2D/LS/11/2017 tanggal 24 November 2017	11.183.000.000,00	
11	**Mutasi Tahun 2018**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		1.800.000.000,00
	SP2D No. 2867/SP2D/LS/12/2018 tanggal 06 Desember 21018	1.800.000.000,00	
12	**Mutasi Tahun 2020**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		8.650.000.000,00
	SP2D No. 0063/SP2D/LS/02/2020 tanggal 11 Februari 2020	8.650.000.000,00	
13	**Mutasi Tahun 2022**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat		2.500.000.000,00
	SP2D No. 6443/SP2D/LS/11/2022 tanggal 22 November 2022	2.500.000.000,00	
14	**Mutasi Tahun 2024**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat		1.000.000.000,00
	SP2D Pembiayaan No.13.77/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/11/2024 tanggal 06 November 2024	1.000.000.000,00	
15	**Mutasi Tahun 2024**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat		2.936.000.000,00
	SP2D Pembiayaan No.13.77/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/10/2025	2.936.000.000,00	
	Tanggal 1 Oktober 2025		
	Jumlah Penyertaan Modal		**63.108.899.000,00**

Jenis Penyertaan Modal	Nilai	Lembar Saham
a. Penyertaan Modal Bank Nagari	**60.284.000.000,00**	60.284,00
B. Penyertaan Modal Balairun	2.824.899.000,00	1.694,94
		1.129.959,60
Catatan : Penyertaan Modal disajikan sebesar nilai pembayaran oleh Pemerintah Kota Pariaman.		

Investasi Jangka Panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2025	Saldo 31 Desember 2025
			Penghapusan (-)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.632.720.250,00		3.632.720.250,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	630.315.200,00		630.315.200,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	2.885.848.999,00		2.885.848.999,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	594.034.000,00		594.034.000,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	349.629.250,00		349.629.250,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	105.600.000,00		105.600.000,00
7	SMP 1 PARIAMAN	5.000.000,00		5.000.000,00
8	SMP 2 PARIAMAN	80.000.000,00		80.000.000,00
9	SMP 3 PARIAMAN	133.800.000,00		133.800.000,00
10	SMP 4 PARIAMAN	16.550.000,00		16.550.000,00
11	SMP 5 PARIAMAN	21.775.000,00		21.775.000,00
12	SMP 6 PARIAMAN	20.770.750,00		20.770.750,00
13	SMP 7 PARIAMAN	256.800.000,00		256.800.000,00
14	SMP 8 PARIAMAN	299.852.400,00		299.852.400,00
15	SMP 9 PARIAMAN	150.000.000,00		150.000.000,00
16	DINAS KESEHATAN	507.869.000,00		507.869.000,00
17	PUSKESMAS NARAS	200.834.410,00		200.834.410,00
18	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	9.740.000,00		9.740.000,00
19	PUSKESMAS PAUH	39.000.000,00		39.000.000,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	-		-
21	PUKESMAS MARUNGGI	199.746.000,00		199.746.000,00
22	PUKESMAS AIR SANTOK	961.499.000,00		961.499.000,00
23	PUKESMAS SIKAPAK	1.435.000,00		1.435.000,00
24	RSUD KOTA PARIAMAN	2.644.660.500,00		2.644.660.500,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	54.115.984.025,65	270.000.000,00	53.845.984.025,65
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	8.064.152.183,00		8.064.152.183,00
27	KANTOR KESBANGPOL	22.560.000,00		22.560.000,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	97.170.000,00		97.170.000,00
29	UPT.TERMINAL	1.551.938.000,00		1.551.938.000,00
30	DINAS PERINDAGKOP	1.825.724.000,00		1.825.724.000,00
31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.392.253.852,60		5.392.253.852,60
32	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	4.808.764.000,00		4.808.764.000,00
33	UPT. BPP KOTA PARIAMAN	403.860.000,00		403.860.000,00
34	UPT. PUSKESWAN & IB	637.200.000,00		637.200.000,00
35	UPT. BBI	1.237.320.000,00		1.237.320.000,00
36	BAGIAN PEMERINTAHAN	5.765.627.119,00		5.765.627.119,00
37	SEKRETARIAT DPRD	1.304.825.500,00		1.304.825.500,00
38	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	1.275.450.000,00		1.275.450.000,00
39	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	75.776.000,00		75.776.000,00
40	KELURAHAN PASIR	11.016.000,00		11.016.000,00
41	KELURAHAN PONDOK 2	32.800.000,00		32.800.000,00
42	KELURAHAN JALAN BARU	2.740.000,00		2.740.000,00
43	KELURAHAN JATI HILIR	4.864.000,00		4.864.000,00
44	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	9.828.000,00		9.828.000,00
45	KELURAHAN TARATAK	15.696.000,00		15.696.000,00
46	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	972.765.000,00		972.765.000,00
47	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	1.207.350.000,00		1.207.350.000,00
48	INSPEKTORAT	707.000.000,00		707.000.000,00
49	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	308.678.000,00		308.678.000,00
JUMLAH		**103.598.821.439,25**	**270.000.000,00**	**103.328.821.439,25**

Lampiran 13

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD	Saldo Awal	Koreksi +	Mutasi Tahun 2025											Saldo 31 Desember 2025
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi +	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	
				Belanja Modal	HIBAH/BTT/ BANTUAN	Reklas salah rekening	Kapitalisasi Blj brg	Antar SKPD	antar SKPD	Tidak dikapitalisasi	Reklas salah rekening	ke Aset lain-lain	Penghapusan	Aset tak berwujud	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.992.913.361,00		2.830.947.145,00					2.124.394.169,00	542.759.976,00			75.127.000,00		2.081.579.361,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	5.254.304.779,44				13.200.000,00	6.800.000,00	426.434.850,00		21.052.000,00		35.790.000,00	32.654.800,00		5.611.242.829,44
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	5.167.375.677,16				14.261.800,00		175.192.700,00		14.356.800,00			2.500.000,00		5.339.973.377,16
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	3.907.382.696,34				7.400.000,00		371.443.820,00		18.438.000,00	5.000.000,00		36.600.000,00		4.226.188.516,34
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	3.036.460.649,16				12.925.000,00		336.797.000,00		13.155.000,00					3.373.027.649,16
6	TK PARIAMAN SELATAN	106.591.000,00													106.591.000,00
7	TK 01 KEC.TIMUR	43.887.000,00						9.956.700,00							53.843.700,00
8	TK 01 KEC. UTARA	31.413.000,00						9.956.700,00							41.369.700,00
9	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	1.090.760.107,00						191.176.469,00							1.281.936.576,00
10	SMP 1 PARIAMAN	1.634.824.270,00						57.003.200,00		7.280.000,00					1.684.547.470,00
11	SMP 2 PARIAMAN	1.490.681.451,00						68.125.000,00		37.950.000,00					1.520.856.451,00
12	SMP 3 PARIAMAN	2.080.283.469,00						115.800.000,00		35.200.000,00					2.160.883.469,00
13	SMP 4 PARIAMAN	1.815.959.933,00						63.884.730,00		19.340.000,00			1.100.000,00		1.859.404.663,00
14	SMP 5 PARIAMAN	878.713.717,42						32.837.000,00		11.525.000,00					900.025.717,42
15	SMP 6 PARIAMAN	1.678.834.442,00						77.433.400,00		11.100.000,00					1.745.167.842,00
16	SMP 7 PARIAMAN	1.434.850.707,00						102.350.900,00		30.400.000,00					1.506.801.607,00
17	SMP 8 PARIAMAN	1.206.623.573,00						33.310.900,00		3.660.000,00					1.236.274.473,00
18	SMP 9 PARIAMAN	1.514.300.330,00				427.000,00		52.690.800,00		29.227.000,00					1.538.191.130,00
19	DINAS KESEHATAN	4.665.450.398,73		35.289.000,00						3.667.000,00					4.697.072.398,73
20	PUSKESMAS NARAS	4.447.660.237,34		192.278.089,00											4.639.938.326,34
21	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	3.653.963.969,00	9.000.000,00	161.420.000,00									66.496.000,00		3.757.887.969,00
22	PUSKESMAS PARIAMAN	5.148.005.072,00		231.869.885,00						2.357.160,00					5.377.517.797,00
23	PUSKESMAS KURAI TAJI	4.994.672.836,30		101.699.750,00						439.000,00					5.095.933.586,30
24	PUSKESMAS MARUNGGI	4.035.968.195,33		97.024.509,00						970.000,00					4.132.022.704,33
25	PUSKESMAS air santok	4.253.569.973,00		164.725.470,00						1.468.720,00			272.121.967,00		4.144.704.756,00
26	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	4.755.916.150,00		110.900.000,00						16.857.000,00					4.849.959.150,00
27	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	31.163.713.324,76		804.780.604,00						106.826.766,00			34.980.000,00		31.826.687.162,76
28	UPT. INSTALASI FARMASI	1.572.031.519,00													1.572.031.519,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	3.813.934.477,00		45.000.000,00				289.036.363,00						45.000.000,00	4.102.970.840,00
30	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	3.769.880.178,95													3.769.880.178,95
31	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	7.872.364.433,00		95.231.500,00				13.300.000,00		43.930.000,00					7.936.965.933,00
32	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	529.966.400,00		65.130.168,00											595.096.568,00
33	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	5.831.804.172,00													5.831.804.172,00
34	KANTOR KESBANG POL	566.399.610,00		1.670.000,00						920.000,00			9.500.000,00		557.649.610,00
35	KANTOR SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	12.299.598.414,00	38.100.000,00	68.813.250,00									10.526.750,00		12.395.984.914,00

Lampiran 13

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD	Saldo Awal	Koreksi +	Mutasi Tahun 2025											Saldo 31 Desember 2025
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi +	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	
				Belanja Modal	HIBAH/BTT/ BANTUAN	Reklas salah rekening	Kapitalisasi Blj brg	Antar SKPD	antar SKPD	Tidak dikapitalisasi	Reklas salah rekening	ke Aset lain-lain	Penghapusan	Aset tak berwujud	
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.321.166.376,00		56.354.110,00	338.151.999,00			66.200.000							5.781.872.485,00
37	DINAS SOSIAL	1.304.168.325,00		34.400.000,00						1.600.000,00					1.336.968.325,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	4.568.685.813,00		28.150.000,00											4.596.835.813,00
39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.523.572.324,00		30.000.000,00											2.553.572.324,00
40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.549.813.187,00		58.920.960,00					7.990.000,00				124.213.750,00		1.476.530.397,00
41	DINAS PERHUBUNGAN	14.363.234.685,00	490.367.040,00	1.089.267.170,00					289.036.363,00	393.117.170,00			2.368.898.894,00		12.891.816.468,00
42	UPT. PARKIR	884.666.000,00		295.430.385,00						196.967.280,00					983.129.105,00
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.000.316.479,00		19.049.000,00											5.019.365.479,00
44	DINAS PERINDAGKOP	1.659.480.175,00		59.850.000,00									11.950.000,00		1.707.380.175,00
45	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	745.756.988,00													745.756.988,00
46	UPT. METROLOGI LEGAL	1.313.515.605,00													1.313.515.605,00
47	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.743.919.153,00		97.042.000,00									57.031.036,00		1.783.930.117,00
48	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.398.733.182,00	10.000.000,00	47.800.000,00				7.990.000,00		3.300.000,00			19.712.985,00		2.441.510.197,00
49	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	7.683.893.248,00		8.078.300,00					2.000.000,00						7.689.971.548,00
50	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.864.731.720,00											37.000.000,00		1.827.731.720,00
51	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	1.171.653.635,00		20.000.000,00				2.000.000,00							1.193.653.635,00
52	UPT. BALAI BENIH IKAN	441.354.050,00		4.800.000,00											446.154.050,00
53	BAGIAN PEMERINTAHAN	586.458.034,00													586.458.034,00
54	BAGIAN HUKUM DAN HAM	858.577.908,00													858.577.908,00
55	BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR	649.334.625,00		1.480.000,00											650.814.625,00
56	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	25.934.900.125,00		2.412.172.099,00			65.667.500,00			217.011.770,00					28.195.727.954,00
57	BAGIAN EKBANG	879.752.857,00													879.752.857,00
58	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	640.890.316,00		19.350.000,00											660.240.316,00
59	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	1.497.891.770,00	131.810.441,00	1.200.000,00	27.222.129,00		5.000.000,00			1.200.000,00					1.661.924.340,00
60	SEKRETARIAT DPRD	8.821.467.957,00		1.214.265.922,00									192.537.400,00		9.843.196.479,00
61	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	1.048.196.992,00		6.438.000,00											1.054.634.992,00
62	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.121.899.270,00													1.121.899.270,00
63	KELURAHAN PASIR	345.134.686,00													345.134.686,00
64	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	315.043.436,00		8.800.000,00											323.843.436,00
65	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	447.632.479,00		9.325.000,00											456.957.479,00
66	KELURAHAN PONDOK 2	358.581.437,00													358.581.437,00
67	KELURAHAN UJUNG BATUNG	427.141.359,00		3.925.000,00											431.066.359,00
68	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	425.147.186,00													425.147.186,00
69	KELURAHAN JALAN BARU	336.007.280,00		20.849.000,00											356.856.280,00

Lampiran 13

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD	Saldo Awal	Koreksi +	Mutasi Tahun 2025											Saldo 31 Desember 2025
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi +	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	
				Belanja Modal	HIBAH/BTT/ BANTUAN	Reklas salah rekening	Kapitalisasi Blj brg	Antar SKPD	antar SKPD	Tidak dikapitalisasi	Reklas salah rekening	ke Aset lain-lain	Penghapusan	Aset tak berwujud	
70	KELURAHAN KARAN AUR	265.459.572,00		16.000.000,00											281.459.572,00
71	KELURAHAN LOHONG	263.616.286,00		200.000,00						200.000,00					263.616.286,00
72	KRLURAHAN JALAN KERETA API	335.364.989,00		4.500.000,00											339.864.989,00
73	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	438.645.684,00													438.645.684,00
74	KELURAHAN KP.JAWA 1	370.400.391,00		25.450.000,00			3.993.250,00						222.899.286,00		176.944.355,00
75	KELURAHAN JATI HILIR	290.726.786,00		5.500.000,00			10.000.000,00								306.226.786,00
76	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	218.322.934,00		14.000.000,00											232.322.934,00
77	KELURAHAN KP JAWA 2	305.999.479,00		19.050.000,00											325.049.479,00
78	KELURAHAN TARATAK	332.755.163,00													332.755.163,00
79	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	965.225.924,00													965.225.924,00
80	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	938.760.774,00		5.962.500,00											944.723.274,00
81	INSPEKTORAT	2.153.046.599,00		155.517.417,00											2.308.564.016,00
82	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.200.620.088,00		55.055.096,00			18.980.710,00						21.000.000,00		3.253.655.894,00
83	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	7.281.278.250,00		29.296.800,00			79.500.000,00		79.500.000,00				38.253.450,00		7.272.321.600,00
84	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.252.550.765,00													2.252.550.765,00
JUMLAH		**256.586.551.868,93**	**679.277.481,00**	**10.884.258.129,00**	**365.374.128,00**	**48.213.800,00**	**189.941.460,00**	**2.502.920.532,00**	**2.502.920.532,00**	**1.786.275.642,00**	**5.000.000,00**	**35.790.000,00**	**3.635.103.318,00**	**45.000.000,00**	**263.246.447.906,93**

Lampiran 14

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - GEDUNG BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi Tahun 2025						Saldo 31 Desember 2025
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	penghapusan	
			Koreksi (-)	Belanja Modal	antar SKPD	antar SKPD	Reklas salah rekening	tidak dikapitalisasi		
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	35.335.659.553,00		2.638.233.641,55	595.727.420,00	2.092.767.092,00				36.476.853.522,55
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	37.718.141.858,00	2,00		185.884.178,00					37.904.026.034,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	36.710.163.075,00			334.915.820,00					37.045.078.895,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	22.837.609.858,00			385.369.508,00		5.000.000,00			23.227.979.366,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	25.264.893.244,00			388.472.965,00					25.653.366.209,00
6	TK PARIAMAN SELATAN	414.642.195,00								414.642.195,00
	TK KEC. TIMUR	169.700.000,00			41.792.458,00					211.492.458,00
	TK KEC. UTARA	-								-
7	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	935.124.000,00								935.124.000,00
8	SMP 1 PARIAMAN	6.140.211.035,00								6.140.211.035,00
9	SMP 2 PARIAMAN	9.407.062.694,00			185.801.074,00					9.592.863.768,00
10	SMP 3 PARIAMAN	5.501.299.667,59								5.501.299.667,59
11	SMP 4 PARIAMAN	3.494.565.196,00			185.609.214,00					3.680.174.410,00
12	SMP 5 PARIAMAN	3.803.121.654,00								3.803.121.654,00
13	SMP 6 PARIAMAN	2.442.118.084,00								2.442.118.084,00
14	SMP 7 PARIAMAN	4.975.870.384,00								4.975.870.384,00
15	SMP 8 PARIAMAN	2.591.955.631,00			185.854.845,00					2.777.810.476,00
16	SMP 9 PARIAMAN	3.526.241.119,00			199.067.030,00					3.725.308.149,00
17	DINAS KESEHATAN	22.864.343.345,03		1.125.297.079,00		1.025.472.079,00				22.964.168.345,03
18	PUSKESMAS NARAS	5.859.613.971,00		20.800.000,00				20.800.000,00		5.859.613.971,00
19	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	4.742.164.527,00								4.742.164.527,00
20	PUSKESMAS PAUH	6.799.654.538,00							238.158.000,00	6.561.496.538,00
	PUSKESMAS KURAI TAJI	7.059.749.684,00		11.956.920,00		595.727.420,00		11.956.920,00		6.464.022.264,00
22	PUSKESMAS MARUNGGI	4.049.596.310,00			1.025.472.079,00				44.745.000,00	5.030.323.389,00
23	PUSKESMAS AIR SANTOK	7.264.444.292,00								7.264.444.292,00

Lampiran 14

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi Tahun 2025						Saldo 31 Desember 2025
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	penghapusan	
			Koreksi (-)	Belanja Modal	antar SKPD	antar SKPD	Reklas salah rekening	tidak dikapitalisasi		
24	PUKESMAS SIKAPAK BARAT	5.256.406.995,00								5.256.406.995,00
	RSUD KOTA PARIAMAN	39.244.785.365,00								39.244.785.365,00
26	UPT. INSTALASI FARMASI	1.835.261.000,00								1.835.261.000,00
27	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	11.975.510.999,82								11.975.510.999,82
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	24.228.233.203,00								24.228.233.203,00
29	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	1.259.127.000,00								1.259.127.000,00
30	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	881.091.605,00								881.091.605,00
31	SAT POL PP dan PEMADAM	49.982.015,12		438.786.084,00						488.768.099,12
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.286.736.165,00								8.286.736.165,00
33	DINAS SOSIAL	-								-
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	3.291.592.771,00								3.291.592.771,00
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	78.967.000,00								78.967.000,00
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.352.368.000,00			600.133.000,00	2.352.368.000,00			43.999.000,00	556.134.000,00
37	DINAS PERHUBUNGAN	2.955.848.800,00								2.955.848.800,00
38	UPT. PARKIR	1.614.569.120,00								1.614.569.120,00
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.000,00								29.798.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	9.778.244.469,00								9.778.244.469,00
40	DINAS PERINDAGKOP	2.786.677.525,00								2.786.677.525,00
41	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	518.975.000,00								518.975.000,00
42	UPT. METROLOGI LEGAL	997.276.030,00								997.276.030,00
43	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	375.508.000,00				375.508.000,00				-
44	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	66.728.417.694,62			2.352.368.000,00	224.625.000,00				68.856.160.694,62

Lampiran 14

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi Tahun 2025						Saldo 31 Desember 2025
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	penghapusan	
			Koreksi (-)	Belanja Modal	antar SKPD	antar SKPD	Reklas salah rekening	tidak dikapitalisasi		
45	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	4.863.580.910,00								4.863.580.910,00
	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	2.526.957.678,00								2.526.957.678,00
47	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	1.386.304.116,00								1.386.304.116,00
48	UPT. BALAI BENIH IKAN	7.620.165.193,00								7.620.165.193,00
49	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	47.849.736.083,80		49.620.000,00						47.899.356.083,80
51	SEKRETARIAT DPRD	13.637.654.059,00		213.601.375,00						13.851.255.434,00
52	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	4.157.773.335,86								4.157.773.335,86
53	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	2.962.701.500,00							95.383.500,00	2.867.318.000,00
54	KELURAHAN PASIR	69.958.000,00								69.958.000,00
55	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	394.525.000,00								394.525.000,00
56	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	-								-
57	KELURAHAN PONDOK 2	17.492.500,00								17.492.500,00
58	KELURAHAN UJUNG BATUNG	619.097.000,00								619.097.000,00
59	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	19.990.000,00								19.990.000,00
60	KELURAHAN JALAN BARU	731.313.500,00								731.313.500,00
62	KELURAHAN LOHONG	79.969.784,00								79.969.784,00
63	KRLURAHAN JALAN KERETA API	778.952.000,00								778.952.000,00
64	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	790.639.000,00								790.639.000,00
66	KELURAHAN JATI HILIR	88.315.500,00								88.315.500,00
67	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	432.230.000,00								432.230.000,00
68	KELURAHAN KP JAWA 2	119.975.000,00								119.975.000,00
70	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	3.022.743.000,00								3.022.743.000,00
71	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	3.314.356.452,00								3.314.356.452,00
72	INSPEKTORAT	3.161.685.136,00								3.161.685.136,00
73	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.205.242.787,00								3.205.242.787,00
74	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	6.924.273.735,00		211.786.148,51						7.136.059.883,51
	JUMLAH	**553.208.953.941,84**	**2,00**	**4.710.081.248,06**	**6.666.467.591,00**	**6.666.467.591,00**	**5.000.000,00**	**32.756.920,00**	**422.285.500,00**	**557.468.992.767,90**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AKIR AKUMULASI PENYUSUTAN 2025				TOTAL
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.651.473.565,00	21.121.625.833,00	7.900.000,00	0,00	22.780.999.398,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	4.696.251.817,44	21.826.778.520,00	7.000.000,00	0,00	26.530.030.337,44
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	4.688.166.564,44	20.795.378.185,00	35.611.650,00	0,00	25.519.156.399,44
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	3.359.631.931,34	13.632.535.025,00	4.000.000,00	0,00	16.996.166.956,34
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	2.857.835.693,16	14.557.884.773,00	12.600.000,00	0,00	17.428.320.466,16
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	1.090.830.901,00	246.887.349,00	6.000.000,00	0,00	1.343.718.250,00
7	TK PARIAMAN SELATAN	34.865.567,00	66.107.394,00	0,00	0,00	100.972.961,00
8	TK PARIAMAN TIMUR	34.036.995,00	26.336.218,00	0,00	0,00	60.373.213,00
9	TK PARIAMAN UTARA	24.421.620,00	0,00	0,00		24.421.620,00
10	SMP 1 PARIAMAN	1.579.023.128,00	3.379.027.317,00	34.999.910,00	0,00	4.993.050.355,00
11	SMP 2 PARIAMAN	1.414.083.033,00	4.803.258.163,00	2.500.000,00	0,00	6.219.841.196,00
12	SMP 3 PARIAMAN	1.955.174.478,00	3.026.048.853,00	0,00	0,00	4.981.223.331,00
13	SMP 4 PARIAMAN	1.746.727.294,00	2.159.276.571,00	38.145.000,00	0,00	3.944.148.865,00
14	SMP 5 PARIAMAN	843.091.417,42	2.636.343.766,00	0,00	0,00	3.479.435.183,42
15	SMP 6 PARIAMAN	1.537.424.870,00	1.438.366.969,00	0,00	0,00	2.975.791.839,00
16	SMP 7 PARIAMAN	1.409.006.870,00	4.007.203.609,00	4.000.000,00	0,00	5.420.210.479,00
17	SMP 8 PARIAMAN	1.163.819.713,00	1.178.843.672,00	13.000.000,00	0,00	2.355.663.385,00
18	SMP 9 PARIAMAN	1.467.199.515,00	1.893.013.369,00	22.750.000,00	0,00	3.382.962.884,00
19	DINAS KESEHATAN	3.610.159.521,14	4.714.868.643,00	240.564.619,00	0,00	8.565.592.783,14
20	PUSKESMAS NARAS	3.974.200.574,33	3.868.860.165,00	11.961.500,00	0,00	7.855.022.239,33
21	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	3.179.415.791,00	2.926.868.841,00	0,00	0,00	6.106.284.632,00
22	PUSKESMAS PARIAMAN	4.497.176.391,00	5.081.003.892,00	16.173.000,00	0,00	9.594.353.283,00
23	PUSKESMAS KURAI TAJI	4.563.776.379,30	2.641.910.076,00	87.353.000,00	0,00	7.293.039.455,30
24	PUSKESMAS MARUNGGI	3.556.612.360,34	2.227.408.625,00	10.918.880,00	0,00	5.794.939.865,34
25	PUSKESMAS AIR SANTOK	3.517.175.566,00	3.600.284.144,00	1.700.000,00	0,00	7.119.159.710,00
26	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	4.263.472.002,00	2.484.808.970,00	13.730.000,00	0,00	6.762.010.972,00
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	27.206.766.340,77	9.121.889.579,00	339.873.022,00	0,00	36.668.528.941,77
28	UPT. INSTALASI FARMASI	928.255.003,00	1.094.823.996,00	47.667.000,00	0,00	2.070.745.999,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	3.590.954.017,00	6.158.813.160,00	683.093.015.364,05	58.505.457.598,00	751.348.240.139,05
30	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	3.502.386.075,00	0,00	19.221.860.016,00		22.724.246.091,00
31	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.408.759.684,00	10.713.027.624,00	118.391.862.491,00	954.272.725,39	136.467.922.524,39
32	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	427.746.150,00	676.953.345,00	40.430.592.710,41	0,00	41.535.292.205,41
33	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	5.758.005.740,00	673.339.873,00	40.000.000,00	0,00	6.471.345.613,00
34	KANTOR KESBANG POL	552.493.854,00	0,00	5.375.000,00	0,00	557.868.854,00
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.162.510.201,00	16.776.828,00	675.000,00	0,00	12.179.962.029,00
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.196.385.028,00	3.414.919.123,00	200.931.510,00	0,00	8.812.235.661,00
37	DINAS SOSIAL	1.114.001.313,00	0,00	0,00	0,00	1.114.001.313,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	4.284.403.875,00	2.228.002.034,00	34.885.783,00	0,00	6.547.291.692,00
39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.371.007.071,00	37.459.229,00	0,00	0,00	2.408.466.300,00
40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.402.080.936,00	405.262.959,00	0,00	0,00	1.807.343.895,00
41	DINAS PERHUBUNGAN	11.129.298.689,00	1.532.678.739,00	3.368.697.000,00	0,00	16.030.674.428,00
42	UPT PERPAKIRAN	657.845.315,00	388.849.091,00	0,00	0,00	1.046.694.406,00
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.814.822.187,00	10.553.458,00	36.435.000,00	0,00	4.861.810.645,00
44	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.627.954.133,00	1.700.512.955,00	390.825.000,00	0,00	3.719.292.088,00
45	UPT. PENGELOLA PASAR	743.064.280,00	325.766.341,00	0,00	0,00	1.068.830.621,00
46	UPT .METREOLOGI LEGAL	1.249.973.703,00	349.701.944,00	0,00	0,00	1.599.675.647,00
47	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.616.407.004,00	0,00	5.664.500,00	0,00	1.622.071.504,00
48	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.319.130.123,00	25.459.900.649,00	2.054.178.248,80	0,00	29.833.209.020,80
49	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	7.578.692.059,00	3.164.178.723,00	812.027.383,00	0,00	11.554.898.165,00
50	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.825.678.636,00	1.540.851.092,00	7.173.000,00	0,00	3.373.702.728,00
51	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	849.751.894,00	759.949.665,00	63.733.958,00	0,00	1.673.435.517,00
52	UPT. BALAI BENIH IKAN	440.054.050,00	5.272.222.191,00	309.785.000,00	0,00	6.022.061.241,00
53	BAGIAN PEMERINTAHAN	586.458.034,00	0,00		0,00	586.458.034,00
54	BAGIAN HUKUM DAN HAM	757.124.063,00	0,00		0,00	757.124.063,00
55	BAGIAN ORGANISASI & APARATUR	537.527.958,00	0,00		0,00	537.527.958,00
56	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	23.270.682.791,00	25.674.090.014,00	1.217.144.676,16	0,00	50.161.917.481,16
57	BAGIAN EKBANG	793.086.190,00	0,00		0,00	793.086.190,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AKIR AKUMULASI PENYUSUTAN 2025				TOTAL
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
58	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	592.503.509,00	0,00		0,00	592.503.509,00
59	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1.335.606.532,00	1.248.824.904,00		0,00	2.584.431.436,00
60	SEKRETARIAT DPRD	7.161.395.764,25	8.014.255.708,00	207.186.013,00	0,00	15.382.837.485,25
61	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	962.317.680,00	2.597.968.668,00	57.534.500,00	0,00	3.617.820.848,00
62	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.040.961.770,00	1.662.470.473,00	700.751.264,00	0,00	3.404.183.507,00
63	KELURAHAN PASIR	337.879.477,00	69.958.000,00	0,00	0,00	407.837.477,00
64	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	315.243.436,00	277.811.354,00	0,00	0,00	593.054.790,00
65	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	394.864.251,00	0,00	0,00	0,00	394.864.251,00
66	KELURAHAN PONDOK 2	352.018.937,00	17.492.500,00	0,00	0,00	369.511.437,00
67	KELURAHAN UJUNG BATUNG	397.479.380,00	275.249.150,00	0,00	0,00	672.728.530,00
68	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	425.147.186,00	19.990.000,00	0,00	0,00	445.137.186,00
69	KELURAHAN JALAN BARU	311.360.322,00	253.928.515,00	0,00	0,00	565.288.837,00
70	KELURAHAN KARAN AUR	219.010.822,00	0,00	0,00	0,00	219.010.822,00
71	KELURAHAN LOHONG	249.737.328,00	46.418.636,00	0,00	0,00	296.155.964,00
72	KRLURAHAN JALAN KERETA API	303.258.219,00	336.318.033,00	0,00	0,00	639.576.252,00
73	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	411.277.393,00	319.549.929,00	0,00	0,00	730.827.322,00
74	KELURAHAN KP.JAWA 1	135.020.335,00	0,00	0,00	0,00	135.020.335,00
75	KELURAHAN JATI HILIR	261.392.859,00	88.315.500,00	0,00	0,00	349.708.359,00
76	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	208.889.600,00	217.915.958,00	0,00	0,00	426.805.558,00
77	KELURAHAN KP JAWA 2	286.815.104,00	82.683.333,00	0,00	0,00	369.498.437,00
78	KELURAHAN TARATAK	329.239.049,00	0,00	0,00	0,00	329.239.049,00
79	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	875.805.768,00	1.981.419.429,00	209.341.050,00	0,00	3.066.566.247,00
80	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	852.843.326,00	1.836.741.196,00	67.416.200,00	0,00	2.757.000.722,00
81	INSPEKTORAT	2.154.577.258,00	1.952.183.787,00	181.049.625,00	0,00	4.287.810.670,00
82	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.129.845.603,00	2.098.124.642,00	121.409.500,00	0,00	5.349.379.745,00
83	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	7.035.089.571,00	3.166.138.454,00	149.777.000,00	0,00	10.351.005.025,00
84	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.148.389.829,00	0,00	0,00	0,00	2.148.389.829,00
TOTAL		**230.646.330.262,93**	**271.625.209.723,00**	**872.337.774.373,42**	**59.459.730.323,39**	**1.434.069.044.682,74**

Lampiran 18a

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP MESIN
31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		RUSAK BERAT	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2025
		MESIN 31 DES 2024	KOREKSI(+)	KOREKSI(-)		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.626.379.357,00		2,00	1.626.379.355,00				54.155.870,00	46.065.340,00	75.127.000,00	1.651.473.565,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	4.370.481.946,44			4.370.481.946,44			35.790.000,00	196.746.075,00	197.468.596,00	32.654.800,00	4.696.251.817,44
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	4.369.188.712,44		26.011.800,00	4.343.176.912,44				176.229.540,00	171.260.112,00	2.500.000,00	4.688.166.564,44
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	3.046.422.078,34			3.046.422.078,34				174.591.890,00	175.217.963,00	36.600.000,00	3.359.631.931,34
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	2.719.973.843,16			2.719.973.843,16				65.508.462,00	72.353.388,00		2.857.835.693,16
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	1.061.794.868,00			1.061.794.868,00				12.177.061,00	16.858.972,00		1.090.830.901,00
	TK PARIAMAN SELATAN	21.415.817,00			21.415.817,00				6.724.875,00	6.724.875,00		34.865.567,00
	TK PARIAMAN TIMUR	22.857.814,00			22.857.814,00				5.485.876,00	5.693.305,00		34.036.995,00
	TK PARIAMAN UTARA	16.360.939,00			16.360.939,00				3.926.625,00	4.134.056,00		24.421.620,00
7	SMP 1 PARIAMAN	1.552.912.736,00			1.552.912.736,00				13.236.568,00	12.873.824,00		1.579.023.128,00
8	SMP 2 PARIAMAN	1.360.598.167,00			1.360.598.167,00				27.532.799,00	25.952.067,00		1.414.083.033,00
9	SMP 3 PARIAMAN	1.861.293.808,00			1.861.293.808,00				46.636.399,00	47.244.271,00		1.955.174.478,00
10	SMP 4 PARIAMAN	1.700.664.171,00			1.700.664.171,00				23.337.918,00	23.825.205,00	1.100.000,00	1.746.727.294,00
11	SMP 5 PARIAMAN	814.872.781,42			814.872.781,42				13.690.423,00	14.528.213,00		843.091.417,42
12	SMP 6 PARIAMAN	1.436.864.151,00			1.436.864.151,00				49.267.285,00	51.293.434,00		1.537.424.870,00
13	SMP 7 PARIAMAN	1.374.028.440,00			1.374.028.440,00				17.415.647,00	17.562.783,00		1.409.006.870,00
14	SMP 8 PARIAMAN	1.125.304.316,00			1.125.304.316,00				19.599.906,00	18.915.491,00		1.163.819.713,00
15	SMP 9 PARIAMAN	1.355.674.546,00			1.355.674.546,00				59.614.403,00	51.910.566,00		1.467.199.515,00
16	DINAS KESEHATAN	3.355.607.741,14	1,00		3.355.607.742,14				129.920.185,00	124.631.594,00		3.610.159.521,14
17	PUSKESMAS NARAS	3.771.561.080,33			3.771.561.080,33				98.230.489,00	104.409.005,00		3.974.200.574,33
18	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	3.001.748.217,00	9.000.000,00		3.010.748.217,00				111.089.178,00	124.074.396,00	66.496.000,00	3.179.415.791,00
19	PUSKESMAS PARIAMAN	4.227.614.671,00			4.227.614.671,00				135.644.832,00	133.916.888,00		4.497.176.391,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	4.311.000.516,30			4.311.000.516,30				126.279.096,00	126.496.767,00		4.563.776.379,30
21	PUSKESMAS MARUNGGI	3.258.353.818,34			3.258.353.818,34				146.601.855,00	151.656.687,00		3.556.612.360,34
22	PUSKESMAS AIR SANTOK	3.570.495.431,00			3.570.495.431,00				103.360.590,00	115.441.512,00	272.121.967,00	3.517.175.566,00
23	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	3.970.532.981,00			3.970.532.981,00				144.892.880,00	148.046.141,00		4.263.472.002,00
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	25.776.282.701,77			25.776.282.701,77				745.145.866,00	720.317.773,00	34.980.000,00	27.206.766.340,77
25	UPT. INSTALASI FARMASI	824.783.753,00			824.783.753,00				51.735.625,00	51.735.625,00		928.255.003,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	3.098.730.823,00			3.098.730.823,00	289.036.363,00			104.177.532,00	99.009.299,00		3.590.954.017,00
27	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	3.400.780.503,00			3.400.780.503,00				50.854.807,00	50.750.765,00		3.502.386.075,00
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.019.960.165,00			6.019.960.165,00				195.048.625,00	193.750.894,00		6.408.759.684,00
29	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	387.587.509,00			387.587.509,00				18.817.237,00	21.341.404,00		427.746.150,00
30	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	5.713.385.323,00			5.713.385.323,00				22.570.625,00	22.049.792,00		5.758.005.740,00
31	KANTOR KESBANG POL	555.878.991,00			555.878.991,00				3.257.952,00	2.856.911,00	9.500.000,00	552.493.854,00
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.010.136.232,00			12.010.136.232,00				74.200.065,00	88.700.654,00	10.526.750,00	12.162.510.201,00
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.135.138.912,00			5.135.138.912,00				28.966.488,00	32.279.628,00		5.196.385.028,00
34	DINAS SOSIAL	1.000.943.686,00			1.000.943.686,00				56.222.564,00	56.835.063,00		1.114.001.313,00
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	4.008.476.633,00			4.008.476.633,00				150.192.919,00	125.734.323,00		4.284.403.875,00
36	UPT. PENYULUH KB KEC. PARIAMAN UTARA	-			-							-

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		RUSAK BERAT	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2025
		MESIN 31 DES 2024	KOREKSI(+)	KOREKSI(-)		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.220.591.351,00			2.220.591.351,00				77.562.855,00	72.852.865,00		2.371.007.071,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.500.455.411,00			1.500.455.411,00		4.161.459,00		15.948.707,00	14.052.027,00	124.213.750,00	1.402.080.936,00
39	DINAS PERHUBUNGAN	12.600.328.370,00			12.600.328.370,00		289.036.363,00		99.820.250,00	228.889.376,00	1.510.702.944,00	11.129.298.689,00
40	UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	-			-							-
41	UPT. TERMINAL	-			-							-
42	UPT PERPAKIRAN	655.794.000,00			655.794.000,00				-	2.051.315,00		657.845.315,00
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.637.286.331,00			4.637.286.331,00				91.927.875,00	85.607.981,00		4.814.822.187,00
44	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.594.297.467,00			1.594.297.467,00				23.474.625,00	22.132.041,00	11.950.000,00	1.627.954.133,00
45	UPT. PENGELOLA PASAR	713.539.881,00			713.539.881,00				15.933.195,00	13.591.204,00		743.064.280,00
46	UPT .METREOLOGI LEGAL	1.179.835.996,00		1,00	1.179.835.995,00				35.106.094,00	35.031.614,00		1.249.973.703,00
47	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.634.485.922,00			1.634.485.922,00				15.377.480,00	20.814.326,00	54.270.724,00	1.616.407.004,00
48	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.243.266.804,00			2.243.266.804,00	4.161.459,00			50.425.440,00	40.989.405,00	19.712.985,00	2.319.130.123,00
49	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	7.533.614.761,00			7.533.614.761,00		250.000,00		22.985.074,00	22.342.224,00		7.578.692.059,00
50	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.861.775.136,00			1.861.775.136,00				451.750,00	451.750,00	37.000.000,00	1.825.678.636,00
51	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	695.672.916,00			695.672.916,00	250.000,00			76.706.156,00	77.122.822,00		849.751.894,00
52	UPT. BALAI BENIH IKAN	439.854.050,00			439.854.050,00				-	200.000,00		440.054.050,00
53	BAGIAN PEMERINTAHAN	586.458.034,00			586.458.034,00							586.458.034,00
54	BAGIAN HUKUM DAN HAM	718.796.833,00			718.796.833,00				19.250.927,00	19.076.303,00		757.124.063,00
55	BAGIAN ORGANISASI & APARATUR	489.315.251,00			489.315.251,00				24.528.749,00	23.683.958,00		537.527.958,00
56	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	22.042.144.157,00			22.042.144.157,00				618.367.501,00	610.171.133,00		23.270.682.791,00
57	BAGIAN EKBANG	759.086.190,00			759.086.190,00				17.000.000,00	17.000.000,00		793.086.190,00
58	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	575.273.259,00			575.273.259,00				8.413.563,00	8.816.687,00		592.503.509,00
59	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1.097.392.944,00			1.097.392.944,00				76.954.583,00	161.259.005,00		1.335.606.532,00
60	SEKRETARIAT DPRD	6.470.956.319,25			6.470.956.319,25				434.948.867,00	448.027.978,00	192.537.400,00	7.161.395.764,25
61	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	927.444.595,00			927.444.595,00				17.371.125,00	17.501.960,00		962.317.680,00
62	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.007.811.801,00			1.007.811.801,00				16.820.438,00	16.329.531,00		1.040.961.770,00
	KELURAHAN PASIR	314.935.727,00			314.935.727,00				14.881.250,00	8.062.500,00		337.879.477,00
	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	296.227.811,00			296.227.811,00				12.543.750,00	6.471.875,00		315.243.436,00
	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	365.021.284,00			365.021.284,00				15.557.024,00	14.285.943,00		394.864.251,00
	KELURAHAN PONDOK 2	328.461.636,00			328.461.636,00				13.909.375,00	9.647.926,00		352.018.937,00
	KELURAHAN UJUNG BATUNG	358.283.315,00			358.283.315,00				21.127.115,00	18.068.950,00		397.479.380,00
	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	398.926.356,00			398.926.356,00				15.732.499,00	10.488.331,00		425.147.186,00
	KELURAHAN JALAN BARU	288.079.155,00			288.079.155,00				13.068.750,00	10.212.417,00		311.360.322,00
	KELURAHAN KARAN AUR	200.914.551,00			200.914.551,00				9.837.875,00	8.258.396,00		219.010.822,00
	KELURAHAN LOHONG	237.957.327,00			237.957.327,00				6.190.000,00	5.590.001,00		249.737.328,00
	KRLURAHAN JALAN KERETA API	284.641.656,00			284.641.656,00				10.372.500,00	8.244.063,00		303.258.219,00
	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	374.138.907,00			374.138.907,00				20.876.750,00	16.261.736,00		411.277.393,00
	KELURAHAN KP.JAWA 1	304.081.706,00			304.081.706,00				7.383.490,00	7.397.139,00	183.842.000,00	135.020.335,00
	KELURAHAN JATI HILIR	240.361.067,00			240.361.067,00				10.763.812,00	10.267.980,00		261.392.859,00
	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	199.021.997,00			199.021.997,00				5.000.625,00	4.866.978,00		208.889.600,00
	KELURAHAN KP JAWA 2	263.048.935,00			263.048.935,00				12.425.524,00	11.340.645,00		286.815.104,00
	KELURAHAN TARATAK	315.354.695,00			315.354.695,00				8.210.059,00	5.674.295,00		329.239.049,00

Lampiran 18a

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		RUSAK BERAT	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2025
		MESIN 31 DES 2024	KOREKSI(+)	KOREKSI(-)		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
63	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	840.582.810,00			840.582.810,00				17.916.688,00	17.306.270,00		875.805.768,00
64	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	822.348.274,00			822.348.274,00				15.225.000,00	15.270.052,00		852.843.326,00
65	INSPEKTORAT	2.071.469.923,00			2.071.469.923,00				35.611.125,00	47.496.210,00		2.154.577.258,00
66	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.046.159.143,00			3.046.159.143,00				54.504.683,00	50.181.777,00	21.000.000,00	3.129.845.603,00
67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	6.789.513.955,00			6.789.513.955,00				154.316.331,00	129.512.735,00	38.253.450,00	7.035.089.571,00
68	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.048.664.165,00			2.048.664.165,00				51.473.375,00	48.252.289,00		2.148.389.829,00
TOTAL		221.809.760.353,93	9.000.001,00	26.011.803,00	221.792.748.551,93	293.447.822,00	293.447.822,00	35.790.000,00	5.749.389.886,00	5.875.071.595,00	2.735.089.770,00	230.646.330.262,93

Lampiran 18b

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP BANGUNAN

31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR 2025
		BANGUNAN 31 DES 2024		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (+)	MUTASI (+)	MUTASI (-)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.217.447.511,00	19.217.447.511,00	568.423.247,00		667.982.248,00	667.772.827,00		21.121.625.833,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	20.101.544.131,00	20.101.544.131,00			862.229.938,00	863.004.451,00		21.826.778.520,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	19.143.989.698,00	19.143.989.698,00			824.996.498,00	826.391.989,00		20.795.378.185,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	12.624.147.251,00	12.624.147.251,00			503.349.369,00	505.038.405,00		13.632.535.025,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	13.325.684.436,00	13.325.684.436,00			615.290.846,00	616.909.491,00		14.557.884.773,00
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	200.131.149,00	200.131.149,00			23.378.100,00	23.378.100,00		246.887.349,00
	TK Pariaman Selatan	45.375.284,00	45.375.284,00			10.366.055,00	10.366.055,00		66.107.394,00
	TK Pariaman timur	17.677.083,00	17.677.083,00			4.242.500,00	4.416.635,00		26.336.218,00
7	SMP 1 PARIAMAN	3.116.865.010,00	3.116.865.010,00			131.081.153,00	131.081.154,00		3.379.027.317,00
8	SMP 2 PARIAMAN	4.342.863.592,00	4.342.863.592,00			229.810.200,00	230.584.371,00		4.803.258.163,00
9	SMP 3 PARIAMAN	2.779.377.194,00	2.779.377.194,00			123.335.829,00	123.335.830,00		3.026.048.853,00
10	SMP 4 PARIAMAN	1.985.618.724,00	1.985.618.724,00			86.395.258,00	87.262.589,00		2.159.276.571,00
11	SMP 5 PARIAMAN	2.547.149.622,00	2.547.149.622,00			44.597.072,00	44.597.072,00		2.636.343.766,00
12	SMP 6 PARIAMAN	1.322.588.877,00	1.322.588.877,00			57.889.046,00	57.889.046,00		1.438.366.969,00
13	SMP 7 PARIAMAN	3.767.924.446,00	3.767.924.446,00			119.639.581,00	119.639.582,00		4.007.203.609,00
14	SMP 8 PARIAMAN	1.074.920.781,00	1.074.920.781,00			51.574.249,00	52.348.642,00		1.178.843.672,00
15	SMP 9 PARIAMAN	1.712.756.755,00	1.712.756.755,00			89.713.584,00	90.543.030,00		1.893.013.369,00
16	DINAS KESEHATAN	3.701.472.917,00	3.701.472.917,00			509.252.310,00	504.143.416,00		4.714.868.643,00
17	PUSKESMAS NARAS	3.576.781.659,00	3.576.781.659,00			146.039.254,00	146.039.252,00		3.868.860.165,00
18	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	2.719.935.343,00	2.719.935.343,00			108.798.466,00	98.135.032,00		2.926.868.841,00
19	PUSKESMAS PARIAMAN	5.089.236.493,00	5.089.236.493,00			88.184.548,00	88.184.550,00	184.601.699,00	5.081.003.892,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	2.893.838.210,00	2.893.838.210,00		568.423.247,00	158.247.557,00	158.247.556,00		2.641.910.076,00
21	PUSKESMAS MARUNGGI	2.064.751.985,00	2.064.751.985,00			90.471.388,00	94.744.190,00	22.558.938,00	2.227.408.625,00
22	PUSKESMAS AIR SANTOK	3.275.712.071,00	3.275.712.071,00			162.286.037,00	162.286.036,00		3.600.284.144,00
23	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	2.243.442.046,00	2.243.442.046,00			120.683.462,00	120.683.462,00		2.484.808.970,00
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	7.219.102.766,00	7.219.102.766,00			951.393.405,00	951.393.408,00		9.121.889.579,00
25	UPT. INSTALASI FARMASI	1.004.936.132,00	1.004.936.132,00			44.943.932,00	44.943.932,00		1.094.823.996,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	5.689.185.422,00	5.689.185.422,00			235.124.358,00	234.503.380,00		6.158.813.160,00
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.521.247.947,00	9.521.247.947,00			595.889.839,00	595.889.838,00		10.713.027.624,00
28	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	598.032.412,00	598.032.412,00			39.460.467,00	39.460.466,00		676.953.345,00
29	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	622.245.482,00	622.245.482,00			25.547.196,00	25.547.195,00		673.339.873,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR 2025
		BANGUNAN 31 DES 2024		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (+)	MUTASI (+)	MUTASI (-)	
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.621.177,00	10.621.177,00			1.249.550,00	4.906.101,00		16.776.828,00
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.065.161.540,00	3.065.161.540,00			174.878.792,00	174.878.791,00		3.414.919.123,00
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	2.073.606.915,00	2.073.606.915,00			77.197.559,00	77.197.560,00		2.228.002.034,00
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	33.510.879,00	33.510.879,00			1.974.175,00	1.974.175,00		37.459.229,00
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	715.511.933,00	715.511.933,00	414.328.238,00	715.511.933,00	7.658.750,00	7.658.750,00	24.382.779,00	405.262.959,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	1.384.886.309,00	1.384.886.309,00			73.896.222,00	73.896.208,00		1.532.678.739,00
36	UPT PERPAKIRAN	308.120.635,00	308.120.635,00			40.364.228,00	40.364.228,00		388.849.091,00
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.063.558,00	9.063.558,00			744.950,00	744.950,00		10.553.458,00
38	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.547.773.324,00	1.547.773.324,00			76.369.817,00	76.369.814,00		1.700.512.955,00
39	UPT. PENGELOLA PASAR	298.967.036,00	298.967.036,00			13.399.652,00	13.399.653,00		325.766.341,00
40	UPT .METREOLOGI LEGAL	299.838.143,00	299.838.143,00			24.931.901,00	24.931.900,00		349.701.944,00
41	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	323.542.300,00	323.542.300,00		323.542.300,00	-	-		-
42	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	21.681.415.524,00	21.681.415.524,00	715.511.933,00	90.785.938,00	1.519.522.438,00	1.634.236.692,00		25.459.900.649,00
43	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	2.909.443.536,00	2.909.443.536,00			127.992.355,00	126.742.832,00		3.164.178.723,00
44	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.418.676.877,00	1.418.676.877,00			61.087.107,00	61.087.108,00		1.540.851.092,00
45	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	675.956.529,00	675.956.529,00			41.996.568,00	41.996.568,00		759.949.665,00
46	UPT. BALAI BENIH IKAN	4.925.065.002,00	4.925.065.002,00			173.578.595,00	173.578.594,00		5.272.222.191,00
47	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	24.074.058.996,00	24.074.058.996,00			799.912.134,00	800.118.884,00		25.674.090.014,00
48	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	757.341.522,00	757.341.522,00			245.741.691,00	245.741.691,00		1.248.824.904,00
49	SEKRETARIAT DPRD	7.602.344.678,00	7.602.344.678,00			205.065.508,00	206.845.522,00		8.014.255.708,00
50	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	2.389.436.076,00	2.389.436.076,00			104.266.296,00	104.266.296,00		2.597.968.668,00
51	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.614.059.990,00	1.614.059.990,00			68.932.347,00	68.932.348,00	89.454.212,00	1.662.470.473,00
	KELURAHAN PASIR	69.958.000,00	69.958.000,00						69.958.000,00
	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	258.085.104,00	258.085.104,00			9.863.125,00	9.863.125,00		277.811.354,00
	KELURAHAN PONDOK 2	17.492.500,00	17.492.500,00						17.492.500,00
	KELURAHAN UJUNG BATUNG	246.394.785,00	246.394.785,00			14.427.183,00	14.427.182,00		275.249.150,00
	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	19.990.000,00	19.990.000,00						19.990.000,00
	KELURAHAN JALAN BARU	217.362.840,00	217.362.840,00			18.282.838,00	18.282.837,00		253.928.515,00
	KELURAHAN LOHONG	44.169.397,00	44.169.397,00			1.124.619,00	1.124.620,00		46.418.636,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR 2025
		BANGUNAN 31 DES 2024		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (+)	MUTASI (+)	MUTASI (-)	
	KRLURAHAN JALAN KERETA API	297.370.433,00	297.370.433,00			19.473.800,00	19.473.800,00		336.318.033,00
	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	280.017.979,00	280.017.979,00			19.765.975,00	19.765.975,00		319.549.929,00
	KELURAHAN JATI HILIR	77.954.801,00	77.954.801,00			5.651.290,00	4.709.409,00		88.315.500,00
	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	196.304.458,00	196.304.458,00			10.805.750,00	10.805.750,00		217.915.958,00
	KELURAHAN KP JAWA 2	80.183.333,00	80.183.333,00			1.250.000,00	1.250.000,00		82.683.333,00
52	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	1.837.953.158,00	1.837.953.158,00			71.733.135,00	71.733.136,00		1.981.419.429,00
53	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	1.679.543.936,00	1.679.543.936,00			78.598.630,00	78.598.630,00		1.836.741.196,00
54	INSPEKTORAT	1.812.755.297,00	1.812.755.297,00			69.714.245,00	69.714.245,00		1.952.183.787,00
55	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.948.677.209,00	1.948.677.209,00			74.723.717,00	74.723.716,00		2.098.124.642,00
56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	2.818.159.883,00	2.818.159.883,00			173.106.843,00	174.871.728,00		3.166.138.454,00
TOTAL		247.566.758.021,00	247.566.758.021,00	1.698.263.418,00	1.698.263.418,00	12.131.475.530,00	12.247.973.800,00	320.997.628,00	271.625.209.723,00

Lampiran 18c

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JARINGAN
31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	Koreksi		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2025
		1 JAN 2025	Tambah	Kurang		SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.900.000,00			7.900.000,00				7.900.000,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	7.000.000,00			7.000.000,00				7.000.000,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	35.611.650,00			35.611.650,00				35.611.650,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	4.000.000,00			4.000.000,00				4.000.000,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	12.600.000,00			12.600.000,00				12.600.000,00
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	6.000.000,00			6.000.000,00				6.000.000,00
	tk SELATAN	-							-
	TK KECAMATAN TIMUR	-							-
	TK KECAMATAN UTARA	-							-
7	SMP 1 PARIAMAN	34.999.910,00			34.999.910,00				34.999.910,00
8	SMP 2 PARIAMAN	2.500.000,00			2.500.000,00				2.500.000,00
9	SMP 3 PARIAMAN								
10	SMP 4 PARIAMAN	38.145.000,00			38.145.000,00				38.145.000,00
11	SMP 5 PARIAMAN								
12	SMP 6 PARIAMAN								
13	SMP 7 PARIAMAN	4.000.000,00			4.000.000,00				4.000.000,00
14	SMP 8 PARIAMAN	13.000.000,00			13.000.000,00				13.000.000,00
15	SMP 9 PARIAMAN	22.750.000,00			22.750.000,00				22.750.000,00
16	DINAS KESEHATAN	156.597.667,00			156.597.667,00	39.850.000,00	44.116.952,00		240.564.619,00
17	PUSKESMAS NARAS	11.961.500,00			11.961.500,00				11.961.500,00
	kpg baru padusunan								
18	PUSKESMAS PARIAMAN	16.173.000,00			16.173.000,00				16.173.000,00
19	PUSKESMAS KURAI TAJI	87.353.000,00			87.353.000,00				87.353.000,00
20	PUSKESMAS MARUNGGI	10.918.880,00			10.918.880,00				10.918.880,00
21	PUSKESMAS AIR SANTOK	1.700.000,00			1.700.000,00				1.700.000,00
22	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	13.730.000,00			13.730.000,00				13.730.000,00
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	339.873.022,00			339.873.022,00				339.873.022,00
24	UPT. INSTALASI FARMASI	47.667.000,00			47.667.000,00				47.667.000,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	655.836.428.321,23	390.629.164,00		656.227.057.485,23	11.345.055.889,00	15.520.901.989,82		683.093.015.364,05
26	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	18.701.404.216,00			18.701.404.216,00	273.700.606,00	246.755.194,00		19.221.860.016,00

Lampiran 18c

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	Koreksi		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2025
		1 JAN 2025	Tambah	Kurang		SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	116.022.077.300,00			116.022.077.300,00	1.202.077.528,00	1.167.707.663,00		118.391.862.491,00
28	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	39.344.938.292,41			39.344.938.292,41	542.410.684,00	543.243.734,00		40.430.592.710,41
29	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	40.000.000,00			40.000.000,00				40.000.000,00
30	KANTOR KESBANG POL	5.375.000,00			5.375.000,00				5.375.000,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	675.000,00			675.000,00				675.000,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.931.510,00			200.931.510,00				200.931.510,00
33	DINAS SOSIAL				-				
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	28.896.783,00			28.896.783,00	2.994.500,00	2.994.500,00		34.885.783,00
36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-			-				-
37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-			-				-
38	DINAS PERHUBUNGAN	3.368.697.000,00			3.368.697.000,00				3.368.697.000,00
39	UPT PERPAKIRAN	-			-				-
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.435.000,00			36.435.000,00				36.435.000,00
41	KOPERINDAG	390.825.000,00			390.825.000,00				390.825.000,00
42	UPT. PENGELOLA PASAR	-							-
43	UPT .METREOLOGI LEGAL	-							-
44	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5.664.500,00			5.664.500,00				5.664.500,00
45	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.013.478.167,80	682.250.000,00		2.695.728.167,80	21.777.800,00	18.922.281,00	682.250.000,00	2.054.178.248,80
46	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	1.492.974.883,00		682.250.000,00	810.724.883,00	651.250,00	651.250,00		812.027.383,00
47	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	7.173.000,00			7.173.000,00				7.173.000,00
48	POSKESWAN	61.496.458,00			61.496.458,00	1.118.750,00	1.118.750,00		63.733.958,00
49	BBI	309.785.000,00			309.785.000,00				309.785.000,00

Lampiran 18c

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	Koreksi		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2025
		1 JAN 2025	Tambah	Kurang		SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
50	Bagian UMUM	1.188.675.170,16			1.188.675.170,16	14.675.910,00	13.793.596,00		1.217.144.676,16
51	BAGIAN HUKUM DAN HAM								
52	SEKRETARIAT DPRD	207.186.013,00			207.186.013,00				207.186.013,00
53	Kec. PARIAMAN UTARA	57.534.500,00			57.534.500,00				57.534.500,00
54	KEC. PARIAMAN TENGAH	583.501.115,00			583.501.115,00	63.954.627,00	53.295.522,00		700.751.264,00
55	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	170.549.850,00			170.549.850,00	19.395.600,00	19.395.600,00		209.341.050,00
56	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	67.416.200,00			67.416.200,00				67.416.200,00
57	INSPEKTORAT	181.049.625,00			181.049.625,00				181.049.625,00
58	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	121.409.500,00			121.409.500,00				121.409.500,00
59	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	149.777.000,00			149.777.000,00				149.777.000,00
TOTAL		**841.468.835.033,60**	**1.072.879.164,00**	**682.250.000,00**	**841.859.464.197,60**	**13.527.663.144,00**	**17.632.897.031,82**	**682.250.000,00**	**872.337.774.373,42**

Lampiran 18d

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINYA
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TAHUN BERJALAN		SALDO AKIR 2025
		ATL 31 DES 2024		SEMESTER 1	SEMESTER II	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	57.723.025.921,00	57.723.025.921,00	426.780.915,00	355.650.762,00	58.505.457.598,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	954.272.725,39	954.272.725,39			954.272.725,39
TOTAL		58.677.298.646,39	58.677.298.646,39	426.780.915,00	355.650.762,00	59.459.730.323,39

Lampiran 19a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PROPERTY INVESTASI GEDUNG BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal	Saldo 31 DESEMBER 2025
DINAS PERINDAGKOP	42.152.809.950,88	42.152.809.950,88
UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	94.504.522.624,00	94.504.522.624,00
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	948.011.384,00	948.011.384,00
JUMLAH	**137.605.343.958,88**	**137.605.343.958,88**

Lampiran 19b

DATA AKUMULASI PROPERTY INVENSTASI GEDUNG BANGUNAN

31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR 2025
		PROPERTI INVESTASI 31 DES 2024		MUTASI (+)	MUTASI (+)	
1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.445.374.150,00	22.445.374.150,00	739.750.428,00	739.750.426,00	23.924.875.004,00
2	UPT. PENGELOLA PASAR	9.844.221.108,00	9.844.221.108,00	2.362.613.066,00	2.362.613.066,00	14.569.447.240,00
3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	51.350.617,00	51.350.617,00	23.700.285,00	23.700.285,00	98.751.187,00
TOTAL		32.340.945.875,00	32.340.945.875,00	3.126.063.779,00	3.126.063.777,00	38.593.073.431,00

Lampiran 20a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET LAIN- LAIN (TGR)
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	ASET LAINNYA TGR		Saldo Awal	Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Mutasi			Saldo Akhir per 31 Desember 2025
		Aset Tetap	Non Aset Tetap			Tambah	Kurang	Total	
1	2	3	4		5=3+4	11	12	13=11-12	17=5+13+16
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	208.747.013,01	208.747.013,01	208.747.013,01	388.401.164,42	86.579.995,42	301.821.169,00	510.568.182,01
2	DINAS KESEHATAN		258.900.271,00	258.900.271,00	258.900.271,00	542.808.511,79	45.506.391,00	497.302.120,79	756.202.391,79
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	858.879.930,32	440.746.762,95	1.299.626.693,27	1.299.626.693,27	400.262.462,70	341.210.127,07	59.052.335,63	1.358.679.028,90
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	-	35.587.287,00	35.587.287,00	35.587.287,00	128.819.563,00	8.170.380,00	120.649.183,00	156.236.470,00
5	SATUAN POL PP & DAMKAR		5.348.631,13	5.348.631,13	5.348.631,13	59.574.000,00	-	59.574.000,00	64.922.631,13
6	DP3AKB	-	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-	5.550.000,00	(5.550.000,00)	5.550.000,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MASYARAKAT DESA	-	20.724.555,00	20.724.555,00	20.724.555,00	23.355.000,00	3.937.000,00	19.418.000,00	40.142.555,00
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	9.301.480,00	5.050.000,00	4.251.480,00	22.651.480,00
9	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM	-	37.095.000,00	37.095.000,00	37.095.000,00	655.124.050,00	4.330.000,00	650.794.050,00	687.889.050,00
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		32.365.000,00	32.365.000,00	32.365.000,00	94.722.385,00	6.700.000,00	88.022.385,00	120.387.385,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	315.959.816,78	315.959.816,78	315.959.816,78	43.359.382,42	26.300.000,00	17.059.382,42	333.019.199,20
12	SEKRETARIAT DAERAH	-	313.474.075,00	313.474.075,00	313.474.075,00	69.370.801,00	159.257.605,00	(89.886.804,00)	223.587.271,00
13	SEKRETARIAT DPRD	-	153.846.402,00	153.846.402,00	153.846.402,00	82.001.633,00	49.760.250,00	32.241.383,00	186.087.785,00
14	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	-	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	25.236.433,00	-	25.236.433,00	27.536.433,00
15	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	-	31.285.600,00	31.285.600,00	31.285.600,00	5.262.000,00	8.400.000,00	(3.138.000,00)	28.147.600,00
16	INSPEKTORAT		143.454.300,00	143.454.300,00	143.454.300,00	-	42.573.800,00	(42.573.800,00)	100.880.500,00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-	1.198.494.378,00	1.198.494.378,00	1.198.494.378,00	37.937.102,00	240.787.244,00	(202.850.142,00)	995.644.236,00
18	KANTOR KESBANG POL	-	62.591.100,00	62.591.100,00	62.591.100,00	18.969.200,00	48.056.100,00	(29.086.900,00)	33.504.200,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		273.654.582,77	273.654.582,77	273.654.582,77	1.297.900,00	262.568.751,72	(261.270.851,72)	12.383.731,05
20	DINAS PERHUBUNGAN	-	33.345.307,00	33.345.307,00	33.345.307,00	107.204.410,00	19.905.381,00	87.299.029,00	120.644.336,00

Lampiran 20a

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	ASET LAINNYA TGR		Saldo Awal	Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Mutasi			Saldo Akhir per 31 Desember 2025
		Aset Tetap	Non Aset Tetap			Tambah	Kurang	Total	
1	2	3	4		5=3+4	11	12	13=11-12	17=5+13+16
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	2.664.048,00	2.664.048,00	2.664.048,00	-	-	-	2.664.048,00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	7.994.700,00	400.000,00	7.594.700,00	7.994.700,00
23	DINAS SOSIAL	-	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.986.296,00	2.435.000,00	6.551.296,00	8.831.296,00
24	BAPPEDA	-	178.768.001,00	178.768.001,00	178.768.001,00	7.810.550,00	99.515.501,00	(91.704.951,00)	87.063.050,00
25	BPBD	-	-	-	-	3.797.000,00	-	3.797.000,00	3.797.000,00
26	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	-	-	-	-	570.000,00	-	570.000,00	570.000,00
	TOTAL	**858.879.930,32**	**3.781.532.130,64**	**4.640.412.060,96**	**4.640.412.060,96**	**2.722.166.024,33**	**1.466.993.526,21**	**1.255.172.498,12**	**5.895.584.559,08**

Lampiran 20.b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
RINCIAN ASET LAIN- LAIN (TGR)
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**						
		LHP Khusus Bidang Pendidikan No. 20/S/XIV.1/02/2007 tgl 13 Februari 2007	Pengadaan sarana meubelair untuk SMKN 3 (CV. Mitra Buana) Mengganti meubelair rusak	3.400.000,00			3.400.000,00
			Pengadaan sarana meubelair untuk SMKN 3 (CV. Mitra Buana) Tidak sesuai spesifikasi teknis	12.060.000,00			12.060.000,00
			Pajak belum disetor	3.761.109,00			3.761.109,00
			Kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Jusra Anom	75.000,00			75.000,00
			Kelebihan pembayaran pembelajaran tambahan sore dan materi belajar tambahan	610.000,00			610.000,00
			Perjalanan dinas ganda	750.000,00			750.000,00
			Kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas pada SDN 17 Kp. Jawa	625.000,00			625.000,00
			Kelebihan pembayaran honor / transportasi pada SDN 17 Kp. Jawa	2.172.000,00			2.172.000,00
			Kelebihan pembayaran TA 2011	404.250,00			404.250,00
			Berdasarkan cek fisik di lapangan, tidak ditemui pembelian sejumlah barang	3.080.000,00			3.080.000,00
		700/89/LHP/Insp/2012 Tgl 31-Oct-2012 atas SMKN I	Terjadinya perjalanan dinas ganda	65.000,00			65.000,00
			Perjalanan dinas ganda an. Drs. Kanderi	150.000,00			150.000,00
		700/117/LHP/Insp/2013 tgl 3 Desember 2013	Biaya perjalanan dinas ganda pegawai SMAN 2 sebesar Rp385.000,00 (Elfisianti dkk.)	185.000,00			185.000,00
		700/26/LHP/Insp/2013 Tgl 04-Mar-2013 atas Disdikpora	Kelebihan pembayaran biaya transportasi dan honorarium	390.000,00			390.000,00
			Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda	1.170.000,00			1.170.000,00
			Pembayaran perjalanan dinas ganda, perjalanan dinas yang dilakukan pada hari libur dan pembayaran perjalanan dinas yang melebihi dari standar yang telah ditetapkan	1.105.000,00			1.105.000,00
		700/48/LHP/Insp/2014 ; tgl: 20-August-2014 SMK Negeri 1	Makan minum fiktif	270.000,00			270.000,00
			Makan minum ganda	7.263.000,00			7.263.000,00
		Kanderi	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan SMA 5 sebesar 15.343.846,82 oleh CV DBP	5.343.846,00			5.343.846,00
		LHP LKPD TA 2016 No. 30.C/LHP/XVIII.PDG/05 /2017 Tanggal 26 Mei 2017	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Beras dan Anak Sebesar Rp90,54 Juta kepada 53 PNS di Enam SKPD	3.636.582,58	152.117,42		3.788.700,00
		700/108/LHP/Insp-Prm/2017 27 Oktober 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	SPPD Ganda	150.000,00			150.000,00
			SPPD Ganda	50.000,00			50.000,00
		LHP LKPD TA 2016 No. 30.C/LHP/XVIII.PDG/05 /2017 Tanggal 26 Mei 2017	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Beras dan Anak Sebesar Rp90,54 Juta kepada 53 PNS di Enam SKPD	956.995,42		956.995,42	-
			Dana BOS SD Pariaman Tengah dan Utara	47.177.601,00			47.177.601,00
		LKPD 2011 (KEPATUHAN)	Pemerintah Kota Pariaman Mengenakan Retribusi IMB terhadap Gedung dan Bangunan Pemerintah	7.389.646,40			7.389.646,40
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Kekurangan Volume atas dua Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Sebesar Rp11.473.390,10 dan Enam Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dua OPD Sebesar Rp284.681.436,55	94.136.394,00		85.623.000,00	8.513.394,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Kekurangan volume pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atas 11 paket pekerjaan sebesar Rp21.166.717,71	12.370.588,61			12.370.588,61
		Kinerja 2005 dan 2006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp77.545.000,00 dan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp15.460.000,00		15.460.000,00		15.460.000,00
			Denda Keterlambatan atas Kegiatan yang Tidak Selesai Dikerjakan Belum Dikenakan Sebesar Rp40.111.850,00		22.440.800,00		22.440.800,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LKPD 2010	Biaya Langsung Non Personil Pengadaan Jasa Konsultansi, Perencanaan dan Pengawasan Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai Sebesar Rp146,37juta		95.911.623,00		95.911.623,00
		BELANJA 2010 - 2011	Penggunaan Kontrak Lumpsum Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Tidak Sesuai Ketentuan dan Rekanan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp96,20 juta		60.204.600,00		60.204.600,00
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional		5.130.000,00		5.130.000,00
			Mekanisme pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya memadai, serta terdapat kas tekor Dana BOS pada Tiga Sekolah sebesar Rp.57.533.488,-		22.054.314,00		22.054.314,00
		LKPD 2022 LHP No. 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023	Pembayaran Biaya Langsung Personel/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.120.064.018,61		39.505.028,00		39.505.028,00
		LKPD 2023	Kekurangan Volume atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Empat OPD		14.954.910,00		14.954.910,00
		700/228/LHP/Insp/2023	Kelebihan Pembayaran atas duplikasi surat tugas Tahun 2021 dan Tahun 2022 sejumlah Rp.19.017.500		200.000,00		200.000,00
			Pembayaran Uang harian kepada Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Melebihi Jumlah Frekwensi yang ditetapkan perbulan tahun 2021 sejumlah Rp.3.125.000 dan Tahun 2022 Rp.650.000		225.000,00		225.000,00
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Tidak Sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp113.854.010,00		5.461.000,00		5.461.000,00
			Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Delapan SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Senyatanya		2.849.600,00		2.849.600,00
			Kelebihan Pembayaran atas Tiga Paket Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		12.846.000,00		12.846.000,00
			Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		18.032.000,00		18.032.000,00
		700/221/LHP/INSP/2025 tanggal 31 Desember 2025	Kelebihan pembayaran honorarium belanja jasa tim ahli pembuat dokumen perencanaan tahun 2024 sejumlah Rp4.306.728,-		4.306.728,00		4.306.728,00
			Pembayaran belanja honorarium pejabat pengadaan barang/jasa honor tim tekinis pemeriksa dokumen perencanaan (PTP) sejumlah Rp2.565.000 tidak diatur dalam peraturan walikota'		2.565.000,00		2.565.000,00
		700/43/LHP/INSP/2021 8 Juli 2021	Pembayaran kegiatan sejumlah Rp. 3,600,000,- tidak berpedoman pada Juknis BOS Tahun 2020		3.600.000,00		3.600.000,00
		700/119/LHP/INSP/2021 21 September 2021	Terdapat bukti tidak lengkap terhadap realisasi dana BOS sebesar Rp. 2,886,000,-		2.886.000,00		2.886.000,00
			Terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2020 sebesar Rp. 3.600.000,-		3.600.000,00		3.600.000,00
		700/42/LHP/Insp/2021	Terdapat pengeluaran fiktif sebesar Rp. 22,869,800,-		8.219.800,00		8.219.800,00
			Kelebihan pekerjaan pengeboran air tanah pada pembanunan jamban Sekolah SD 03 Taluk Tahun 2020		1.750.000,00		1.750.000,00
		700/177/LHP/Insp/2024, tanggal 10 Desember 2024 atas SDN 03 Taluk	Pengeluaran Dana BOS Tahun 2021 sejumlah Rp.1.500.000,- tidak berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS		1.500.000,00		1.500.000,00
		700/162/LHP-AK/Insp-Prm/2022	Pembayaran ganda uang transportasi Tahun 2020 dan tahun 2021 sejumlah Rp. 240.000		150.000,00		150.000,00
		700/34/LHP/Insp-Prm/2022 Tanggal 14 April 2022	Terdapat ketekoran kas atas pengelolaan keuangan BOS tahun 2019 sejumlah Rp. 26.856.165,-		23.499.144,00		23.499.144,00
		700/235/LHP/Insp/2023	Pengeluaran dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS		1.800.000,00		1.800.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		700/84/LHP/Insp/2024, tanggal 15 Juli 2024	Pembayaran transprtasi tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp.454.000		50.000,00		50.000,00
		700/187/LHP/Insp/2024, tanggal 16 Desember 2024	Honor pengelola BOS Tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.22.237.500,-		9.547.500,00		9.547.500,00
			Pembayaran transportasi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar Rp.1.050.000,-		1.050.000,00		1.050.000,00
		700/62/LHP/Insp/2025 tanggal 22 Juli 2025	Pembayaran uang transportasi tahun 2022/2024 yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp8.950.000,-		8.450.000,00		8.450.000,00
Jumlah				**208.747.013,01**	**388.401.164,42**	**86.579.995,42**	**510.568.182,01**
2	**Dinas Kesehatan**						
		LHP No. 700/90/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 30 Desember 2011 atas Dinkes	Pajak pembayaran honor dan belanja belum setor	1.321.000,00	195,00	0,00	1.321.195,00
		LHP LKPD TA 2012 No. 08/LHP/XVIII.PDG/05/2013 tgl 20 Mei 2013	Pengadaan Alat Medis/Kesehatan/Laboratorium (DAK) pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp733.338.100,00 dan Diantaranya tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp39.488.000,00	39.488.000,00			39.488.000,00
		700/133/Insp-Prm/X-2016 tanggal 5 Oktober 2016 Pada Dinkes	Pemeriksaan Khusus Kehilangan Uang Kas Dinas Kesehatan Kota Pariaman Sebesar Rp98.907.200,00	90.664.933,00			90.664.933,00
		LHP LKPD TA 2014 No. 07.C/LHP/XVIII.PDG/05/2015 tanggal Mei 2015 Dinkes	Terdapat Realisasi Belanja Pegawai yang Dibayarkan kepada 4 PNS yang Tidak Aktif Bekerja sebesar Rp161.626.222,00	30.685.600,00		7.800.000,00	22.885.600,00
			Pembayaran tiket melebihi satuan harga	6.838.600,00		6.838.600,00	-
		700/22/LHP/Insp-PRM/2019 tanggal 10 April 2019 Dinas Kesehatan	Terdapat Kelebihan Pembayaran honor narasumber pada kegiatan pendampingan akreditasi puskesmas	7.905.000,00			7.905.000,00
		700/243/LHP/Insp/2023 Dinas Kesehatan	Perjalanan Dinas yang tidak dapat diyakini kebenarannya	7.975.000,00		1.825.000,00	6.150.000,00
			Kelebihan Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan	1.860.000,00		1.060.000,00	800.000,00
			Kelebihan Pembayaran belanja keg. Peningkatan Mutu pelayanan fasilitas kes Th.2021	19.175.000,00		9.975.000,00	9.200.000,00
			Kelebihan pembayaran paket data keg. Covid-19	800.000,00			800.000,00
		700/164/LHP/Insp/2015 tgl 16-December-2015	Pelaksanaan pekerjaan rehab poskesdes Simp.Apar dengan nomor kontrak:21/RHB-Poskesdes/S.Apar/Dinkes-2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh CV.Mitra Bersama mengalami keterlambatan selama 13 hari kalender	1.287.000,00			1.287.000,00
			Ditemukan kekurangan fisik pekerjaan lanjutan ruang rawat puskesmas Kp.Baru Padusunan senilai Rp.972.341,- oleh CV.Putra Kembar dan hasil pekerjaan belum dimanfaatkan	972.000,00			972.000,00
			Ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan belanja modal penataan halaman/lahan/lapangan dan area parkir puskesmas kuraitaji senilai Rp.8.398.000,-	7.801.000,00			7.801.000,00
			Keterlanjuran pembayaran paket pekerjaan rehabilitasi poskesdes dan pustu	1.277.105,00		1.277.105,00	-
			Kemahalan harga pembelian lemari arsip Tahun 2009 Rp5.885.000,00, kekurangan pekerjaan pembangunan Poskesdes Tahun 2009 Rp18.551186,00, dan kemahalan harga pengadaan barang Tahun 2012 Rp20.994.500,00	4.000.000,00		4.000.000,00	-
			Kemahalan harga pembelian lemari arsip th 2009 Rp5.885.000,00, kekurangan pekerjaan pembangunan Poskesdes th 2009 Rp18.551186,00, dan kemahalan harga pengadaan barang th 2012 Rp20.994.500,00	12.730.686,00		12.730.686,00	-
		700/118/LHP/Insp/2014 tgl 31 Desember 2014 DINKES	Belanja modal pekerjaan konstruksi pembangunan baru Poskesdes Batang Tajongkek	22.125.513,00			22.125.513,00
			Belanja modal konstruksi rehab Rumah Dinas Tenaga Medis dan Paramedis Puskesmas Marunggi	1.343.834,00			1.343.834,00
		700/242/LHP/Insp/2021 31 Desember 2021	Perjalanan dinas ganda Tahun 2019	200.000,00			200.000,00
			SPPD melebihi ketentuan tahun 2019	450.000,00			450.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LKPD 2012	Penyelesaian Tiga Pekerjaan Pembangunan sebesar Rp1.510.451.000,00 pada Puskesmas Kampung Baru Padusunan Dinas Kesehatan Kota Pariaman tidak Sesuai Ketentuan dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp75.522.550,00 telah Kadaluarsa		75.522.550,00		75.522.550,00
		LKPD 2024 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tanggal 22 Mei 2025	1) Belanja Gaji dan Tunjangan		1.080.000,00		1.080.000,00
			2) Pembayaran TPP Tidak Sesuai dengan Ketentuan		52.048.046,00		52.048.046,00
			3) Perjalanan Dinas		5.980.015,00		5.980.015,00
	UPT Instalasi Farmasi	700/94/LHP/Insp/2024, tanggal 26 Juli 2024	Tranportasi akomodasi distribusi obat dan perbekalan kesehatan th.2022 dan 2023 tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp.41.000.000		8.000.000,00		8.000.000,00
	Puskesmas Marunggi	LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Perjalanan Dinas yang Tidak Sesuai dengan Standar Harga Satuan Biaya, Biaya Senyatanya dan Kelengkapan Dokumen SPJ		6.989.615,00		6.989.615,00
	RSUD Sadikin	LKPD 2019 LHP No. 27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2020 (Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan)	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan RSUD dr. Sadikin TA 2019 Belum Dapat Dicairkan sebesar Rp641,08 Juta		320.433.735,00		320.433.735,00
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		14.452.663,00		14.452.663,00
			Kelebihan Pembayaran atas Empat Paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Kurang Ditetapkan		6.301.692,79		6.301.692,79
	Puskesmas Santok	700/112/LHP/Insp/2024, tanggal 30 Agustus 2024	Kelebihan pembayaran pada pekerjaan fisik Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Puskesmas Air Santok) sebesar Rp. 2.600.000,-.		2.600.000,00		2.600.000,00
	Puskesmas Kuraitaji	700/227/LHP/INSP/2025 tanggal '31 Desember 2025	Pembayaran belanja transportasi lokakarya bulanan tahun 2023 tidak efektif dan efisien sebesar Rp49.400.000,-		49.400.000,00		49.400.000,00
Jumlah				**258.900.271,00**	**542.808.511,79**	**45.506.391,00**	**756.202.391,79**
3	**DPUPR**						
		LHP LKPD TA 2009 No.126/S/XVIII.PDG/6/2010 tgl 7 Juli 2010	Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum CV Darma Swasta	13.000.000,00			13.000.000,00
		LHP LKPD TA 2010 No. 08/LHP/XVIII.PDG/06/2011 tgl 21 Juni 2011	Terdapat enam kontrak pengadaan barang dan jasa senilai Rp3.159,47jt tidak dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2010 dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp674,80jt belum dicairkan CV Glorius	420.000.000,00			420.000.000,00
		LHP No. 700/95/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 6 Feb 2012 atas Dinas PU	Kelebihan biaya perjalanan an. Ir. Aprimensyah & Subali	1.150.000,00			1.150.000,00
		LHP LKPD TA 2012 No. 08/LHP/XVIII.PDG/05/2013 tgl 20 Mei 2013	Terdapat Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan TA 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp420.454.919,32 dan Satu Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp15.343.846,82	40.267.664,00			40.267.664,00
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sembilan SKPD Diragukan Kebenarannya dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Maksimal Sebesar Rp28.860.950,99	525.800,00			525.800,00
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Terdapat Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp197.396.331,28	114.076.245,28		8.998,80	114.067.246,48
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Kekurangan Volume atas Kontrak Pembangunan Trotoar Simpang RSU-BLK Sebesar Rp2.539.200,00 dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp87.676.750,00 Belum Dicairkan dan Disetor ke Kas Daerah	85.215.950,00			85.215.950,00
		700/97/LHP/Insp/2014 ; tgl: 16-October-2014	Kekurangan fisik	4.963.000,00			4.963.000,00
		LHP LKPD TA 2015 No. 31.C/LHP/XVIII.PDG/06/2016 Tanggal 8 Juni 2016	Terdapat kekurangan penetapan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Pembangunan Pasar Nagari Kurai Taji sebesar Rp7.290.902,63, pekerjaan jaringan listrik lampu heighmast sebesar Rp8.100.920,00, dan pekerjaan pembangunan tambatan kapal sebesar Rp5.766.295,00	8.100.920,00			8.100.920,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		700/14/Insp-2019 tanggal 28 Februari 2019 Inspektorat	CV Genniyo Technik sudah menerima uang muka sebesar Rp375.305.100 dan termin I sebesar Rp203.290.263 = Rp 578.595.363 serta sudah mengembalikan uang muka sebesar Rp98.826.275 sehingga sisa uang muka yang harus dikembalikan rekanan CV Genniyo Technik kepada kas daerah sebesar Rp281.478.825	140.823.572,00		140.823.572,00	-
		39.C/LHP/XVII.PDG/05/2019 700/14/Insp-2019 tanggal 28 Februari 2019 Inspektorat	Terhadap denda yang belum dibayarkan oleh CV Genniyo Technik, PPK menagih denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp44.354.242,86	22.843.055,32			22.843.055,32
		27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2020	Kelebihan Pembayaran atas kekurangan Volume dan Kesalahan perhitungan pembesian atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp150,77 Juta	67.392.062,46			67.392.062,46
		35/LHP/XVIII.PDG/04/2022	Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Sebesar Rp11.469.753,63 dan Enam Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dua OPD Sebesar Rp284.716.510,06	16.682,00		16.682,00	-
		34/LHP/XVIII.PDG/05/2023	Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu pada 6 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPRP Sebesar Rp628.586.499,11. Nilai Rekomendasi Rp505.896.613,22 (Rp628.586.499,11 - Rp135.405.000,00)	109.664.105,15			109.664.105,15
			Pembayaran Biaya Langsung Personil/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada 7 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp120.064.018,61	20.389.600,00			20.389.600,00
		37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Kekurangan volume atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Empat OPD	36.179.106,06		16.668.444,27	19.510.661,79
		37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Honorarium	215.018.931,00		183.692.430,00	31.326.501,00
		BELANJA 2010	Pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Mangor Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Dalam Kontrak dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp60,52 juta		60.527.936,00		60.527.936,00
		BELANJA 2010	Tiga Kontrak Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp32,32 juta dan Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp134,20 juta serta Berpotensi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp62,33 juta		61.270.114,00		61.270.114,00
		LKPD 2011 (KEPATUHAN)	Pemerintah Kota Pariaman Mengenakan Retribusi IMB terhadap Gedung dan Bangunan Pemerintah Yang Bukan		3.554.283,14		3.554.283,14
		LHP Inspektorat No.700/95/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 6 Februari 2012	Pemborosan biaya perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama dengan tujuan dan maksud yang sama		144.500,00		144.500,00
		LHP Inspektorat No.700/95/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 6 Februari 2012	Pemborosan keuangan daerah senilai Rp.9.774.717,7,- atas pekerjaan lanjutan pengecoran tribun lapangan tenis Tahun 2010 dengan pelaksana CV.Siguntang, dengan rincian temuan sbb : 1) Panitia tidak cermat menyusun HPS, di DPA Rp.98.000.000,- panitia menyusun HPS senilai Rp.70.000.000,- sehingga anggaran tersisa Rp.28.000.000,- 2) Harga pekerjaan beton tidak sesuai dengan harga pasar dan analisas SNI, akibatnya terdapat kerugian daerah Rp.7.583.805,- 3) Analisa pekerjaan tidak tepat, pekerjaan bekisting tribun terjadi kerugian daerah Rp.2.190.912,-		1.396.341,00		1.396.341,00
		LHP Inspektorat No.700/77/Insp/2013 tgl 30 Agustus 2013	Rekayasa berita acara kemajuan pekerjaan pembangunan gerbang batas kota sejumlah Rp.40.385.335,-		1.024.653,00		1.024.653,00
		LHP Inspektorat No.700/77/Insp/2013 tgl 30 Agustus 2013	Terdapat pembayaran IMB sebesar 1% dari kontrak Rp.1.398.384.816,88 = Rp.13.983.848,17 pada pekerjaan pembangunan gerbang batas kota dan gedung promosi tidak sesuai dengan ketentuan		6.137.286,00		6.137.286,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LKPD 2014 (SPI)	Jaminan Pelaksanaan atas Empat Pekerjaan yang Telah Diputus Kontrak Belum Diterima Pemerintah Kota Pariaman Minimal Sebesar Rp759.705.300,00		6.670.063,00		6.670.063,00
		700/178/LHP/Insp-2015 tgl 31 Desember 2015	Belum ditagihnya kelebihan pembayaran pekerjaan plesteran kepada Cv. Fajar Raya senilai Rp. 14,928,000,-		14.928.000,00		14.928.000,00
		700/178/LHP/Insp-2015 tgl 31 Desember 2015	Kelebihan pembayaran senilai Rp. 13,151,000 pada pekerjaan swakelola rehab gedung komplek perkantoran karan aur		4.383.574,00		4.383.574,00
		LKPD TH 2017 (Kepatuhan)	Pekerjaan Pembangunan Trotoar Simpang Empat Pasar Pariaman – Simpang Kampung Kaliang Syeh M. Jamil Tidak Layak Dibayarkan Sebesar Rp76.491.355,56		76.491.355,56		76.491.355,56
		LKPD 2019 LHP No. 27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2020 (Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan)	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Kesalahan Perhitungan Pembesian atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp197,88 Juta		12.000.000,00		12.000.000,00
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		35.034.357,00		**35.034.357,00**
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Kekurangan Volume pada sembilan Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Serta Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan lingkungan Hidup		116.700.000,00		**116.700.000,00**
	Jumlah			**1.299.626.693,27**	**400.262.462,70**	**341.210.127,07**	**1.358.679.028,90**
4	**Perkim-LH**						
		LHP No.700/55/LHP/Bawas-Prm/XII/2006 Tgl. 28 Desember 2006 atas Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja	Pajak yang belum disetor	853.407,00			853.407,00
				17.876.000,00			17.876.000,00
		LHP No. 700/27/LHP/Insp-Prm/VIII/2008 tgl 19 Agt 2008 atas Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja	Pengembalian honorarium panitia pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa	850.000,00			850.000,00
			Pengeluaran fiktif atas biaya dokumentasi	962.500,00			962.500,00
			Biaya makan yang dilakukan pada bulan ramadhan	375.000,00			375.000,00
		34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023	Pembayaran Biaya Langsung Personil/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada 7 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp120.064.018,61	7.500.000,00		1.000.000,00	6.500.000,00
				600.000,00		600.000,00	-
				600.000,00		600.000,00	-
				600.000,00		600.000,00	-
		/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Realisasi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Tim sebesar Rp6.900.000,00	135.000,00		135.000,00	-
				3.000.000,00		3.000.000,00	-
			Jumlah Pemberian Honorsrium melebihi batas jumlah Tim Maksimal yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	-
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.253.880,00	835.380,00		835.380,00	-
		LKPD 2021 LHP No.	Kelebihan Pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab		1.425.000		1.425.000,00
					1.497.700,00		1.497.700,00
		LKPD 2022 LHP No. 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023	Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belum Memadai		11.299.000,00		11.299.000,00
		LKPD 2024LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Pengelolaan Retribusi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tidak Sesuai dengan Ketentuan		41.573.600,00		41.573.600,00
					27.571.000,00		27.571.000,00
			Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Delapan SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Senyatanya		2.000.000,00		2.000.000,00
					270.000,00		270.000,00
					1.586.000,00		1.586.000,00
					2.040.000,00		2.040.000,00
					2.040.000,00		2.040.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
					2.040.000,00		2.040.000,00
					2.040.000,00		2.040.000,00
					2.040.000,00		2.040.000,00
					2.040.000,00		2.040.000,00
					2.040.000,00		2.040.000,00
					2.040.000,00		2.040.000,00
					6.800.000,00		6.800.000,00
			Kekurangan Volume pada sembilan Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Serta Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		7.000.000,00		7.000.000,00
			Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		917.800,00		917.800,00
					7.717.963,00		7.717.963,00
					480.000,00		480.000,00
		700/210/LHR/Insp/2025 tanggal 17 Desember 2025	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah tahun 2023 dan 2024 melebihi jumlah hari yang ditetapkan sebesar Rp1.025.000		400.000,00		400.000,00
			Pembayaran biaya taxi perjalanan dinas tahun 2023 sejumlah Rp1.344.000 melebihi ketentuan tarif maksimal yang telah ditetapkan		1.334.000,00		1.334.000,00
			Terdapat pembayaran perjalanan dinas pada hari libur nasional atau cuti bersama tahun 2023 sejumlah Rp800.000		250.000,00		250.000,00
					200.000,00		200.000,00
			Belanja kegiatan dilaksanakan pada waktu bersamaan		177.500,00		177.500,00
Jumlah				**35.587.287,00**	**128.819.563,00**	**8.170.380,00**	**156.236.470,00**
5	**Kantor Satpol-PP**						
		LHP No. 700/88/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 4 Jan 2012 atas Kantor Satpol PP	Pembayaran kegiatan fiktif bulan Juni 2011	395.000,00			395.000,00
			Kelebihan pembayaran sewa gedung	1.650.000,00			1.650.000,00
			Pembayaran makan minum ganda	360.000,00			360.000,00
			Kelebihan pembayaran biaya operasional bulan Agustus 2011	485.000,00			485.000,00
			Kelebihan pembayaran PTT	10.000,00			10.000,00
		700/48/LHP/Insp/2013 Tgl 04-Jun-2013	Kegiatan fiktif pada kegiatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan penegakan Perda TA 2013 pada Kantor Satpol PP yang dilaksanakan pada tanggal 2 dan 4 Januari 2013, dimana pada hari itu anak sekolah masih libur tahun baru, sejumlah Rp.2.245.000.-	155.000,00			155.000,00
			Pembayaran ganda terhadap kegiatan-kegiatan di Kantor Sat Pol PP sejumlah Rp 1.315.000,- an: 1. Arisman Rp. 65.000,- 2. Sarjawan, SH Rp. 40.000,- sehingga PPTK harus menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 1.315.000,-.	40.000,00			40.000,00
			Kekurangan volume dan harga satuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harga pasar pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pembuatan sekat ruangan) pada Satpol PP sebesar Rp 2.253.631,13,-	2.253.631,13			2.253.631,13
		LHP Inspektorat No.700/86/LHP/Insp-Prm/XII/2010 tgl 31 Desember 2010	Perjalanan dinas ganda Tahun 2010		100.000,00		100.000,00
		700/152/LHP/Insp/2020, 23 Oktober 2020	Perjalanan Dinas Ganda Th anggaran 2018 & 2019		225.000,00		225.000,00
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Kelebihan Pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang Belum Berdasarkan Pagu Anggaran Dikelola Masing-Masing Sebesar Rp1.030.615.000,00		6.885.000,00		6.885.000,00
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Tidak Sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp113.854.010,00		3.724.000,00		3.724.000,00
			Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Delapan SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Senyatanya		19.275.000,00		19.275.000,00
			Pembayaran Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		800.000,00		800.000,00
			Perjalanan Dinas yang Tidak Sesuai dengan Standar Harga Satuan Biaya, Biaya Senyatanya dan Kelengkapan Dokumen SPJ		4.100.000,00		4.100.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		700/188/LHP/Insp/2025 tanggal 20 November 2025	Pembayaran biaya jasa komunikasi sebesar Rp13.800.000		13.800.000,00		13.800.000,00
			Belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2023 pada Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sejumlah Rp.20.045.000,- tidak sesuai dengan kondisi senyatanya		10.665.000,00		10.665.000,00
	Jumlah			**5.348.631,13**	**59.574.000,00**	**0,00**	**64.922.631,13**
6	**DP3AKB**						
		700/16/LHP/Insp/2024 tanggal 25 maret 2024	pemborosan biaya makan minum monev Stunting Tahun 2023	11.100.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00
	Jumlah			**11.100.000,00**	**0,00**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**
7	**DPMD**						
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional	3.937.000,00		3.937.000,00	-
		LHP Inspektorat No.700/39/LHP/Insp-Prm/VII/2009 tgl 7 Juli 2009	Perjalanan dinas ganda	400.000,00			400.000,00
			Perjalanan dinas ganda	100.000,00			100.000,00
			Setoran PBN I (Pajak makan minum Tahun 2008)	506.100,00			506.100,00
		LHP Inspektorat No.700/84/LHP/Insp/2013 tgl 25 September 2013	Makan minum fiktif kegiatan pelantikan pengurus RT dan BPD	11.800.000,00			11.800.000,00
			Pajak makan minum belum setor	726.000,00			726.000,00
			Perjalanan dinas fiktif, ganda dan hari libur	475.000,00			475.000,00
			Pajak belum setor	700.455,00			700.455,00
		700/229/LHP/Insp/2023	Kelebihan pembayaran perencanaan pada keg. Rehabilitasi Paving Block Hal Kantor sejumlah Rp.2.080.000 dengan Pelaksana CV. Nidianra Jaya Konsultan	2.080.000,00	0,00		2.080.000,00
		LKPD TH 2009 (SPI)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Sebesar Rp47.557.500,00 Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah		23.355.000,00		23.355.000,00
	Jumlah			**20.724.555,00**	**23.355.000,00**	**3.937.000,00**	**40.142.555,00**
8	**Dinas Komunikasi dan Informatika**						
		LHP: 700/46/LHP/Insp/2019	Perjalanan Dinas tidak diyakini kebenarannya		150.000,00		150.000,00
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional		255.000,00		255.000,00
		700/171/LHP/Insp/2024, tanggal 29 November 2024	Belanja Cetak Baliho Tahun 2022 sejumlah Rp1.050.000 tidak dapat diyakini kebenarannya		1.050.000,00		1.050.000,00
		LKPD 2024 LHP No.39.B/LHP/XVII.PDG/05/2025, tanggal 22 Mei 2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi seharusnya		7.846.480,00		7.846.480,00
		700/182/LHP/Insp/2021 Tgl 10 November 2021 atas Dinas Komunikasi dan Informasi	Pengeluaran belanja penggantian biaya pengiriman majalah tabuik tahun 2019 dan 2020 fiktif	17.850.000,00		4.500.000,00	13.350.000,00
			Perjalanan daerah tidak sesuai ketentuan	550.000,00		550.000,00	-
	Jumlah			**18.400.000,00**	**9.301.480,00**	**5.050.000,00**	**22.651.480,00**
9	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**						
	UPT. Pasar Pariaman	LHP No. 700/46/ LHP/Bawas-Prm/XI/2007 tgl 2 Okt 2007 atas UPTD Pasar Pariaman	Penerimaan kas daerah kota pariaman dari kegiatan operasional pasar serikat B Pariaman belum disetorkan	32.420.000,00	34.710.000,00		67.130.000,00
			Pendapatan yang belum diterima bendaharawan atas sewa pasar lama sejak bulan Mei 2006 s/d Agustus 2006	3.005.000,00		3.000.000,00	5.000,00
		LHP No. / LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak	340.000,00			340.000,00
			Sesuai Standar Harga Regional	1.330.000,00		1.330.000,00	-
		LKPD TH 2016 (SPI) No LHP: 30.B/LHP/XVIII.PDG/05/2017	Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Belum Sesuai Peraturan Daerah dan Potensi Kehilangan Pendapatan Daerah Sebesar Rp188,68 Juta		130.500.000,00		130.500.000,00
		LKPD 2020 LHP No. 53.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 (Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan)	Pengelolaan Pendapatan Retribusi Kekayaan Daerah serta Retribusi Grosir dan Pertokoan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Belum Optimal		207.733.337,00		207.733.337,00
		LKPD 2022 LHP No. 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023	Pembayaran Biaya Langsung Personel/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.120.064.018,61		4.500.000,00		4.500.000,00
		LKPD 2023 LHP Nomor: 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Pengelolaan Retribusi Grosir dan Pertokoan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tidak Sesuai Ketentuan		276.780.713,00		276.780.713,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		700/135/LHP/Insp/2024, tanggal 25 November 2024	Pembayaran honorarium pengelola keuangan tahun 2021 dan 2022 tidak sesuai dengan ketentuan.		475.000,00		475.000,00
			Perjalanan dinas tahun 2021 dan 2023 tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp.2.450.000		225.000,00		225.000,00
			Belanja perjalanan dinas melebihi ketentuan tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp.4.150.000,-		200.000,00		200.000,00
Jumlah				**37.095.000,00**	**655.124.050,00**	**4.330.000,00**	**687.889.050,00**
10	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**						
		700/23/LHP/INSP/2019	Biaya perjalanan dinas ganda Tahun 2017 senilai Rp. 2.650.000	100.000,000	900.000,00		1.000.000,00
			Biaya perjalanan dinas ganda Tahun 2018 senilai Rp. 2.500.000	50.000,000	100.000,00		150.000,00
			Kelebihan pembayaran TA 2017 pada dinas Pariwisata sejumlah Rp. 7.927.274 (S = Rp.2.527.274)	1.000.000,000	1.997.385,00		2.997.385,00
		700/160/LHP-AK/Insp-prm/2020	SPPD ganda tahun 2019	200.000,000			200.000,00
			Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman sebesar Rp. 63.575.000,00 tidak sesuai aturan yang berlaku	2.675.000,000			2.675.000,00
				900.000,000			900.000,00
				12.050.000,000		6.700.000	5.350.000,00
				1.400.000,000			1.400.000,00
				2.800.000,000			2.800.000,00
		LHAK-239/Insp/2023 tgl. 12 Desember 2023 Dinas Pariwisata		8.850.000,000			8.850.000,00
		LKPD 2022 LHP No.34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023		2.340.000,000			2.340.000,00
		LKPD 2009	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas sebesar Rp.47.557.500 tidak didukung bukti yang lengkap dan sah		23.392.500,00		23.392.500,00
		LHP Inspektorat No.700/82/LHP/Insp/Prm/2012 tgl 21 September 2012	Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas luar daerah pada beberapa pegawai Tahun 2011		300.000,00		300.000,00
		No.700/47/LHP/Insp/2015 tgl 27-February-2015	Perjalanan dinas ganda		200.000,00		200.000,00
		No.700/147/LHP/Insp/2017 tgl 19 Desember 2017	Pembayaran sewa mobil senilai Rp. 4.000.000 pada kegiatan Triathlon tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.		4.000.000,00		4.000.000,00
		LKPD 2017 LHP No. 36.C/LHP/XVIII.PDG/05/2018 (Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan)	Kekurangan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Minimal Sebesar Rp41.750.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
		700/23/LHP/INSP/2019	Belum disetorkanya retribusi tiket penyebrangan kapal wisata, jualan dikawasan wisata, tempat rekreasi dan olahraga khusus, dan retribusi masuk pulau oleh petugas retribusi sejumlah Rp. 16.000.000		14.950.000,00		14.950.000,00
		700/160/LHP-AK/Insp-prm/2020	Input Kwitansi Ganda 2019		100.000,00		100.000,00
			SPPD ganda Wisata di Kubu Gadang Pd.Panjang		500.000,00		500.000,00
			kelebihan biaya Pengelaran Seni Budaya		450.000,00		450.000,00
			Retribusi belum disetorkan		3.235.000,00		3.235.000,00
		700/121/LHP/Insp/2021 29 September 2021	Belum setor PPh Pasal 22 tahun 2020 sejumlah Rp. 450.000,-.		225.000,00		225.000,00
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional		1.147.500,00		1.147.500,00
		700/239/LHA-AK/Insp/2023	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan Pelatihan Pengelola Usaha Homestay/pondok wisata sebesar Rp.225.000		225.000,00		225.000,00
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Terdapat Penerimaan Retribusi Wisata Pulau Angso Duo yang Belum Disetorkan Tenaga Pengelola Aset Destinasi Kawasan Wisata Pulau Angso Duo		3.000.000,00		3.000.000,00
Jumlah				**32.365.000,00**	**94.722.385,00**	**6.700.000,00**	**120.387.385,00**
11	**Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**						
		LHP No. 85/Bws-Keu/2007	Kekurangan volume Pembuatan jalan usaha tani tidak sesuai kontrak (CV. TRD)	34.403.268,00			34.403.268,00
		LHP No. 86/Bws-Keu/2007	Pembayaran biaya perjalanan dinas	2.225.000,00			2.225.000,00
			Kekurangan pelaksanaan proyek	7.599.512,00			7.599.512,00
			Kelemahan dan kekurangan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan	16.449.850,00			16.449.850,00
			Pengadaan buku komik flu burung melebihi harga pasar	850.000,00			850.000,00
			Pengadaan Bibit Sapi tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak sebesar Rp182.850.000,00	179.350.000,00	28.570.000,00		207.920.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Kelebihan Pembayaran dan Kekurangan volume fisik pekerjaan jalan kampung di Pulau Angso sebesar Rp. 10.170.635,20	9.170.635,20			9.170.635,20
		LHP BPK No. 57/S/XVIII.PDG/07 /2008 tgl 11 Juli 2008	Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Fasilitas pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Pariaman yang tidak selesai, Uang jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Total Akseleri Kontruksi belum dicairkan oleh KPA dan PPTK (LHP BPK No. 57/S/XVIII.PDG/07/2008 tgl 11 Juli 2008)	20.565.517,58	14.789.382,42		35.354.900,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Kekurangan volume atas belanja barang untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat pada dua OPD	6.638.554,00			6.638.554,00
				8.612.860,00		2.000.000	6.612.860,00
				6.794.620,00		1.000.000	5.794.620,00
		LKPD 2022 LHP No. 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023	Pembayaran Biaya Langsung Personel/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp120.064.018,61	7.800.000,00		7.800.000	-
				3.100.000,00		3.100.000	-
				3.100.000,00		3.100.000	-
				3.100.000,00		3.100.000	-
				3.100.000,00		3.100.000	-
				3.100.000,00		3.100.000	-
Jumlah				**315.959.816,78**	**43.359.382,42**	**26.300.000,00**	**333.019.199,20**
12	**Sekretariat Daerah**						
		LHP No. 131/S/XVIII.PDG/6/2009 tgl 26 Juni 2009	Pemberian bantuan biaya operasional Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp190.800.000,00 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan Daerah	115.500.000,00		91.250.000,00	24.250.000,00
			Pemberian biaya tamu secara tetap kepada Sekretaris Daerah yang dibebankan ke Akun Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp60.000.000 tidak memiliki dasar ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan Daerah	60.000.000,00			60.000.000,00
		LHP No. 84/Bws-Keu/2007 tgl 3 Okt 2007	Kelebihan pembayaran transportasi Peserta diklat Kepala Desa/Lurah	1.785.000,00			1.785.000,00
		LHP No. 84/Bws-Keu/2007 tgl 3 Okt 2007	Pembayaran honor panitia yang tidak sesuai dengan peruntukannya Bagian Sosial	13.664.870,00			13.664.870,00
			Pembayaran honor panitia yang tidak sesuai dengan peruntukannya Bagian Pemerintahan	5.420.500,00			5.420.500,00
		LHP No. 84/Bws-Keu/2007 tgl 3 Okt 2007	Pembayaran honor tim penyusun profil kerja sama daerah tidak sesuai ketentuan Wako.	2.295.000,00			2.295.000,00
			Pembayaran honor Pengguna anggaran Sekretariat Derah tahun 2006 tidak sesuai ketentuan	3.600.000,00			3.600.000,00
		LHP No. 700/89/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 29 Desember 2011 atas Setda	Perjalanan dinas ganda dan hari libur TA 2010 dan 2011 (Bag. Umum)	375.000,00			375.000,00
		700/114/LHP/Insp/2013 tgl 3 Desember 2013	Perjalanan dinas ganda pada bagian umum Setda Rp3.025.000,00 (Nal Afrizal dkk.)	1.300.000,00			1.300.000,00
		142914	Keterlanjuran pembayaran paket pekerjaan rehabilitasi poskesdes dan pustu	1.277.105,00		1.277.105,00	-
		142919	Pembayaran tiket melebihi satuan harga	6.838.600,00			6.838.600,00
		1049602	Kemahalan harga pembelian lemari arsip Tahun 2009 Rp5.885.000,00, kekurangan pekerjaan pembangunan Poskesdes Tahun 2009 Rp18.551186,00, dan kemahalan harga pengadaan barang Tahun 2012 Rp20.994.500,00	4.000.000,00		4.000.000,00	-
		1340989		500.000,00			500.000,00
		1340990		20.923.000,00		20.923.000,00	-
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 2 mei 2024	Kelebihan pembayaran Belanja Operasional Kepala Daerah dan Honor Pengelola Keuangan	20.400.000,00			20.400.000,00
			Melebihi batas honor	45.915.000,00		32.127.500,00	13.787.500,00
				9.680.000,00		9.680.000,00	-

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LKPD 2021 LHP:/S/XVIII.PDG/04/2022 20 Mei 2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional		4.590.000,00		4.590.000,00
		LKPD 2022 LHP:34/B/XVIII.PDG/05/2023 5 Mei 2023	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp555.959.500,00		4.672.000,00		4.672.000,00
		LKPD 2024 LHP:39.B/XVIII.PDG/05/2025 22 Mei 2025	Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Delapan SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Senyatanya		10.344.500,00		10.344.500,00
			Terdapat Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan		6.000.000,00		6.000.000,00
			Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		29.745.701,00		29.745.701,00
			Perjalanan Dinas Tidak Terkomfirmasi Hadir		14.018.600,00		14.018.600,00
Jumlah				**313.474.075,00**	**69.370.801,00**	**159.257.605,00**	**223.587.271,00**
13	**Sekretariat DPRD**						
		LHP No. 131/S/XVIII.PDG/ 6/2009 tgl 26 Juni 2009	Harga pengadaan Notebook pada Sekretariat DPRD diperhitungkan lebih tinggi minimal sebesar Rp26.899.998,00	26.899.998,00			26.899.998,00
		700/122/LHP/Insp/2013 tgl 18 Desember 2013	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp9.265.000,00 (Nofrizal dkk)	1.000.000,00			1.000.000,00
			Kelebihan pembayaran BBM (PPTK Salma)	1.432.000,00			1.432.000,00
			Pengadaan barang fiktif pada pengadaan peralatan rumah jabatan Ketua DPRD Tahun 2012 sebesar Rp15.400.000,00 (KPA, PPTK)	9.400.000,00			9.400.000,00
		700/24/LHP/Insp-Prm/2016 Tanggal 10 Maret 2016 pada Sekretariat DPRD	Terdapat pembayaran ganda atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dengan honor lembur sebesar Rp2.880.750,00	750,00		750,00	-
			Pembayaran kegiatan Bimtek tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp10.890.000,00	26.250,00		26.250,00	-
			Belanja Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas Ketua DPRD tetap dibayarkan meskipun yang bersangkutan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada saat yang sama sebesar Rp2.902.000,00	1.088.250,00		1.088.250,00	-
		LHP LKPD TA 2016 No. 30.C/LHP/XVIII.PDG/05 /2017 Tanggal 26 Mei 2017	Belanja Publikasi Kegiatan Parlementaria atas Nama Pribadi Sebesar Rp24,45 Juta Merugikan Keuangan Daerah dan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Outbound Anggota DPRD Sebesar Rp182,41 Juta Memboroskan Keuangan Daerah	815.000,00		815.000,00	-
		LHP Inspektorat No.700/85/LHP/Insp/2011 tgl 26 Desember 2011	Terjadinya keterlambatan 9 (sembilan) hari kalender pekerjaan pengadaan genset dengan total biaya Rp.425.004.000,- dengan denda keterlambatan Rp.3.825.000,- Pihak Kedua Direktur **CV.Multi Guna**	3.825.000,00			3.825.000,00
			Tidak ditemuinya fisik pengadaan alat penangkal petir dan pengadaan genset	19.450.000,00			19.450.000,00
		700/202/LHP/Insp/2021	Pembayaran perjalanan dinas Tahun 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.	34.373.600,00			34.373.600,00
		700/14/LHP/Insp-Prm/2023	Keterlanjuran transfer kepada Sdri. Fitri Nora, SE sejumlah Rp. 15.000.000,- dan Sdr. Arie Surya Dirgantara sejumlah Rp. 3.500.000,- (ditagih dan diserahkan kepada Sdr. M. Fahreza).	18.500.000,00		18.500.000,00	-
			Terdapat pembayaran SPPD fiktif sejumlah Rp. 14.120.000,-	9.170.000,00		9.170.000,00	-
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Perjalanan dinas terindikasi tidak dilaksanakan	20.160.000,00		20.160.000,00	-
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp109.028.388,00 dan Rp32.200.000,00	7.705.554,00			7.705.554,00
			Realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan dan membebani Keuangan Daerah		30.140.000,00		30.140.000,00
		LHP Inspektorat 700/255/LHP/Insp/2023	Pembayaran ganda uang perjalanan dinas dalam daerah tahun 2021 dan 2022		1.625.000,00		1.625.000,00
			Pembayaran uang perjalanan dinas Tahun 2021 dan 2022 sejumlah Rp.1.775.000,- yang dilaksanakan pada hari libur		1.050.000,00		1.050.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Pembayaran uang perjalanan dinas Tahun 2022 sejumlah Rp. 8.350.000,- tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku		4.225.000,00		4.225.000,00
			Belum setor Pajak Negara		3.157.753,00		3.157.753,00
		LKPD 2024 No.39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025	Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Delapan SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Senyatanya		1.093.800,00		1.093.800,00
			Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		40.710.080,00		40.710.080,00
	Jumlah			**153.846.402,00**	**82.001.633,00**	**49.760.250,00**	**186.087.785,00**
14	**Kec. Parteng**						
		LHP No.700/12/LHP/Bawas-Prm/VI-2006 tgl 15 Juni 2006 atas Kantor Camat Pariaman Tengah	Pengeluaran yang tidak diperbolehkan: biaya ucapan selamat (iklan), dan biaya cetak kartu lebaran	800.000,00			800.000,00
			Pembayaran biaya perbaikan kursi rapat fiktif	1.500.000,00			1.500.000,00
	Kelurahan Kampung Jawa I	700/190/LHP/Insp/2024, tanggal 16 Desember 2024	Belum dipungut dan disetorkannya PPn dan PPh ke kas negara oleh bendahara Rp.4.755.383,-		4.755.383,00		4.755.383,00
			Belum dipungut dan disetorkannya Pajak restoran ke kas daerah oleh bendahara sejumlah Rp.1.832.400		1.832.400,00		1.832.400,00
			Kelebihan pembayaran perjalanan dinas tahun 2021 dan 2023 sejumlah Rp 2.750.000,-		500.000,00		500.000,00
			Belanja rapat input profil tidak dapat diyakini kebenarannya sejumlah Rp.1.600.000,-		1.600.000,00		1.600.000,00
			Kelebihan pembayaran honor narasumber keg Musrenbang tahun 2021 sejumlah Rp.400.000,-		400.000,00		400.000,00
	Kelurahan Jawi-Jawi I	700/183/LHP/Insp/2024, tanggal 16 Desember 2024	Perjalanan dinas luar kota dalam propinsi Tahun 2021 sejumlah Rp.550.000,- tidak sesuai ketentuan jumlah hari maksimal hari perjalanan dinas per bulan.		200.000,00		200.000,00
	Kelurahan Jawi-Jawi II	700/14/LHP/Insp-2014 tgl 20-February-2014	Belum disetornya pajak restoran sejumlah Rp. 421.200,-		246.200,00		246.200,00
		700/45/LHP/Insp/2015 tgl 27-February-2015	kegiatan yang dialokasikan pada anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dikelola oleh LPM tidak dilaksanakan		4.900.000,00		4.900.000,00
	Kelurahan Jalan Kereta Api	LHP Inspektorat No.700/32/LHP/Bawas-Prm/VI/2008 tgl 25 Juni 2008	Perjalanan Lurah dan Sekretaris yang dilakukan pada hari libur (Sabtu dan Minggu)		550.000,00		550.000,00
			Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas Lurah dan Sekretaris		480.000,00		480.000,00
		LHP Inspektorat No.700/54/LHP/Insp-Prm/VIII/2009 tgl 14 Agustus 2009	Setoran pajak PPn dan PPh pasal 22 dari kegiatan penyelesaian pembuatan balai pemuda PPn Rp.770.000,- PPh pasal 22 Rp.103.450,-		873.450,00		873.450,00
	Kelurahan Pondok II	700/190/LHP/Insp/2024, tanggal 16 Desember 2024	Perjalanan dinas tahun 2022 dan 2023 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp. 4.550.000,-		2.500.000,00		2.500.000,00
		LHP No. 700/54/LHP/Insp-Prm/VIII/2009 tgl 14 Agt 2009 atas Kel. Jalan Kereta Api	Setoran pajak		873.000,00		873.000,00
		LHP No. 700/56/LHP/Insp-Prm/IX/2009 tgl 29 Juli 2009 atas Kel. Ujung Batuang	SPPD ganda		50.000,00		50.000,00
			SPPD hari libur		50.000,00		50.000,00
		LHP No. 700/57/LHP/Insp-Prm/IX/2009 tgl 29 Juli 2009 atas Kel. Karan Aur	Setoran Pajak		40.000,00		40.000,00
		LHP No. 700/23/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 30 Maret 2012 atas Kel. Jalan Baru	PBN 1 TA 2010 belum setor		96.000,00		96.000,00
		700/09/LHP/Insp/2014 tgl 11 Februari 2014	Biaya perjalanan dinas ganda lurah dan sekretaris lurah Rp390.000,00		390.000,00		390.000,00
		700/45/LHP/Insp/2015 Kelurahan Jawi-Jawi II	kegiatan yang dialokasikan pada anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dikelola oleh LPM tidak dilaksanakan		4.900.000,00		4.900.000,00
		700/120/LHP/Insp/2015 Tanggal 22 September 2015 Kelurahan Jawi-jawi I	Belum adanya pertanggung jawaban SPJ atas dana kelembagaan oleh LPM, PKK, dan Karang Taruna TA 2013 dan 2014 sejumlah Rp. 45.350.000		845.000,00		845.000,00
	Jumlah			**2.300.000,00**	**25.236.433,00**	**0,00**	**27.536.433,00**
15	**Kecamatan Partim**	LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
		LHP Inspektorat No.700/81/LHP/Insp/2012 tgl 19 Oktober 2012	Kemahalan harga pembelian barang pada TA 2011	0,00	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
		1341103		31.285.600,00		8.400.000,00	22.885.600,00
	Jumlah			**31.285.600,00**	**5.262.000,00**	**8.400.000,00**	**28.147.600,00**
16	**Inspektorat**						

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LHP No. 34/LHP/XVIII.PDG/05/2023	HPK	2.210.000,00			2.210.000,00
		LHP No. 35/LHP/XVIII.PDG/04/2022	HONOR TPKD 2021	2.271.800,00		2.271.800,00	-
		LHP No. 126/S/XVIII.PDG/07/2010	BBM	270.000,00			270.000,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/2024 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan tim	Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	11.475.000,00			11.475.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	1.275.000,00			1.275.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	9.945.000,00			9.945.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	1.190.000,00			1.190.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	3.825.000,00			3.825.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	12.750.000,00		12.750.000,00	-
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	1.105.000,00		1.105.000,00	-
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	11.220.000,00		11.220.000,00	-
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	11.220.000,00			11.220.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	10.200.000,00			10.200.000,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/2024 Jumlah pemberian honorarium melebihi batas jumlah tim maksimal yang ditetapkan	honorarium melebihi batas jumlah tim maksimal	11.465.000,00			11.465.000,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/2024 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	350.000,00			350.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	6.570.000,00		4.152.000,00	2.418.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	8.550.000,00			8.550.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	2.687.500,00			2.687.500,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	850.000,00			850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	637.500,00			637.500,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	4.462.500,00			4.462.500,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	850.000,00			850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	7.650.000,00			7.650.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	850.000,00			850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	6.375.000,00			6.375.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	850.000,00			850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	5.000.000,00		5.000.000,00	-
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	4.275.000,00		4.275.000,00	-
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	475.000,00			475.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	400.000,00		200.000,00	200.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	600.000,00			600.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	600.000,00		600.000,00	-
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	500.000,00		500.000,00	-
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	500.000,00		500.000,00	-
Jumlah				**143.454.300,00**	**0,00**	**42.573.800,00**	**100.880.500,00**
17	**BPKPD**						
	DPPKA (SKPKD)	LHP No. 700/58/LHP/Insp-Prm/XII/2008 tgl 5 Des 2008 atas Ds. Naras Hilla	Pembelian fiktif	1.200.000,00		1.200.000,00	-
			Potongan pajak	1.774.000,00		1.774.000,00	-
		LHP No. 700/54/LHP/Insp-Prm/VIII/2009 tgl 14 Agt 2009 atas Kel. Jalan Kereta Api	Setoran pajak	873.000,00		873.000,00	-
		LHP No. 700/56/LHP/Insp-Prm/IX/2009 tgl 29 Juli 2009 atas Kel. Ujung Batuang	SPPD ganda	50.000,00		50.000,00	-
			SPPD hari libur	50.000,00		50.000,00	-
		LHP No. 700/57/LHP/Insp-Prm/IX/2009 tgl 29 Juli 2009 atas Kel. Karan Aur	Setoran Pajak	40.000,00		40.000,00	-
		LHP No. 700/105/LHP/Insp-Prm/XII/2009 tgl 22 Des 2009 atas Ds. Palak Aneh	Pengeluaran fiktif	1.500.000,00		1.500.000,00	-

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Pungutan pajak	2.673.000,00		2.673.000,00	-
		LHP No. 700/47/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 20 Juni 2011 atas Ds. Pauh Timur	PPh pasal 23 belum setor	16.000,00		16.000,00	-
			Pajak dana fisik LPM belum setor	270.228,00		270.228,00	-
		LHP No. 700/44/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 4 Juli 2011 atas Ds. Simpang Kurai Taji	Pajak yang belum setor	442.000,00		442.000,00	-
			PPn dan PPh belum setor	3.872.000,00		3.872.000,00	-
		LHP No. 700/46/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 4 Juli 2011 atas Ds. Palak Aneh	Pajak yang belum setor	3.682.000,00		3.682.000,00	-
			PBN 1 belum setor	538.000,00		538.000,00	-
		LHP No. 700/11/LHP/Insp/ 2012 tgl 2 Febr 2012 atas Ds. Taluk	PPn dan PPh belum setor	4.024.000,00		4.024.000,00	-
		LHP No. 700/12/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 28 Febr 2012 atas Ds. Tanjung Sabar	PPn dan PPh belum setor	6.961.000,00		6.961.000,00	-
		LHP No. 700/20/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 23 Apr 2012 atas Ds. Air Santok	PPn dan PPh TA 2010 dan 2011 belum setor	3.485.000,00		3.485.000,00	-
			PBN 1 TA 2010 dan 2011 belum setor	865.000,00		865.000,00	-
		LHP No. 700/23/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 30 Maret 2012 atas Kel. Jalan Baru	PBN 1 TA 2010 belum setor	96.000,00		96.000,00	-
		LHP No. 700/60/LHP/Insp/2012 tgl 1 Mei 2012 atas Ds. Jati Mudik	Kelebihan biaya perjalanan dinas	1.000.000,00		1.000.000,00	-
		700/09/LHP/Insp/2014 tgl 11 Februari 2014	Biaya perjalanan dinas ganda lurah dan sekretaris lurah Rp390.000,00	390.000,00		390.000,00	-
		700/45/LHP/Insp/2015 Kelurahan Jawi-Jawi II	kegiatan yang dialokasikan pada anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dikelola oleh LPM tidak dilaksanakan	4.900.000,00		4.900.000,00	-
		700/120/LHP/Insp/2015 Tanggal 22 September 2015 Kelurahan Jawi-jawi I	Belum adanya pertanggung jawaban SPJ atas dana kelembagaan oleh LPM, PKK, dan Karang Taruna TA 2013 dan 2014 sejumlah Rp. 45.350.000	845.000,00		845.000,00	-
		700/025/LHP/Insp/2014 tgl 25 April 2014 Desa Pauh Timur	Pengadaan barang fiktif, yaitu pembelian mesin ketik manual TA 2013 sebesar Rp1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	-
	BPKPD	LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah (TPKD) Sebesar Rp1.811.330.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan	668.621.381,00		37.934.199,00	630.687.182,00
		LKPD 2022 LHP No. 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional Sebesar Rp879.625.000,00	399.491.769,00		101.984.817,00	297.506.952,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan	85.435.000,00		55.922.000,00	29.513.000,00
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp109.028.388,00 dan Rp32.200.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00	-
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Delapan SKPD Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Senyatanya		16.203.067,00		16.203.067,00
			Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		21.734.035,00		21.734.035,00
Jumlah				**1.198.494.378,00**	**37.937.102,00**	**240.787.244,00**	**995.644.236,00**
18	**Kantor Kesbangpol**	LHP LKPD TA 2023 Nomor 37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	11.475.000,00		11.475.000,00	-
				3.825.000,00			3.825.000,00
				10.710.000,00			10.710.000,00
				13.260.000,00		13.260.000,00	-
				6.609.600,00		6.609.600,00	-
				5.100.000,00		5.100.000,00	-
				2.850.000,00		2.850.000,00	-
				6.156.000,00		6.156.000,00	-
				1.026.000,00		1.026.000,00	-
				769.500,00		769.500,00	-
				810.000,00		810.000,00	-
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional		1.395.000,00		1.395.000,00
		700/191/LHP/Insp/2024, tanggal 23 Desember 2024	Belanja makan minum kegiatan tidak sesuai ketentuan Rp.676.800		288.200,00		288.200,00
			Honor Tim Terpadu penanganan konflik th.2021 s/d 2022 tidak sesuai ketentuan sejumlah Rp.14.400.000		13.050.000,00		13.050.000,00
			Pertanggungjawaban pelaksanaan tahun 2023 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp.7.656.000,-		1.716.000,00		1.716.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Pertanggungjawaban pelaksanaan tahun 2023 sebesar Rp.2.520.000,- tidak sesuai ketentuan		2.520.000,00		2.520.000,00
		Jumlah		**62.591.100,00**	**18.969.200,00**	**48.056.100,00**	**33.504.200,00**
19	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**						
		LHP LKPD TA 2023 Nomor 37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Kekurangan volueme pada Dinas Perpustakaan dan Arsip atas pekerjaan pembangunan gedung pustaka dan pembangunan pagar pustaka sebesar Rp272.081.582,77				
			Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum sebesar Rp254.697.851,72	254.697.851,72		254.697.851,72	-
			Kekurangan volume pekerjaan pembangunan pagar dan turap gedung fasilitas layanan perpustakaan sebesar Rp17.383.731,05	17.383.731,05		5.000.000,00	12.383.731,05
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.573.000,00	1.573.000,00		1.573.000,00	-
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		1.297.900,00	1.297.900,00	-
		Jumlah		**273.654.582,77**	**1.297.900,00**	**262.568.751,72**	**12.383.731,05**
20	**Dinas Perhubungan**						
		Np. 700/48/LHP/Bawas-Prm/XI/2006	Bendahara belum melakukan Penyetoran pajak yang terutang bulan September s/d Desember Tahun 2005 dengan rincian sbb : - PPh pasal 21 sejumlah Rp4.704.750,00; - PPh pasal 22 sejumlah Rp317.561,00; - PPh pasal 23 sejumlah Rp498.934,00; - PPn sejumlah Rp4.225.136,00	9.746.381,00		9.746.381,00	-
		LHP Inspektorat No.700/42/LHP/Bawas-Prm/XI/2008 tgl 24 November 2008	Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung Dinas Perhubungan	6.743.226,00			6.743.226,00
		LKPD 2022	Kelebihan Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun 2022	760.000,00		760.000,00	-
				800.000,00		800.000,00	-
				950.000,00		950.000,00	-
		LKPD 2023	Realisasi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan tim sebesar Rp1.265.278.000,00	3.825.000,00		3.825.000,00	-
		700/33/LHP/Insp/2023	Kelebihan Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp 2.030.000	0			-
			Uang lembur	240.000,00			240.000,00
				240.000,00			240.000,00
				240.000,00			240.000,00
				240.000,00			240.000,00
				240.000,00			240.000,00
				240.000,00			240.000,00
				-			-
			Uang makan lembur	50.000,00			50.000,00
				50.000,00			50.000,00
				50.000,00			50.000,00
				50.000,00			50.000,00
				50.000,00			50.000,00
				50.000,00			50.000,00
				-			-
			Terdapat pembayaran BBM yang tidak diyakini kebenarannya tahun anggaran 2021 dan 2022 sejumlah Rp 5.350.900	-			-
			Kelebihan Pengeluaran Belanja BBM Tahun 2021 Sejumlah Rp 4.727.700,-	2.337.700,00		2.337.700,00	-
			Kelebihan Pembayaran biaya pemeliharaan bus sekolah dengan Nomor Polisi BA 8030 W tahun 2022 sejumlah Rp 6.443.000	6.443.000,00		1.486.300,00	4.956.700,00
		LHP Inspektorat 700/15/LHP/Bawas-Prm/XII/2005	Pembelian papan data fiktif		12.750.000,00		12.750.000,00
			Perjalanan dinas rangkap		65.000,00		65.000,00
		7LHP Inspektorat 00/50/LHP/Insp/Prm/VIII/2009	Perjalanan dinas ganda dan hari libur		125.000,00		125.000,00
			Kelebihan uang makan		2.919.000,00		2.919.000,00
			Kemahalan harga pengadaan traffic light dan material		1.552.810,00		1.552.810,00
		LHP Inspektorat 700/159/LHP/Insp/2020	Pembayaran perjalanan dinas Rp2.250.000 tidak sesuai aturan yang berlaku		275.000,00		275.000,00
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional		9.222.500,00		9.222.500,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Terdapat Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Tidak Sesuai dengan Ketentuan		77.490.100,00		77.490.100,00
	UPT. Parkir	700/79/LHP/Insp/2022	Pembayaran yang tidak sesuai ketentuan tahun 2019 dan tahun 2020		2.805.000,00		2.805.000,00
Jumlah				**33.345.307,00**	**107.204.410,00**	**19.905.381,00**	**120.644.336,00**
21	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	LKPD 2023	Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp4.664.048,00	2.664.048,00	-		2.664.048,00
Jumlah				**2.664.048,00**	**0,00**	**0,00**	**2.664.048,00**
22	**BKPSDM**	LHP Nomor 700/124/LHP/Insp/2022 tanggal 30 Agustus 2022	pembayaran uang perjalanan dinas tahun 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	400.000,00		400.000,00	-
		700/124/LHP/Insp-Prm/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	Belum disetorkannya ke Kas Daerah Pajak Restoran sebesar Rp. 20.621.255		400.000,00		400.000,00
		LHP Nomor 700/184/LHP/Insp/2025 tanggal 18 November 2025	Pembayaran kegiatan tahun 2022, 2023 dan 2024 yang dilaksanakan pada tanggal yang sama sejumlah Rp10.987.242,-				-
			a. Tahun 2022 (Honor narasumber sama dg perjadin)		925.000,00		925.000,00
			b. Tahun 2023 (Lembur sama dg perjadin)		685.000,00		685.000,00
			c. Tahun 2024(lembur sama dg lembur lainnya)		290.000,00		290.000,00
					290.000,00		290.000,00
					90.000,00		90.000,00
			Kelebihan pembayaran perjalanan dinas, Bantuan Bahan Bakar Minyak, Servis dan makanan minuman rapat tahun 2022 dan 2024 sejumlah Rp10.908.750,-				-
			a. Tahun 2022		200.000,00		200.000,00
			b. Tahun 2024		152.000,00		152.000,00
					70.000,00		70.000,00
					140.000,00		140.000,00
					200,00		200,00
					90.000,00		90.000,00
			Pembayaran BBM minyak tahun 2023 tidak sesuai ketentuan		200.000,00		200.000,00
					150.000,00		150.000,00
			Pembayaran Biaya Pembawa Baki tahun 2022 Tidak diatur dalam Perwako sejumlah Rp1.350.000		312.500,00	-	312.500,00
			Kelebihan pembayaran narasumber/fasilitator/moderator yang Perwako sejumlah Rp5.200.000		1.200.000,00		1.200.000,00
					1.200.000,00		1.200.000,00
					1.200.000,00		1.200.000,00
					400.000,00		400.000,00
Jumlah				**400.000,00**	**7.994.700,00**	**400.000,00**	**7.994.700,00**
23	**Dinas Sosial**	700/108/LHP/Insp/2023	Pembayaran Honor Narasumber dari Pihak Internal Tahun 2021 dan 2022 Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp.5.380.000	1.700.000,00			1.700.000,00
			Pembayaran honor/SPPD Tidak	190.000,00			190.000,00
			sesuai ketentuan tahun 2022	340.000,00			340.000,00
			Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan tahun 2021 Sejumlah Rp.800.000	50.000,00			50.000,00
		700/190/LHP/Insp/2025 tanggal '27 November 2025	Pembayaran transportasi dan uang saku sub kegiatan penyediaan permakanan yang diberikan kepada ASN tahun 2024 sejumlah Rp7.940.000,- tidak memiliki dasar pembayaran		3.275.000,00	1.485.000,00	1.790.000,00
			Kelebihan pembayaran BBM untuk transportasi darat dari Kota Pariaman ke Kota/Kabupaten sekitar pada tahun 2024 sejumlag Rp536.000		515.000,00		515.000,00
			Kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas roda dua (tahun 2024) sejumlah Rp1.767.000		1.061.000,00	500.000,00	561.000,00
			Kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 pada tahun 2023 sejumlah Rp1.209.246		1.209.246,00		1.209.246,00
			Kemahalanan pembelian nasi kotak pada acara pokok pikiran anggota dewan kota Pariaman pada tahun 2024 sejumlah Rp2.276.050		2.276.050,00		2.276.050,00
			Pembayaran ganda tahun 2023 atas pembayaran biaya transportasi, honor dan perjalanan dinas sejumlah Rp2.025.000		650.000,00	450.000,00	200.000,00
Jumlah				**2.280.000,00**	**8.986.296,00**	**2.435.000,00**	**8.831.296,00**
24	**Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah**						
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan pembentukan tim sebesar Rp1.265.278.000,00				

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	NILAI TGR	TAHUN 2025		SISA
					PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Honorarium tim penyusun rencana kerja pemerintah daerah	37.170.501,00		37.170.501,00	-
			Honorarium Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2023	141.597.500,00		62.345.000,00	79.252.500,00
		LKPD 2024 LHP No. 39.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tgl 22 Mei 2025	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Belanja Honorarium Kegiatan pada Enam SKPD		2.850.000,00		2.850.000,00
			Pertanggungjawaban Belanja Jasa Tim Ahli pada Bappeda Tidak Sesuai dengan Ketentuan		2.125.000,00		2.125.000,00
			Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya		2.835.550,00		2.835.550,00
Jumlah				**178.768.001,00**	**7.810.550,00**	**99.515.501,00**	**87.063.050,00**
25	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**						
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional		2.280.000,00		2.280.000,00
		700/90/LHP/Insp-Prm/IV/2015 tgl 24-August-2015	Ditemui perjalanan dinas dalam rangka Diklat, Bimtek, Workshop dan sejenisnya melebih Peraturan Walikota sejumlah Rp 2.465.000,-		270.000,00		270.000,00
		700/16/LHP/Insp/2024	Pembayaran Belanja Bantuan BBM Tahun 2022 sejumlah Rp2.247.000 Melebihi Ketentuan Jumlah Maksimal Yang Telah Ditetapkan		1.247.000,00		1.247.000,00
Jumlah				**-**	**3.797.000,00**	**-**	**3.797.000,00**
26	**Kecamatan Pariaman Selatan**						
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022			570.000,00		570.000,00
Jumlah				**-**	**570.000,00**	**-**	**570.000,00**
Total				**4.640.412.060,96**	**2.722.166.024,33**	**1.466.993.526,21**	**5.895.584.559,08**

Lampiran 21

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET LAIN- LAIN (TAK BERWUJUD)
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo 31 Desember 2024	saldo 1 Januari 2025	MUTASI TAHUN ASET TAK		Saldo 31 Desember 2025
				TAMBAH	KURANG	
		Nilai	Nilai	Debet	Kredit	Nilai
1	2	3	6	4	5	6
1	UPTD. PARIAMAN UTARA	19.184.000,00	19.184.000,00	0,00	0,00	19.184.000,00
2	UPTD. PARIAMAN TIMUR	38.368.000,00	38.368.000,00	0,00	0,00	38.368.000,00
3	DINAS KESEHATAN	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	29.700.000,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	451.910.000,00	451.910.000,00	89.095.815,00	0,00	541.005.815,00
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
7	DIANAS PEKERJAAN UMUM	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
	TOTAL	**687.162.000,00**	**687.162.000,00**	**89.095.815,00**	**0,00**	**821.257.815,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET LAIN- LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025		Koreksi Penyesuaian Saldo Awal	Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo 31 Desember 2025
						Tambah			Kurang	
		Rusak Berat	Total Aset Lain Lain	Koreksi (-)		Peralatan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Tambah	Penghapusan Rusak berat	Nilai
				KURANG						
1	2	3	5	6	7	8	11	12	13	16
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	575.685.400,00	575.685.400,00		575.685.400,00			0,00	49.780.400,00	525.905.000,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	1.000.758.556,01	1.000.758.556,01		1.000.758.556,01	35.790.000,00	1.184.441,00	36.974.441,00	185.147.482,00	852.585.515,01
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	787.486.940,72	787.486.940,72		787.486.940,72			0,00	216.969.160,00	570.517.780,72
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	705.115.596,72	705.115.596,72		705.115.596,72			0,00	216.690.038,00	488.425.558,72
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	769.641.307,00	769.641.307,00		769.641.307,00			0,00	241.240.749,00	528.400.558,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	39.958.333,00	39.958.333,00		39.958.333,00			0,00		39.958.333,00
7	SMP 1 PARIAMAN	53.700.000,00	53.700.000,00		53.700.000,00			0,00		53.700.000,00
8	SMP 2 PARIAMAN	99.846.317,00	99.846.317,00		99.846.317,00			0,00		99.846.317,00
9	SMP 3 PARIAMAN	127.838.792,00	127.838.792,00		127.838.792,00			0,00	120.938.792,00	6.900.000,00
10	SMP 4 PARIAMAN	54.817.400,00	54.817.400,00		54.817.400,00			0,00	39.320.000,00	15.497.400,00
11	SMP 5 PARIAMAN	57.057.200,00	57.057.200,00		57.057.200,00			0,00		57.057.200,00
12	SMP 6 PARIAMAN	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00			0,00		2.000.000,00
	SMP 7 PARIAMAN	298.717.521,42	298.717.521,42		298.717.521,42			0,00		298.717.521,42
13	SMP 8 PARIAMAN	28.050.000,00	28.050.000,00		28.050.000,00			0,00	28.050.000,00	0,00
	SMP 9 PARIAMAN	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00			0,00		7.500.000,00
	DINAS KESEHATAN	279.945.045,00	279.945.045,00		279.945.045,00			0,00	230.545.986,77	49.399.058,23
15	PUSKESMAS NARAS	407.457.739,33	407.457.739,33		407.457.739,33			0,00		407.457.739,33
16	PUKESMAS KP. BARU PADUSUNAN	14.834.398,50	14.834.398,50	9.000.000,00	5.834.398,50			0,00		5.834.398,50
17	PUSKESMAS PAUH PARIAMAN	1.430.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00			0,00		1.430.000,00
18	PUSKESMAS KURAI TAJI	219.259.000,00	219.259.000,00		219.259.000,00			0,00		219.259.000,00
19	PUKESMAS MARUNGGI	51.227.857,15	51.227.857,15		51.227.857,15			0,00		51.227.857,15
20	PUKESMAS AIR SANTOK	7.800.000,33	7.800.000,33		7.800.000,33			0,00		7.800.000,33
21	PUKESMAS SIKAPAK BARAT	284.700.389,00	284.700.389,00		284.700.389,00			0,00		284.700.389,00
22	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	0,10	0,10		0,10			0,00		0,10
23	UPT. INSTALASI FARMASI	4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00			0,00		4.700.000,00

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025		Koreksi Penyesuaian Saldo Awal	Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo 31 Desember 2025
						Tambah			Kurang	
		Rusak Berat	Total Aset Lain Lain	Koreksi (-) KURANG		Peralatan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Tambah	Penghapusan Rusak berat	Nilai
1	2	3	5	6	7	8	11	12	13	16
24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	742.618.280,00	742.618.280,00		742.618.280,00			0,00		742.618.280,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	2.863.751.533,28	2.863.751.533,28		2.863.751.533,28			0,00		2.863.751.533,28
26	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	65.137.000,00	65.137.000,00		65.137.000,00			0,00		65.137.000,00
27	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	536.181.100,00	536.181.100,00		536.181.100,00			0,00		536.181.100,00
28	KANTOR KESBANG POL	26.615.000,00	26.615.000,00		26.615.000,00			0,00	1.500.000,00	25.115.000,00
29	SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	1.612.867.503,30	1.612.867.503,30		1.612.867.503,30			0,00	64.845.100,00	1.548.022.403,30
30	BPBD	108.532.400,00	108.532.400,00		108.532.400,00			0,00		108.532.400,00
31	DINAS SOSIAL	34.597.500,00	34.597.500,00		34.597.500,00			0,00		34.597.500,00
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	434.142.000,00	434.142.000,00		434.142.000,00			0,00	257.680.000,00	176.462.000,00
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251.523.458,00	251.523.458,00		251.523.458,00			0,00	233.788.458,00	17.735.000,00
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.289.300,00	19.289.300,00		19.289.300,00			0,00		19.289.300,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	10.454.300.325,32	10.454.300.325,32		10.454.300.325,32			0,00	60.548.450,00	10.393.751.875,32
36	UPT. TERMINAL	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	UPT PARKIR	204.770.000,00	204.770.000,00		204.770.000,00			0,00		204.770.000,00
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	144.441.150,00	144.441.150,00		144.441.150,00			0,00		144.441.150,00
38	DINAS PERINDAGKOP	2.579.878.800,00	2.579.878.800,00		2.579.878.800,00			0,00	122.818.300,00	2.457.060.500,00
39	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	461.449.852,00	461.449.852,00		461.449.852,00			0,00		461.449.852,00
40	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	65.518.936,00	65.518.936,00		65.518.936,00			0,00	11.599.636,00	53.919.300,00
41	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.795.899.228,00	1.795.899.228,00		1.795.899.228,00			0,00	133.748.628,00	1.662.150.600,00
42	UPT. PULAU ANGSO	22.170.635,20	22.170.635,20		22.170.635,20			0,00	8.000.000,00	14.170.635,20

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2025		Koreksi Penyesuaian Saldo Awal	Saldo Awal Per 1 Januari 2025	Mutasi Tahun 2025				Saldo 31 Desember 2025
						Tambah			Kurang	
		Rusak Berat	Total Aset Lain Lain	Koreksi (-) KURANG		Peralatan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Tambah	Penghapusan Rusak berat	Nilai
1	2	3	5	6	7	8	11	12	13	16
43	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	811.435.700,00	811.435.700,00		811.435.700,00			0,00	123.589.700,00	687.846.000,00
44	UPT. BPP KOTA PARIAMAN	149.039.000,00	149.039.000,00		149.039.000,00			0,00	139.139.000,00	9.900.000,00
45	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	27.014.000,00	27.014.000,00		27.014.000,00			0,00	26.639.000,00	375.000,00
46	UPT. BBI	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
47	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	BAGIAN PEMERINTAHAN	25.090.000,00	25.090.000,00		25.090.000,00			0,00		25.090.000,00
	BAGIAN HUKUM DAN HAM	33.511.000,00	33.511.000,00		33.511.000,00			0,00		33.511.000,00
	BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR	19.488.000,00	19.488.000,00		19.488.000,00			0,00		19.488.000,00
48	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	1.070.664.843,00	1.070.664.843,00		1.070.664.843,00			0,00	668.843.025,00	401.821.818,00
	BAGIAN EKBANG	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
49	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.800.007,00	11.800.007,00		11.800.007,00			0,00		11.800.007,00
50	SEKRETARIAT DPRD	321.939.999,72	321.939.999,72		321.939.999,72			0,00	197.760.000,00	124.179.999,72
9	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	12.264.000,00	12.264.000,00		12.264.000,00			0,00		12.264.000,00
52	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
53	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
54	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	9.520.000,00	9.520.000,00		9.520.000,00			0,00		9.520.000,00
55	INSPEKTORAT	33.422.500,00	33.422.500,00		33.422.500,00			0,00		33.422.500,00
56	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	175.895.000,00	175.895.000,00		175.895.000,00			0,00	40.000.000,00	135.895.000,00
57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.241.642.139,00	1.241.642.139,00		1.241.642.139,00			0,00	259.323.450,00	982.318.689,00
58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00			0,00		15.000.000,00
TOTAL		**32.260.937.983,10**	**32.260.937.983,10**	**9.000.000,00**	**32.251.937.983,10**	**35.790.000,00**	**1.184.441,00**	**36.974.441,00**	**3.678.505.354,77**	**28.610.407.069,33**

Lampiran 24

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PENYUSUTAN ASET LAIN- LAIN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Saldo awal Penyusutan RB per 1 Januri 2025	Koreksi saldo		Pindah Dari		Mutasi (-)	Total Akumulasi Penyusutan
			Koreksi (-)	Total Aset Lain Lain 2024	Peralatan dan Mesin	Total Tambah	Penghapusan	
1	2	3	5	5	6	9	13	12=6+7+8+9+10+11
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	420.463.900,00		420.463.900,00		-		420.463.900,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	668.617.083,00		668.617.083,00	35.790.000,00	35.790.000,00	**124.285.480,00**	580.121.603,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	695.599.357,44		695.599.357,44		-	193.909.429,00	501.689.928,44
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	470.714.331,72		470.714.331,72		-	169.975.351,00	300.738.980,72
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	566.073.095,00		566.073.095,00		-	220.724.336,00	345.348.759,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	36.072.569,00		36.072.569,00		-		36.072.569,00
7	SMP 1 PARIAMAN	53.700.000,00		53.700.000,00		-		53.700.000,00
8	SMP 2 PARIAMAN	66.114.185,00		66.114.185,00		-		66.114.185,00
9	SMP 3 PARIAMAN	127.838.792,00		127.838.792,00		-	120.938.792,00	6.900.000,00
10	SMP 4 PARIAMAN	52.822.608,00		52.822.608,00		-	38.903.334,00	13.919.274,00
11	SMP 5 PARIAMAN	29.900.000,00		29.900.000,00		-		29.900.000,00
12	SMP 6 PARIAMAN	2.000.000,00		2.000.000,00		-		2.000.000,00
13	SMP 7 PARIAMAN	298.717.521,42		298.717.521,42		-		298.717.521,42
14	SMP 8 PARIAMAN	28.029.167,00		28.029.167,00		-	28.029.167,00	-
15	SMP 9 PARIAMAN	7.500.000,00		7.500.000,00		-		7.500.000,00
16	DINAS KESEHATAN	271.495.045,59		271.495.045,59		-	218.545.986,77	52.949.058,82
17	PUSKESMAS NARAS	407.378.209,34		407.378.209,34		-		407.378.209,34
18	PUKESMAS KP. BARU PADUSUNAN	14.834.399,50	**9.000.000,00**	5.834.399,50		-		5.834.399,50
19	PUSKESMAS PAUH PARIAMAN	1.430.000,00		1.430.000,00		-		1.430.000,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	164.444.341,00		164.444.341,00		-		164.444.341,00
21	PUKESMAS MARUNGGI	51.227.857,15		51.227.857,15		-		51.227.857,15
22	PUKESMAS AIR SANTOK	5.850.000,00		5.850.000,00		-		5.850.000,00
23	PUKESMAS SIKAPAK BARAT	270.800.227,00		270.800.227,00		-		270.800.227,00
24	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	0,00		0,00		-		-
25	UPT. INSTALASI FARMASI	4.700.000,00		4.700.000,00		-		4.700.000,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	742.618.280,00		742.618.280,00		-		742.618.280,00
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	2.848.951.532,72		2.848.951.532,72		-		2.848.951.532,72
28	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	65.137.000,00		65.137.000,00		-		65.137.000,00
29	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	534.324.850,00		534.324.850,00		-		534.324.850,00

Lampiran 24

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Saldo awal Penyusutan RB per 1 Januri 2025	Koreksi saldo		Pindah Dari		Mutasi (-)	Total Akumulasi Penyusutan
			Koreksi (-)	Total Aset Lain Lain 2024	Peralatan dan Mesin	Total Tambah	Penghapusan	
1	2	3	5	5	6	9	13	12=6+7+8+9+10+11
30	KANTOR KESBANG POL	26.615.000,00		26.615.000,00		-	1.500.000,00	25.115.000,00
31	SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	778.943.248,30		778.943.248,30		-	64.845.100,00	714.098.148,30
32	BPBD	100.813.656,00		100.813.656,00		-		100.813.656,00
33	DINAS SOSIAL	34.347.500,00		34.347.500,00		-		34.347.500,00
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	425.359.188,00		425.359.188,00		-	257.680.000,00	167.679.188,00
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251.523.458		251.523.458,00		-	233.788.458,00	17.735.000,00
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.289.300,00		19.289.300,00		-		19.289.300,00
37	DINAS PERHUBUNGAN	10.400.190.960,00		10.400.190.960,00		-	60.179.106,00	10.340.011.854,00
38	UPT. TERMINAL	-		0,00		-		-
39	UPT PARKIR	200.821.250,00		200.821.250,00		-		200.821.250,00
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	144.441.150,00		144.441.150,00		-		144.441.150,00
41	DINAS PERINDAGKOP	1.239.535.950,00		1.239.535.950,00		-	122.818.300,00	1.116.717.650,00
42	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	319.902.919,00		319.902.919,00		-		319.902.919,00
43	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	64.904.353,00		64.904.353,00		-	11.599.636,00	53.304.717,00
44	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.120.504.311,80		1.120.504.311,80		-	123.132.810,00	997.371.501,80
45	UPT. PULAU ANGSO	-		0,00		-		-
46	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	790.246.533,00		790.246.533,00		-	123.589.700,00	666.656.833,00
47	UPT. BPP KOTA PARIAMAN	149.039.000,00		149.039.000,00		-	139.139.000,00	9.900.000,00
48	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	27.014.000,00		27.014.000,00		-	26.639.000,00	375.000,00
49	UPT. BBI	-		0,00		-		-
50	SEKRETARIAT DAERAH	-		0,00		-		-
51	BAGIAN PEMERINTAHAN	25.090.000,00		25.090.000,00		-		25.090.000,00
52	BAGIAN HUKUM DAN HAM	33.511.000,00		33.511.000,00		-		33.511.000,00
53	BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR	19.488.000,00		19.488.000,00		-		19.488.000,00
54	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	1.061.276.093,00		1.061.276.093,00		-	668.818.025,00	392.458.068,00
55	BAGIAN EKBANG	-		0,00		-		-
56	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.800.007		11.800.007,00		-		11.800.007,00
57	SEKRETARIAT DPRD	335.735.832,99		335.735.832,99		-	197.760.000,00	137.975.832,99
58	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	12.264.000,00		12.264.000,00		-		12.264.000,00
59	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	-		0,00		-		-
60	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	-		0,00		-		-
61	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	9.520.000,00		9.520.000,00		-		9.520.000,00
62	INSPEKTORAT	33.422.500,00		33.422.500,00		-		33.422.500,00

Lampiran 24

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Saldo awal Penyusutan RB per 1 Januri 2025	Koreksi saldo		Pindah Dari		Mutasi (-)	Total Akumulasi Penyusutan
			Koreksi (-)	Total Aset Lain Lain 2024	Peralatan dan Mesin	Total Tambah	Penghapusan	
1	2	3	5	5	6	9	13	12=6+7+8+9+10+11
63	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	173.259.583,00		173.259.583,00		-	40.000.000,00	133.259.583,00
64	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	424.080.450,00		424.080.450,00		-	259.323.450,00	164.757.000,00
65	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	-		0,00		-		-
66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15.000.000,00		15.000.000,00		-		15.000.000,00
TOTAL		**27.155.293.594,97**	**9.000.000,00**	**27.146.293.594,97**	**35.790.000,00**	**35.790.000,00**	**3.446.124.460,77**	**23.735.959.134,20**

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2025

A. DINAS PERINDAG DAN UKM ***(Dalam Rupiah)***

1 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, grosir, pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

NO	NAMA PENYEWA	BLOK	JUMLAH
1	Pasar Kurai Taji Blok A5 an. Indra Wadi	A 5	1.125.000,00
JUMLAH			**1.125.000,00**

B. BPKPD ***(Dalam Rupiah)***

1 Pajak Reklame

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	Pajak Reklame	91.360.023,50
JUMLAH		**91.360.023,50**

2 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

NO	JENIS RETRIBUSI	TANGGAL SEWA	JUMLAH
1	Sewa Lahan Galeri ATM Bank Nagari di Kantor DPRD Pariaman	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2027	23.010.000,00
2	Sewa satu ruangan dalam bangunan Kantor BPKPD untuk Kantor Capem Bank Nagari Kelas D Balaikota	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2027	41.072.000,00
3	Sewa Lahan Galeri ATM Bank Nagari di Kantor Balai Kota Pariaman	1 Mei 2025 s/d 30 April 2028	29.139.444,44
JUMLAH			**93.221.444,44**
TOTAL PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA			**185.706.467,94**

Lampiran 26

RINCIAN SISA KEWAJIBAN PEMKO PARIAMAN (UTANG BELANJA)

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Nilai Utang	MUTASI (-)		MUTASI (+) Utang Tahun 2025	Total Utang s.d Tahun 2025
		Tahun 2024	Pembayaran	Penghapusan		
1	3	4	5	6	7	8 =4-6+7
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				24.750.000,00	24.750.000
2	RSUD DR SADIKIN	162.554.032,00		162.554.032,00		-
3	RSUD DR SADIKIN	177.677.605,00		177.677.605,00		-
4	RSUD DR SADIKIN	59.061.000,40	59.061.000,40			-
5	DINAS KESEHATAN	2.378.220.600,00	2.378.220.600,00			-
6	RSUD DR SADIKIN				554.244.267,00	554.244.267,00
7	RSUD DR SADIKIN				154.099.124,00	154.099.124,00
8	RSUD DR SADIKIN				353.114.115,00	353.114.115,00
9	RSUD DR SADIKIN				3.500.000,00	3.500.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				19.875.600,00	19.875.600,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				14.944.500,00	14.944.500,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				497.007.600,00	497.007.600,00
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.604.000,00	2.604.000,00			-
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.340.000,00	4.340.000,00			-
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.000.000,00	1.000.000,00			-
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	960.000,00	960.000,00			-
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	44.331.010,00	42.093.250,00	2.237.760,00		-
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	780.000,00	780.000,00			-
19	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.875.000,00		1.875.000,00		-
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.272.730.013,04	95.510.603,00		1.533.736,50	1.178.753.147
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.072.813.135,57	385.360.106,00			687.453.030
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	14.025.000,00				14.025.000
JUMLAH		**5.192.971.396,01**	**2.969.929.559,40**	**344.344.397,00**	**1.623.068.942,50**	**3.501.766.382,11**

RINCIAN SISA KEWAJIBAN PEMKO PARIAMAN (UTANG BELANJA)

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	URAIAN	Nilai	Akun Belanja
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Pembayaran Kekurangan Gaji Tenaga Outsourching Tahun Anggaran 2025	24.750.000,00	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
2	RSUD dr. Sadikin	Utang Belanja BLUD- Belanja Obat	554.244.267,00	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan
3	RSUD dr. Sadikin	Utang Belanja BLUD- Belanja Obat	154.099.124,00	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
4	RSUD dr. Sadikin	Utang Belanja BLUD - Bahan Medis Habis Pakai	353.114.115,00	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
5	RSUD dr. Sadikin	Utang Belanja BLUD - Jasa Tenaga Kesehatan	3.500.000,00	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Kewajiban Tahun 2022 dan 2023 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tanki Septik Individual dan MCK/Jamban CV. Parades Karya Consultan	19.875.600,00	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Kewajiban Pembayaran Sisa Kegiatan Tahun 2022 dan 2023 Jasa Pengawasan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah CV. Diwel Enggineering Consultant	14.944.500,00	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Kewajiban Pembayaran Sisa Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pembangunan Tanki Septik Indivudual dan MCK/Jamban PT. Adikarya Konstruksi Perkasa	497.007.600,00	Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
9	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	KURANG SALUR DBH DESA	1.178.753.146,54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
10	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	KURANG SALUR DBH DESA	687.453.029,57	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
		Utang Belanja Bagi Hasil untuk KAN Kurai Taji Tahun 2021	14.025.000,00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
JUMLAH			**3.501.766.382,11**	

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Beban Pegawai BLUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	74.260.731.836,00	23.183.768.460,00	15.642.775.196,00		0,00	0,00	0,00	113.087.275.492,00
2	Dinas Kesehatan	40.544.226.772,00	23.294.153.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.838.380.012,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	1.701.000.000,00	154.099.124,00	0,00	0,00	0,00	3.282.659.368,00	5.137.758.492,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	104.843.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.763.891,00	482.607.406,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	104.953.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.996.528,00	583.950.303,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	170.400.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.354.749,00	1.140.755.113,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	73.279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.185.711,00	527.464.911,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	83.682.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.375.057,00	494.057.788,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	97.057.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.364.373,00	624.422.240,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	93.474.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.001.767,00	513.476.719,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	3.742.517.318,00	2.030.764.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773.281.494,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	5.237.716.408,00	2.694.527.250,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00	50.415.000,00	7.986.298.658,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.285.147.276,00	1.020.802.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.949.795,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.802.099.870,00	1.910.206.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712.306.162,00
16	Dinas Sosial	1.433.925.999,00	989.365.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.291.158,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	2.042.474.554,00	1.181.330.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.804.936,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.889.155.588,00	1.263.146.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.302.090,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.604.453.637,00	1.176.965.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.419.000,00
20	Dinas Perhubungan	3.302.589.153,00	1.430.970.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.559.448,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.021.145.962,00	1.091.612.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.758.004,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Beban Pegawai BLUD	TOTAL
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.947.482.930,00	1.720.432.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667.915.690,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	2.386.121.659,00	1.455.798.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.919.703,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.618.164.847,00	1.503.904.567,00	0,00	0,00	7.875.000,00	0,00	0,00	4.129.944.414,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.393.761.160,00	898.137.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.898.181,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	8.143.736.797,00	4.913.843.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057.579.936,00
27	Sekretariat Daerah	5.544.791.322,00	4.113.789.150,00	0,00	0,00	143.806.716,00	275.000.000,00	0,00	10.077.387.188,00
28	Sekretariat DPRD	2.013.046.995,00	1.212.881.435,00	0,00	5.910.156.687,00	0,00	110.880.000,00	0,00	9.246.965.117,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2.230.898.903,00	1.390.698.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.596.974,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	3.502.424.564,00	2.770.096.273,00	0,00	0,00	172.173.784,00	0,00	0,00	6.444.694.621,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	2.075.139.671,00	1.232.529.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.669.518,00
32	Inspektorat	4.163.911.245,00	2.946.491.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.403.008,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	1.462.405.365,00	858.763.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.168.932,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	6.496.886.702,00	3.508.160.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005.047.346,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.541.889.639,00	876.938.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418.828.191,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	1.052.700.881,00	607.260.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.961.829,00
37	Kantor Kesbangpol	1.074.325.172,00	666.464.367,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.740.789.539,00
TOTAL		**193.813.872.225,00**	**94.372.494.232,00**	**15.796.874.320,00**	**5.910.156.687,00**	**327.495.500,00**	**385.880.000,00**	**6.972.116.444,00**	**317.578.889.408,00**

Lampiran 27a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Gaji Pokok ASN	Beban Tunjangan Keluarga ASN	Beban Tunjangan Jabatan ASN	Beban Tunjangan Fungsional ASN	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Beban Tunjangan Beras ASN	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Beban Pembulatan Gaji ASN	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	56.545.132.335,00	5.401.243.122,00	98.625.000,00	4.434.866.000,00	389.585.000,00	2.970.378.720,00	205.307.653,00	677.733,00	3.744.568.623,00	117.587.624,00	352.760.026,00	74.260.731.836,00
2	Dinas Kesehatan	30.263.534.654,00	2.567.055.835,00	124.674.950,00	3.374.319.850,00	167.780.000,00	1.654.362.480,00	81.425.038,00	441.286,00	2.060.889.584,00	62.435.445,00	187.307.650,00	40.544.226.772,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.852.473.640,00	236.475.450,00	102.480.000,00	53.910.000,00	120.820.000,00	162.510.480,00	1.875.475,00	51.919,00	188.071.368,00	5.962.222,00	17.886.764,00	3.742.517.318,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	3.982.218.160,00	339.206.078,00	142.380.000,00	60.606.000,00	183.805.000,00	232.902.720,00	5.501.049,00	64.691,00	257.515.466,00	8.379.318,00	25.137.926,00	5.237.716.408,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.686.806.200,00	165.112.480,00	106.315.000,00	28.840.000,00	61.960.000,00	110.232.992,00	3.776.372,00	26.525,00	107.294.990,00	3.695.713,00	11.087.004,00	2.285.147.276,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.168.565.020,00	461.801.246,00	98.450.000,00	147.930.000,00	240.805.000,00	341.098.200,00	2.784.857,00	77.832,00	294.261.803,00	11.581.739,00	34.744.173,00	6.802.099.870,00
16	Dinas Sosial	1.047.518.820,00	94.054.816,00	81.830.000,00	36.120.000,00	27.330.000,00	54.677.100,00	4.418.554,00	15.539,00	79.183.579,00	2.194.393,00	6.583.198,00	1.433.925.999,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.546.644.980,00	101.365.870,00	66.815.000,00	67.956.000,00	57.825.000,00	77.489.400,00	5.618.183,00	20.332,00	105.639.080,00	3.275.182,00	9.825.527,00	2.042.474.554,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.370.136.180,00	125.923.070,00	88.550.000,00	77.840.000,00	34.750.000,00	71.550.960,00	6.057.081,00	21.842,00	102.870.388,00	2.864.023,00	8.592.044,00	1.889.155.588,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.158.498.920,00	102.059.062,00	77.174.950,00	64.960.000,00	36.010.000,00	61.267.320,00	4.561.592,00	15.819,00	90.338.200,00	2.391.925,00	7.175.849,00	1.604.453.637,00
20	Dinas Perhubungan	2.510.486.796,00	217.685.008,00	113.260.000,00	20.050.000,00	111.880.000,00	148.026.480,00	3.082.982,00	37.440,00	156.429.728,00	5.412.725,00	16.237.994,00	3.302.589.153,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.452.887.780,00	136.646.928,00	77.070.000,00	105.704.000,00	44.805.000,00	83.789.940,00	4.500.575,00	22.517,00	103.193.297,00	3.131.515,00	9.394.410,00	2.021.145.962,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.212.047.880,00	182.833.326,00	108.710.000,00	73.400.000,00	76.590.000,00	116.378.940,00	5.794.113,00	33.406,00	153.040.732,00	4.663.635,00	13.990.898,00	2.947.482.930,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	1.758.896.960,00	155.616.340,00	87.290.000,00	73.450.000,00	65.710.000,00	98.925.720,00	6.192.318,00	26.555,00	125.256.483,00	3.689.291,00	11.067.992,00	2.386.121.659,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.939.849.605,00	169.076.042,00	75.509.950,00	99.876.000,00	71.030.000,00	107.109.180,00	5.218.725,00	26.354,00	134.064.708,00	4.101.070,00	12.303.213,00	2.618.164.847,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.017.641.774,00	81.092.338,00	80.990.000,00	59.840.000,00	16.990.000,00	46.421.220,00	5.236.153,00	13.343,00	77.105.880,00	2.107.607,00	6.322.845,00	1.393.761.160,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	5.971.654.981,00	535.225.784,00	123.020.000,00	556.149.950,00	142.410.000,00	329.438.580,00	12.986.411,00	86.031,00	423.237.009,00	12.381.895,00	37.146.156,00	8.143.736.797,00
27	Sekretariat Daerah	4.006.836.739,00	369.914.420,00	237.225.000,00	208.493.000,00	133.480.000,00	222.619.080,00	15.393.818,00	58.514,00	317.044.701,00	8.431.544,00	25.294.506,00	5.544.791.322,00
28	Sekretariat DPRD	1.508.344.140,00	121.167.992,00	74.970.000,00	66.948.000,00	48.760.000,00	67.350.600,00	6.837.114,00	23.052,00	105.942.607,00	3.175.874,00	9.527.616,00	2.013.046.995,00

Lampiran 27a

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Gaji Pokok ASN	Beban Tunjangan Keluarga ASN	Beban Tunjangan Jabatan ASN	Beban Tunjangan Fungsional ASN	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Beban Tunjangan Beras ASN	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Beban Pembulatan Gaji ASN	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	TOTAL
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	1.593.306.843,00	158.445.170,00	76.345.000,00	127.380.000,00	47.740.000,00	90.959.520,00	6.474.917,00	25.430,00	117.061.919,00	3.290.006,00	9.870.098,00	2.230.898.903,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.644.986.208,00	255.374.640,00	133.939.950,00	10.560.000,00	101.060.000,00	148.461.000,00	4.487.492,00	38.630,00	181.308.028,00	5.552.149,00	16.656.467,00	3.502.424.564,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.527.682.140,00	147.027.982,00	74.915.000,00	63.455.000,00	51.750.000,00	84.948.660,00	5.223.643,00	20.905,00	107.498.073,00	3.154.564,00	9.463.704,00	2.075.139.671,00
32	Inspektorat	2.960.844.019,00	239.469.908,00	97.024.950,00	422.514.950,00	29.285.000,00	138.901.560,00	18.614.457,00	45.303,00	232.636.663,00	6.143.582,00	18.430.853,00	4.163.911.245,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	1.081.613.836,00	119.313.354,00	69.380.000,00	0,00	37.225.000,00	68.074.800,00	2.623.540,00	14.828,00	75.166.128,00	2.248.457,00	6.745.422,00	1.462.405.365,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	4.929.496.920,00	444.140.834,00	386.475.000,00	0,00	106.635.000,00	257.887.620,00	5.248.388,00	66.299,00	325.836.296,00	10.275.038,00	30.825.307,00	6.496.886.702,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.151.277.900,00	120.024.522,00	70.689.950,00	0,00	38.510.000,00	72.275.160,00	1.778.801,00	17.935,00	77.835.646,00	2.369.923,00	7.109.802,00	1.541.889.639,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	778.978.780,00	80.016.590,00	56.580.000,00	0,00	25.920.000,00	48.666.240,00	1.482.813,00	12.685,00	54.434.657,00	1.652.276,00	4.956.840,00	1.052.700.881,00
37	Kantor Kesbangpol	803.652.920,00	81.742.486,00	41.940.000,00	0,00	32.325.000,00	50.476.740,00	1.268.418,00	13.017,00	56.257.892,00	1.662.145,00	4.986.554,00	1.074.325.172,00
TOTAL		**145.472.015.130,00**	**13.209.110.693,00**	**2.972.629.700,00**	**10.235.168.750,00**	**2.502.775.000,00**	**7.917.181.412,00**	**433.770.532,00**	**1.995.762,00**	**9.853.983.528,00**	**303.810.880,00**	**911.430.838,00**	**193.813.872.225,00**

Lampiran 27b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5.128.142.687,00	82.850.913,00	0,00	2.378.117.661,00	15.594.657.199,00	23.183.768.460,00
2	Dinas Kesehatan	15.317.887.804,00	560.146.405,00	0,00	7.340.152.534,00	75.966.497,00	23.294.153.240,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	1.701.000.000,00	0,00	0,00	1.701.000.000,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	104.843.515,00	104.843.515,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	104.953.775,00	104.953.775,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400.364,00	170.400.364,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	73.279.200,00	73.279.200,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	83.682.731,00	83.682.731,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	97.057.867,00	97.057.867,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	93.474.952,00	93.474.952,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.303.729.674,00	121.910.699,00	0,00	596.016.161,00	9.107.642,00	2.030.764.176,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.767.262.602,00	108.341.561,00	0,00	793.462.284,00	25.460.803,00	2.694.527.250,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632.301.009,00	115.202.014,00	0,00	272.899.068,00	400.428,00	1.020.802.519,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.199.049.084,00	172.600.368,00	0,00	537.797.675,00	759.165,00	1.910.206.292,00
16	Dinas Sosial	654.197.453,00	72.356.324,00	0,00	262.415.174,00	396.208,00	989.365.159,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	780.524.315,00	66.774.728,00	0,00	333.663.605,00	367.734,00	1.181.330.382,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	830.917.029,00	79.333.932,00	0,00	352.497.143,00	398.398,00	1.263.146.502,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	776.037.475,00	71.554.287,00	0,00	328.993.174,00	380.427,00	1.176.965.363,00
20	Dinas Perhubungan	937.354.817,00	93.036.307,00	0,00	399.877.685,00	701.486,00	1.430.970.295,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	713.045.057,00	78.149.971,00	0,00	300.016.628,00	400.386,00	1.091.612.042,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.146.228.663,00	78.585.708,00	0,00	494.631.079,00	987.310,00	1.720.432.760,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	972.349.853,00	64.480.032,00	0,00	418.567.255,00	400.904,00	1.455.798.044,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	994.454.837,00	51.280.080,00	0,00	428.144.180,00	30.025.470,00	1.503.904.567,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	578.030.035,00	75.842.843,00	0,00	243.869.410,00	394.733,00	898.137.021,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	3.293.309.422,00	117.931.453,00	0,00	1.498.253.063,00	4.349.201,00	4.913.843.139,00
27	Sekretariat Daerah	2.529.568.900,00	409.722.046,00	17.891.780,00	1.156.606.424,00	0,00	4.113.789.150,00
28	Sekretariat DPRD	794.605.363,00	87.036.417,00	0,00	330.839.307,00	400.348,00	1.212.881.435,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	936.344.301,00	49.430.793,00	0,00	404.225.106,00	697.871,00	1.390.698.071,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.299.202.435,00	157.572.239,00	0,00	597.165.863,00	716.155.736,00	2.770.096.273,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	828.581.203,00	61.279.802,00	0,00	342.268.394,00	400.448,00	1.232.529.847,00
32	Inspektorat	1.974.160.870,00	75.151.824,00	0,00	887.580.165,00	9.598.904,00	2.946.491.763,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	573.800.992,00	35.814.244,00	0,00	248.740.911,00	407.420,00	858.763.567,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.273.743.159,00	217.715.809,00	0,00	1.011.837.957,00	4.863.719,00	3.508.160.644,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	584.188.803,00	36.855.871,00	0,00	255.559.566,00	334.312,00	876.938.552,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	401.722.788,00	35.447.914,00	0,00	170.090.246,00	0,00	607.260.948,00
37	Kantor Kesbangpol	446.296.156,00	22.182.220,00	0,00	197.586.422,00	399.569,00	666.464.367,00
	TOTAL	**49.667.036.786,00**	**3.198.586.804,00**	**1.718.891.780,00**	**22.581.874.140,00**	**17.206.104.722,00**	**94.372.494.232,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
AN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	15.642.775.196,00	0,00	15.642.775.196,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	154.099.124,00	154.099.124,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**15.642.775.196,00**	**154.099.124,00**	**15.796.874.320,00**

Lampiran 27d

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Uang Representasi DPRD	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	Beban Tunjangan Beras DPRD	Beban Uang Paket DPRD	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Beban Tunjangan Reses DPRD	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	TOTAL
1	Sekretariat DPRD	451.290.000,00	23.373.000,00	37.513.520,00	38.682.000,00	654.370.500,00	62.574.750,00	5.892.075,00	1.512.000.000,00	378.000.000,00	1.343.050,00	989.850.612,00	1.755.267.180,00	5.910.156.687,00
TOTAL		**451.290.000,00**	**23.373.000,00**	**37.513.520,00**	**38.682.000,00**	**654.370.500,00**	**62.574.750,00**	5.892.075,00	**1.512.000.000,00**	**378.000.000,00**	**1.343.050,00**	**989.850.612,00**	**1.755.267.180,00**	**5.910.156.687,00**

Lampiran 27e

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	TOTAL
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
2	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00
3	Sekretariat Daerah	46.799.960,00	3.024.000,00	84.240.000,00	4.345.200,00	553.356,00	1.000,00	4.468.800,00	93.600,00	280.800,00	0,00	0,00	143.806.716,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.771.110,00	1.402.674,00	172.173.784,00
TOTAL		**46.799.960,00**	**3.024.000,00**	**84.240.000,00**	**4.345.200,00**	**553.356,00**	**1.000,00**	**4.468.800,00**	**93.600,00**	**280.800,00**	**170.771.110,00**	**12.917.674,00**	**327.495.500,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH DAN BEBAN PEGAWAI BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	Beban Pegawai BLUD	TOTAL
1	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	3.282.659.368,00	3.282.659.368,00
2	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	377.763.891,00	377.763.891,00
3	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	478.996.528,00	478.996.528,00
4	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	970.354.749,00	970.354.749,00
5	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	454.185.711,00	454.185.711,00
6	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	410.375.057,00	410.375.057,00
7	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	527.364.373,00	527.364.373,00
8	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	420.001.767,00	420.001.767,00
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	50.415.000,00	50.415.000,00
10	Sekretariat Daerah	0,00	275.000.000,00	0,00	275.000.000,00
11	Sekretariat DPRD	110.880.000,00	0,00	0,00	110.880.000,00
	TOTAL	**110.880.000,00**	**275.000.000,00**	**6.972.116.444,00**	**7.357.996.444,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BEBAN BARANG DAN JASA				TOTAL
		BEBAN JASA	BEBAN PERSEDIAAN	BEBAN PEMELIHARAAN	BEBAN PERJALANAN DINAS	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	15.910.150.674,00	1.711.121.861,00	1.334.487.776,00	266.042.794,00	19.221.803.105,00
2	Dinas Kesehatan	12.260.510.935,00	4.570.807.958,00	487.394.514,00	351.052.795,00	17.669.766.202,00
3	RSUD dr Sadikin	5.214.425.897,60	1.059.241.650,53	81.855.507,00	-	6.355.523.055,13
4	UPT. Puskesmas Air Santok	740.657.124,00	43.736.854,69	42.831.850,00	-	827.225.828,69
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	901.412.340,00	18.869.635,33	64.596.000,00	-	984.877.975,33
6	UPT. Puskesmas Pariaman	1.570.584.581,00	26.656.647,60	86.324.000,00	-	1.683.565.228,60
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	960.298.965,00	48.471.227,49	69.827.795,00	1.125.000,00	1.079.722.987,49
8	UPT. Puskesmas Marunggi	826.515.409,00	(12.738.771,85)	74.787.200,00	-	888.563.837,15
9	UPT. Puskesmas Naras	782.163.727,00	(35.497.233,70)	48.500.000,00	-	795.166.493,30
10	UPT. Puskesmas Sikapak	763.341.258,00	37.056.466,51	62.653.000,00	-	863.050.724,51
11	UPT. Instalasi Farmasi	204.481.780,00	87.566.815,00	34.213.000,00	17.457.500,00	343.719.095,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.243.987.537,00	2.714.539.530,00	2.048.782.563,00	197.421.330,00	10.204.730.960,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	7.533.833.691,00	1.749.310.753,00	1.226.073.575,00	139.451.901,00	10.648.669.920,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.083.593.314,00	155.968.730,00	233.231.740,00	54.304.086,00	1.527.097.870,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.967.902.436,56	356.800.240,00	550.095.595,00	35.575.500,00	4.910.373.771,56
16	Dinas Sosial	521.050.940,00	523.930.200,00	96.908.410,00	70.395.949,00	1.212.285.499,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.182.619.129,00	645.383.900,00	243.249.835,00	227.592.990,00	4.298.845.854,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	183.722.532,00	133.265.667,00	97.122.000,00	54.916.315,00	469.026.514,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.530.111.681,00	235.195.700,00	120.061.012,00	138.393.539,00	2.023.761.932,00
20	Dinas Perhubungan	1.604.770.103,00	474.907.430,00	1.022.997.504,00	68.638.967,00	3.171.314.004,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.235.059.083,00	52.758.750,00	314.452.810,00	159.957.914,00	3.762.228.557,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.685.231.536,00	767.730.800,00	328.269.983,00	149.013.214,00	3.930.245.533,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	561.357.480,00	183.022.000,00	136.398.911,00	96.117.368,00	976.895.759,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.626.802.441,00	332.435.100,00	203.599.910,00	174.605.458,00	2.337.442.909,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	497.030.478,00	248.361.950,00	110.991.500,00	57.516.614,00	913.900.542,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.193.453.233,00	1.923.868.010,67	390.866.900,00	157.076.685,00	3.665.264.828,67
27	Sekretariat Daerah	10.169.145.453,00	5.681.042.248,00	2.106.689.111,08	2.602.528.187,00	20.559.404.999,08
28	Sekretariat DPRD	3.207.128.922,00	2.452.345.611,00	639.083.335,00	8.700.953.705,00	14.999.511.573,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	683.401.609,00	373.317.845,00	121.126.849,00	129.916.054,00	1.307.762.357,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	5.109.013.904,00	1.628.922.505,00	373.978.174,46	880.796.815,00	7.992.711.398,46
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	962.216.442,00	240.106.778,00	94.677.057,00	540.203.510,00	1.837.203.787,00
32	Inspektorat	333.379.754,00	72.409.000,00	102.364.483,00	784.106.188,00	1.292.259.425,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	171.732.511,00	62.230.796,00	39.538.000,00	21.161.477,00	294.662.784,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.907.105.334,00	903.465.110,00	353.578.970,00	147.944.805,00	4.312.094.219,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	163.275.399,00	53.961.000,00	47.320.440,00	17.938.500,00	282.495.339,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	167.436.976,00	31.498.500,00	45.100.400,00	17.007.621,00	261.043.497,00
37	Kantor Kesbangpol	633.746.100,00	431.693.030,00	34.127.000,00	133.821.859,00	1.233.387.989,00
TOTAL		**99.292.650.709,16**	**29.983.764.294,27**	**13.468.156.709,54**	**16.393.034.640,00**	**159.137.606.352,97**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Bahan Habis pakai	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.523.751.000,00	187.370.861,00	1.711.121.861,00
2	Dinas Kesehatan	4.574.474.958,00	-3.667.000,00	4.570.807.958,00
3	RSUD dr Sadikin	1.059.241.650,53	0,00	1.059.241.650,53
4	UPT. Puskesmas Air Santok	43.736.854,69	0,00	43.736.854,69
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	18.869.635,33	0,00	18.869.635,33
6	UPT. Puskesmas Pariaman	26.656.647,60	0,00	26.656.647,60
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	48.910.227,49	-439.000,00	48.471.227,49
8	UPT. Puskesmas Marunggi	(12.738.771,85)	0,00	(12.738.771,85)
9	UPT. Puskesmas Naras	(35.497.233,70)	0,00	(35.497.233,70)
10	UPT. Puskesmas Sikapak	53.913.466,51	-16.857.000,00	37.056.466,51
11	UPT. Instalasi Farmasi	87.566.815,00	0,00	87.566.815,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.714.539.530,00	0,00	2.714.539.530,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.793.240.753,00	-43.930.000,00	1.749.310.753,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	155.968.730,00	0,00	155.968.730,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	356.800.240,00	0,00	356.800.240,00
16	Dinas Sosial	523.930.200,00	0,00	523.930.200,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	645.383.900,00	0,00	645.383.900,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	133.265.667,00	0,00	133.265.667,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	235.195.700,00	0,00	235.195.700,00
20	Dinas Perhubungan	474.907.430,00	0,00	474.907.430,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	52.758.750,00	0,00	52.758.750,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	767.730.800,00	0,00	767.730.800,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	183.022.000,00	0,00	183.022.000,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	335.735.100,00	-3.300.000,00	332.435.100,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	248.061.950,00	300.000,00	248.361.950,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.923.868.010,67	0,00	1.923.868.010,67
27	Sekretariat Daerah	5.681.042.248,00	0,00	5.681.042.248,00
28	Sekretariat DPRD	1.972.649.240,00	479.696.371,00	2.452.345.611,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	373.317.845,00	0,00	373.317.845,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.628.922.505,00	0,00	1.628.922.505,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	240.106.778,00	0,00	240.106.778,00
32	Inspektorat	72.409.000,00	0,00	72.409.000,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	62.230.796,00	0,00	62.230.796,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	901.665.110,00	1.800.000,00	903.465.110,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	53.961.000,00	0,00	53.961.000,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	31.498.500,00	0,00	31.498.500,00
37	Kantor Kesbangpol	431.693.030,00	0,00	431.693.030,00
TOTAL		**29.382.790.062,27**	**600.974.232,00**	**29.983.764.294,27**

Lampiran 28b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Jasa Kantor	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Beban Sewa Tanah	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Beban Barang dan Jasa BOS	Beban Barang dan Jasa BLUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5.472.626.369,00	39.042.000,00	13.945.000,00	35.500.000,00	11.100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900.000,00	673.637.608,00	0,00	9.557.399.697,00	0,00	15.910.150.674,00
2	Dinas Kesehatan	1.240.027.102,00	9.820.785.183,00	0,00	52.000.000,00	504.580.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.618.650,00	0,00	0,00	0,00	12.260.510.935,00
3	RSUD dr Sadikin	1.221.137.880,60	2.196.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933.210,00	0,00	0,00	3.834.158.411,00	5.214.425.897,60
4	UPT. Puskesmas Air Santok	127.683.991,00	278.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048.600,00	488.450.499,00	0,00	115.195.394,00	740.657.124,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	159.282.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	547.404.000,00	0,00	189.100.901,00	901.412.340,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	197.435.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625.000,00	984.964.500,00	0,00	373.559.358,00	1.570.584.581,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	135.451.232,00	360.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625.000,00	569.867.500,00	0,00	239.994.378,00	960.298.965,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	166.969.376,00	356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702.760,00	481.398.600,00	0,00	163.088.273,00	826.515.409,00
9	UPT. Puskesmas Naras	126.280.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.868,00	505.745.000,00	0,00	146.175.063,00	782.163.727,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	108.799.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125.000,00	490.206.500,00	0,00	154.209.900,00	763.341.258,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	140.966.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.515.000,00	0,00	0,00	0,00	204.481.780,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	4.977.430.537,00	12.999.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.132.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.425.000,00	0,00	0,00	0,00	5.243.987.537,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	4.941.469.150,00	168.326.995,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.039.919,00	0,00	0,00	1.286.997.627,00	7.533.833.691,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.062.141.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451.634,00	0,00	0,00	0,00	1.083.593.314,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.768.118.423,00	145.259.713,56	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.300,00	0,00	0,00	0,00	3.967.902.436,56
16	Dinas Sosial	307.209.700,00	197.640,00	0,00	8.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.443.600,00	0,00	0,00	0,00	521.050.940,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	726.407.625,00	711.504,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.408.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.182.619.129,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	180.234.100,00	488.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	183.722.532,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	751.766.681,00	0,00	0,00	19.985.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	724.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.111.681,00
20	Dinas Perhubungan	1.467.737.477,00	4.207.626,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.604.770.103,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.755.020.250,00	1.617.840,00	0,00	0,00	18.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.973.993,00	0,00	0,00	0,00	3.235.059.083,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.149.028.377,00	955.800,00	0,00	38.500.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.497.359,00	0,00	0,00	0,00	2.685.231.536,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	360.280.000,00	134.577.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	561.357.480,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	855.515.061,00	1.699.380,00	0,00	191.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.099.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626.802.441,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	347.511.428,00	0,00	0,00	18.550.000,00	0,00	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450.000,00	61.019.050,00	0,00	0,00	0,00	497.030.478,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.120.725.183,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.728.050,00	0,00	0,00	0,00	1.193.453.233,00
27	Sekretariat Daerah	3.977.940.994,00	0,00	0,00	1.450.524.700,00	368.730.000,00	96.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.288.000,00	1.273.091.759,00	0,00	0,00	0,00	10.169.145.453,00
28	Sekretariat DPRD	2.457.300.563,00	2.415.204,00	0,00	201.500.000,00	428.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.953.155,00	0,00	0,00	0,00	3.207.128.922,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	650.823.710,00	477.899,00	0,00	1.200.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	683.401.609,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.927.710.059,00	1.851.345.780,00	0,00	0,00	243.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.847.378,00	9.388.687,00	0,00	47.022.000,00	0,00	0,00	0,00	5.109.013.904,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	759.436.028,00	402.414,00	0,00	0,00	30.150.000,00	0,00	0,00	0,00	125.978.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	962.216.442,00
32	Inspektorat	231.539.264,00	311.038,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.029.452,00	0,00	0,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	333.379.754,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	158.232.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	171.732.511,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.734.197.932,00	1.453.427,00	0,00	3.000.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.853.975,00	0,00	0,00	0,00	2.907.105.334,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Jasa Kantor	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Beban Sewa Tanah	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Beban Barang dan Jasa BOS	Beban Barang dan Jasa BLUD	TOTAL
35	Kecamatan Pariaman Selatan	145.480.299,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.572.900,00	0,00	0,00	0,00	163.275.399,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	146.932.476,00	291.600,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.212.900,00	0,00	0,00	0,00	167.436.976,00
37	Kantor Kesbangpol	300.670.000,00	136.800,00	0,00	46.550.000,00	192.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	93.089.300,00	0,00	0,00	0,00	633.746.100,00
TOTAL		**47.357.521.054,60**	**12.191.118.086,56**	**13.945.000,00**	**2.097.498.700,00**	**1.937.317.000,00**	**160.570.000,00**	**205.132.160,00**	**49.500.000,00**	**125.978.000,00**	**131.876.830,00**	**9.388.687,00**	**3.202.838.000,00**	**11.682.051.590,00**	**4.068.036.599,00**	**9.557.399.697,00**	**6.502.479.305,00**	**99.292.650.709,16**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	131.862.350,00	1.202.625.426,00	0,00	1.334.487.776,00
2	Dinas Kesehatan	158.222.667,00	329.171.847,00	0,00	487.394.514,00
3	RSUD dr Sadikin	81.855.507,00	0,00	0,00	81.855.507,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	42.831.850,00	0,00	0,00	42.831.850,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	64.596.000,00	0,00	0,00	64.596.000,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	61.324.000,00	25.000.000,00	0,00	86.324.000,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	67.015.445,00	0,00	2.812.350,00	69.827.795,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	39.787.200,00	35.000.000,00	0,00	74.787.200,00
9	UPT. Puskesmas Naras	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	52.653.000,00	10.000.000,00	0,00	62.653.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	34.213.000,00	0,00	0,00	34.213.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	287.984.821,00	350.747.457,00	1.410.050.285,00	2.048.782.563,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	851.330.525,00	175.446.050,00	199.297.000,00	1.226.073.575,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	233.231.740,00	0,00	0,00	233.231.740,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	550.095.595,00	0,00	0,00	550.095.595,00
16	Dinas Sosial	88.508.410,00	8.400.000,00	0,00	96.908.410,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	243.249.835,00	0,00	0,00	243.249.835,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	97.122.000,00	0,00	0,00	97.122.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	96.735.512,00	23.325.500,00	0,00	120.061.012,00
20	Dinas Perhubungan	882.412.055,00	140.585.449,00	0,00	1.022.997.504,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	314.452.810,00	0,00	0,00	314.452.810,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	228.400.200,00	99.869.783,00	0,00	328.269.983,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	130.051.911,00	6.347.000,00	0,00	136.398.911,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	114.850.000,00	88.749.910,00	0,00	203.599.910,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	110.991.500,00	0,00	0,00	110.991.500,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	384.866.900,00	6.000.000,00	0,00	390.866.900,00
27	Sekretariat Daerah	619.365.876,00	1.487.323.235,08	0,00	2.106.689.111,08
28	Sekretariat DPRD	370.311.684,00	258.996.651,00	9.775.000,00	639.083.335,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	121.126.849,00	0,00	0,00	121.126.849,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	209.455.389,00	164.522.785,46	0,00	373.978.174,46
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	94.677.057,00	0,00	0,00	94.677.057,00
32	Inspektorat	96.365.098,00	5.999.385,00	0,00	102.364.483,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	39.538.000,00	0,00	0,00	39.538.000,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	288.503.970,00	65.075.000,00	0,00	353.578.970,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	47.320.440,00	0,00	0,00	47.320.440,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	45.100.400,00	0,00	0,00	45.100.400,00
37	Kantor Kesbangpol	34.127.000,00	0,00	0,00	34.127.000,00
TOTAL		**7.363.036.596,00**	**4.483.185.478,54**	**1.621.934.635,00**	**13.468.156.709,54**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PERJALANAN DINAS - LO
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Perjalanan Dinas	TOTAL
		Beban Perjalanan Dinas Biasa	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	266.042.794,00	266.042.794,00
2	Dinas Kesehatan	351.052.795,00	351.052.795,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	1.125.000,00	1.125.000,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	17.457.500,00	17.457.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	197.421.330,00	197.421.330,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	139.451.901,00	139.451.901,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.304.086,00	54.304.086,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	35.575.500,00	35.575.500,00
16	Dinas Sosial	70.395.949,00	70.395.949,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	227.592.990,00	227.592.990,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	54.916.315,00	54.916.315,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	138.393.539,00	138.393.539,00
20	Dinas Perhubungan	68.638.967,00	68.638.967,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	159.957.914,00	159.957.914,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	149.013.214,00	149.013.214,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	96.117.368,00	96.117.368,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	174.605.458,00	174.605.458,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	57.516.614,00	57.516.614,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	157.076.685,00	157.076.685,00
27	Sekretariat Daerah	2.602.528.187,00	2.602.528.187,00
28	Sekretariat DPRD	8.700.953.705,00	8.700.953.705,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	129.916.054,00	129.916.054,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	880.796.815,00	880.796.815,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	540.203.510,00	540.203.510,00
32	Inspektorat	784.106.188,00	784.106.188,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	21.161.477,00	21.161.477,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	147.944.805,00	147.944.805,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	17.938.500,00	17.938.500,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	17.007.621,00	17.007.621,00
37	Kantor Kesbangpol	133.821.859,00	133.821.859,00
TOTAL		**16.393.034.640,00**	**16.393.034.640,00**

Lampiran 28e

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN HIBAH - LO
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.328.605.110,00	0,00	600.000.000,00	2.341.735.000,00	0,00	6.270.340.110,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00
4	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	925.776.000,00	925.776.000,00
	TOTAL	**3.328.605.110,00**	**210.000.000,00**	**750.000.000,00**	**2.341.735.000,00**	**925.776.000,00**	**7.556.116.110,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	846.270.276,00
2	Dinas Kesehatan	3.667.000,00
3	RSUD dr Sadikin	106.826.766,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	1.468.720,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	2.357.160,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	12.395.920,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	970.000,00
9	UPT. Puskesmas Naras	20.800.000,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	16.857.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	48.018.600,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	73.930.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00
16	Dinas Sosial	1.600.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00
20	Dinas Perhubungan	590.084.450,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.300.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.200.000,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00
27	Sekretariat Daerah	217.011.770,00
28	Sekretariat DPRD	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00
32	Inspektorat	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	200.000,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00
37	Kantor Kesbangpol	920.000,00
TOTAL		**1.947.877.662,00**

DAFTAR SELISIH BEBAN PEGAWAI-LO DAN BELANJA PEGAWAI -LRA
TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO	LRA-LO	Hutang 2025
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	113.087.275.492,00	113.087.275.492,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	63.838.380.012,00	63.838.380.012,00	0,00	-
3	RSUD dr Sadikin	4.983.659.368,00	5.137.758.492,00	(154.099.124,00)	154.099.124
4	UPT. Puskesmas Air Santok	482.607.406,00	482.607.406,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	583.950.303,00	583.950.303,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	1.140.755.113,00	1.140.755.113,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	527.464.911,00	527.464.911,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	494.057.788,00	494.057.788,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	624.422.240,00	624.422.240,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	513.476.719,00	513.476.719,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.773.281.494,00	5.773.281.494,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	7.986.298.658,00	7.986.298.658,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.305.949.795,00	3.305.949.795,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.712.306.162,00	8.712.306.162,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	2.423.291.158,00	2.423.291.158,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.223.804.936,00	3.223.804.936,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.152.302.090,00	3.152.302.090,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.781.419.000,00	2.781.419.000,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	4.733.559.448,00	4.733.559.448,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.112.758.004,00	3.112.758.004,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	4.667.915.690,00	4.667.915.690,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	3.841.919.703,00	3.841.919.703,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.129.944.414,00	4.129.944.414,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.291.898.181,00	2.291.898.181,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	13.057.579.936,00	13.057.579.936,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	10.077.387.188,00	10.077.387.188,00	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	9.246.965.117,00	9.246.965.117,00	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	3.621.596.974,00	3.621.596.974,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	6.444.694.621,00	6.444.694.621,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	3.307.669.518,00	3.307.669.518,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	7.110.403.008,00	7.110.403.008,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	2.321.168.932,00	2.321.168.932,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	10.005.047.346,00	10.005.047.346,00	0,00	
35	Kecamatan Pariaman Selatan	2.418.828.191,00	2.418.828.191,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	1.659.961.829,00	1.659.961.829,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	1.740.789.539,00	1.740.789.539,00	0,00	0,00
Total		**317.424.790.284,00**	**317.578.889.408,00**	**(154.099.124,00)**	**154.099.124,00**

Lampiran 29b

DAFTAR SELISIH BEBAN BARANG LO DAN BEBAN BARANG -LRA
TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Persediaan Awal Tahun 2025	Belanja Persediaan -LRA	Persedian Akhir Tahun 2025	Persedian yang digunakan	Beban Persediaan -LO	Selisih	Utang Belanja Tahun 2025	Pembayaran Utang Belanja	Belanja Modal Tambah Barang dan Jasa	Koreksi BPK	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=7-6					
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	1.717.921.861,00	0,00	1.717.921.861,00	1.711.121.861,00	(6.800.000,00)	-	-	(6.800.000,00)		(6.800.000,00)
2	Dinas Kesehatan	5.566.000,00	4.570.807.958,00	5.566.000,00	4.570.807.958,00	4.570.807.958,00	-	0,00	0,00	-		-
3	RSUD dr Sadikin	568.277.136,53	284.663.798,00	701.057.666,00	151.883.268,53	1.059.241.650,53	907.358.382,00	907.358.382,00	-	0,00		907.358.382,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	107.831.904,13	10.105.000,00	74.200.049,44	43.736.854,69	43.736.854,69	-	-	-	0,00		-
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	89.620.851,67	18.489.500,00	89.240.716,34	18.869.635,33	18.869.635,33	-	0,00	0,00	0,00		-
6	UPT. Puskesmas Pariaman	148.663.849,83	15.394.000,00	137.401.202,23	26.656.647,60	26.656.647,60	-	0,00	0,00	0,00		-
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	137.551.141,46	14.753.600,00	103.833.513,97	48.471.227,49	48.471.227,49	-	0,00	0,00	0,00		-
8	UPT. Puskesmas Marunggi	79.074.271,47	15.799.000,00	107.612.043,32	(12.738.771,85)	(12.738.771,85)	-	0,00	0,00	0,00		-
9	UPT. Puskesmas Naras	118.733.496,30	23.668.000,00	177.898.730,00	(35.497.233,70)	(35.497.233,70)	-	0,00	0,00	0,00		-
10	UPT. Puskesmas Sikapak	100.850.879,71	18.530.000,00	82.324.413,20	37.056.466,51	37.056.466,51	-	0,00	0,00	0,00		-
11	UPT. Instalasi Farmasi	2.370.331.092,00	515.711.030,00	2.798.475.307,00	87.566.815,00	87.566.815,00	-	0,00	0,00	0,00		-
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	417.890.340,00	2.092.939.890,00	293.298.300,00	2.217.531.930,00	2.714.539.530,00	497.007.600,00	497.007.600,00	-	0,00		497.007.600,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	430.511.697,00	1.664.256.316,00	345.457.260,00	1.749.310.753,00	1.749.310.753,00				0,00		-
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	111.000,00	163.392.730,00	7.535.000,00	155.968.730,00	155.968.730,00	-	0,00	0,00	0,00		-
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	357.025.240,00	225.000,00	356.800.240,00	356.800.240,00	-	0,00	0,00	0,00		-
16	Dinas Sosial	0,00	523.930.200,00	-	523.930.200,00	523.930.200,00	-	0,00	0,00	0,00		-
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.593.000,00	648.988.900,00	5.198.000,00	645.383.900,00	645.383.900,00	-	-	-	-		-
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	272.632.700,00	234.018.117,00	373.385.150,00	133.265.667,00	133.265.667,00	-	0,00	0,00	0,00		-
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	844.000,00	234.877.700,00	526.000,00	235.195.700,00	235.195.700,00	-	0,00	0,00	0,00		-
20	Dinas Perhubungan	2.896.500,00	473.515.930,00	1.505.000,00	474.907.430,00	474.907.430,00	-	0,00	0,00	0,00		-
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	801.000,00	52.301.250,00	343.500,00	52.758.750,00	52.758.750,00	-	0,00	0,00	0,00		-
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3.276.000,00	765.317.500,00	862.700,00	767.730.800,00	767.730.800,00	-	-	-	0,00		-
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	170.000,00	182.942.000,00	90.000,00	183.022.000,00	183.022.000,00	-	0,00	0,00	0,00		-
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.671.000,00	331.568.100,00	1.804.000,00	332.435.100,00	332.435.100,00	-	0,00	0,00	0,00		-
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	490.000,00	304.759.200,00	110.000,00	305.139.200,00	248.361.950,00	(56.777.250,00)	-	(51.777.250,00)	(5.000.000,00)		(56.777.250,00)
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	75.356.810,00	1.975.078.962,00	61.765.030,00	1.988.670.742,00	1.923.868.010,67	(64.802.731,33)	0,00	0,00	0,00	(64.802.731,33)	(64.802.731,33)
27	Sekretariat Daerah	17.416.311,00	5.748.308.020,00	19.014.583,00	5.746.709.748,00	5.681.042.248,00	(65.667.500,00)	-	0,00	(65.667.500,00)		(65.667.500,00)
28	Sekretariat DPRD	758.500,00	2.452.788.911,00	1.201.800,00	2.452.345.611,00	2.452.345.611,00	-	-	0,00	0,00		-
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	8.678.476,00	393.215.010,00	9.594.931,00	392.298.555,00	373.317.845,00	(18.980.710,00)	0,00	0,00	(18.980.710,00)		(18.980.710,00)
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	49.632.500,00	1.665.786.005,00	86.496.000,00	1.628.922.505,00	1.628.922.505,00	-	0,00	0,00	0,00		-
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM		240.106.778,00		240.106.778,00	240.106.778,00	-	0,00	0,00	0,00		-
32	Inspektorat	3.240.000,00	71.974.000,00	2.805.000,00	72.409.000,00	72.409.000,00	-	0,00	0,00	0,00		-
33	Kecamatan Pariaman Utara	220.500,00	62.176.796,00	166.500,00	62.230.796,00	62.230.796,00	-	0,00	0,00	0,00		-
34	Kecamatan Pariaman Tengah	5.990.800,00	914.633.560,00	3.166.000,00	917.458.360,00	903.465.110,00	(13.993.250,00)	-	0,00	(13.993.250,00)		(13.993.250,00)

Lampiran 29b

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Persediaan Awal Tahun 2025	Belanja Persediaan -LRA	Persedian Akhir Tahun 2025	Persedian yang digunakan	Beban Persediaan -LO	Selisih	Utang Belanja Tahun 2025	Pembayaran Utang Belanja	Belanja Modal Tambah Barang dan Jasa	Koreksi BPK	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=7-6					
35	Kecamatan Pariaman Selatan	967.000,00	55.040.000,00	2.046.000,00	53.961.000,00	53.961.000,00	-	0,00	0,00	0,00		-
36	Kecamatan Pariaman Timur	100.000,00	31.508.500,00	110.000,00	31.498.500,00	31.498.500,00	-	0,00	0,00	0,00		-
37	Kantor Kesbangpol	190.000,00	431.503.030,00	-	431.693.030,00	431.693.030,00	-	0,00	0,00	0,00		-
Total		**5.022.938.757,10**	**29.277.796.392,00**	**5.494.315.395,50**	**28.806.419.753,60**	**29.983.764.294,27**	**1.177.344.540,67**	**1.404.365.982,00**	**(51.777.250,00)**	**(110.441.460,00)**	**(64.802.731,33)**	**1.177.344.540,67**

Lampiran 29c

DAFTAR SELISIH BEBAN BARANG DAN JASA-LO DAN BELANJA BARANG DAN JASA -LRA
TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Jasa -LRA	Beban Jasa -LO	Selisih	Pembayaran Utang	Kapitalisasi Barang dan Jasa	Utang Belanja 2025	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	15.896.648.174,00	15.910.150.674,00	(13.502.500,00)	0,00	11.247.500,00	(24.750.000,00)	(13.502.500,00)
2	Dinas Kesehatan	14.638.731.535,00	12.260.510.935,00	2.378.220.600,00	2.378.220.600,00	0,00	0,00	2.378.220.600,00
3	RSUD dr Sadikin	5.269.986.898,00	5.214.425.897,60	55.561.000,40	59.061.000,40	0,00	(3.500.000,00)	55.561.000,40
4	UPT. Puskesmas Air Santok	740.657.124,00	740.657.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	901.412.340,00	901.412.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	1.570.584.581,00	1.570.584.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	960.298.965,00	960.298.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	826.515.409,00	826.515.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	782.163.727,00	782.163.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	763.341.258,00	763.341.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	204.481.780,00	204.481.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.209.167.437,00	5.243.987.537,00	(34.820.100,00)	0,00	0,00	(34.820.100,00)	(34.820.100,00)
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	7.533.833.691,00	7.533.833.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.083.593.314,00	1.083.593.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.967.902.436,56	3.967.902.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	521.050.940,00	521.050.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.182.619.129,00	3.182.619.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	183.722.532,00	183.722.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Jasa -LRA	Beban Jasa -LO	Selisih	Pembayaran Utang	Kapitalisasi Barang dan Jasa	Utang Belanja 2025	Total
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.530.111.681,00	1.530.111.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	1.604.770.103,00	1.604.770.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.235.059.083,00	3.235.059.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.685.231.536,00	2.685.231.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	561.357.480,00	561.357.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.626.802.441,00	1.626.802.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	497.030.478,00	497.030.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.193.453.233,00	1.193.453.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	10.169.145.453,00	10.169.145.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	3.207.128.922,00	3.207.128.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	683.401.609,00	683.401.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	5.109.013.904,00	5.109.013.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	962.216.442,00	962.216.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	333.379.754,00	333.379.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	171.732.511,00	171.732.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.907.105.334,00	2.907.105.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	163.275.399,00	163.275.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	167.436.976,00	167.436.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	633.746.100,00	633.746.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**101.678.109.709,56**	**99.292.650.709,16**	**2.385.459.000,40**	**2.437.281.600,40**	**11.247.500,00**	**(63.070.100,00)**	**2.385.459.000,40**

DAFTAR SELISIH BEBAN PEMELIHARAAN-LO DAN BELANJA PEMELIHARAAN -LRA
TAHUN 2025

No	OPD/UPT	Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan - LO	Selisih	Kapitalisasi Belanja Modal	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.334.487.776,00	1.334.487.776,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	487.394.514,00	487.394.514,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	81.855.507,00	81.855.507,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	42.831.850,00	42.831.850,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	64.596.000,00	64.596.000,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	86.324.000,00	86.324.000,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	69.827.795,00	69.827.795,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	74.787.200,00	74.787.200,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	62.653.000,00	62.653.000,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	34.213.000,00	34.213.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.048.782.563,00	2.048.782.563,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.226.073.575,00	1.226.073.575,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	233.231.740,00	233.231.740,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	550.095.595,00	550.095.595,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	96.908.410,00	96.908.410,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	243.249.835,00	243.249.835,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	97.122.000,00	97.122.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	120.061.012,00	120.061.012,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	1.022.997.504,00	1.022.997.504,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	314.452.810,00	314.452.810,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	328.269.983,00	328.269.983,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	136.398.911,00	136.398.911,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	203.599.910,00	203.599.910,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	110.991.500,00	110.991.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	390.866.900,00	390.866.900,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	2.200.509.458,08	2.106.689.111,08	93.820.347,00	93.820.347,00	93.820.347,00
28	Sekretariat DPRD	639.083.335,00	639.083.335,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	121.126.849,00	121.126.849,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	373.978.174,46	373.978.174,46	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	94.677.057,00	94.677.057,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	102.364.483,00	102.364.483,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	39.538.000,00	39.538.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	353.578.970,00	353.578.970,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	47.320.440,00	47.320.440,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	45.100.400,00	45.100.400,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	34.127.000,00	34.127.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		**13.561.977.056,54**	**13.468.156.709,54**	**93.820.347,00**	**93.820.347,00**	**93.820.347,00**

DAFTAR SELISIH BEBAN PERJALANAN DINAS-LO DAN BELANJA PERJALANAN DINAS -LRA
TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

No	Unit Kerja	Belanja Perjalanan Dinas-LRA	TOTAL	Beban Perjalanan Dinas-LO	TOTAL	Selisih (+/-)
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Beban Perjalanan Dinas Biasa		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	266.042.794,00	266.042.794	266.042.794,00	266.042.794	0,00
2	Dinas Kesehatan	351.052.795,00	351.052.795	351.052.795,00	351.052.795	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	1.125.000,00	1.125.000	1.125.000,00	1.125.000	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	17.457.500,00	17.457.500	17.457.500,00	17.457.500	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	197.421.330,00	197.421.330	197.421.330,00	197.421.330	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	139.451.901,00	139.451.901	139.451.901,00	139.451.901	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.304.086,00	54.304.086	54.304.086,00	54.304.086	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	35.575.500,00	35.575.500	35.575.500,00	35.575.500	0,00
16	Dinas Sosial	70.395.949,00	70.395.949	70.395.949,00	70.395.949	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	227.592.990,00	227.592.990	227.592.990,00	227.592.990	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	54.916.315,00	54.916.315	54.916.315,00	54.916.315	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	138.393.539,00	138.393.539	138.393.539,00	138.393.539	0,00
20	Dinas Perhubungan	68.638.967,00	68.638.967	68.638.967,00	68.638.967	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	159.957.914,00	159.957.914	159.957.914,00	159.957.914	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	149.013.214,00	149.013.214	149.013.214,00	149.013.214	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	96.117.368,00	96.117.368	96.117.368,00	96.117.368	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	174.605.458,00	174.605.458	174.605.458,00	174.605.458	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	57.516.614,00	57.516.614	57.516.614,00	57.516.614	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	157.076.685,00	157.076.685	157.076.685,00	157.076.685	0,00
27	Sekretariat Daerah	2.602.528.187,00	2.602.528.187	2.602.528.187,00	2.602.528.187	0,00
28	Sekretariat DPRD	8.700.953.705,00	8.700.953.705	8.700.953.705,00	8.700.953.705	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	129.916.054,00	129.916.054	129.916.054,00	129.916.054	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	880.796.815,00	880.796.815	880.796.815,00	880.796.815	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	540.203.510,00	540.203.510	540.203.510,00	540.203.510	0,00
32	Inspektorat	784.106.188,00	784.106.188	784.106.188,00	784.106.188	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	21.161.477,00	21.161.477	21.161.477,00	21.161.477	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	147.944.805,00	147.944.805	147.944.805,00	147.944.805	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	17.938.500,00	17.938.500	17.938.500,00	17.938.500	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	17.007.621,00	17.007.621	17.007.621,00	17.007.621	0,00
37	Kantor Kesbangpol	133.821.859,00	133.821.859	133.821.859,00	133.821.859	0,00
Total		**16.393.034.640**	**16.393.034.640**	**16.393.034.640**	**16.393.034.640**	**0,00**

DAFTAR SELISIH AKUMULASI PENYUSUTAN DAN BEBAN PENYUSUTAN-LO
TAHUN 2025

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan 2025	Beban Penyusutan	selisih	Rekons Penyustan Aset Tetap			Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	Beban Penyusutan Properti Investasi	TOTAL
						Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	(137.351.656.595,81)	(148.536.487.118,81)	10.826.190.878,00	(358.639.645,00)	215.919.837,00	(574.559.482,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(90.543.164.601,87)	(97.829.677.880,87)	8.426.695.129,00	1.140.181.850,00	364.597.966,00	775.583.884,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	(744.449.555.206,23)	(774.072.486.230,05)	28.943.265.496,82	(679.665.527,00)	(289.036.363,00)	0,00	(390.629.164,00)	937.500,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	(179.223.747.155,80)	(184.474.560.342,80)	5.250.813.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.401.231.962,00)	(8.812.235.661,00)	411.003.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	(12.021.432.409,00)	(12.179.962.029,00)	169.056.370,00	10.526.750,00	10.526.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	(1.000.943.686,00)	(1.114.001.313,00)	113.057.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	(6.110.980.331,00)	(6.547.291.692,00)	436.311.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(2.254.102.230,00)	(2.408.466.300,00)	154.364.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(2.215.967.344,00)	(1.807.343.895,00)	45.318.234,00	453.941.683,00	128.375.209,00	325.566.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	(18.317.826.314,00)	(17.077.368.834,00)	559.281.827,00	1.799.739.307,00	1.799.739.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.682.784.889,00)	(4.861.810.645,00)	179.025.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	(6.025.076.847,00)	(6.387.798.356,00)	374.671.510,00	11.950.001,00	11.950.001,00	0,00	0,00	0,00	6.204.726.986,00	0,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	(1.963.692.722,00)	(1.622.071.504,00)	36.191.806,00	377.813.024,00	54.270.724,00	323.542.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(25.938.160.495,80)	(29.833.209.020,80)	3.285.874.056,00	(609.174.469,00)	15.551.526,00	(624.725.995,00)	(0,00)	0,00	47.400.570,00	0,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.854.734.466,00)	(2.584.431.436,00)	729.696.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	(22.331.488.148,00)	(22.624.097.651,00)	1.011.859.503,00	719.250.000,00	37.000.000,00	0,00	682.250.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	(50.433.807.890,16)	(53.428.617.235,16)	2.994.809.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	(14.280.487.010,25)	(15.382.837.485,25)	1.294.887.875,00	192.537.400,00	192.537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	(5.116.245.852,00)	(5.349.379.745,00)	254.133.893,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	(9.757.450.838,00)	(10.351.005.025,00)	631.807.637,00	38.253.450,00	38.253.450,00	0,00	0,00	1.856.162,81	0,00	0,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	(2.048.664.165,00)	(2.148.389.829,00)	99.725.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Inspektorat	(4.065.274.845,00)	(4.287.810.670,00)	222.535.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Pariaman Utara	(3.374.415.171,00)	(3.617.820.848,00)	243.405.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Pariaman Tengah	(9.780.112.661,00)	(10.348.448.113,00)	841.631.664,00	273.296.212,00	183.842.000,00	89.454.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Pariaman Selatan	(2.849.085.818,00)	(3.066.566.247,00)	217.480.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Pariaman Timur	(2.569.308.410,00)	(2.757.000.722,00)	187.692.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kantor Kesbangpol	(561.253.991,00)	(557.868.854,00)	6.114.863,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**(1.369.522.652.054,92)**	**(1.434.069.044.682,74)**	**67.946.902.663,82**	**3.400.510.036,00**	**2.794.027.807,00**	**314.861.393,00**	**291.620.836,00**	**2.793.662,81**	**6.252.127.556,00**	**0,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KOREKSI EKUITAS LAINNYA

(Dalam Rupiah)

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	OPD	DEBET	KREDIT	SALDO
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
1	2025-12-31	035/JP/DIKPORA/XII/2025	KOREKSI SALDO AWAL AKUN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	26.011.802,00	0,00	(26.011.802,00)
2	2025-12-31	034/JP/DIKPORA/XII/2025	MUTASI (-) PENGJAPUSAN RUSAK BERAT ASET LAIN-LAIN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	200.933.233,00	174.921.431,00
3	2025-12-31	033/JP/DIKPORA/XII/2025	ATL MUTASI (-) PENGHAPUSAN	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	9.496.537,00	184.417.968,00
4	2025-12-31	027/JP/DIKPORA/XII/2025	KOREKSI EKUITAS BANGUNAN DAN GEDUNG	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	2,00	184.417.970,00
5	2025-12-31	004/JU-PIUTANG/BPKPD/2025	JU PENYESUIAN PIUTANG JASA DANA BERGULIR TAHUN 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	7.140.682,00	0,00	177.277.288,00
6	2025-12-31	012/JP/PARBUD/2025	TGR DISPARBUD 2025	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	94.722.385,00	0,00	82.554.903,00
7	2025-12-31	012/JP/PARBUD/2025	TGR DISPARBUD 2025	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	6.700.000,00	89.254.903,00
8	2025-12-31	003/PIUTANG-BLJ/BPKPD/2025	JU PENYESUAIAN PIUTANG TDF TAHUN 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	1.758.923.689,00	1.848.178.592,00
9	2025-12-31	012/JU-PENYESUAIAN/PARBUD/2025	PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT PULAU ANGSO	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	8.000.000,00	1.856.178.592,00
10	2025-12-31	011/JU-PENYESUAIAN/PARBUD/2025	KOREKSI (+) SALDO AWAL AKUM PENY	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	682.250.000,00	2.538.428.592,00
11	2025-12-31	015/JP/DPUPR/2025	koreksi saldo awal tambah penyusutan karna penilaian ruas jalan SK NO 452/900/2025	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	390.629.164,00	2.929.057.756,00
12	2025-12-31	003/UTANG-BLJ/BPKPD/2025	KURANG CATAT UTANG BELANJA TAHUN 2021 DBH KEPADA DESA	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	1.533.736,50	2.930.591.492,50
13	2025-12-31	008/JU-PENYESUAIAN/PARBUD/2025	MUTASI (-) PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	10.615.818,00	2.941.207.310,50
14	2025-12-31	006/JU/DPMD/2025	Jurnal Penghapusan Gedung Bangunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	19.616.221,00	2.960.823.531,50
15	2025-12-31	011/JP/DPUPR/2025	Koreksi tambah saldo Awal JIJ terhadap penilaian 56 ruas jalan yang belum tercatat sk no 452/900/2025 RP.22.823.200.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	22.823.200.000,00	0,00	(19.862.376.468,50)
16	2025-12-31	009/JU/ARSIP/2025	JU PENYESUAIAN UTANG BELANJA TAHUN 2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.237.760,00	0,00	(19.864.614.228,50)
17	2025-12-31	009/JU/DISHUB/2025	KOREKSI (+) ASET MESIN	Dinas Perhubungan	490.367.040,00	0,00	(20.354.981.268,50)
18	2025-12-31	010/JP/RSUDSADIKIN/2025	Penyesuaian penghapusan ATL per 31 Des 2025	RSUD dr Sadikin	0,00	750.500,00	(20.354.230.768,50)
19	2025-12-31	001/JU/DPMD/2025	Jurnal Umum Data Aset dan lain-Lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	23.355.000,00	0,00	(20.377.585.768,50)
20	2025-12-31	001/JU/DPMD/2025	Jurnal Umum Data Aset dan lain-Lain	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	3.937.000,00	(20.373.648.768,50)
21	2025-12-31	008/JP/HCPDS/2025	KOREKSI (+) SALDO AWAL	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	9.000.000,00	(20.364.648.768,50)
22	2025-12-31	011/JP/DINKES/2025	Penyesuaian penghapusan Aset Lain-lain per 31 Des 2025	Dinas Kesehatan	0,00	12.000.000,00	(20.352.648.768,50)
23	2025-12-31	010/JU/BPKPD/2025	Mutasi Kurang TGR 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	240.787.244,00	(20.111.861.524,50)
24	2025-12-31	33/JU/PARTENG/2025	TGR KEC PARTENG 2025	Kecamatan Pariaman Tengah	25.236.433,00	0,00	(20.137.097.957,50)
25	2025-12-31	009/JU/BPKPD/2025	Mutasi Tambah TGR Tahun 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	37.937.102,00	0,00	(20.175.035.059,50)
26	2025-12-31	007/JU-ASET/DPPP/12/2025	ASET LAIN-LAIN TGR TAHUN 2025	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	43.359.382,42	0,00	(20.218.394.441,92)
27	2025-12-31	007/JU-ASET/DPPP/12/2025	ASET LAIN-LAIN TGR TAHUN 2025	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	26.300.000,00	(20.192.094.441,92)
28	2025-12-31	006/JU/ARSIP/2025	TGR TA 2025 Dispersip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.297.900,00	0,00	(20.193.392.341,92)
29	2025-12-31	006/JU/ARSIP/2025	TGR TA 2025 Dispersip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	262.568.751,72	(19.930.823.590,20)
30	2025-12-31	007/JP/DPUPR/2025	JU PENYESUAIAN ASET LAIN-LAIN TGR TAHUN 2025	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	400.262.462,70	0,00	(20.331.086.052,90)
31	2025-12-31	007/JP/DPUPR/2025	JU PENYESUAIAN ASET LAIN-LAIN TGR TAHUN 2025	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	341.210.127,07	(19.989.875.925,83)
32	2025-12-31	006/JP/PUSKMARUNGGI/2025	Penyesuaian penghapusan Gedung dan Bangunan per 31 Des 2025	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	22.186.062,00	(19.967.689.863,83)
33	2025-12-31	13.77/09.0/000006/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0003/02/2026	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	9.000.000,00	0,00	(19.976.689.863,83)
34	2025-12-31	008/JP/SMP4/XII/2025	MUTASI (-) PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN	SMP 4 Kota Pariaman	0,00	416.666,00	(19.976.273.197,83)
35	2025-12-31	005/JU/KESBANGPOL/2025	TGR Kesbangpol 2025	Kantor Kesbangpol	18.969.200,00	0,00	(19.995.242.397,83)
36	2025-12-31	005/JU/KESBANGPOL/2025	TGR Kesbangpol 2025	Kantor Kesbangpol	0,00	48.056.100,00	(19.947.186.297,83)
37	2025-12-31	001/UTANG-BLJ/PARTENG/2025	JU PENYESUAIAN UTANG TAHUN 2025	Kecamatan Pariaman Tengah	1.875.000,00	0,00	(19.949.061.297,83)
38	2025-12-31	006/JU-ASET/DPPP/12/2025	MUTASI (-) KOREKSI SALDO AWAL	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	682.250.000,00	0,00	(20.631.311.297,83)
39	2025-12-31	005/JU/ARSIP/2025	Mutasi + Hibah Belum Tercatat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.509.600,00	0,00	(20.657.820.897,83)
40	2025-12-31	005/JU/DPMPTSPNAKER/2025	Mutasi Kurang Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	6.208.720,00	(20.651.612.177,83)

(Dalam Rupiah)

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	OPD	DEBET	KREDIT	SALDO
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
41	2025-12-31	006/JU/perindag/2025	JU mutasi tambah dan kurang TGR perindag	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	655.124.050,00	0,00	(21.306.736.227,83)
42	2025-12-31	006/JU/perindag/2025	JU mutasi tambah dan kurang TGR perindag	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	4.330.000,00	(21.302.406.227,83)
43	2025-12-31	005/JU/DISHUB/2025	TGR Dishub 2025	Dinas Perhubungan	107.204.410,00	0,00	(21.409.610.637,83)
44	2025-12-31	005/JU/DISHUB/2025	TGR Dishub 2025	Dinas Perhubungan	0,00	19.905.381,00	(21.389.705.256,83)
45	2025-12-31	005/JP-ASET/POLPP/2025	TGR SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2025	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	59.574.000,00	0,00	(21.449.279.256,83)
46	2025-12-31	007/JU-ASET/12/2025	TGR PERKIMLH TAHUN 2025	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	128.819.563,00	0,00	(21.578.098.819,83)
47	2025-12-31	007/JU-ASET/12/2025	TGR PERKIMLH TAHUN 2025	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	8.170.380,00	(21.569.928.439,83)
48	2025-12-31	006/JP/SMP8/XII/2025	MUTASI (-) PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN	SMP 8 Kota Pariaman	0,00	20.833,00	(21.569.907.606,83)
49	2025-12-31	004/JU/Partim/2025	Mutasi Kurang TGR Aset Lain-Lain	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	8.400.000,00	(21.561.507.606,83)
50	2025-12-31	004/JU/DISHUB/2025	Mutasi kurang Penghapusan Rusak berat	Dinas Perhubungan	0,00	369.344,00	(21.561.138.262,83)
51	2025-12-31	005/JP/HCPRM/12/2025	Penyesuaian penghapusan Gedung dan Bangunan per 31 Des 2025	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	53.556.301,00	(21.507.581.961,83)
52	2025-12-31	007/JP/DINKES/2025	Koreksi (+) Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap - Peralatan & Mesin	Dinas Kesehatan	0,00	1,00	(21.507.581.960,83)
53	2025-12-31	003/JU/Partim/2025	Mutasi Tambah TGR Aset Lain-Lain	Kecamatan Pariaman Timur	5.262.000,00	0,00	(21.512.843.960,83)
54	2025-12-31	004/JU/DISHUB/2025	Mutasi kurang penyusutan Peralatan Mesin	Dinas Perhubungan	0,00	858.195.950,00	(20.654.648.010,83)
55	2025-12-31	003/JU/BPBD/12/2025	MUTASI (+) TGR TAHUN 2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.797.000,00	0,00	(20.658.445.010,83)
56	2025-12-31	005/JP/DINKES/2025	Mutasi tambah TGR Dinkes 2025	Dinas Kesehatan	542.808.511,79	0,00	(21.201.253.522,62)
57	2025-12-31	005/JU/KP. JAWA I/2025	MUTASI (-) PENGHAPUSAN ASET TETAP PERLATAN DAN MESIN	Kelurahan Kampung Jawa I	0,00	39.057.286,00	(21.162.196.236,62)
58	2025-12-31	002/JU/BAGIAN-UMUM/SETDA/2025	MUTASI (-) PENGHAPUSAN	Bagian Umum Sekretariat Daerah	0,00	25.000,00	(21.162.171.236,62)
59	2025-12-31	003/JU-ASET/BPP/12/2025	MUTASI (-) ASET TETAP LAINNYA	UPT. Balai Penyuluh Pertanian	0,00	455.000,00	(21.161.716.236,62)
60	2025-12-31	002/JU/DISKOMINFO/XII/2025	TGR KOMINFO TAHUN 2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.301.480,00	0,00	(21.171.017.716,62)
61	2025-12-31	002/JU/DISKOMINFO/XII/2025	TGR KOMINFO TAHUN 2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	5.050.000,00	(21.165.967.716,62)
62	2025-12-31	004/JP/HCPDS/2025	Koreksi (-) saldo awal - Aset lain-lain	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	9.000.000,00	(21.156.967.716,62)
63	2025-12-31	006/JP/DINKES/2025	Mutasi kurang TGR Dinkes 2025	Dinas Kesehatan	0,00	45.506.391,00	(21.111.461.325,62)
64	2025-12-31	003/JU/PARSEL/2025	TGR Kecamatan Pariaman Selatan Tahun 2025	Kecamatan Pariaman Selatan	570.000,00	0,00	(21.112.031.325,62)
65	2025-12-31	001/JU/PARTENG/2025	JU MUTASI (-) PENGHAPUSAN	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	5.929.288,00	(21.106.102.037,62)
66	2025-12-31	003/JU/INSP/XII/2025	TGR Tahun 2025	Inspektorat	0,00	42.573.800,00	(21.063.528.237,62)
67	2025-12-31	001/BKPSDM/XII/2025	TGR Bkpsdm Kota Pariaman Tahun 2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	7.994.700,00	0,00	(21.071.522.937,62)
68	2025-12-31	001/BKPSDM/XII/2025	TGR Bkpsdm Kota Pariaman Tahun 2025	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	400.000,00	(21.071.122.937,62)
69	2025-12-31	001/JU/Bappeda-2025	Aset lain-lain TGR Tahun 2025	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	7.810.550,00	0,00	(21.078.933.487,62)
70	2025-12-31	001/JU/Bappeda-2025	Aset lain-lain TGR Tahun 2025	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	99.515.501,00	(20.979.417.986,62)
71	2025-12-31	002/JP/SETDPRD/2025	JU PENYESUAIAN ASET LAIN-LAIN TGR	Sekretariat DPRD	82.001.633,00	0,00	(21.061.419.619,62)
72	2025-12-31	002/JP/SETDPRD/2025	JU PENYESUAIAN ASET LAIN-LAIN TGR	Sekretariat DPRD	0,00	49.760.250,00	(21.011.659.369,62)
73	2025-12-31	001/JP/SETDA/XII/2025	TGR SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	69.370.801,00	0,00	(21.081.030.170,62)
74	2025-12-31	001/JP/SETDA/XII/2025	TGR SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	0,00	159.257.605,00	(20.921.772.565,62)
75	2025-12-31	001/JU/ARSIP/2025	Koreksi + Saldo Awal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.000.000,00	0,00	(20.929.772.565,62)
76	2025-12-31	001/JU/ARSIP/2025	Koreksi + Saldo Awal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.250.000,00	0,00	(20.944.022.565,62)
77	2025-12-31	001/JU/ARSIP/2025	Koreksi + Saldo Awal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	109.560.441,00	0,00	(21.053.583.006,62)
78	2025-12-31	002/JU/DISPARBUD/2025	KOREKSI TAMBAH ASET TETAP	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	10.000.000,00	0,00	(21.063.583.006,62)
79	2025-12-31	001/JU/DPMPTSPNAKER/2025	Mutasi Kurang Penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	2.760.312,00	(21.060.822.694,62)
80	2025-12-31	002/JU/METROLEGAL/2025	MUTASI (-) KOREKSI SALDO AWAL AKUM PENY PERALATAN DAN MESIN	UPT Metrologi Legal	1,00	0,00	(21.060.822.695,62)
81	2025-12-31	001/JU/DP3AKB/12/2025	JU ASET LAIN-LAIN TGR TAHUN 2025	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	5.550.000,00	(21.055.272.695,62)
82	2025-12-31	001/JU/DINSOS/XII/2025	TGR TA 2025 DINAS SOSIAL	Dinas Sosial	8.986.296,00	0,00	(21.064.258.991,62)

(Dalam Rupiah)

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	OPD	DEBET	KREDIT	SALDO
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
83	2025-12-31	001/JU/DINSOS/XII/2025	TGR TA 2025 DINAS SOSIAL	Dinas Sosial	0,00	2.435.000,00	(21.061.823.991,62)
84	2025-12-31	001/JP-ASET/POLPP/2025	KOREKSI (+) SALDO AWAL ASET MESIN	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	38.100.000,00	0,00	(21.099.923.991,62)
85	2025-12-31	003/JP/HCPDS/2025	Koreksi Tambah Saldo Awal (Aset Tetap - Peralatan dan Mesin)	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	9.000.000,00	0,00	(21.108.923.991,62)
86	2025-12-31	012/DIKPORA/12-2025	TGR TAHUN 2025	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	388.401.164,42	0,00	(21.497.325.156,04)
87	2025-12-31	012/DIKPORA/12-2025	TGR TAHUN 2025	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	86.579.995,42	(21.410.745.160,62)
87	2025-12-31	013/JP/RSUDSADIKIN/2025	JU PENYESUAIAN UTANG BELANJA TAHUN 2025	RSUD dr Sadikin	340.231.637,00		(21.750.976.797,62)
JUMLAH					**27.319.899.992,33**	**5.568.923.195,71**	**(21.750.976.797,62)**